Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS

FITRI, S.H.
Pembina/IVa

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Hulu Sungai Selatan yang Sehat, Makmur, Agamis, Rakat, dan Berbasis Teknologi;
b. bahwa untuk memaksimalkan fungsi pelayanan yang tertuang dalam *Masterplan Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
3. *Masterplan Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disusun oleh Dewan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta hasil bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam mewujudkan dan menjalankan program *Smart City* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

(2) Pengaturan Masterplan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk:
   a. memberikan arah kebijakan pengembangan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
   b. membantu pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengatasi permasalahan kabupaten;
   c. mendorong proses perwujudan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkelanjutan;

d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
e. mengimplementasikan program *quick win Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. sistematika;
b. visi dan misi; dan
c. sasaran.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Masterplan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Buku I
BAB I Analisis Masa Depan;
BAB II Analisis Kesiapan Daerah;
BAB III Analisis Strategi Pembangunan *Smart City*;
BAB IV Analisis Visi Pembangunan *Smart City*;
BAB V Penutup.

Buku II
BAB I Pendahuluan;
BAB II Arah Pembangunan *Smart City* Daerah;
BAB III Strategi Pembangunan *Smart City*;
BAB IV Rencana Aksi Smart City Daerah;
BAB V Peta Jalan *Smart City* Daerah;
BAB VI Penutup.

Buku III
BAB I Latar Belakang;
BAB II Visi *Smart City* Daerah;
BAB III Strategi Pembangunan *Smart City*;
BAB IV Peta Jalan *Smart City* Daerah;
BAB V Penutup.

Buku IV
BAB I Visi dan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
BAB II Visi dan Sasaran *Smart City* Daerah;
BAB III Profil Quickwins Smart City Daerah;
BAB IV Manajemen Risiko *Quickwins*;
BAB V Penutup

(2) Uraian rincian Masterplan Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi Masterplan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu "Hulu Sungai Selatan yang Sehat, Makmur, Agamis, Rakat, dan Berbasis Teknologi (HSS SMART)".

Pasal 6

Misi Masterplan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

a. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama;
b. memantapkan tata kelola pemerintahan yang cerdas;
c. meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis agribisnis-agroindustri yang berteknologi tinggi; dan
d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026

BUKU I

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I
ANALISIS MASA DEPAN

Bab ini membahas analisis masa depan *smart city* dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan atau tren Kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa yang akan datang. Melalui analisis masa depan akan diketahui strategi daerah untuk menghadapi kondisi daerah ke depan. Analisis masa depan *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan dalam dua kategori utama. Pertama, penjelasan akan berfokus pada analisis visi pembangunan daerah. Kedua, penjelasan akan menjabarkan perkembangan kondisi eksternal yang meliputi isu terkait politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta peraturan/kebijakan. Berdasarkan analisis masa depan ini akan diperoleh gambaran masa depan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan dan mengimplementasikan seluruh dimensi *smart city*.

1.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 (enam) kabupaten administratif dan 3 (tiga) swapraja. Salah satunya *Afdeling Van Hoeloe Soengai* dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibu kota Kandangan. Untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan suatu inisiatif untuk menjadi paradigma yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan rencana pembangunan melalui penerapan *smart city*. Oleh karena itu, penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tahun 2023, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berakhir. Namun, terdapat kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terdapat masa transisi menjelang Pemilu Kepala

Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 sehingga dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam menganalisis visi pembangunan daerah ini menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025. Dengan demikian, Visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 menggunakan Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, yaitu: "**Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Daerah Agropolitan yang Didasari Nilai-nilai Agama**".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (12), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah model mental masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut. Penjabaran arti dari visi tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai Agama diartikan sebagai:

a. Suatu nilai kebenaran dan kejujuran yang senantiasa harus melekat dalam hati sanubari setiap anggota masyarakat.
b. Suatu nilai agama yang senantiasa harus diyakini dan dijunjung tinggi, diamalkan serta diterapkan dalam segenap perilaku kehidupan oleh setiap insan anggota masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan yang dianutnya.
c. Suatu nilai yang akan membentuk insan anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa, mempunyai sikap religius, bersikap jujur, sehat, berkarakter serta mempunyai kepedulian sosial.

d. Suatu nilai yang akan mampu membentuk insan anggota masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai pemahaman dan pengamalan agama secara *kaffah* serta mempunyai kecerdasan spritual.
e. Nilai-nilai agama juga harus dijadikan sumber motivasi, inspirasi dan pedoman oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, iptek, lingkungan dan keamanan ketertiban. Oleh sebab itu, nilai-nilai agama harus dapat dijadikan "sumber energi" untuk menggerakkan proses pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
f. Nilai-nilai agama diartikan juga sebagai suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akherat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, serta material spiritual.

Daerah Agropolitan mengandung pengertian:

a. Agropolitan adalah kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau juga kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik serta menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.
b. Bahwa pada tahun 2025 mendatang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil diwujudkan menjadi pusat pengembangan agribisnis- agroindustri yang utama di Kalimantan Selatan.
c. Sebagai daerah yang identik sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis dengan subsistem usaha dari hulu sampai hilir.
d. Sebagai daerah yang berfungsi menjadi pusat pertumbuhan baik bagi setiap wilayah perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun juga kabupaten sekitarnya dengan tidak terbatas pada sektor pertanian saja tetapi juga terkait dengan agroindustri, perdagangan, pariwisata dan jasa pelayanan lainnya.
e. Sebagai daerah pertanian berbasis agroindustri yang mampu mendukung dan mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.
f. Daerah agropolitan juga mengandung pengertian perlu adanya proses pengolahan terhadap produk pertanian yang dihasilkan sehingga mampu memberi nilai tambah serta mempunyai kemampuan memasarkannya yang terintegrasi dalam konsep petik-olah-jual.

g. Daerah agropolitan memberikan pengertian adanya pemberian kesempatan tumbuh dan berusaha yang seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha khususnya UMKM serta adanya kemudahan akses permodalan.
h. Daerah agropolitan akan menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selain mampu mandiri dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi; juga diharapkan semakin meningkatkan daya saing serta mampu memelihara dan meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lain.
i. Daerah agropolitan berarti juga memberikan pengertian bahwa setiap investor baik asing, nasional maupun lokal dapat tertarik dan merasa aman, nyaman serta mendapat pelayanan yang profesional dalam berinvestasi.
j. Daerah agropolitan berarti juga dalam visi jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan perekayasaan potensi sumber daya alam dan ekonomi khususnya pertanian; potensi sumber daya manusia; dan potensi sosial budaya masyarakat termasuk kearifan lokal serta potensi ruang.

Adapun 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ditetapkan sesuai dengan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama serta Membangun Sikap Religius.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Agribisnis - Agroindustri.
5. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan misi pembangunan tersebut ditetapkan 3 (tiga) Tujuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 seperti dijabarkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026

Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025	Tujuan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026
Misi 4 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Agribisnis - Agroindustri	**Tujuan 1** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan
Misi 5 Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	
Misi 1 Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama serta Membangun Sikap Religius	**Tujuan 2** Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
Misi 3 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Tujuan 3** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

(*Sumber*: RPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026)

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2023 menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu dari 50 (lima puluh) kabupaten/kota terpilih dalam implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Oleh karena itu, penyusunan Masterplan *Smart City* diharapkan dapat membantu akselerasi pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian dapat diidentifikasi sinkronisasi sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan enam dimensi *smart city* (lihat Tabel 1.2).

Tabel 1.2

Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Enam Dimensi *Smart City*

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi *Smart City*					
					Smart Governance	*Smart Branding*	*Smart Economy*	*Smart Living*	*Smart Society*	*Smart Environment*
Misi 4 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Agribisnis - Agroindustri **Misi 5** Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	**Tujuan 1** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan		**Sasaran 1.1** Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan	**Indikator 1** Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan **Indikator 2** Indeks Daya Saing Pariwisata **Indikator 3** Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur **Indikator 4** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup **Indikator 5** Indeks Risiko Bencana						
			Sasaran 1.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan	**Indikator 1** Tingkat Pengangguran Terbuka **Indikator 2** Rasio Gini **Indikator 3** Indeks Desa Membangun						

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi *Smart City*					
					Smart Governance	*Smart Branding*	*Smart Economy*	*Smart Living*	*Smart Society*	*Smart Environment*
Misi 1 Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama serta Membangun Sikap Religius	**Tujuan 2** Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter		**Sasaran 2.1** Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditi Pangan dan Non-Pangan Masyarakat	**Indikator 1** Harapan Lama Sekolah **Indikator 2** Rata-rata Lama Sekolah **Indikator 3** Pengeluaran Per Kapita **Indikator 4** Indeks Literasi						
Misi 2 Mewujudkan Sumber daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing			**Sasaran 2.2** Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**Indikator 1** Keamanan dan Ketertiban **Indikator 2** Indeks Pembangunan Kebudayaan						
Misi 3 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Tujuan 3** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		**Sasaran 3.1** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Layanan Sampai Ke Tingkat Desa	**Indikator 1** SAKIP **Indikator 2** Indeks Reformasi Birokrasi **Indikator 3** Sistem Merit ASN **Indikator 4** Indeks Inovasi Daerah						

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

1.2 Analisis Kondisi Eksternal

Secara umum, terdapat dua kondisi yang wilayah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis dan menjadi pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Berbeda halnya dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal organisasi yang akan menciptakan peluang dan tantangan bagi organisasi lebih berkaitan dengan aspek masa depan dibandingkan dengan masa sekarang. Kondisi eksternal merupakan kondisi-kondisi di luar organisasi yang memengaruhi perubahan eksternal dalam industri organisasi terutama yang memengaruhi intensitas persaingan. Kondisi eksternal terus berubah dan organisasi perlu memantau dan meninjau strategi secara terus menerus untuk mengelola setiap ancaman yang muncul secara efektif dan untuk dapat memanfaatkan peluang yang menguntungkan (Witcher, 2020). Faktor lingkungan eksternal organisasi memiliki kerangka yang terdiri atas tiga komponen besar yakni tren atau perkembangan lingkungan yang terjadi, kekuatan yang mampu memiliki kontrol terhadap organisasi (*stakeholder*), dan pesaing (Bryson, 2011). Organisasi harus mengembangkan kemampuan untuk memahami dan memberikan makna terhadap perubahan dan ketidakpastian dalam lingkungan eksternal mereka agar dapat beradaptasi dan bertahan (Wick. 2020).

Dalam lingkungan eksternal, terdapat berbagai kekuatan yang memiliki kemampuan untuk memaksa organisasi berubah, misalnya faktor politik, ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi bahkan lingkungan fisik (David & David, 2017). Memahami aspek-aspek ini akan memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengenali peluang dan ancaman yang mungkin muncul bagi organisasi. Namun demikian seringkali organisasi hanya berfokus pada hal-hal negatif yang menjadi ancaman dan kurang memperhatikan aspek positif yang sangat mungkin menjadi peluang secara proporsional. Perhatian pada hal negatif sesungguhnya memiliki keunggulan ketika organisasi mampu mengubah aspek-aspek negatif itu menjadi peluang. Banyak organisasi yang sebelumnya telah mapan akhirnya mengalami kemunduran dan keterpurukan karena kegagalan mereka untuk beradaptasi dengan persaingan dan perubahan lingkungan atau, lebih buruk lagi, karena kegagalan mereka untuk menciptakan perubahan (Wheelen, Hunger, Hoffman, & Bamford, 2018).

Menghadapi lingkungan eksternal yang terus berkembang, organisasi harus membangun berbagai skenario untuk mengeksplorasi masa depan alternatif pada

lingkungan eksternal. Skenario yang dibuat itu harus mampu menunjukkan bagaimana berbagai variasi kekuatan dan tren itu saling berinteraksi, dan melakukan identifikasi mana yang berpengaruh dan mana yang tidak berpengaruh kepada organisasi. Skenario juga menawarkan cara efektif menetapkan masa depan organisasi jika memungkinkan. Masa depan organisasi merupakan suatu bentuk masa depan organisasi yang ditetapkan yang memungkinkan bagi strategi yang ada untuk mencapainya secara masuk akal (Bryson, 2011). Organisasi yang tidak ingin mengambil masa depan organisasi itu maka organisasi tidak akan memiliki kemampuan untuk berubah. Memberikan perhatian pada peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal, bersama dengan analisis *stakeholder* akan menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan organisasi. Dari analisis ini mungkin akan dijumpai kesamaan dengan mandat yang diemban organisasi mengenai apa yang harus organisasi lakukan atau kriteria yang harus dipenuhi agar mencapai keberhasilan yang diharapkan oleh *stakeholder* kunci juga lingkungan eksternal lainnya (Wheelen, Hunger, Hoffman, & Bamford, 2018; Witcher, 2020; David & David, 2017; Bryson, 2011).

Adapun analisis kondisi eksternal Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan peraturan/kebijakan.

1.2.1 Kondisi Politik

Aspek politik, secara umum berkaitan dengan kekuasaan. Hasil dari kekuasaan itu terwujud dalam berbagai aturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara. Berbagai peraturan perundangan itu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada organisasi (Sager, 2011). Organisasi harus memperhatikan dan melakukan analisis atas berbagai perundangan yang berkaitan dengan gerak dan mandat organisasi. Pengaruh apa yang ditimbulkan dari peraturan yang ada, apakah menjadi peluang atau menjadi ancaman (David & David, 2017).

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pilkada

serentak nasional akan dilaksanakan tahun 2024. Ini diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang akan diikuti 33 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota sehingga berjumlah 541 daerah otonom atau daerah secara serentak akan melaksanakan pilkada di tahun 2024. Penyelenggaraan pilkada serentak menurut ilmuwan politik dinilai akan meningkatkan *voting turnout* atau partisipasi pemilih. Hal ini dapat ditelusuri dalam beberapa studi antara lain penelitian Boyd yang menyimpulkan hipotesis daya tarik suara bahwa pemilihan serentak meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Juga dalam penelitian Campbell (1960), Geys (2006), dan Andersen (2011) menyimpulkan keserentakan pemilu legislatif-eksekutif akan memberikan pengaruh positif pada partisipasi pemilih, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Dalam perspektif perencanaan, penyelenggaraan pilkada serentak dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memujudkan perencanaan yang bersinergi. Suksesi kepemimpinan di tingkat lokal memiliki keterkaitan erat dengan proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu diperhatikan sistem perencanaannya. Sistem perencanaan sesungguhnya harus tersistem dan bersinergi antara daerah dan pusat. Pemahaman ini mengingat implementasi visi dan misi serta janji politik kepala daerah yang terpilih akan diwujudkan secara berjenjang dalam jangka pendek dan jangka menengah. Hal tersebut akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah. Namun, hal ini memiliki tantangan pula yang harus diperhatikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait konsistensi pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh dominasi politik rezim yang berkuasa. dengan adanya pilkada serentak maka ada kesamaan waktu dalam proses perencanaan pembangunannya sehingga hal itu bisa disesuaikan antardaerah yang satu dengan daerah yang lain, termasuk antara daerah dengan provinsi maupun pusat.

1.2.2 Kondisi Ekonomi

Aspek ekonomi berkaitan dengan sifat-sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu organisasi berada. Perubahan-perubahan dalam bidang perekonomian, ditentukan oleh kecenderungan arah permintaan, penawaran dan interaksinya (Samuelson, 2019). Perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka miliki, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi, menjadi kunci penting bagi organisasi untuk dipahami.

Pada sisi produsen, perilaku untuk memaksimalkan keuntungan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki adalah aspek pasangan dari perilaku konsumen. Bertemunya produsen dan konsumen akan menciptakan perilaku baru dalam pertukaran, pola penggunaan media pertukaran akan menjadi bagian berikutnya untuk dianalisis (Opitz *et al*., 2019). Perilaku produsen dalam menjalankan bisnisnya, pola kolaborasi antarpelaku usaha adalah juga aspek penting yang harus dipahami oleh organisasi. Beberapa isu strategis eksternal pada bidang ekonomi yang teridentifikasi sebagai berikut.

Gerbang Ibu Kota Negara dan *Food Estate*

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota negara (IKN) yang baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai ibu kota negara baru, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur di sebelah timur berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Sementara itu, sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemindahan ibu kota negara sudah termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan salah satu kegiatan prioritas pengembangan kawasan perkotaan. Salah satu yang mendasari pemindahan ibu kota negara yaitu mengubah paradigma pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris sehingga merepresentasikan identitas bangsa, kebhinnekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

IKN diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru dan sentra inovasi dalam mengakselerasi Indonesia Maju 2045 (*https:// www.setneg.go.id/*). Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadikan wilayah sekitarnya termasuk Provinsi Kalimantan Selatan berperan penting dalam mendukung kebutuhan logistik IKN. Permasalahan lainnya yang mungkin muncul terkait pemindahan ibu kota negara yaitu ketersediaan pangan. Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menjadi lumbung padi nasional. Kalimantan Selatan memiliki lahan sawah paling luas dibanding provinsi lain di Kalimantan, sehingga mungkin bagi Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lumbung padi nasional karena ketersediaan pangan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, tentunya

penyediaan pangan untuk ibu kota negara baru menjadi tantangan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan ke depannya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi tanaman pangan di Kalimantan Selatan diperlukan *roadmap* atau pemetaan pembangunan pertanian yang terstruktur. Kalimantan Selatan sebagai penyangga pangan nasional dan daerah yang memiliki surplus beras harus mampu menjadi daerah penyuplai bahan pangan ke wilayah ibu kota negara. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan potensi pertaniannya dapat turut andil dalam menjadi daerah penyuplai bahan pangan khususnya beras. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan

Selatan juga diharapkan akan berperan sebagai *hinterland* pemasok kebutuhan logistik pangan kepada IKN di Kalimantan Timur. Salah satu produk pertanian yang sangat penting adalah perkebunan dan hortikultura. Alasannya adalah bahwa Kalimantan Selatan memiliki kekayaan buah, sayur mayur, rempah-rempah yang melimpah serta perikanan (ikan gabus) dan peternakan (daging ayam ras, telur ayam ras). Sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, *food estate* merupakan salah satu Program Strategis Nasional yaitu Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional. Penetapan food *estate* di Kalimantan Tengah merupakan respon pemerintah terhadap pandemi global COVID-19 yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia. terutama terkait dengan kelangkaan dan krisis pangan di dunia dalam jangka menengah-panjang. Dalam KLHS cepat yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK. Kawasan Eks-PLG (Pengembangan Lahan Gambut) di Kalimantan Tengah yang dulunya dalam kondisi rusak berat setelah dilakukan pemulihan berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2016 membuahkan hasil kawasan yang terpulihkan sekitar 47 ribu hektar. KLHS cepat ini merekomendasi reposisi areal Eks-PLG sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Wilayah Pertanian Pusat Pangan Nasional Terpadu, Modern dan Berkelanjutan dengan tipe penggunaan lahan sebagai berikut:

1. Padi sawah (*rice*) sepanjang tahun;
2. Mix-farming: Padi hortikultura;
3. Padi-jagung-semangka;
4. Padi estate atau usaha masyarakat untuk padi dan jagung dan agroforestry;
5. Padi estate atau padi rakyat dan palawija/sayuran serta agroforestry dan sapi;
6. Padi dan palawija/sayuran serta agroforestry dan sapi;
7. Padi-palawija-sayuran; dan

8. Tanaman purun pada Zona 3.4.

Penetapan *food estate* di Kalimantan Tengah tentunya merupakan suatu isu strategis yang harus direspon dengan baik oleh daerah tetangga termasuk Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beberapa program (dari 20 program/kegiatan yang direncanakan) yang dapat dijadikan peluang oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk penguatan dan fokus penelitian-pengembangan sektor pertanian.

Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam

Pengolahan sumber daya alam berupa kelapa sawit, kayu, aluminium, dan bauksit, yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). *Outlet* untuk komoditas mentah maupun barang olahan di Pulau Kalimantan diarahkan di pelabuhan *hub* Pontianak. Selain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), serta Wilayah Metropolitan dan Kota Baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Kalimantan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, ibu kota sekaligus pusat pemerintahannya terletak di kota Kandangan. Secara regional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki peran sebagai daerah penunjang Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung kategori pariwisata khususnya cagar alam dan cagar budaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang (RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023). Melihat kenyataannya sektor pariwisata ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, pariwisata secara umum memiliki kontribusi terhadap lapangan kerja yang memiliki implikasi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebagai industri baru telah mendorong sektor ini tumbuh dan berkembang menjadi andalan dalam menambah pendapatan negara. Pariwisata adalah sektor yang penting dan mudah dapat menghasilkan devisa dibandingkan dengan banyak sektor lain, dan banyak negara berhasil memperoleh devisa dari pariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 bagian Ketentuan Umum menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Oleh

karena itu Pemerintah Indonesia mendorong penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik bahwa secara aturan serta regulasi yang mengatur mengenai sektor cagar budaya harus jelas dan mengikat semua pihak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan merupakan suatu landasan pengembangan pariwisata di Indonesia yang di rencanakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas daerah setempat, kerangka kepentingan nasional, strategi pengembangan pariwisata berdasarkan amanat undang- undang tersebut adalah persoalan yang perlu dikembangkan secara serius karena kemampuan strategi itu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata secara strategis diharapkan dapat memunculkan efek ganda, yang bermanfaat pada pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pariwisata berpotensi akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) ke depannya.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Visi Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keleluasaan daerah untuk mengatur segala aspek kehidupan yang ada di daerah seiring dengan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka pemerintah daerah sebagai pengelola daerah sangat dituntut untuk memiliki daya inovasi, kreasi dan kreativitas dalam mengembangkan potensi daerah tersebut.

Dengan cara demikian memungkinkan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan untuk masyarakat setempat, serta menempatkan mereka sebagai subjek kegiatan kepariwisataan, alih-alih sebagai objek. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. Konsep pariwisata berbasis masyarakat bermakna bahwa manajemen pariwisata di tempat bersangkutan dikelola oleh masyarakat setempat, ini meliputi pengelolaan kepariwisataan secara

menyeluruh di lokasi tersebut, termasuk penyiapan semua produk/ pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Apalagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berdasarkan RIPARNAS PP Nomor 50 Tahun 2011.

Pembangunan Akses Transportasi

Tren perkembangan ekonomi masa depan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur juga akan ditopang oleh keberadaan akses transportasi yang memadai, dimana akan dibangun sistem transportasi kereta api kawasan IKN dengan lintasan yang melewati bandara, perkotaan Balikpapan, dan kawasan Trans-Kalimantan. Dengan demikian, dukungan transportasi konektivitas terhadap distribusi logistik menuju IKN di Kalimantan Timur dari wilayah sekitarnya termasuk dari Kalimantan Selatan merupakan faktor yang harus dipersiapkan dalam mendorong IKN sebagai pusat pemerintahan melalui pemaduan jaringan prasarana, layanan, dan pelayanan transportasi antarmoda, dengan indikator kinerja transportasi yang terukur dari kawasan penyangga menuju IKN yang pada akhirnya akan mengembangkan ekonomi wilayah.

1.2.3 Kondisi Sosial

Aspek sosial berkaitan dengan keyakinan, sistem nilai dan gaya hidup masyarakat. Aspek sosial ini melibatkan hubungannya dengan sesama manusia lainnya dan akibat tingkah lakunya. Aspek sosial tidak sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain karena adanya perbedaan dalam tingkat perkembangan dan kebudayaannya, sifat kependudukannya, tingkat pendidikan, dan keadaan lingkungan alamnya juga (Coleman, 2011). Aspek sosial dalam masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalannya organisasi sehingga harus disadari dalam setiap pengambilan keputusan. Beberapa kondisi sosial yang muncul dari eksternal yang berpotensi memengaruhi Kabupaten Hulu Sungai Selatan teridentifikasi sebagai berikut.

Kebutuhan Tenaga Kerja Unggul

Ibu kota negara baru diharapkan mampu menuju kemandirian pangan. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan persiapan sebagai daerah penyangga pangan baru melalui Sistem Klaster Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan dengan menggunakan teknologi pertanian modern. Dengan mempersiapkan ini diharapkan ketika roda pemerintahan di IKN baru mulai berjalan, maka tidak perlu

melakukan impor pangan dari wilayah lain di luar Pulau Kalimantan dan kebutuhan pangan dapat diproduksi oleh masyarakat Kalimantan Selatan sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 mencapai 232.212 jiwa dan sebagian besar berada di daerah pedesaan. Mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Berdasarkan Sakernas Tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan mencapai 33,48 persen dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja. Artinya, dari 100 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 33 hingga 34 penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mayoritas bergantung pada sektor agraris. Tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian karena masih banyaknya lahan pertanian dan produktif, sehingga mengakibatkan penduduk untuk bertahan di sektor pertanian.

Dorongan untuk mendukung IKN dari sektor pertanian akan mendorong peluang bisnis di sektor pertanian dan penggunaan teknologi pertanian modern. Hal ini kemudian mendorong kebutuhan kesiapan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menopang kebutuhan tenaga kerja di IKN. Namun di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja unggul ini akan sangat mungkin mendorong tingginya urbanisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian akan memunculkan persaingan tenaga kerja. Persaingan tenaga kerja ini sangat mungkin memunculkan kesenjangan antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang pada skala tertentu dan dapat mengakibatkan konflik. Kesenjangan ini dapat terjadi dalam banyak hal, yaitu akibat perbedaan kualitas SDM yang menyangkut keterampilan (*skill*), pendidikan, kondisi ekonomi, dan keberpihakan pemerintah.

Selain itu, perpindahan ASN dari kementerian dan lembaga tentunya akan diikuti oleh pekerja swasta di bidang perbankan, kesehatan, pendidikan, wisata, dan termasuk pelaku ekonomi. Penduduk pendatang dari luar pada umumnya memiliki kualitas yang lebih unggul dalam hal pendidikan, etos kerja, dan keterampilan. Infrastruktur pelengkap terbaik juga akan menjadi daya tarik para pekerja berpendidikan dan terampil. Orang-orang yang akan pindah ini merupakan orang pilihan yang memiliki keunggulan sesuai bidang dan keahliannya dari lembaga atau perusahaan yang menempatkan diri di wilayah sekitar IKN, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hadirnya penduduk pendatang yang memiliki keunggulan lebih dapat memunculkan isu sosial yang disebut "*culture shock*" bagi penduduk lokal (Kastrat

UGM, 2019). Budaya kerja para penduduk pendatang yang terbiasa bekerja di kota besar akan mengakibatkan efek kejut pada penduduk lokal. Efek kejut ini juga dirasakan oleh penduduk lokal yang terbiasa saling mengenal dengan kehadiran orang-orang baru di lingkungan tempat tinggal.

Perbedaan kualitas SDM dapat menjadi pemicu kesenjangan sosial antara penduduk pendatang dan penduduk lokal. Hal ini dikarenakan penduduk lokal akan terkalahkan dengan penduduk pendatang yang memang sudah dipersiapkan untuk bekerja di wilayah sekitar IKN. Akibat persaingan ini, penduduk lokal hanya akan mengisi lapangan pekerjaan yang tersisa karena kesulitan mencari pekerjaan.

Urbanisasi

Ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur akan memberi dampak tidak saja ekonomi namun juga sosial. Salah satu tantangan utama dari pemindahan ibu kota negara adalah arus urbanisasi yang massif. Urbanisasi tidak hanya terjadi di wilayah Kalimantan Timur saja namun dapat terjadi di wilayah yang lebih luas (Adaba, 2022). Daya tarik ini akan meluas hingga ke wilayah lain di Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia seiring besarnya peluang ekonomi yang bisa didapatkan di IKN. Tentu IKN tidak mampu membendung kaum urban yang melakukan urbanisasi sehingga akan berdampak pada tingginya urbanisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penduduk pelaku urbanisasi ini biasanya ada yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus yang bisa digunakan bekerja di daerah baru. Namun tidak sedikit pula penduduk yang tidak mempunyai keahlian khusus tetapi tetap melakukan urbanisasi (Seftiani, 2008). Penduduk yang seperti ini biasanya hanya mengandalkan kekuatan fisik.

Penduduk pelaku urbanisasi yang punya modal dan bekal untuk hidup di daerah baru berpeluang lebih berhasil sehingga memungkinkan mereka mampu hidup dengan layak. Bahkan jika mereka telah mampu beradaptasi maka di daerah tujuan akan mendapatkan kedudukan yang bagus di mata masyarakat. Dengan demikian para penduduk yang sukses ini akan akan menguntungkan daerah asal karena keberadaan urban yang sukses ini akan ikut memajukan suatu daerah (Hidayati, 2020). Sedangkan untuk segolongan penduduk yang melakukan perpindahan tanpa mempunyai modal apapun baik modal kemampuan kerja maupun modal yang bersifat material. Penduduk yang seperti ini akan sulit mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kondisi ini jika tidak diantisipasi akan menjadi permasalahan sosial yang kompleks bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Munculnya Budaya Baru

Tantangan lain akibat urbanisasi dari berbagai wilayah yaitu munculnya budaya baru akibat berbaurnya penduduk tempatan dan penduduk pendatang. Inkulturasi atau masuknya budaya-budaya luar ke dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan sulit terhindarkan. Hal ini berpotensi terjadinya pergeseran budaya dan adat istiadat. Munculnya budaya baru ini karena terjadi proses deviasi yang disebut *vicious circle* (Sobirin, 2002). Proses terjadinya *vicious circle ini* dikarenakan gagalnya anggota masyarakat dalam mempertahankan budaya lama (*virtuous circle* yang ada) kemudian membentuk nilai-nilai budaya baru (*virtual circle* baru) yang sesuai dengan kebutuhan (Gagliardi, 1986). Budaya lama memiliki karakteristik meneruskan budaya yang diciptakan oleh orang tua dan pendahulunya, sedangkan budaya baru merupakan hasil interaksi dengan dunia luar yang menyebabkan akulturasi dan inkulturasi (Sobirin, 2002).

Secara sosiologis, ada tiga kemungkinan yang terjadi terhadap pembentukan budaya baru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu akulturasi, konservasi, dan asimilasi. Akulturasi merupakan dominasi budaya pendatang dimana penduduk tempatan hanya bisa mengadopsi budaya pendatang pada level yang rendah. Pada akulturasi, budaya pendatang menjadi dominan dan kuat karena didukung oleh pembangunan yang lebih memihak pada pendatang. Konservasi adalah pengerdilan budaya, dimana pemerintah melindungi budaya asli atau lokal tetapi tidak mengembangkannya dengan budaya modern agar setara. Terakhir, yaitu asimilasi yang merupakan pencampuran budaya yang sifatnya "*win-win*" atau tidak ada yang dimenangkan dan dikalahkan antara keduanya. Asimilasi secara alami akan membentuk budaya dengan mengambil nilai-nilai terbaik dan bermanfaat dari budaya asli dan pendatang (Wirutomo, 2022).

1.2.4Kondisi Teknologi

Aspek teknologi, berkaitan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam masyarakat, perubahan teknologi ini akan mengubah seluruh aspek kehidupan (Pearce & Robinson, 1997). Adaptasi teknologi akan membuka kemungkinan terciptanya produk baru maupun perbaikan prosedur pelayanan. Aspek teknologi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Teknologi dalam hal ini meliputi perkembangan sistem komunikasi yang mampu diakses oleh

pemerintah, jaringan jalan, sarana transportasi, dan perkembangan teknologi (komputerisasi) dan penggunaannya untuk menunjang perumusan kebijakan atau strategi yang baik (Witcher, 2020; David & David, 2017).

Menghadapi era *Society 5.0*, pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (*artificial intelligence*). Kemajuan teknologi ini kemudian mendorong aparatur pemerintah untuk dapat mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk mendukung era keterbukaan yang semakin meluas maka seluruh pemerintah di Indonesia didorong untuk mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai *network government* dan *collaborative governance.*

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus terus dapat mengantisipasi era keterbukaan yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saingnya terutama meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah- masalah publik sendirian. Pemerintah berkomitmen dalam menangkap isu peluang tersebut dengan beradaptasi dengan inovasi layanan publik yang semakin dituntut untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

1.2.5 Kondisi Lingkungan

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) untuk periode 2020-2030, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030. Kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon ini akan mendorong Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengadaptasi dan menerapkannya pada rencana pembangunan daerah. Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan langkah awal menuju pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Selain itu, arah kebijakan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan secara umum diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan, diversifikasi, dan pelestarian alam. Pengembangan wilayah bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan

Prioritas Nasional (KPPN), PKSN, kawasan transmigrasi, kawasan pertambangan minyak bumi, gas bumi dan batu bara, serta sentra produksi perikanan di SKPT.

Dalam rangka pembangunan daerah, penggunaan sumber daya alam di daerah juga harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat wajib menjaga dan mengelola lingkungan hidup agar tetap berkelanjutan, sebagai sumber daya dan penopang kehidupan bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya. Dorongan ini akan mendorong Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dapat mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan iklim yang secara alami berdampak negatif pada kualitas lingkungan.

1.2.6 Kondisi Peraturan/Kebijakan

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kekurangan sebesar 26,23 persen terkait persentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi baik dari target SDGs sebesar 45 persen, adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah, belanja modal kecenderungan mengalami penurunan. Manajemen pemerintahan dituntut untuk dinamis dan adaptif dalam menyikapi perubahan. Birokrasi harus respon terhadap kebijakan yang terus berubah, selain itu pemerintah dihadapkan dengan pengelolaan APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat.

BAB II
ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Untuk menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kota cerdas, maka perlu dilakukan analisis kesiapan daerah, sehingga dapat diidentifikasi kesiapan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengimplementasikan *smart city*. Terdapat 5 (lima) komponen utama yang akan diuraikan untuk menggambarkan kodisi eksisting kesiapan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pengembangan *smart city,* yaitu: kesiapan kondisi alam (*nature*), kesiapan struktur (sumber daya manusia, birokrasi, dan anggaran), kesiapan infrastruktur (fisik, digital, dan sosial), suprastruktur (kebijakan dan kelembagaan), dan kesiapan kultur (budaya masyarakat). Masing-masing komponen akan dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Analisis Kesiapan Kondisi Alam

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sebesar 180.494 ha atau 1.804,94 km^2. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- Sebelah utara: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah timur: Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru
- Sebelah selatan: Kabupaten Tapin
- Sebelah barat: Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

Secara rinci wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

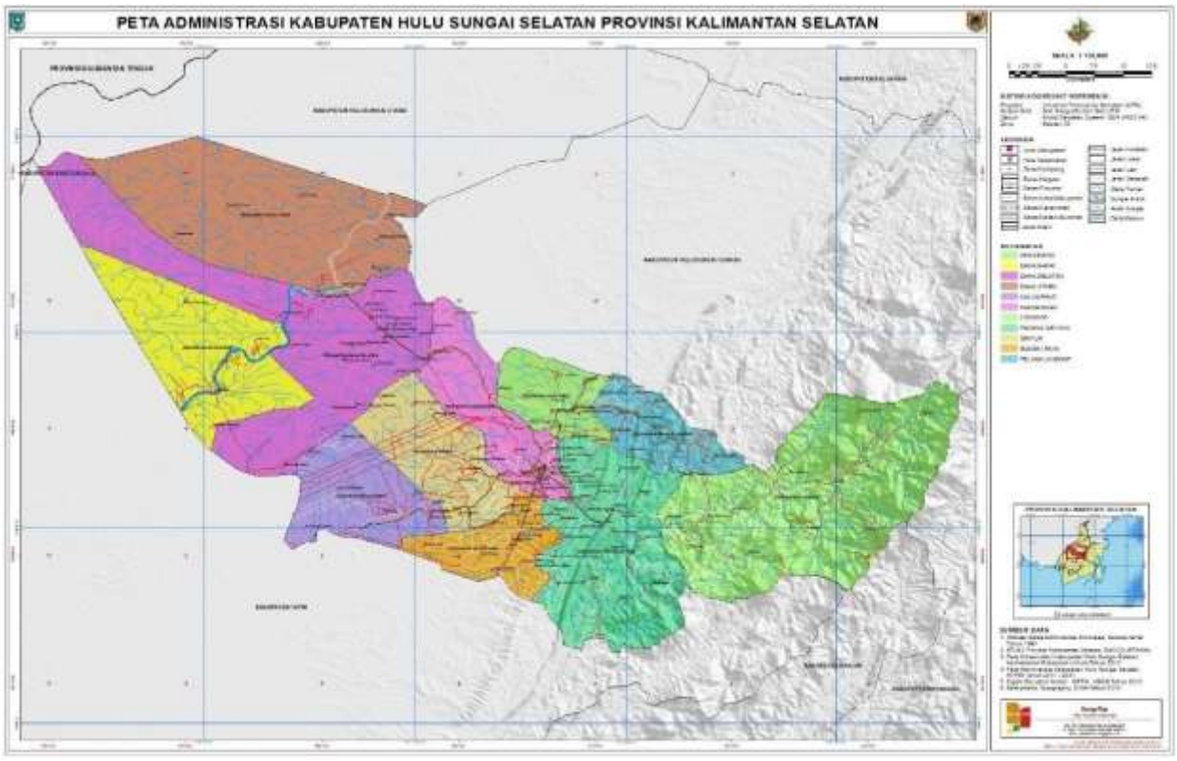

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 11 kecamatan, 144 desa dan 4 kelurahan dengan pusat pemerintahan sekaligus ibu kotanya adalah kota Kandangan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Desa/Kelurahan
1.	Padang Batuang	203,93	17
2.	Loksado	338,89	11
3.	Telaga Langsat	58,00	11
4.	Angkinang	58,40	11
5.	**Kandangan**	106,71	14/4
6.	Sungai Raya	80,96	18
7.	Simpur	82,35	11
8.	Kalumpang	135,07	9
9.	Daha Selatan	322,82	16
10.	Daha Barat	149,62	7
11.	Daha Utara	268,11	19
	Jumlah	**1.804,94**	**148**

(*Sumber*: Kabupaten Hulu Sungai Dalam Angka, 2022)

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara 02029'59"LS - 02056'10"LS dan 114051'19"BT - 115036'19"BT; dimana kota Kandangan terletak

pada 2°47'LS - 115°40'BT dan dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito. Secara topografis, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, daerah berbukit dengan lereng terjal (antara 25% sampai lebih dari 40%) mencapai luas hampir 12 persen dari total keseluruhan wilayah. Daerah perbukitan tersebar di empat kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, sebagian Sungai Raya dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng terjal ini merupakan bagian dari jalur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung.

Secara regional, daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari Cekungan Barito yang terbentuk pada Kala Eosen-Oligosen, kala itu terjadi penurunan daratan yang mengakibatkan genangan air laut (transgresi). Secara hidrologi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sistem hidrologi yang terdiri dari sungai, danau dan rawa. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan umumnya berpangkal di Pegunungan Meratus dan berakhir di Laut Jawa setelah bergabung dengan Sungai Barito. Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Sungai Negara, Sungai Angkinang, Sungai Amandit, dan Sungai Kajang.

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki hutan yang cukup luas meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, hingga pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Luas wilayah hutan saat ini mencapai 55.382,33 ha dengan persentase sebesar 30,68 persen disusul oleh padang (semak, alang, rumput) dengan luas 53.829,44 ha atau 29,82 persen. Persentase luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2017

Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
Kampung	5.161,18	2,86
Industri	-	-
Pertambangan	-	-
Sawah	44.294,00	24,54
Ladang	8.983,00	4,98
Kebun Campuran	1.744,25	0,97
Perkebunan (Kebun Karet)	10.906,94	6,04
Padang (Semak, Alang, Rumput)	53.829,44	29,82
Hutan	55.382,33	30,68
Rawa	192,86	0,11
Tanah Terbuka	-	-
Lain-lain	-	-
Jumlah	**180.494,00**	**100,00**

(*Sumber*: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan)

Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi *main prime mover* (pendorong pertumbuhan utama) antara lain kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pariwisata serta kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan, yang didasarkan atas sumber daya yang ada dan kontribusi terhadap pembangunan. Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan potensi luas lahan 77.505 ha. Dari potensi luas tersebut baru 60 persen lahan dimanfaatkan untuk sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan luasan sebesar 40 persen untuk sementara tidak diusahakan. Rincian potensi luasan lahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Luas Lahan Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan Sementara/ Tidak Digunakan Menurut Kecamatan Tahun 2021 (Ha)

Kecamatan	Irigasi	Non-Irigasi	Tegal/ Ladang/ Kebun Huma		Sementara/ Tidak Digunakan	Jumlah
Padang Batuang	987	275	4.669	1.300	1.325	8.556
Loksado	-	13	4.637	2.870	13.041	20.561
Telaga Langsat	1.356	50	153	910	725	3.194
Angkinang	1.225	2.591	146	-	324	4.286
Kandangan	18	2.439	176	-	3.357	5.990
Sungai Raya	592	1.686	759	134	1.197	4.368
Simpur	217	2.608	-	-	210	3.035
Kalumpang	-	1.418	180	-	2.247	3.845
Daha Selatan	-	3.110	-	-	3.907	7.017
Daha Barat	-	3.612	-	-	4.639	8.251
Daha Utara	-	7.967		-	-	8.402
Jumlah	**4.395**	**25.769**	**11.155**	**5.214**	**30.972**	**77.505**

(*Sumber*: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2022; diolah)

Potensi produksi pangan dapat dilihat dari hasil produksi tanaman pangan yang dihasilkan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi di beberapa komoditas unggulan. Rincian produksi tanaman pangan tahun 2015-2020 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Produksi Menurut Jenis Tanaman Pangan Tahun 2015-2020 (ton)

Komoditas	2015	2016	2017	2018	2020
Padi	232.950	260.888	253.637	268.935	159.074
Jagung	5.093	440	4.973	5.072	3.282
Kedelai	36	2	0	0	0
Kacang Tanah	447	849	497	561	416
Kacang Hijau	26	29	8	11	6
Ubi Kayu	1.174	1.491	2.570	2.886	4.436
Ubi Jalar	5.944	9.712	2.485	8.690	3.646

* Data tanaman pangan tahun 2019 tidak tersedia
(*Sumber*: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2021)

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Kalimantan Selatan karena secara geografis berada pada kawasan pegunungan, sungai, dan rawa. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki objek wisata yang beragam dan alam yang sangat indah, seperti kawasan Pegunungan Meratus yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan air yang jernih, air terjun dan riam, dan sumber air panas alami. Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki seni budaya serta adat istiadat yang khas, beragam, dan terpelihara dengan baik. Potensi alam dan budaya ini menyebabkan sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan melalui konsep *eco-tourism* serta *diamond triangle* dalam konsep pengelompokan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). Dalam konsep konsep e*co-tourism,* pembangunan pariwisata dilakukan dengan mengoptimalkan sekaligus melestarikan potensi alam dan budaya khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip yaitu:

1) Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
2) Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
3) Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal);
4) Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah; dan

5) Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

Konsep Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok:

1. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I

WPP I merupakan kawasan alam (pegunungan, hutan, dan pertanian) yang sesuai untuk kegiatan wisata petualangan (*adventure*) dengan menikmati pemandangan alam. Di samping itu, juga terdapat kelompok dan masyarakat adat asli Dayak Pegunungan Meratus. WPP I merupakan Kawasan Prioritas I dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berada di Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Telaga Langsat, dengan kawasan pengembangan utama yaitu Loksado yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Di kawasan utama Kecamatan Loksado (Desa Loksado) perlu dibangun sebuah ruang terbuka yang berfungsi sebagai zona penyambutan/lokasi untuk bersantai dan istirahat bagi wisatawan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas berwisata. Sesuai dengan dokumen Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Loksado, maka dalam pengembangan amenitas di kawasan Loksado diperlukan penataan terhadap bangunan-banguna n yang ada di tepi sungai dan pemulihan kembali Delta Amandit sebagai zona santai untuk wisatawan. Sinergitas antara berbagai urusan pemerintahan dalam pengembangan pariwisata di WP I berdasarkan konsep 3A, setidaknya mencakup:

a. Pengembangan *eco-tourism*, *edu-tourism*, *ethnic-tourism* dan penyelenggaraan festival-festival dengan skala provinsi dan nasional, seperti *jungle tracking*, air terjun, air panas Tanuhi, Festival Loksado, *bamboo rafting*, rumah adat/balai, dan upacara pesta adat/*Aruh Ganal*;
b. Peningkatan jalan menuju destinasi pariwisata/objek wisata sesuai dengan lingkup kewenangan secara berjenjang dari level pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
c. Pengembangan usaha kecil dan menengah, fasilitasi jaringan permodalan dan legalitas usahanya;
d. Pemberdayaan komunitas masyarakat adat;
e. Pengembangan kawasan terpadu pariwisata desa;

f. Pemanfaatan sumber daya hutan, perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi;
g. Pengendalian pencemaran, pencegahan perusakan lingkungan hidup dan peningkatan upaya kebersihan lingkungan;
h. Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan seperti penyediaan rambu-rambu dan peningkatan tipe pelayanan Terminal Loksado;
i. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan seluler di kawasan Loksado;
j. Pembinaan terhadap masyarakat, kelompok sadar wisata dan pelaku usaha jasa pariwisata melalui bentuk-bentuk sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenisnya serta pemberian materi-materi khusus kepariwisataan pada pelajar di semua level pendidikan; dan
k. Pengembangan kawasan yang dapat dijadikan museum rumah adat Dayak, yang berisi kekhasan wilayah Loksado.

2. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II

WPP II merupakan wilayah dengan dataran dan rawa, sebagian berada di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai zona penghubung. WPP II melingkupi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang. Pengembangan pariwisata di wilayah ini diarahkan pada pengembangan wisata religi, wisata kuliner, wisata perkotaan, dan wisata minat khusus. Ada beberapa makam ulama besar, mesjid yang bernilai sejarah, kawasan kuliner khas ketupat Kandangan, beberapa wisata buatan, wahana permainan dan taman kota. Mendukung fungsinya sebagai zona penghubung, pada WPP II perlu adanya *Tourism Information Center* (TIC) dalam rangka memberikan kemudahan wisatawan terhadap akses informasi destinasi wisata dan mengarahkan pola perjalanannya sesuai paket-paket yang sudah disiapkan.

3. Wilayah Pengembangan Pariwisata Religi

Pariwisata religi atau wisata religius merupakan jenis pariwisata yang mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai keagamaan atau religius bagi pengunjungnya. Pada awalnya, wisata religius tidak direncanakan sebagai sebuah industri pariwisata, tetapi berkembang secara alami sesuai dengan kearifan lokal dan kepercayaan agama yang ada di suatu wilayah.

Dalam pengembangannya, wisata religius dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Selain dapat meningkatkan perekonomian lokal, wisata religius juga dapat memperkenalkan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat kepada wisatawan. Dengan demikian, wisata religius dapat memperkuat hubungan antara masyarakat setempat dan wisatawan, serta memperkaya pengalaman wisatawan.

Objek wisata religi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri terdapat tiga kawasan yang sering didatangi oleh para penziarah yaitu Makam Datu Taniran, Makam Datu Balimau dan terdapat satu area baru yaitu Makam Guru Kapuh. Tiga titik ini menjadi *triangle* wisata yang menjadi daya tarik terkuat wisata religi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selain potensi alam, akibat morfologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki daratan seluas sekitar >65 persen, menyebabkan risiko yang tinggi akan terjadinya bencana banjir. Risiko banjir semakin besar karena di daerah hulu Sungai Amandit yaitu daerah Loksado selama ini merupakan hutan namun kian lama akan semakin gundul karena banyak penebangan kayu yang kurang terkontrol. Di daerah Kecamatan Loksado dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Batung merupakan daerah dengan satuan geomorfologi perbukitan berelief sedang sehingga di wilayah ini terjal dimana kemiringan lereng mencapai >36˚. Kondisi ini juga menyebabkan daerah ini rawan terjadi bencana tanah longsor yang sangat berbahaya terutama dekat dengan pemukiman dan jalan penghubung antardesa.

Sesuai data dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Inarisk BNPB (http://inarisk.bnpb.go.id), pada tahun 2015 sampai dengan 2021 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk pada kelas risiko tinggi dengan skor 152,40 dan mengalami penurunan sampai tahun 2021 menjadi 150,00. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 (lihat Tabel 2.5) terlihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di urutan kelima dengan kelas risiko tinggi. Jenis bencana yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah banjir, kekeringan, angin puting beliung, longsor, serta kebakaran lahan dan hutan.

Tabel 2.5
Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota		
1.	Kabupaten Tanah Laut	178,00	Tinggi
2.	Kabupaten Kotabaru	172,71	Tinggi
3.	Kabupaten Banjar	165,12	Tinggi
4.	Kabupaten Barito Kuala	155,96	Tinggi

No.	Kabupaten/Kota		
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	150,00	Tinggi
6.	Kabupaten Tabalong	149,03	Tinggi
7.	Kabupaten Tanah Bumbu	143,94	Sedang
8.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	133,87	Sedang
9.	Kabupaten Balangan	133,77	Sedang
10.	Kabupaten Tapin	128,79	Sedang
11.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	126,00	Sedang
12.	Kota Banjarbaru	108,00	Sedang
13.	Kota Banjarmasin	96,40	Sedang

(*Sumber*: Buku Indeks Risiko Bencana Insonesia Tahun 2021)

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki titik rawan bencana sebagai berikut:

a. Bencana longsor meliputi Kecamatan Loksado di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Padang Batung di Desa Batu Laki, Kecamatan Telaga Langsat di Desa Hamak dan Desa Hamak Utara.
b. Bencana banjir meliputi kecamatan-kecamatan: Kandangan, Kalumpang, Angkinang, Sungai Raya, Padang Batung, Telaga Langsat, Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat.

2.2 Analisis Kesiapan Struktur

Kesiapan daerah terkait struktur meliputi kesiapan sumber daya manusia baik sebagai pelaksana maupun sebagai penerima manfaat *smart city*, kesiapan sumber daya pemerintah, dan kesiapan anggaran untuk implementasi *smart city*. Masing-masing analisis kesiapan terkait struktur akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia dapat di analisis dari sisi jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 232.212 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Perkembangan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam lima tahun terakhir (2017-2022) disajikan pada Gambar 2.2.

(*Sumber*: Evaluasi RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan, 2023)

Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk dan
Laju PertumbuhannyaTingkat Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan angka yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk yang tinggi biasanya ditandai dengan adanya aktivitas ekonomi yang tinggi, wilayah perkotaan, infrastruktur yang memadai baik dari sisi pendidikan, kesehatan ataupun kelayakan untuk dihuni. Selain itu, akses kemudahan terhadap pendidikan dan kesahatan juga sangat mudah. Akan tetapi, semakin tinggi perbedaan kepadatan penduduk suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya akan menimbulkan ketimpangan distribusi penduduk dan memiliki peluang terjadinya konflik sosial.

Kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sebesar 129 jiwa/km^2. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km^2 ditempati sekitar 129 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk setiap kecamatan beraneka ragam, berkisar antara 25 - 465 jiwa/km^2. Kisaran tingkat kepadatan antar- kecamatan memiliki perbedaan yang sangat jauh. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecamatan yang jarang penduduknya dan ada juga yang memiliki tingkat kepadatannya yang sangat padat. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kecamatan, luas wilayah, dan kepadapatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan (jiwa/km^2)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Padang Batuang	10.869	11.049	21.918	203,93	107
Loksado	4.326	4.222	8.548	338,89	25
Telaga Langsat	5.319	5.189	10.508	58,08	181
Angkinang	9.441	9.583	19.024	58,40	326

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan (jiwa/km^2)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Kandangan	24.598	25.006	49.604	106,71	465
Sungai Raya	9.198	9.335	18.533	80,96	229
Simpur	7.703	7.865	15.568	82,35	189
Kalumpang	3.381	3.277	6.658	135,07	49
Daha Selatan	20.918	20.358	41.276	322,82	128
Daha Barat	4.184	3.980	8.164	149,62	55
Daha Utara	16.516	15.895	32.411	268,11	121
Jumlah	**116.453**	**115.759**	**232.212**	**1.804,94**	**129**

(*Sumber*: Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2021-2023)

Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu mencapai 465 jiwa/km^2. Kecamatan Kandangan merupakan ibu kota kabupaten sehingga kegiatan perekonomian banyak terpusat di sini. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi berikutnya adalah Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Sungai Raya. Sementara, Kecamatan Loksado, Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Daha Barat merupakan tiga kecamatan yang memiliki tingkat penduduk yang rendah. Kecamatan Loksado merupakan kecamatan yang kepadatan penduduknya terendah dengan tingkat kepadatan sebesar 25 jiwa/km^2. Kecamatan Loksado merupakan wilayah dengan luasan terbesar, akan tetapi sebagian besar wilayahnya adalah hutan. Wilayah permukiman hanya ada di beberapa titik. Sementara itu untuk wilayah Kalumpang dan Daha Barat terdapat perkebunan sawit yang menggunakan wilayah yang cukup luas sehingga jumlah kepadatan penduduknya rendah.

Indikator setelah kepadatan penduduk adalah persebaran penduduk. Tingkat persebaran pada setiap kecamatan memiliki kepadatan yang beragam. Persebaran penduduk dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan antar- wilayah. Semakin merata persebaran penduduk antarwilayah menunjukkan semakin mirip tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah. Semakin besar tingkat kepadatan suatu wilayah maka dapat diindikasikan semakin mampu memberikan daya dukung sarana dan prasarana terhadap penduduk yang berada di wilayah tersebut.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menempati sebelas kecamatan dengan tingkat persebaran yang berbeda-beda. Persebaran dan kepadatan penduduk sedikit memiliki kesamaan. Biasanya wilayah dengan padat penduduk memiliki tingkat persebaran yang tinggi. Pada tahun 2022, persebaran penduduk berada pada kisaran 2,87 - 21,36 persen. Hal ini sama halnya dengan kepadatan. Tingkat persebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong masih rendah. Hal ini

ditunjukkan bahwa beberapa kecamatan hanya dihuni oleh sebagian kecil penduduk. Sedangkan terdapat kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 1/5 total penduduk.

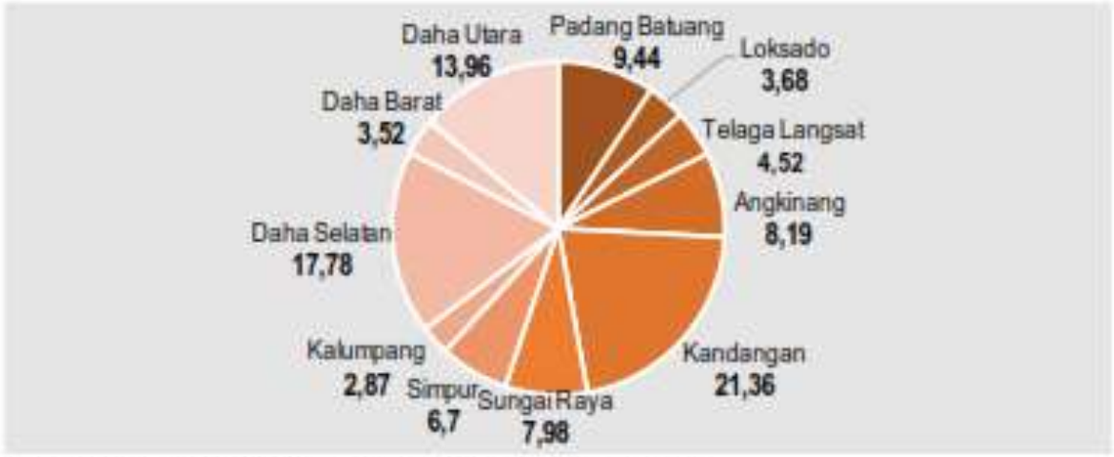

(*Sumber*: Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2021-2023)

Gambar 2.3
Persentase Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Menurut Kecamatan Tahun 2022

Data pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk hanya tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kandangan (21,36%), Kecamatan Daha Selatan (17,78%) dan Kecamatan Daha Utara (13,96%). Ketiga kecamatan ini selain memiliki wilayah yang luas, juga memiliki daya tarik terhadap kegiatan perekonomian. Kecamatan Kandangan sebagai ibu kota kabupaten yang menyediakan berbagai macam jenis pekerjaan serta daerah Daha Selatan dan Daha Utara dengan kegiatan perekonomian di bidang kerajinan dan perikanan. Selain itu, akses transportasi sungai sangat mudah untuk digunakan menuju ke ibu kota provinsi ataupun ke provinsi lainnya. Sementara itu, kecamatan dengan persebaran terendah adalah Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Loksado, dan Kecamatan Daha Barat. Seiring dengan tingkat kepadatan penduduknya, persebaran di kecamatan ini juga sangat rendah. Hal ini dikarenakan berbagai masalah dapat ditimbulkan seperti ketimpangan daya dukung suatu wilayah seperti sarana dan prasarana wilayah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki akses menuju ibu kota kabupaten yang susah.

Komposisi Penduduk

Keberadaan penduduk berdasarkan struktur umur dan jenis kelamin dapat memberikan informasi untuk menggambarkan keadaan mendatang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Struktur penduduk suatu wilayah dapat membantu pemerintah untuk menentukan prioritas dalam pengambilan

keputusan. Pada wilayah dengan struktur penduduk muda lebih membutuhkan ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dan selanjutnya didukung dengan lapangan usaha yang dapat mencakup kelompok penduduk usia muda sehingga dapat mengantisipasi peningkatan pengangguran. Sementara itu, untuk struktur penduduk tua lebih membutuhkan fasilitas kesehatan yang mudak diakses dan memadai serta diperlukan sistem jaminan hari tua untuk meningkatkan keberlangsungan penduduknya.

Berdasarkan usia, struktur penduduk dalam ilmu demografi dibagi menjadi tiga kelompok, yang pertama adalah struktur penduduk muda yang ditandai dengan tingkat kelahiran tinggi dan jumlah penduduk tua sedikit. Kedua adalah struktur penduduk stasioner yang menggambarkan keadaan tetap (statis) karena jumlah kelahiran dan kematian relatif sama yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk lambat. Kelompok ketiga adalah struktur penduduk tua yang menggambarkan jumlah kelahiran yang mengalami penurunan dan tingkat kematian pada kelompok tua rendah. Struktur umur berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan pada Gambar 2.4.

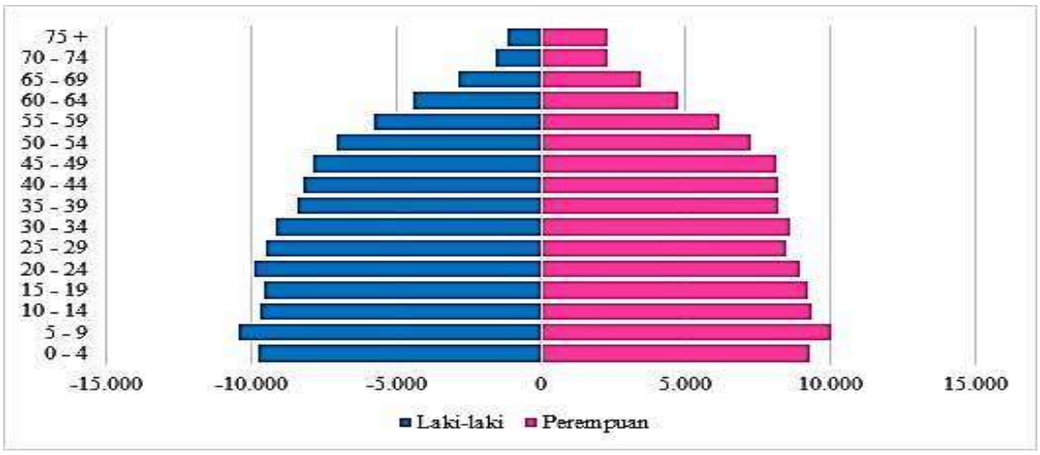

(*Sumber*: Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2021-2023)

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

Piramida penduduk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022. Dari piramida tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu struktur penduduk muda. Penduduk yang mendominasi adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun), dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi. Fertilitas tinggi pada piramida penduduk

dapat dilihat dari dasar piramida yang lebar, sementara itu untuk tingkat kematian yang tinggi ditunjukkan oleh puncak piramida yang mengerucut.

Berdasarkan struktur umur dan kemampuan berproduksi secara ekonomi, struktur penduduk dibedakan menjadi tiga yaitu, kelompok usia belum produktif (0-14 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan kelompok usia tua (65+). Angka beban ketergantungan penduduk adalah perbandingan penduduk yang tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Berdasarkan kelompok umur tersebut diperoleh angka besarnya Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*). Perbandingan antara umur 10-14 tahun terhadap umur 15-64 tahun dinamakan Angka Ketergantungan Muda. Hal ini dikarenakan penduduk usia muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih bergantung kepada orangtua atau orang lain yang menanggung kehidupannya. Selanjutnya perbandingan antara penduduk umur 65 tahun ke atas dengan umur 15-64 tahun merupakan Angka Ketergantungan Tua. Hal ini dikarenakan pada usia 65 tahun ke atas dianggap tidak mampu lagi bekerja, sehingga tidak produktif lagi.

Indikator lain yang berkaitan dengan komposisi penduduk adalah Angka Beban Ketergantungan dapat dilihat melalui Rasio Ketergantungan. Rasio Ketergantungan menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang belum produktif dan merupakan salah satu indikator kependudukan yang sangat penting. Semakin tinggi persentase Angka Beban Ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.7
Distribusi Persentase Kelompok Umur Penduduk dan
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 14 tahun	25,73	24,82	25,27
15 - 64 tahun	69,13	67,81	68,47
65 tahun ke atas	5,15	7,37	6,26
Rasio Ketergantungan	44,66	47,48	46,05
Rasio Ketergantungan Muda	37,21	36,61	36,91
Rasio Ketergantungan Tua	7,45	10,88	9,14

(*Sumber*: Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2021-2023)

Data pada Tabel 2.7 menunjukkan bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada kelompok umur 0-14 tahun dan 15-64 tahun tidak memiliki perbedaan yang banyak antara laki-laki dan perempuan, Sementara itu, pada kelompok usia 65 tahun ke atas menunjukkan persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan memiliki harapan umur lebih panjang dibandingkan laki-laki. Rasio Ketergantungan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 adalah 46,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 jiwa penduduk produktif menanggung kebutuhan sekitar 46 sampai 47 jiwa penduduk tidak produktif secara ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dapat dikatakan juga bahwa 1 orang usia non-produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rasio ketergantungan penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki- laki yaitu 47,48 persen untuk perempuan dan 44,66 persen untuk laki-laki.

Persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun (25,27%) lebih besar dibandingkan kelompok umur 65 tahun ke atas (6,26%). Hal ini mengakibatkan Rasio Ketergantungan Penduduk Muda (YDR/*Young Dependency Ratio*) lebih tinggi dibandingkan dengan Rasio Ketergantungan Penduduk Tua (ODR/*Old Dependency Ratio).* Hal ini dapat diartikan bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif sebagian besar adalah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 25,27 persen.

Indikator penduduk yang dapat dilihat lainnya adalah Rasio Jenis Kelamin. Dengan rasio ini dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Indikator ini dapat digunakan untuk mendukung adanya pembangunan berwawasan gender, kebijakan perimbangan pembangunan berdasarkan jenis kelamin secara adil. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki Rasio Jenis Kelamin sebesar 100,60. Angka ini memberikan arti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100-101 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir sama.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2021	115.366	114.594	229.960	100,67
2022	116.453	115.759	232.212	100,60

(*Sumber*: Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2021-2023)

Ketenagakerjaan

Mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih pada sektor pertanian. Berdasarkan Sakernas Tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 33,48 persen dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja. Lahan pertanian yang masih banyak dan produktif mengakibatkan penduduk untuk bertahan di sektor pertanian. Keberadaan Pulau Kalimantan terkenal akan sungainya, sehingga penduduknya juga memanfaatkan keadaan alam untuk bekerja sebagai nelayan/budidaya ikan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan pada saat pandemi COVID-19. Sektor lain yang dapat menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha yang ada pada sektor jasa-jasa. Pada sektor ini didominasi oleh usaha perdagangan yang mencapai 25,48 persen. Selain itu pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 16,45 persen. Pada sektor manufaktur didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 14,80 persen.

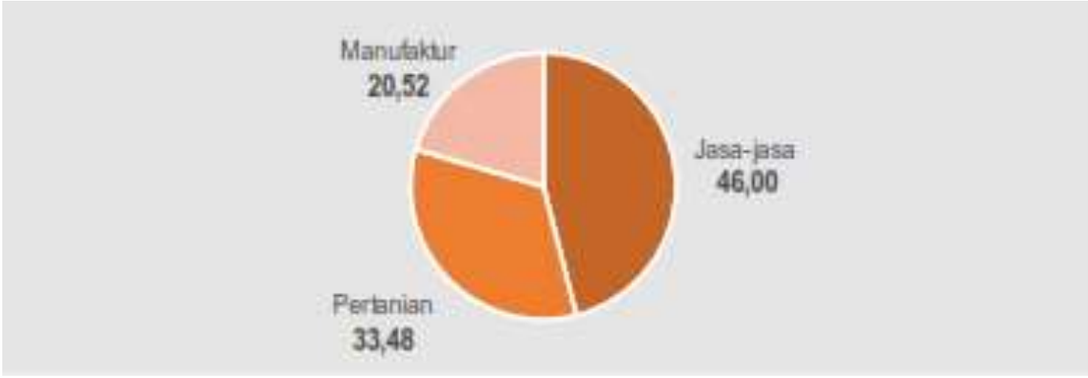

(*Sumber*: Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2021-2023)

Gambar 2.5
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021

Sedangkan menurut kelompok tingkat pendidikan hingga tahun 2021 masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/sederajat ke bawah yaitu sebesar 50,57 persen dari jumlah penduduk. Berdasarkan tingkat pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021, angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 53,29 persen (lihat Gambar 2.6).

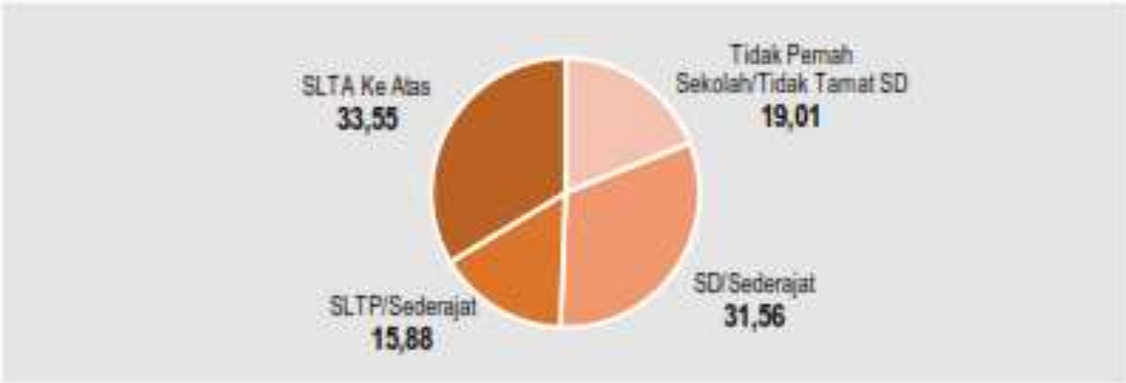

(Sumber: Diolah dari Sakernas Tahun 2021, BPS Kab. Hulu Sungai Selatan)

Gambar 2.6
Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021

Kualitas Pembangunan Manusia

Kesiapan daerah terkait sumber daya manusia dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semakin baik nilai Indeks Pembangunan Manusia maka masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin siap dalam implementasi *smart city.* IPM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya dimana IPM pada tahun 2022 mencapai 69,76 yang pada tahun sebelumnya sebesar 69,21. Meskipun begitu, angka IPM tersebut masih dalam kategori sedang dan berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mencapai 71,84 dan nasional yang telah mencapai 72,91 (lihat Gambar 2.7).

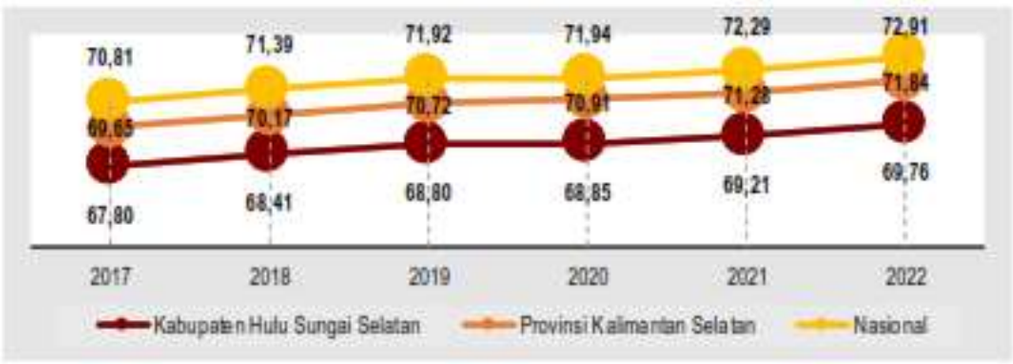

(*Sumber*: Badan Pusat Statistik)

Gambar 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2017-2022

Berdasarkan dimensi pembentuknya, khusus dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan fluktuatif setiap tahunnya. AHH tersebut juga masih berada di bawah AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi ekonomi yaitu pada angka Pengeluaran Per Kapita di Hulu Sungai Selatan dari tahun 2020 dan tahun 2021 berada di atas rata-rata dibandingkan angka Pengeluaran Per

Kapita Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi pendidikan, seluruh komponen penyusunnya yang meliputi rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki tren naik setiap tahunnya. Namun walaupun memiliki tren naik setiap tahunnya, nilai pada kedua indeks tersebut masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Data perkembangan pembentuk IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.8.

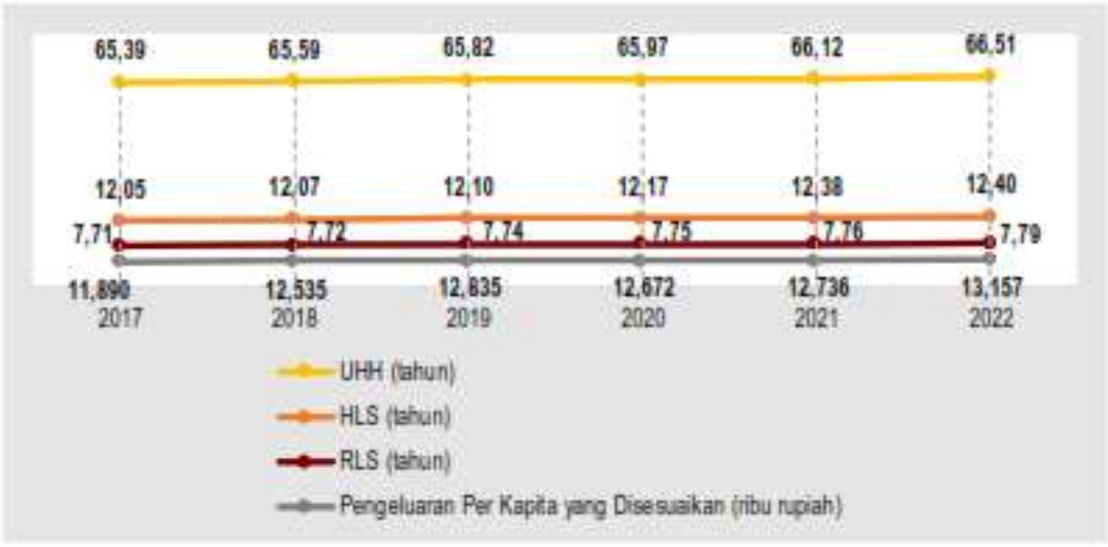

(*Sumber*: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan)

Gambar 2.8
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2017-2022

Komunitas, *Start-Up*, dan Dukungan Perguruan Tinggi

Upaya pengembangan industri kreatif membutuhkan kesiapan SDM pelaku usaha kreatif. Perkembangan industri kreatif dari suatu daerah dapat dilihat komunitas yang tumbuh dan munculnya *start-up*. Berdasarkan FGD (*focus group discussion*) yang dilakukan dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diketahui bahwa jumlah komunitas minat bakat/hobi/kreatif masuk dalam kategori baik dimana terdapat 15 komunitas minat bakat/hobi/kreatif yang berdiri. Namun sebagian besar komunitas (12 komunitas) merupakan aktivis peduli lingkungan dan hanya 3 komunitas yang merupakan komunitas bakat/kreatif. Sementara, telah ada komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK yang terbentuk meskipun jumlahnya baru 1 komunitas. Tumbuhnya komunitas kreatif yang lambat ini mungkin menjadi alasan dari belum adanya *digital start-up* yang dibangun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Di sisi lain, penerapan konsep *smart city* membutuhkan dukungan perguruan tinggi daerah dalam mempersiapkan SDM. SDM yang siap akan mengurangi kesenjangan

digital, baik akses maupun kapabilitas dalam mewujudkan *smart city*. Meskipun terdapat dua perguruan tinggi namun jurusan pada perguruan tinggi tersebut dianggap masih kurang mampu mendukung *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun demikian, komitmen pemerintah daerah untuk mempersiapkan sumber daya daerah yang unggul diwujudkan dalam pemberian 50 beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah untuk mahasiswa/santri ke luar negeri.

Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Kondisi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk dalam kategori baik. Kondisi ini merupakan modal masyarakat dalam mewujudkan *smart city*. Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa Angka Kriminalitas masih di bawah rata-rata Angka Kriminalitas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (223), hanya terjadinya satu kali perusakan fasilitas umum (yaitu *safety mirror*) di sudut tikungan jalan, dan tidak adanya kegiatan tawuran antarkelompok warga dalam satu tahun karena warga dengan sangat baik menjaga keamanan lingkungannya.

Secara umum, gambaran kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut interpretasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Bimtek I berdasarkan 9 komponen penilaian adalah 44,4 persen masuk dalam kategori baik, 14,4 persen masuk dalam kategori sedang, dan 11,1 persen masuk dalam kategori buruk (lihat Tabel 2.9).

Tabel *2.9*
Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia Daerah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Jumlah komunitas minat bakat/hobi/ kreatif di daerah	12		●	
2.	Adanya komunitas pengembang/ developer perangkat lunak TIK di daerah	1		●	
3.	Adanya *digital start-up* di daerah	0		●	●
4.	Adanya perguruan tinggi di daerah	2		●	
5.	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	50		●	
6.	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	15	●		
7.	Jumlah Angka Kriminalitas dalam satu tahun	223	●		
8.	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	1	●		
9.	Jumlah kegiatan tawuran antar-kelompok warga dalam satu tahun	0	●		
		Persentase	**44,4**	**44,4**	**11,1**

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.2.2 Analisis Kesiapan Sumber Daya Pemerintah

Dalam proses implementasi konsep *smart city*, perlu untuk mengukur kesiapan dengan kemampuan pemerintah untuk menggunakan TIK secara tepat untuk memfasilitasi layanan dan kegiatan di lingkungan baru (Mandala, Firman, Rosalia, & Rasid, 2023). Dengan demikian, kesiapan sumber daya pemerintah menjadi komponen penting agar tidak menjadi penghambat dalam merealisasi konsep *smart city*. Berdasarkan komponen penilaian kesiapan sumber daya pemerintah, maka analisis ini dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu kesiapan sumber daya manusia pemerintah dan kesiapan sumber daya pendukung. Untuk kesiapan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk dalam kategori sedang, sementara pada komponen sumber daya pendukung sebagian besar sudah masuk dalam kategori baik.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah PNS pada tahun 2022 sebanyak 4.178 orang yang terdiri dari 1.808 orang PNS laki-laki dan 2.370 orang PNS perempuan. Berdasarkan golongan, PNS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi Golongan III

sebanyak 61 persen diikuti Golongan IV (21%), Golongan II (17%), dan Golongan I (1%) tersaji pada Gambar 2.9.

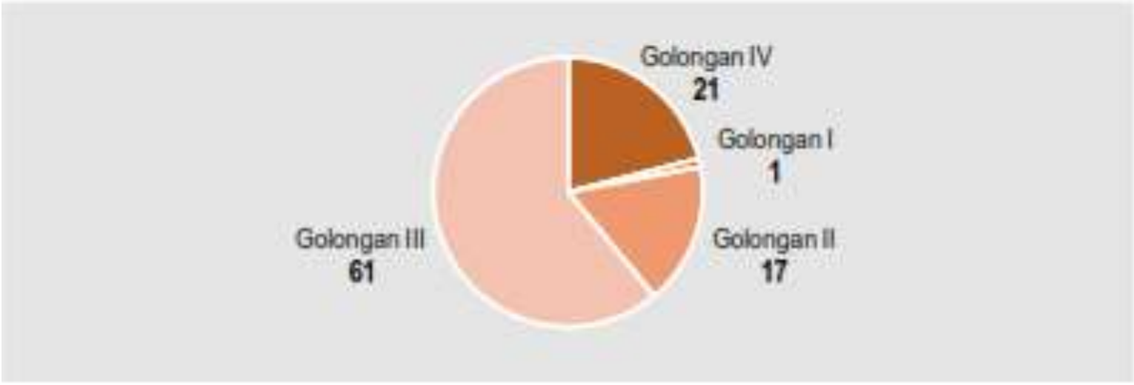

(*Sumber*: Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan Kab. Hulu Sungai Selatan)

Gambar *2.9*
Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022

Berdasarkan jenis kelamin, PNS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi pegawai perempuan sebanyak 2.370 pegawai sementara pegawai laki-laki sebesar 1.808 pegawai. Berdasarkan pendidikan, sebagian besar pegawai memiliki pendidikan terakhir S-1/sarjana sebanyak 2.229 pegawai (lihat Tabel 2.10), meskipun persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S-2 ke atas baru mencapai 5,22 persen. Namun demikian, komposisi pendidikan PNS yang demikian masih berpotensi adaptif dalam perubahan pola kerja berbasis digital sebagai salah satu bentuk dari penerapan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.10
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	23	4	27
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	50	2	52
Sekolah Menengah Atas (SMA)	360	232	592
Diploma I (D-I)/Akta I	2	8	10
Diploma II (D-II)/Akta II	45	53	98
Diploma III (D-III)/Akta III	259	569	828
Diploma IV (D-IV)/Akta IV	29	81	110
S-1/Sarjana	901	1.328	2.229
S-2/Pascasarjana	139	93	232
S-3/Doktor/Ph.D.	-	-	-
Jumlah	**1.808**	**2.370**	**4.178**

(*Sumber*: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Hulu Sungai Selatan)

Jika dianalisis lebih dalam, berdasarkan hasil asesmen *smart city* diketahui bahwa kualitas SDM TIK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dalam kategori kurang dimana jumlah SDM TIK hanya sebanyak 38 orang atau sebesar 3 persen (lihat Tabel 2.11). Sementara jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer/teknik informatika hanya sebanyak 12 orang. Di sisi lain, komunitas relawan TIK Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum ada karena baru dalam proses pembentukan.

Tabel 2.11
SDM TIK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir Terkait TIK	Jumlah (orang)
1.	D-3 Komputer Akuntansi	2
2.	D-3 Manajemen Informatika	11
3.	D-3 Manajemen Teknik Informatika	1
4.	D-3 Perekam Medik dan Informatika Kesehatan	1
5.	D-3 Teknik Informatika	8
6.	D-4 Teknik Informatika	1
7.	S-1 Komputer Informatika	1
8.	S-1 Komputer	1
9.	S-1 Sistem Informasi	3
10.	S-1 Teknik Informatika	8
11.	S-1 Teknik Informatika dan Komputer	1
	Jumlah	**38**

(*Sumber*: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Hulu Sungai Selatan)

Adapun secara umum, hasil analisis sumber daya pemerintah yang dihasilkan dari Bimtek I menunjukkan bahwa berdasarkan 20 komponen penilaian kesiapan sumber daya pemerintah maka 60 persen masuk dalam kategori baik, 30 persen masuk dalam kategori sedang, dan 10 persen masuk dalam kategori buruk (lihat Tabel 2.12)

Tabel 2.12
Analisis Kesiapan Sumber Daya Pemerintah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S-2 ke atas	5,22 %		●	
2.	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer/ teknik informatika (BKPSDM)	12 Orang		●	
3.	Jumlah relawan TIK di daerah (BKPSDM)	Belum ada			●

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
4.	Persentase jumlah unit komputer (PC dan laptop) terhadap jumlah pegawai (ASET)	117%		●	
5.	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai (BKPSDM)	33,16 %		●	
6.	Persentase pegawai berusia 40-50 tahun terhadap jumlah pegawai (BKPSDM)	30,07%		●	
7.	Persentase pegawai berusia 25-40 tahun terhadap jumlah pegawai (BKPSDM)	38,77%		●	
8.	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah (KOMINFO)	10	●		
9.	Persentase ketersediaan jaringan *broadband access* terhadap jumlah kantor pemerintahan (KOMINFO)	100%	●		
10.	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan (KOMINFO)	100%	●		
11.	Jumlah lokasi *wireless internet* (*hotspot*) di kawasan perkantoran pemerintahan (KOMINFO)	53	●		
12.	Ketersediaan *data center* (baik yang dikelola sendiri maupun *manage service*) untuk kepentingan pemerintahan (KOMINFO)	Tersedia	●		
13.	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan (BPBD)	Tersedia	●		
14.	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperabel	Tersedia	●		
15.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperabel	38,77 %	●		
16.	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperabel (BKPSDM)	Belum ada			●
17.	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel	Tersedia	●		
18.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel	Tersedia	●		
19.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel	Tersedia	●		

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
20.	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperabel (Kominfo)	Tersedia	●		
Persentase	60	30	10		

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.2.3 Analisis Kesiapan Kemampuan Anggaran

Kesiapan daerah dalam hal kemampuan anggaran dalam mendukung implementasi *smart city* dianalisis berdasarkan realisasi pendapatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah menunjukkan terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp1.746.060.016,20 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1.342.594.288,40 (lihat Tabel 2.13).

Tabel 2.13
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut
Jenis Pendapatan Tahun 2021-2022

	Jenis Pendapatan	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**247.697.934,57**	**166.427.626,95**
1.1	Pajak Daerah	13.543.126,92	17.300.630,53
1.2	Retribusi Daerah	6.608.175,98	6.818.208,64
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.091.259,05	6.713.672,62
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	221.455.372,62	135.595.115,16
Pendapatan Transfer		**1.072.252.216,28**	**1.579.155.846,81**
2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**	**831.612.713,00**	**1.339.470.577,56**
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	197.773.311,49	667.394.508,57
2.2	Dana Alokasi Umum	474.753.627,00	473.900.465,24
2.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	71.332.731,44	99.395.904,04
2.4	Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	87.753.043,07	98.779.699,71
3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**	**171.821.933,00**	**119.371.510,00**
3.1	DID	53.518.401,00	11.572.948,00
3.2	Dana Desa	118.303.532,00	107.798.562,00
4	**Pendapatan Transfer Antardaerah**	**68.817.570,00**	**120.313.759,25**
4.1	Pendapatan Bagi Hasil	68.817.570,00	120.313.759,25
5	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.644.132,55**	**476.542,44**
5.1	Pendapatan Hibah	55.024,55	476.542,44
5.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	22.589.108,00	-
	Jumlah	**1.342.594.288,40**	**1.746.060.016,20**

(*Sumber*: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Hulu Sungai Selatan)

Dengan demikian, persentase nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah adalah sebesar 10,57 persen atau masuk dalam kategori sedang. Dari FGD diketahui bahwa belum optimalnya PAD ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang perpajakan daerah yang menyebabkan selalu ada tunggakan pajak. Sementara nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu (2021) menunjukkan realisasi pendapatan dan pembiayaan *netto* melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD dan adanya efisiensi belanja sehingga komponen ini masuk dalam kategori baik. Selanjutnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dapat melakukan efisiensi belanja pegawai yaitu realisasi belanja pegawai lebih kecil dari yang dianggarkan dalam APBD yaitu sebesar 34,92 persen. Persentase ini tidak jauh melebihi alokasi belanja dari yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 30 persen sehingga masuk dalam kategori baik. Namun demikian, persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 31,40 persen sehingga masuk dalam kategori sedang.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa anggaran Belanja Infrastruktur (Belanja Modal dan Pemeliharaan) yang tidak terealisasi dari sumber dana APBD dan sumber Dana Transfer (DAK Fisik). Penyebabnya adalah karena lemahnya perencanaan yang memakan waktu lama sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan realisasi anggaran.

Selain itu, kesiapan anggaran pendukung smart city telah dilakukan sejak tahun 2017, dimana jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2017 adalah sebesar Rp 424.610.000 yang masuk dalam Program Pengembangan Informasi Komunikasi dan Media Massa. Demikian juga Anggaran untuk Belanja *Smart City* yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2018 meningkat menjadi Rp3.682.591.250 pada program yang sama. Program-program pembangunan untuk mendukung *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didesain untuk mendukung perwujudan Misi 5 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 32 program. Meskipun kinerja keuangan daerah dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan *smart city* sudah baik, namun nilai investasi yang masuk yang seharusnya dapat mendukung pembangunan daerah tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD atau sebesar Rp206.183.242.256. Beberapa alternatif sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat digunakan untuk mendukung *smart city* adalah Dana CSR dan Hibah Luar Negeri.Secara keseluruhan, hasil analisis kesiapan keuangan daerah yang dihasilkan dari Bimtek I menunjukkan bahwa berdasarkan 9 komponen penilaian menunjukkan 33,3 persen masuk dalam kategori baik, 66,7 persen masuk dalam kategori sedang, dan tidak ada komponen yang masuk dalam kategori buruk (lihat Tabel 2.14).

Tabel 2.14
Analisis Kesiapan Keuangan Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	10,57%		●	
2.	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	Rp224.163.148.418,74	●		
3.	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah	34,92%	●		
4.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	31,40%		●	
5.	Jumlah Anggaran untuk Belanja *Smart City* yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2017 (Kominfo)	Rp424.610.000,00		●	
6.	Jumlah Anggaran untuk Belanja *Smart City* yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2018	Rp3.682.591.250,00		●	
7.	Jumlah program pembangunan untuk mendukung *smart city* di daerah (Kominfo)	32	●		
8.	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	Rp206.183.242.256,00		●	
9.	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung *smart city* (Kominfo)	2		●	
		Persentase	**33,3**	**66,7**	**-**

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur

Analisis Kesiapan daerah terkait infrastruktur meliputi kesiapan fisik, digital, dan sosial daerah. Masing-masing analisis kesiapan terkait infrastruktur dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Pembangunan infrastruktur fisik sangat penting dalam pembangunan karena dapat menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek *multiplier.* Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah kurang optimal, dapat

berarti bahwa perekonomian pada daerah tersebut berjalan dengan cara yang kurang efisien. Biaya distribusi dan produksi yang tinggi akan berujung pada belum maksimalnya daya saing usaha. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan juga sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan dapat diklasifikasikan menjadi klasifikasi jalan menurut fungsi dan klasifikasi jalan menurut wewenang. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar-ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih terdapatnya ruas jalan yang mengalami kerusakan dan beberapa ruas jalan masuk pada usia perbaikan, serta belum optimalnya penyediaan akses air bersih terutama di kawasan pedesaan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik dan memadai dapat mendukung akselerasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Persentase jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kondisi baik telah mencapai 50,65 persen. Data menunjukkan bahwa jumlah ruas jalan kabupaten di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, oleh karena itu interpretasi kategori komponen ini adalah baik. Namun demikian, berdasarkan pengembangan wilayah strategis ada beberapa ruas jalan kabupaten yang kemudian menjadi jalan nasional dan jalan provinsi.

Pembangunan pada suatu wilayah mendorong meningkatnya pertumbuhan penduduk, sosial ekonomi, sehingga menimbulkan tingkat okupansi dari suatu daerah

khususnya di bidang transportasi (Aulia, 2016). Masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas untuk menjangkau tempat-tempat yang diinginkan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan alat transportasi kendaraan dan juga berjalan kaki. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para pejalan kaki telah ada fasilitas pejalan kaki sudah disediakan secara khusus sebesar 50 persen. Demikian pula, telah fasilitas pendukung untuk masyarakat pengguna jalan dimana persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik mencapai 87 persen. Secara khusus terdapat kontak layanan aduan masyarakat jika terjadi kerusakan pada lampu PJU. Selain itu rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik mencapai 70 persen. Rambu dan petunjuk jalan untuk jalan kabupaten sudah banyak tersedia, dan sisa kekurangannya masih tahap pemeliharaan.

Infrastruktur fisik penunjang ekonomi selain jalan adalah kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis dan kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat. Kondisi saat ini, kawasan bisnis perkantoran untuk kegiatan bisnis belum tersedia karena baru dalam perencanaan. Sementara, kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat seperti pasar sudah tersebar di 11 kecamatan, jadi sarana distribusi perdagangan sudah terpenuhi di seluruh kecamatan. Demikian pula sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dalam kondisi baik telah masuk dalam kategori baik. Dengan demikian, infrastruktur fisik daerah sudah siap menunjang implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena sudah dalam kondisi baik sebesar 87,5 persen.

Tabel 2.15
Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	50.65%	●		
2.	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	50 %	●		
3.	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	87 %	●		
4.	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	70 %	●		
5.	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Tidak Ada			●
6.	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	44	●		
7.	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	90	●		

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
8.	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	82.00%	●		
		Persentase	**87,5**		**12,5**

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.3.2 Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Kesiapan infrastruktur digital suatu daerah menjadi bagian yang penting dalam mengimplementasikan konsep *smart city*. Terdapat 7 komponen untuk menilai kesiapan infrastruktur digital daerah. Komitmen pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dibuktikan dengan prestasi yang dicapai pada tahun 2017 dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati peringkat pertama hasil Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) untuk seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Pemeringkatan ini diikuti 35 kabupaten/kota dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki peringkat pertama dengan nilai indeks 3.53.

Pencapaian prestasi ini merupakan hasil dari kesiapan digital daerah. Kondisi infrastruktur jaringan 4G/3G sudah mencakup di seluruh wilayah kecamatan, sedangkan wilayah pedesaan sudah mencakup 97 persen terlayani jaringan 4G dimana dari 148 desa/kelurahan, 143 desa/kelurahan telah memiliki jaringan 4G, sisanya masih menggunakan jaringan 3G. Provider yang beroperasi di wilayah Hulu Sungai Selatan di antaranya adalah Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, serta 3. Jaringan *broadband access* untuk masyarakat yang ada adalah IndiHome dan Telkomsel.

Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) yang beroperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 sejumlah 180 buah. Selanjutnya untuk akses internet untuk OPD hingga desa terpusat di Diskominfo dengan kecepatan 1 *terabyte*. Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyediakan internet gratis untuk memfasilitasi Informasi Layak Anak (ILA). Hal ini juga ditunjukkan dari data jumlah lokasi *wireless* untuk publik sudah dalam kategori baik. Terdapat 251 sekolah dari 256 sekolah telah memiliki akses internet. Dari 5 rumah sakit negeri dan swasta yang ada seluruhnya sudah memiliki sistem rujukan terpadu dengan menggunakan sistem layanan elektronik/*online*.

Selain itu dukungan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat dari persentase rumah yang terlayani listrik sebesar 86.54 persen dengan jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan tahun 2022 hanya sebanyak 2,36 jam yang dihitung dari nilai kumulatif SAIDI (System Average Interruption Duration Index).

Kesiapan infrastruktur digital Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini ditunjukkan dengan seluruh komponen penilaian 100 persen dalam kondisi baik (lihat Tabel 2.16).

Tabel 2.16
Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	97	●		
2.	Tersedianya jaringan *broadband access* untuk masyarakat	Ada	●		
3.	Jumlah lokasi *wireless* untuk publik	24	●		
4.	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	86,54%	●		
5.	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	2,36 jam	●		
6.	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	251	●		
7.	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/*online*	5	●		
		Persentase	**100**	**-**	**-**

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.3.3 Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Infrastruktur sosial seringkali luput dari perhatian karena banyak pembangunan lebih berfokus pada infrastruktur fisik. Padahal infrastruktur sosial ini bagian penting menjadi landasan bagi mencapai masyarakat yang sejahtera.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pusat kegiatan belajar masyarakat atau dikenal dengan sebutan PKBM, merupakan sebuah lembaga pendidikan yang lahir dari pemikiran tentang kesadaran pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan non-formal, oleh sebab itu berdirinya PKBM di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi terjadinya proses pembangunan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Sihombing (1999) menjelaskan bahwa PKBM merupakan salah satu alternatif yang

dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM, akan banyak potensi yang selama ini tidak tergali akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan-pendekatan budaya yang persuasif. Dari FGD yang dilakukan diperoleh data bahwa kegiatan belajar masyarakat terdapat di 14 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun belum teridentifikasi pusat kegiatan masyarakat di tingkat kelurahan/desa.

Pertumbuhan kawasan pemukiman harus diimbangi dengan ketersediaan lahan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fungsi dari RTH ini antara lain sebagai penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan, area pengembangan keanekaragaman hayati dan juga sebagai tempat rekreasi dan olahraga masyarakat. Namun, ketersediaan ruang terbuka untuk publik masih belum ada pada tingkat RT. Pada level kabupaten, RTH terus meningkat di setiap tahunnya dalam empat tahun terakhir (lihat Gambar 2.10).

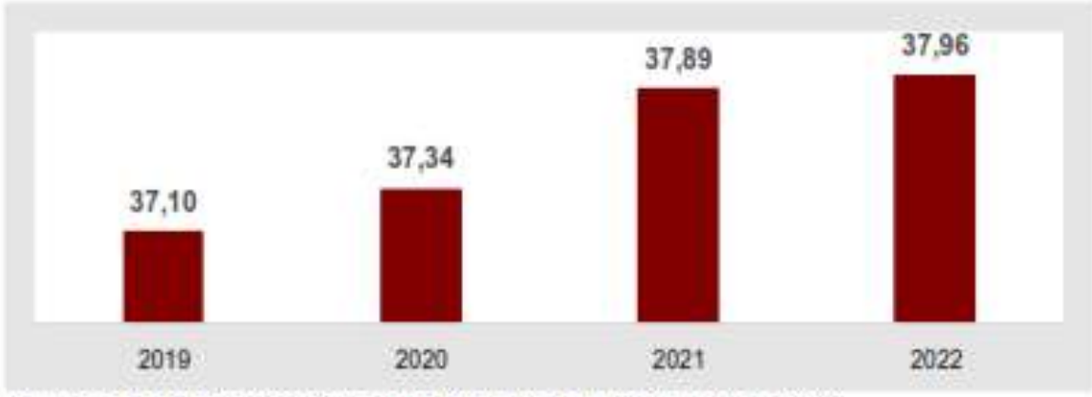

(*Sumber*: Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2022)

Gambar 2.10
Persentase Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2019-2022

Demikian halnya dengan fasilitas olahraga pada level desa masih belum tersedia. Berdasarkan data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 diketahui bahwa fasilitas gedung olahraga baru tersedia 12 buah (lihat Gambar 2.11).

(*Sumber*: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Hulu Sungai Selatan, 2023)

Gambar 2.11
Fasilitas Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sementara, ruang publik berupa aula/balai pertemuan untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan musyawarah desa maupun rapat adat atau kegiatan karang taruna desa telah tersedia di setiap desa/kelurahan. Menurut data UNESCO, minat literasi membaca masyarakat Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimana Indonesia berada pada indeks 0,1 persen yang berarti dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya satu orang yang rajin membaca. Pada tahun 2020 yang lalu IMD *World Digital Competitiveness Ranking* menetapkan Indonesia pada ranking 56 dari 63 negara terkait minat literasi. Oleh karena itu, ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah menjadi penting sebagai infrastruktur sosial. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah tersedia 1 unit gedung perpustakaan berstandar nasional di kota dan 2 unit gedung perpustakaan di kecamatan.

Terakhir, komponen infrastruktur sosial daerah yang juga penting adalah tersedianya mal pelayanan publik untuk perluasan akses layanan masyarakat. Mal pelayanan publik ini tersedia di pusat kota (Pasar Kandangan) sehingga mudah diakses dan melayani berbagai keperluan masyarakat seperti layanan kependudukan, layanan ketenagakerjaan, layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, air minum, dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan aplikasi berbagi-pakai dan integrasi data antar-OPD sejak tahun 2008 ketika aplikasi Surat Maya dan Surat Keterangan Desa diluncurkan, hingga sekarang aplikasi berbagai pakai terus dikembangkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Keberhasilan interoperabilitas (berbagi-pakai) serta integrasi data antar-SKP sangat bergantung dengan komitmen bupati dan "kerelaan" OPD. Satu Data sangat mengandalkan ketersediaan aplikasi berbagi pakai yang ada di OPD karena sebagai sumber daya utama pendukung suksesnya program Hulu Sungai Selatan Satu Data.

Tujuan utama program Hulu Sungai Selatan Satu Data adalah menyajikan kemampuan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital secara *real-time* serta memenuhi kaidah keterbukaan informasi publik. Sebagian besar aplikasi yang ada telah dapat diintegrasikan seperti data kependudukan, *e*-Musrenbang, *e-Planning*, SIMDA, *e-monev*, SIM Perijinan, SIM Kemiskinan, Surat Keterangan Desa, Pendaftaran BLC, Pencarian Rekomendasi Penelitian serta Pemberian Rekomendasi Menara Telekomunikasi. Aplikasi yang sudah berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah cukup banyak, aplikasi tersebut sebagian besar hosting di server milik Dinas Kominfo dan sisanya ada di beberapa OPD.

Secara keseluruhan, kesiapan infrastruktur sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 66,6 persen dalam kategori baik dan 16, 7 persen dalam kategori sedang, serta 16,7 persen dalam kategori buruk (lihat Tabel 2.17).

Tabel 2.17
Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	14 Unit	●		
2.	Adanya ruang terbuka publik di tingkat RW	Tidak Ada			●
3.	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	148 Unit	●		
4.	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa			●	
5.	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	3 Unit	●		
6.	Ketersediaan mal pelayanan publik untuk perluasan akses layanan masyarakat	100%	●		
		Persentase	**66,6**	**16,7**	**16,7**

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.4 Analisis Kesiapan Suprastruktur

Analisis kesiapan daerah terkait suprastuktur mencakup kesiapan daerah terkait kebijakan, kelembagaan, dan organisasi masyarakat daerah dalam menerapkan konsep *smart city*. Masing-masing analisis kesiapan terkait infrastruktur akan dijelaskan sebagai berikut.

2.4.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Landasan hukum yang digunakan sebagai pendukung implementasi konsep *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
3. Nota Kesepakatan antara Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 48 Kepala Daerah Tahun 2021 Tentang Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Kota/Kabupaten pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu kota Negara Baru;
4. SNI ISO 37120:2018 tentang Pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan – Indikator-indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup;
5. SNI ISO 317122:2019 tentang Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan – Indikator untuk Kota Cerdas;
6. Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-349/DJAI/AI.01.02/06/2022 Tentang Asemen Penetapan 50 Kabupaten/Kota Menuju Gerakan Smart City 2023;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelengaraan Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Penyelengaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (E- Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selanjutnya, analisis kesiapan daerah terkait kebijakan untuk mengimplementasikan *smart city* berdasarkan 7 komponen menunjukkan kesiapan yang rendah karena sebagian besar komponen dalam kondisi buruk (72,4%) sementara sisanya sudah dalam kondisi baik (lihat Tabel 2.18). Namun demikian, hasil ini tidak serta merta menunjukkan ketidaksiapan kebijakan dalam penerapan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai selatan karena beberapa komponen seperti *masterplan* dan visi *smart city* sedang dalam proses penyusunan.

Tabel 2.18
Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan *Smart City* Daerah	Ada	●		
2.	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana *Smart City* Daerah	Ada	●		
3.	Adanya *Masterplan Smart City* daerah	Belum Ada			●
4.	Adanya Peraturan Daerah tentang *Masterplan Smart City* Daerah	Belum Ada			●
5.	Adanya visi pembangunan *smart city* yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Belum Ada			●
6.	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program *smart city* dalam jangka panjang	Belum Ada			●
7.	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program *smart city*	Belum Ada			●
		Persentase	**28,6**		**71,4**

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.4.2 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Kesiapan kelembagaan daerah untuk implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188/36/Hum/2023 Tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188/37/Hum/2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terbentuknya Dewan *Smart City* ini berfungsi sebagai pengarah dan koordinator pelaksanaan kegiatan-kegiatan *smart city* di daerah dan Tim Pelaksana *Smart City* dibentuk sebagai penggerak kegiatan *smart city* atas arahan Dewan *Smart City*. Sementara, tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana *Smart City* dari setiap OPD juga telah ditetapkan. Namun, SOP *Smart City* daerah belum tersedia. Dengan demikian, kesiapan kelembagaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masuk dalam kategori baik sebesar 75 persen, sedangkan sisanya masuk dalam kategori buruk (lihat Tabel 2.19).

Tabel 2.19
Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya Dewan *Smart City* Daerah	Ada	●		
2.	Adanya Tim Pelaksana *Smart City* Daerah	Ada	●		
3.	Adanya SOP *Smart City* Daerah	Belum			●
4.	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana *Smart City* di setiap OPD	Ada	●		
	Persentase		**75**		**25**

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.4.3 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Kesiapan organisasi masyarakat daerah merupakan bagian dari analisis kesiapan suprastruktur daerah yang memuat informasi terkait ketersediaan lembaga pengabdian masyarakat perguruan tinggi daerah, forum swadaya masyarakat pendukung *smart city*, dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung *smart city*, adanya sekretariat definitif forum pendukung *smart city*, dan ketersediaan pakar dari perguruan tinggi lokal yang menjadi Dewan *Smart City* daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan organisasi masyarakat sebagian besar masuk kategori sedang (83,3%), dan hanya satu komponen, yaitu dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung *smart city* yang berada dalam kategori baik (16,7%) (lihat Tabel 2.20).

Tabel 2.20
Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	Ada		●	
2.	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung *smart city*	Ada		●	
3.	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung *smart city*	1		●	
4.	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung *smart city*	Ada	●		
5.	Jumlah forum pendukung *smart city* yang memiliki sekretariat definitif	1		●	
6.	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan *Smart City* Daerah	Ada		●	
	Persentase		**16,7**	**83,3**	

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.5 Analisis Kesiapan Budaya Masyarakat

Salah satu unsur kebudayaan adalah kesenian, yang memiliki daya juang dan daya tahan apabila memiliki fungsi atau peranan dalam kehidupan masyarakatnya. Sebuah bentuk seni pertunjukan akan tetap bertahan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pendukungnya selama masih dibutuhkan dan mempunyai fungsi sosial-kultural dalam kehidupan masyarakat (Haryono, 2008).

Masyarakat di Hulu Sungai Selatan mengenal dan masih melakukan acara adat yang disebut dengan *Aruh Ganal* yang merupakan acara adat masyarakat Dayak Meratus yang ada di Loksado. *Aruh Ganal* digelar sebagai doa bersama sebagai tanda ucapan syukur warga Dayak Meratus atas hasil panen dan mendoakan agar pada panen berikutnya lebih banyak hasil yang didapat serta dijauhkan dari hama perusak tanaman. *Aruh Ganal* juga sebaga cara beribadat masyarakat Dayak Loksado yang memiliki kedudukansangat sakral. Acara adat ini biasanya dilaksanakan di bulan Juni atau Juli.

Aruh Ganal juga menjadi ajang paling efektif untuk menumbuhkan rasa solidaritas, membangun kebersamaan, dan saling mengenal satu sama lainya. Hal itu tecermin dari aktivitas mereka sejak mempersiapkan peralatan hingga pelaksanaan upacara. Dengan senang hati dan penuh kesadaran masyarakat Dayak Loksado mempersiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan agar upacara dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Tanpa terjalinnya kerja sama dan rasa kegotongroyongan yang baik, maka sajian Tari Babangsai dalam upacara *Aruh Ganal* mustahil dapat diselenggarakan. Pada saat pelaksanaan upacara *Aruh Ganal*, semua lapisan masyarakat Loksado ikut membaur untuk menyaksikan jalannya upacara. Masyarakat yang datang ke balai tempat pelaksanaan upacara tidak saja bagi penganut kepercayaan *Kaharingan*, namun semua penganut agama bersatu padu untuk menikmati peristiwa budaya yang disajikan lewat upacara adat *Aruh Ganal*. Sikap saling menghormati antarumat beragama diwujudkan dengan mengikuti jalannya upacara sejak mulai hari pertama hingga tujuh hari berikutnya dengan tertib dan mematuhi segala peraturan adat setempat dalam suasana sukacita.

Di dalam *Aruh Ganal* dilakukan Tari *Babangsai* sebagai sarana ritual, tari ini juga memiliki nilai moral yang sangat tinggi yaitu kekeluargaan, solidaritas, dan memupuk rasa kesatuan maupun persatuan. Hal ini didorong karena masyarakat Dayak Loksado mengungkapkan syukur dan bersuka ria lewat ungkapan tarian, dan tetap berpegang teguh pada kepercayaan *Kaharingan*. Oleh karena itu, Tari *Babangsai* bukan hanya

produk profan yang menyatakan kekuatannya dalam dimensi hiburan belaka, tetapi lebih kepada penyatuan manusia dengan Tuhan dan alam sekitarnya yang memberi hidup dan kehidupan. Warisan tradisi suku Dayak Meratus ini sebagai tanda adanya suatu ikatan emosional terhadap alam yang telah memberi kesuburan tanah leluhur mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk *bahuma tugal* (berladang). *Aruh Adat* Dayak Meratus diringi dengan berbagai tarian seperti *Batindik Balian*, *Kanjar* dan *Bangsai* yang dilengkapi dengan properti seperti *gelang hiang*, *serunai*, *kapur*, *manyan*, *kembang lelehi*, dan bermacam-macam sesaji untuk persembahan.

Keunikan budaya khas Hulu Sungai Selatan yang lain adalah Balanting Paring. Balanting Paring adalah arung jeram menggunakan bambu atau juga dikenal dengan bamboo rafting. Budaya peninggalan nenek moyang di Hulu Sungai Selatan ini masih dijaga dan dapat dinikmati oleh pendatang yang berkunjung ke Loksado.

Kehidupan budaya yang terus dikelola oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat menjadi kekuatan masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang mengakar dan lestari ini ini menjadi kekuatan dan kesadaran yang dapat mendorong masyarakat untuk bisa memaknai keragaman budaya sebagai hasil dari berbagai ilmu pengetahuan yang beragam itu. Kekuatan inilah yang kemudian menjadi kesiapan masyarakat dalam mengimplementasikan smart city di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III
ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Pada bab ini akan dilakukan analisis strategi sehingga dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah jitu untuk mewujudkan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Analisis strategi ini dimulai dengan melakukan analisis kesenjangan (*gap*), kemudian dilakukan analisis SWOT dan Analisis TOWS pada setiap dimensi *smart city*, yaitu *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society*, dan *Smart Environment*.

3.1 Analisis Kesenjangan (*Gap*)

Pada bagian ini dilakukan analisis kesenjangan (*gap*) pada seluruh dimensi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan analisis ini akan diketahui kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang diinginkan atau keadaan yang diinginkan di masa depan. Analisis kesenjangan dari seluruh dimensi *smart city* dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Analisis Kesenjangan Berdasarkan Dimensi *Smart City*
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
Smart Governance		
Belum semua sistem pelayanan terintegrasi	Akselerasi sistem pelayanan yang terintegrasi	Meningkatkan sistem pelayanan yang terintegrasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas data
Belum adanya basis data terpadu dan terintegrasi antarsektor pemerintahan	Basis data antarsektor pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang valid dan memiliki integritas yang tinggi	Membangun *database* terintegrasi dengan memperbaiki mekanisme sistem pengelolaan *database* antarsektor pemerintahan

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
Partisipasi publik melalui *platform* digital belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan sistem pelayanan publik berbasis digital	Masih perlunya sosialisasi dan komunikasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membangun *smart governance*
Komitmen pimpinan daerah untuk melaksanakan *smart governance* yang tinggi	Terwujudnya *smart governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan *smart governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan *smart governance*	Penyelenggaraan tata kelola dan kinerja pemerintahan yang baik	Perlunya integrasi regulasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi kepastian regulasi yang memadai dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi cerdas untuk pelaksanaan *smart governance*
Kesenjangan infrastruktur dan konektivitas digital yang menghambat adopsi teknologi cerdas secara menyeluruh dan pemanfaatan data yang efektif	Infrastruktur dan konektivitas digital yang merata guna adopsi teknologi cerdas secara menyeluruh dan pemanfaatan data yang efektif	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas digital yang menyeluruh
Tingginya kebutuhan akan ketersediaan data yang *real-time* dari berbagai sumber untuk memudahkan pengambilan kebijakan dan operasional perangkat daerah demi terciptanya pemerintah yang efektif dan efisien	Kualitas pelayanan publik yang prima dengan tersedianya informasi pengambilan keputusan dan operasional yang berkualitas dan cepat	Peningkatan penggunaan *Internet of Things* (IoT) dan jaringan sensor akan memungkinkan pengumpulan data secara *real-time* dari berbagai sumber
Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki	Kualitas SDM yang dapat mendukung *smart governance*	Peningkatan kualitas SDM yang dapat meningkatkan penggunaan sistem informasi

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
kapabilitas pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola teknologi cerdas untuk implementasi *smart governance*		yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan analitik data dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan
	Smart Branding	
Produk UMKM secara *packaging* kurang menarik dan pemasaran secara konvensional	Produk UMKM masuk *e-commerce* nasional maupun internasional	Meningkatkan kreativitas pelaku usaha dan menumbuhkan semangat kompetitif
Event pariwisata belum teragendakan secara baik dan masih tergantung pada musim/iklim	*Event* pariwisata diekspos dari awal tahun dan dipromosikan secara terpadu.	Optimalisasi *branding* pada potensi budaya yang sudah ada dengan pengembangan wisata digital
Potensi wisata alam yang begitu unik dan menarik dengan ditetapkannya Loksado sebagai Kawasan Strategis Parwisata Nasional dan masuk ke dalam *Geopark* Meratus dan wisata religi	Terciptanya akses satu pintu bagi wisatawan yang ingin mengunjungi daya tarik wisata	Pemberdayaan sumber daya manusia pariwisata dan TIK
Penentuan kawasan belum teroganisir dengan baik (RTRW - RDTR)	Mewujudkan keterpaduan pembangunan di dalam kabupaten	RTRW - RDTR masih dalam proses penyusunan, akibatnya proses persetujuan tata rungan memerlukan waktu yang lama
Harga jual produk pada saat panen raya terutama komoditas hortikultura seperti lombok, tomat dan lain-lain mengalami penurunan harga	Sistem informasi pemasaran pertanian yang terintegrasi	Pengembangan sistem informasi pasar yang efisien agar petani dapat memperoleh informasi tentang harga pasar yang sedang berlaku dan permintaan pasar, sehingga dapat menentukan waktu yang tepat untuk menjual produk mereka dan mendapatkan harga yang lebih tinggi

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
	Smart Economy	
Penjualan/pemasaran produksi pertanian masih konvensional dan diatur pedagang perantara sehingga harga murah	Digitalisasi pemasaran pertanian yang terintegrasi, lincah, dan kolaboratif	Pengembangan UKM dan petani milenial dalam sistem digitalisasi pemasaran
Rendahnya nilai tambah produk pertanian karena belum dijadikan sebagai produk olahan	Produk olahan dengan kualitas ekspor	Meningkatkan pemberdayaan terhadap potensi sumber daya alam terutama sektor pertanian pada UKM dan industri kecil menengah
Pertanian masih konvensional dan banyak tergantung pada musim/iklim	Pertanian menggunakan teknologi pertanian modern untuk menjawab tantangan iklim dan kemajuan (*smart farming*)	Penerapan teknologi dan inovasi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif pertanian pada lingkungan
Belum seluruhnya UMKM mendapatkan pendampingan dan bantuan fasilitas UMKM	UMKM yang cakap dan berdaya saing	Terlaksananya pembinaan secara merata terhadap semua UMKM serta fasilitas (sertifikasi halal, SNI, dan PIRT) yang diperlukan oleh UMKM dapat terpenuhi secara maksimal
Transaksi masih didominasi pembayaran tunai (konvensional)	Terciptanya budaya transaksi pembayaran non-tunai secara merata di seluruh prasarana publik	Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pemanfaatan media transaksi non-tunai
Masih adanya penduduk miskin sebesar 4,54 persen tahun 2022	Terbangunnya ekosistem usaha masyarakat	Membangun hubungan kolaboratif dengan multipihak untuk membina UMKM dan kemudahan dalam modal usaha
	Smart Living	
Kurang tersedianya sarana prasarana publik yang ramah untuk penyandang disabilitas	Kabupaten yang ramah disabilitas	Meningkatkan aksesibilitas kaum disabilitas di area publik dengan ketersediaaan sarana prasarana ramah difabel
Sarana prasarana pariwisata yang belum menunjang untuk	Sarana dan Prasarana rekreasi yang keluarga yang mendukung	Peningkatan manajemen pariwisata yang berorientasi pada keluarga

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung setiap akhir pekan		
Kualitas kondisi jalan yang yang menurun akibat kondisi alam dan angkutan alat berat melintasi jalan	Ekosistem transportasi yang berkualitas dan aman	Pemeliharaan jalan yang rusak oleh alam dan pengendalian angkutan berat yang melintasi jalan
Jumlah sarana prasarana rambu petunjuk jalan masih terbatas		Peningkatan survei serta evaluasi dan penyedia rambu petunjuk jalan
Tenaga ahli yang menguasai teknologi kesehatan masih terbatas	Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang baik	Meningkatkan kapasitas tenaga ahli bidang kesehatan yang menguasai teknologi secara merata
Kesenjangan SDM berkualitas pada fasilitas kesehatan		Pemerataan pelatihan teknis kesehatan untuk semua tenaga kesehatan
Tidak semua puskesmas menggunakan aplikasi sistem informasi puskesmas	Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	Meningkatkan aplikasi sistem informasi puskesmas yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah
Integrasi informasi kesehatan baru terintegrasi cukup rendah di bidang subspesialis		Peningkatan kualitas pengumpulan informasi kesehatan yang terkini dan terintegrasi
Smart Society		
Kekurangan tenaga pendidik di daerah terpencil seperti di Kecamatan Loksado dan Kecamatan Daha	Pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Terpenuhinya tenaga pendidik di daerah Loksado dan Daha dengan adanya pengadaan formasi PPPK
Sarana TIK untuk pendidikan saat ini masih kurang	Terbentuknya ekosistem digitalisasi dalam bidang pendidikan	Pemetaan sekolah yang belum mempunyai sumber daya listrik, internet dan sarana TIK dari segi geografis.
Banyak siswa kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan	Tersedianya SDM daerah yang unggul	Alokasi dana yang tersedia sangat terbatas karena kewenangan SMA/SMK ada

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
sekolah ke jenjang perguruan tinggi karena keterbatasan biaya		pada pemerintah provinsi dan santri di Kementerian Agama
		Terfasilitasinya siswa dan santri kurang mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa maupun sumber bantuan lainnya
		Pemetaan siswa SMA/SMK dan santri BNBA
Rendahnya minat baca masyarakat di perpustakaan daerah	Tumbuhnya budaya literasi membaca masyarakat	Meningkatkan sosialisasi budaya baca ke masyarakat dan sekolah
		Meningkatkan taman baca digital untuk masyarakat dan sekolah
Pencari kerja dari lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi belum memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pemberi kerja	Tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing	Pengadaan pelatihan dan pemagangan kerja berdasar klaster kompetensi berbasis NIK penduduk dan lokasi (geospasial) yang terhubung dengan aplikasi SIAPKERJA
		Membangun BLK
		Memastikan suplai tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar dengan berkolaborasi dengan lembaga survei resmi untuk survei pasar kebutuhan tenaga kerja
Pencari kerja dari penyandang disabilitas belum memiliki tingkat pendidikan yang baik	Optimalisasi layanan inklusi bagi tenaga kerja penyadang disabilitas	Peningkatan pendidikan dan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas dengan pendidikan non-formal dan pelatihan kompetensi
		Pemetaan tenaga kerja penyandang disabilitas berbasis NIK dan lokasi
		Optimalisasi aplikasi SIAP KERJA dan aplikasi pemetaan BNBA dan lokasi untuk tenaga kerja penyandang disabilitas

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
Data BNBA penduduk miskin sudah berbasis NIK namun bantuan sosial masih belum didukung pemetaan berbasis lokasi (geospasial)	Menciptakan keamanan sosial berbasis lokasi (geospasial) yang terintegrasi dan mudah digunakan	Peningkatan Data BNBA penduduk miskin sudah berbasis data *geotagging*
		Mengoptimalkan peran sumber daya manusia (sarjana pendamping) yang sudah ada untuk digitalisasi data bansos berbasis lokasi
Smart Environment		
Kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kondisi baik	Kualitas air menjadi kelas I	Menjaga dan meningkatkan kualitas air mengingat ada potensi penururan kualitas akibat adanya tambang pasir ilegal di aliran sungai yang perizinannya adalah kewenangan pusat sehingga sulit untuk diintervensi
Kualitas udara saat ini dalam kondisi sangat baik	Kualitas udara yang memadai	Mengantisipasi perubahan iklim yang dapat mengakibatkan terjadinya karhutla sehingga kualitas udara menurun karena kabut asap
Nilai kualitas tutupan lahan saat ini masih dalam kategori kurang hal ini disebabkan oleh 40% luasan lahan adalah rawa yang tidak bisa ditanami dengan pepohonan sehingga nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak bisa ditingkatkan	Tumbuhnya vegetasi di lahan rawa	Membangun gerakan penanaman pohon produktif yang mampu hidup di lahan rawa yang dapat menciptakan vegetasi sehingga nilai tutupan lahan dapat meningkat dan bernilai ekonomis
Pengolahan sampah plastik baru sampai pencacahan belum ada aplikasi pengelolaan sampah B3	Manajemen pengolahan sampah sampai menjadi biji plastik	Memanfaatkan teknologi pengolahan sampah plastik yang mendukung sampai menjadi bijih plastik
Pengelolaan sampah sudah mencapai pedesaan walaupun	Bank sampah digital berbasis masyarakat yang terintegrasi hingga level desa	Penyediaan aplikasi bank sampah yang hingga di level desa

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
belum menyeluruh 100 persen		
Telah menggunakan energi ramah lingkungan (gas metan) namun baru terbatas untuk penerangan di TPA	Penggunaan energi ramah lingkungan yang menyeluruh	Dukungan untuk mengembangkan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan
Edukasi lingkungan dan kebencanaan belum merata	Terbangunnya sistem edukasi lingkungan dan kebencanaan berbasis digital	Peningkatan aplikasi kebencanaan yang selama ini masih menggunakan aplikasi milik BNPB (aplikasi INARISK) untuk edukasi lingkungan dan bencana

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3.2 Analisis SWOT

Merujuk pada Pearce dan Robinson, SWOT adalah singkatan dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dari sisi lingkungan internal serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dari sisi lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan. Konsep ini kemudian diterapkan dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal daerah yang akan mengimplementasikan *smart city*. Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal daerah pada masing-masing dimensi *smart city* untuk melahirkan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil dalam implementasi setiap dimensi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Analisis SWOT dilakukan pada setiap dimensi *smart city* sebagai berikut.

1. Analisis SWOT Smart Governance

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintahyang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *good and clean governance*. Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain). Secara internal, nilai inovasi telah ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat reformasi birokrasi merupakan prasyarat utama tata kelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Proses bisnis pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktivitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertangungjawabkan hasil-hasil (*outcome*) pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas pembangunannya, perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Salah satu contoh inovasi yang berhasil dikembangkan adalah inovasi pemanfaatan informasi geospasial dalam tata kelola pemerintahannya, sehingga berdampak pada produktivitas maupun efektivitas kinerja lembaga.

Identifikasi faktor internal dan eksternal sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan agar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Masing-masing identifikasi faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut.

Internal	
Kekuatan (S)	**Kelemahan (W)**
(S1) Adanya komitmen kuat dari kepala daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	(W1) SDM yang mempunyai kompetensi IT belum memadai
(S2) Infrastruktur TIK (*data center*, jaringan intra, dan SPLP) yang sudah tersedia	(W2) Konektivitas teknologi yang belum merata
(S3) Adanya peraturan daerah yang mendukung *smart governance*	(W3) Kurangnya literasi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
	(W4) Layanan aplikasi sistem pemerintahan belum terintegrasi sepenuhnya
	(W5) Pemeliharaan keamanan sistem informasi belum optimal
Peluang (O)	**Ancaman (T)**
(O1) Ada kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan infrastruktur	(T1) Gerakan Menuju *Smart City* dari Kementerian Kominfo
(O2) Ada bentuk kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi	(T2) Ancaman keamanan siber
(O3) Gerakan Menuju *Smart City* dari Kementerian Kominfo	(T3) Masuknya berbagai jenis teknologi eksternal
	(T4) Regulasi/kebijakan pusat yang bersifat dinamis
Eksternal	

2. Analisis SWOT Smart Branding

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas dalam konsep pemberdayaan masyarakat dapat mendukung pengembangan pariwisata yang perlu dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, pemerintahan desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) secara bersinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama ini telah diarahkan melalui pengembangan pariwisata terpadu berbasis kawasan strategis cepat tumbuh dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Sinergitas dan pengintegrasian antar/lintas-urusan dalam pemerintahan akan dimaksimalkan, khususnya dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkonsep 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi) pada wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata. Identifikasi faktor internal dan eksternal perlu dilakukan untuk dapat dianalisis lebih lanjut untuk efektivitas implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut:

Internal	
Kekuatan (S)	**Kelemahan (W)**
(S1) Potensi pariwisata alam dan budaya (Loksado, wisaya budaya lokal, wisata sejarah, wisata religi) dan UMKM unggulan (Tanuhi, kerajinan cor logam, kuliner khas)	(W1) Minim pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi
(S2) Adanya TIC (*Tourism Information Center*)	(W2) Pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata belum optimal
(S3) Hasil pertanian Hulu Sungai Selatan sangat unggul dan penyumbang PDRB terbesar	(W3) Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif belum maksimal
(S4) Adanya BUMDes digital dan SI PANDU WISATA	(W4) Pemasaran digital (melalui *website*, *mobile*, teknologi *virtual reality*/VR) belum maksimal
(S5) Adanya kelompok sadar wisata (pokdarwis) Hulu Sungai Selatan	(W5) Tampilan infrastruktur penanda ciri khas kota masih kurang
(S6) Memiliki aplikasi SI OPEN yang memasarkan produk UMKM daerah	(W6) Penebangan pohon yang kurang terkontrol di kawasan Loksado bisa menjadi pemicu banjir dan tanah longsor
(S7) Perda Kabupaten Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah	

Peluang (O)		Ancaman (T)	
(O1)	Destinasi wisata Loksado sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)	(T1)	Masuknya produk pangan dan UMKM dari luar daerah
(O2)	Adanya teknologi informasi yang mudah dijangkau	(T2)	Berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (BIRBI) tahun 2015-2021 HSS ditetapkan sebagai kawasan dengan risiko bencana tinggi
(O3)	Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu transit gerbang IKN	(T3)	Perkembangan daerah lain yang sama-sama terkoneksi dengan gerbang IKN
(O4)	Berkembangnya sistem IoT (*Internet of Things*) untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berwisata dan berbelanja		
(O5)	Adanya teknologi geospasial dalam pemetaan titik rawan serta areal prioritas di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata		
Eksternal			

3. Analisis SWOT Smart Economy

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, masih berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, konsistensi peningkatan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum mampu menjawab tingginya permintaan yang ada. Di samping itu, sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal. Terdapat kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada inflasi Banjarmasin. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. Mengenali faktor internal dan eksternal menjadi esensial dalam memahami situasi aktual di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semakin banyak dan jelas hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dikelompokkan berdasarkan

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, akan semakin mendukung tahap perumusan strategi pembangunan pada dimensi *Smart Economy*. Setiap identifikasi faktor internal dan eksternal melibatkan hal-hal berikut:

Internal	
Kekuatan (S)	**Kelemahan (W)**
(S1) Pertanian unggulan sebagai sentra pangan	(W1) Rendahnya daya saing produk UMKM dalam hal pemanfaatan teknologi dan informasi
(S2) Mempunyai potensi wisata dan UMKM berbagai sektor unggulan (batik Sasirangan, cor logam)	(W2) Belum tersedianya pengembangan model GIS dan IoT untuk industri UMKM
(S3) Mempunyai paguyuban petani kayu manis	(W3) Rendahnya kemampuan literasi keuangan pelaku industri
(S4) Salah satu penghasil komoditi kayu manis terbaik di Indonesia	(W4) Tenaga kerja (SDM) yang kompeten terbatas
(S5) Mempunyai MPP digital dan *e-catalog* lokal untuk belanja pemerintah	(W5) Partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja masih belum optimal karena minimnya penyediaan informasi pasar kerja
	(W6) Masih minimnya diversifikasi usaha mikro
	(W7) Lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan usaha mikro
	(W8) Keterbatasan modal pelaku usaha

Peluang (O)		Ancaman (T)	
(O1)	Perkembangan Era Industri 4.0	(T1)	Belum mendapatkan indikasi geografis untuk kayu manis dari pusat
(O2)	Adanya IKN (Ibu Kota Negara) membuat Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu kota transit gerbang IKN	(T2)	Cuaca ekstrem yang yang memicu serangan organisme pengganggu tanaman
(O3)	Rehabilitasi lahan yang mengharuskan menanam tanaman endemik (seperti kayu manis, karet kemiri, beras gunung)	(T3)	Terjadinya krisis keuangan global akibat pandemi COVID-19
(O4)	Permintaan pasar terhadap produk pangan tinggi		
(O5)	Daya tarik produk UMKM yang memiliki keunikan sedang menjadi tren		
(O6)	Dukungan pemerintah terhadap industri kreatif sangat besar		
Eksternal			

4. Analisis SWOT Smart Living

Konsep *smart living* berkaitan dengan penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan integrasi teknologi informasi, komunikasi, dan otomasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berada di daerah pedesaan. Meskipun demikian, jika penduduk dikelompokkan berdasarkan sektor lapangan usaha, maka sebagian besar yang dominan adalah jasa pada sektor perdagangan besar/eceran, rumah makan/restoran dan hotel, sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi dan jasa perusahaan, serta sektor jasa kemasyarakatan dan lainnya. Dengan mengintegrasikan pemahaman atas profil sektor lapangan usaha, pemerintah dapat mengarahkan implementasi *smart living* dengan strategi yang terencana dan terpadu. Keberlanjutan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penerapan teknologi cerdas dapat membentuk lingkungan yang mendukung konsep *smart living* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Implementasi *smart living* bertujuan untuk memberikan solusi cerdas dalam mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi terperinci faktor

internal dan eksternal yang dikelompokkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, agar semakin memperkuat langkah-langkah perumusan strategi pembangunan pada dimensi *smart* living. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut.

Internal	
Kekuatan (S)	**Kelemahan (W)**
(S1) Adanya kerja sama UHC BPJS	(W1) Kualitas tenaga kerja kesehatan masih rendah
(S2) Penambahan jumlah tenaga kesehatan	(W2) Akses internet masih belum merata
(S3) Fokus pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan dan penunjangnya	(W3) Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan rendah
(S4) Tersedia ruang publik yang memadai dengan konsep RTH (Ruang Terbuka Hijau)	(W4) Layanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) urusan kesehatan belum mencapai target
(S5) Tersedia layanan transportasi pelajar gratis	(W5) Alat transportasi publik kurang memadai dan terbatas
(S6) Tersedia sarana ruang publik untuk aktivitas masyarakat	(W6) Adanya budaya mendorong pernikahan dini pada anak usia Sekolah
(S7) Tersedia sistem informasi untuk tenaga kesehatan	(W7) Akses terhadap air bersih khususnya air minum masih belum merata khususnya di pedesaan
(S8) Mobilitas penduduk meningkat	(W8) Infrastruktur jalan banyak yang dalam kondisi rusak
	(W9) Kurang pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana

Peluang (O)	**Ancaman (T)**
(O1) Kemajuan Teknologi untuk semua bidang layanan	(T1) Kondisi alam yang berubah-ubah dan cuaca ekstrim
(O2) Bantuan CSR perusahaan untuk angkutan pelajar	(T2) Izin trayek angkutan umum sulit didapatkan karena dari provinsi
(O3) Bantuan CSR perusahaan untuk layanan kesehatan	(T3) Angkutan berat (truk pengangkut material) melebihi kapasitas muatan melintasi jalan
(O4) Hulu Sungai Selatan sebagai kawasan strategis gerbang transit IKN	(T4) Masuknya tenaga kesehatan dari luar
(O5) Termasuk daerah target pembangunan dan penataan tata ruang wilayah di Indonesia	
Eksternal	

5. Analisis SWOT Smart Society

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 km^2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 228.006 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 126 jiwa/km^2 yang artinya setiap 1 km^2 ditempati sekitar 126 jiwa. Dengan demikian, tingkat kepadatan penduduk memiliki *range* yang besar yaitu 25 - 458. Kondisi ini mendorong untuk dapat memfasilitasi pencapaian kualitas hidup masyarakat dengan implementasi *smart society,* sehingga dapat mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien. Dalam upaya menciptakan lingkungan dengan kualitas interaksi sosial yang baik dan menjadikan masyarakat lebih terhubung dan efisien maka dianalisis rencana implementasi *smart society* yang terarah, efektif, dan responsif terhadap dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan konsep ini. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal dimensi ini adalah sebagai berikut:

Internal	
Kekuatan (S)	**Kelemahan (W)**
(S1) Potensi SDM kesejahteraan sosial yaitu sarjana pendamping desa sejahtera, PKSK dan pendamping PKH dalam mengawal program dan pendampingan bansos di lapangan	(W1) Alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan masih belum sesuai kebutuhan
(S2) Program ramah lansia	(W2) Kualitas tenaga kerja masih rendah, kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar
(S3) Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagai wadah layanan inklusif ketenagakerjaan untuk pemerataan hak mendapat pekerjaan	(W3) Belum tersedia digitalisasi sebaran data penduduk miskin dan penerima bansos
(S4) Adanya program perlindungan anak dan perempuan	(W4) Infrastruktur yang kurang memadai: jaringan internet yang belum memadai dapat menghambat implementasi *smart society*
(S5) Karakter masyarakat yang berbudaya	(W5) Aplikasi satu data NIK belum berbasis sebaran lokasi (geospasial sebaran kemiskinan, kekurangan infografis)
(S6) Partisipasi pendidikan non-formal tinggi	(W6) Belum ada regulasi yang mendukung program ramah lansia
(S7) Adanya program pengembangan daya saing kepemudaan (bidang olahraga, seni, kewirausahaan)	(W7) Sifat masyarakat Hulu Sungai Selatan yang homogen
(S8) Sarana dan prasarana pendidikan sudah layak dan memadai	(W8) Kekurangan SDM tenaga pendidikan
(S9) Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah untuk menuju *smart society/smart city*	(W9) Kesadaran atas pendidikan masih rendah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi

Peluang (O)		Ancaman (T)	
(O1)	Program pusat menuju *smart society/smart city*	(T1)	Pengaruh ekonomi global Revolusi Industri 4.0
(O2)	Partisipasi dari sektor swasta untuk mendukung *smart society* (CSR dari perusahaan)	(T2)	Perkembangan inovasi digital yang cepat
(O3)	Dukungan ulama terhadap dunia pendidikan	(T3)	Ketimpangan akses dan kesenjangan digital
(O4)	Dukungan pemerintah pusat terhadap program-program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dan kaum muda		
(O5)	Pengakuan pusat (predikat Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya pada tahun 2021)		
(O6)	Kemajuan teknologi untuk pelayanan di semua lini		
(O7)	Keterlibatan aparat Polri dan TNI di level desa		
Eksternal			

6. Analisis SWOT Smart Environment

Dalam konteks implementasi *smart environment* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu untuk mengintegrasikan teknologi dan praktik berkelanjutan, implementasi *smart environment* dapat memberikan solusi yang holistik untuk tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga membangun ketahanan terhadap risiko bencana dan mendukung transisi menuju energi terbarukan. Melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, implementasi *smart environment* membuka jalan menuju pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kombinasi analisis internal dan eksternal perlu dilakukan agar dapat merumuskan strategi yang tepat, mengidentifikasi prioritas, dan memastikan bahwa implementasi *smart environment* sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Analisis ini juga membantu dalam meminimalkan risiko, memaksimalkan peluang, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam upaya menuju lingkungan yang lebih pintar dan berkelanjutan. Identifikasi faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut.

Internal	
Kekuatan (S)	**Kelemahan (W)**
(S1) Adanya komitmen pimpinan daerah dalam pengendalian lingkungan	(W1) Adanya sumber daya alam yang pemanfaatannya masih secara tradisional dan tidak ramah lingkungan
(S2) Daerah sudah memiliki TPA yang menggunakan metode *Sanitary Landfill*	(W2) Ketidaktaatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan
(S3) Tersedianya lahan konservasi keanekaragaman hayati	(W3) Keterbatasan kewenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah
(S4) Tersedianya SDM pegelolaan dan pengawasan terhadap lingkungan	(W4) Masih perlu peningakatan kualitas dan kuantitas SDM bidang lingkungan
(S5) Banyaknya sungai dan anak sungai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan wisata alam	(W5) Belum ada dokumen kajian kebencanaan daerah
(S6) Adanya organisasi masyarakat peduli dan pemerhati lingkungan	(W6) Ketersediaan air tanah dan air baku berkelanjutan masih terbatas
(S7) Pengolahan limbah dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat	(W7) Belum tersedianya rencana penanggulangan bencana daerah
(S8) Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki produktivitas yang tinggi di bidang pertanian khususnya hortikultura	(W8) Masih minimnya kapasitas operator Pusdalop (Pusat Pengendalian Operasi), petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) dan petugas pembantuan
	(W9) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong daerah yang memiliki risiko bencana tinggi (banjir, tanah longor, kebakaran hutan dan lahan)

Peluang (O)	**Ancaman (T)**
(O1) Potensi energi terbarukan yang menjanjikan (pemanfaatan gas metan menjadi sumber daya listrik)	(T1) Banyaknya pengusaha luar yang masuk untuk mengeksploitasi SDA
(O2) Pemanfaatan potensi wisata khususnya destinasi wisata alam	(T2) Adanya keterbatasan kewenangan daerah terkait larangan kegiatan (sebagian perizinan menjadi kewenangan pusat)
(O3) Pertumbuhan ekonomi global yang bersifat inklusif	(T3) Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan pada kegiatan yang bukan kewenangan daerah
(O4) Kampanye global yang mengangkat isu global warming	(T4) Adanya perubahan iklim global yang tidak bisa dihindari
(O5) Banyaknya komunitas pecinta alam dan peduli lingkungan	
(O6) Digitalisasi pelayanan publik di semua OPD	
(O7) Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
Eksternal	

3.3 Analisis TOWS

Analisa TOWS digunakan untuk memudahkan dalam perumusan strategi, dikarenakan analisa TOWS merupakan salah satu *tool* yang paling populer untuk merencanakan sebuah strategi, dimana *tool* ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan) dari sebuah perusahaan. Dari identifikasi faktor- faktor tersebut diharapkan dapat menghasilkan strategi yang efektif dengan cara mengambil keuntungan dari kekuatan, menghilangkan kelemahan, mengekspoitasi peluang dan melawan ancaman (Wang *et al*., 2014).

Matriks TOWS dapat digunakan untuk merumuskan strategi masa depan daerah dalam mengimplementasikan *smart city*. Matriks TOWS dapat menghasilkan empat kemungkinan strategi yang dihasilkan sebagai berikut (David 2005):

a. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang.
b. Strategi ST (Strengths-Threats) merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari dan mengatasi ancaman.
c. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) sebagai strategi yang menggunakan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan.
d. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) adalah strategi untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Analisis TOWS yang dilakukan pada setiap dimensi *smart* city adalah sebagai berikut.

1. Analisis TOWS Smart Governance

Dimensi *Smart Governance* didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar. Dimensi *Smart Governance* diwujudkan dengan tercapainya sasaran berupa kualitas layanan publik, birokrasi yang efektif dan efisien, serta perancangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masing-masing sasaran pada dimensi *Smart Governance* dapat diwujudkan melalui strategi/kebijakan yang harus diambil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kekuatan utamanya terletak pada komitmen pelaksanaan sistem pemerintahan, terutama mendorong lahirnya inovasi. Namun demikian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih memiliki banyak tantangan/ancaman pembangunan. Kondisi ini membutuhkan strategi yang mampu merespon kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat, yang berorientasi

pada kinerja hasil pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Strategi-strategi hasil analisis TOWS adalah sebagai berikut.

Internal			
Kekuatan (S) X Peluang (O)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Peluang (O)**	**Strategi**
(S1.S3.O4)	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	(W2.O1)	Mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemenuhan infrastruktur digital
		(W1.W3.O2.O3)	Meningkatkan kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi untuk peningkatan SDM dan literasi digital
(S2.O2)	Menciptakan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam pengembangan inovasi pelayanan dengan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK	(W4.O3.O4)	Menciptakan pelayanan digital yang mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek melalui sistem satu pintu
Kekuatan (S) X Ancaman (T)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Ancaman (T)**	**Strategi**
(S1.T2)	Mendorong perumusan peraturan daerah terkait *cyber crime* melalui dukungan kepala daerah	(W1.T1.T3)	Meningkatkan kualitas SDM pemerintah dengan kompetensi IT dapat mengimbangi perkembangan teknologi
(S2.T4)	Mengoptimalkan pelayanan publik melalui digitalisasi pemerintahan yang didukung oleh kebijakan saat ini	(W5.T4)	Mendorong perumusan SOP keamanan sistem informasi dan penerapan standar keamanan informasi berdasarkan sertifikat ISO/IEC 27001
Eksternal			

Dari matriks TOWS untuk dimensi *Smart Governance* diperoleh 9 (sembilan) strategi, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengelompokkan strategi berdasarkan

subdimensi-subdimensi *smart governance*. Pertama, strategi pada subdimensi Layanan Publik adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak. Kedua, strategi pada subdimensi Birokrasi adalah meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien. Terakhir, strategi pada subdimensi Perancangan Kebijakan adalah menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi (lihat Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Subdimensi dan Strategi Smart Governance

Subdimensi			Strategi
Layanan Publik	(S2.O2)	Menciptakan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam pengembangan inovasi pelayanan dengan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak
	(W2.O1)	Mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemenuhan infrastruktur digital	
	(W1.W3. O2.O3)	Meningkatkan kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi untuk peningkatan SDM dan literasi digital	
	(W1.T1.T3)	Meningkatkan kualitas SDM pemerintah dengan kompetensi IT dapat mengimbangi perkembangan teknologi	

Subdimensi			Strategi
Birokrasi	(S1.S3.O4)	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien
Perancangan Kebijakan	(W4.O3.O4)	Menciptakan kebijakan pelayanan digital yang mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek melalui sistem satu pintu	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi
	(S1.T2)	Mendorong perumusan peraturan daerah terkait *cyber crime* melalui dukungan kepala daerah	
	(S2.T4)	Mengoptimalkan pelayanan publik melalui digitalisasi pemerintahan yang didukung oleh kebijakan saat ini	
	(W5.T4)	Mendorong perumusan SOP keamanan sistem informasi dan penerapan standar keamanan informasi berdasarkan sertifikat ISO/IEC 27001	

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2. Analisis TOWS Smart Branding

Smart branding merupakan salah satu dimensi dalam *smart city* yang dibutuhkan dalam era informasi seperti saat ini dimana sebuah kota tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi juga harus mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerah. Pada asarnya konsep *branding* bertujuan untuk peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan ini maka ditetapkan sasaran-sasaran *smart branding* Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan subdimensi. Untuk mencapai masing-masing

sasaran telah dirumuskan strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Internal			
Kekuatan (S) X Peluang (O)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Peluang (O)**	**Strategi**
(S2.O2.O6)	Meningkatkan pengembangan TIC untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwisata	(W1.O1.O3)	Meningkatan kemampuan SDM untuk peningkatan mutu pelayanan pariwisata
		(W2.O1.O3.O4)	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata
(S1.S4.S5.O1.O3)	Meningkatkan kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pokdarwis dalam pengembangan pariwisata daerah	(W4.O2.O5)	Mengembangkan penggunaan teknologi digital dalam branding, promosi, dan *event* wisata daerah
(S6.O2.O5)	Meningkatkan sistem aplikasi SI OPEN sebagai *digital marketplace* bagi pelaku usaha UMKM	(W5.O3.O4)	Meningkatkan inovasi pembangunan tampilan infrastruktur kota untuk mempersiapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu pintu gerbang IKN
(S1.O1.O3.O4)	Membangun sentra kerajinan UMKM di dekat kawasan wisata		

Kekuatan (S) X Ancaman (T)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Ancaman (T)**	**Strategi**
(S1.T1)	Meningkatkan daya saing produk pangan dan UMKM unggulan daerah	(W1.W3.T1.T4)	Meningkatkan inovasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
(S5.T2)	Meningkatkan kerja sama pemerintah dan pokdarwis terhadap pengawasan di kawasan wisata	(W5.T4)	Meningkatkan inovasi bentuk infrastruktur perwajahan kota yang khas (tidak sama dengan daerah lain)
(S3.T3)	Meningkatkan inovasi teknologi pertanian yang tidak terpengaruh terhadap bencana		
Eksternal			

Dengan penetapan KSPN Loksado, fokus pengembangan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diarahkan ke arah menjadikan Loksado sebagai destinasi wisata yang memenuhi standar dan dapat bersaing di tingkat nasional melalui peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dengan memperhatikan konsep 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi). Sesuai dengan dokumen rencana induk dan rencana detail KSPN Loksado, pengembangan amenitas di kawasan Loksado melibatkan penataan bangunan di tepi sungai dan pemulihan Delta Amandit sebagai zona santai bagi wisatawan. Beberapa kebutuhan yang diidentifikasi dalam dimensi ini termasuk pengembangan ekowisata, eduwisata, wisata etnik, dan penyelenggaraan festival-festival berskala provinsi dan nasional, seperti *jungle trekking*, air terjun, air panas Tanuhi, Festival Loksado, *bamboo rafting*, rumah adat/balai, dan upacara pesta adat/*Aruh Ganal*. Kebutuhan lainnya mencakup pengembangan usaha kecil dan menengah, fasilitasi permodalan, dan legalitas usaha; serta pembangunan SDM pariwisata melalui pembinaan masyarakat, kelompok sadar wisata, dan pelaku usaha jasa pariwisata melalui sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan serupa, termasuk pemberian materi khusus kepariwisataan kepada pelajar di semua tingkatan pendidikan.

Dari matriks TOWS untuk dimensi *smart branding*, ditemukan 13 (tigabelas) strategi yang kemudian dianalisis untuk dikelompokkan berdasarkan subdimensi *smart branding*. Strategi dalam subdimensi dengan tema yang serupa disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Subdimensi dan Strategi *Smart Branding*

Subdimensi			Strategi
Pariwisata	(S2.O2.O6)	Meningkatkan pengembangan TIC untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwisata	Meningkatkan pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat
	(S1.S4.S5.O1.O3)	Meningkatkan kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pokdarwis dalam pengembangan pariwisata daerah	
	(S1.O1.O3.O4)	Membangun sentra kerajinan UMKM di dekat kawasan wisata	
	(W1.O1.O3)	Meningkatkan kemampuan SDM untuk peningkatan mutu pelayanan pariwisata	
	(W2.O1.O3.O4)	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata	
	(W4.O2.O5)	Mengembangkan penggunaan teknologi digital dalam *branding*, promosi, dan *event* wisata daerah	
	(S5.T2)	Meningkatkan kerja sama pemerintah dan pokdarwis terhadap pengawasan di kawasan wisata	

Subdimensi			Strategi
Daya Saing Bisnis	(S6.O2.O5)	Meningkatkan sistem aplikasi SI OPEN sebagai *digital marketplace* bagi pelaku usaha UMKM	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan
	(S1.T1)	Meningkatkan daya saing produk pangan dan UMKM unggulan daerah	
	(S3.T3)	Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian menjadi produk olahan	
	(W1.W3.T1.T4)	Meningkatkan inovasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	
Wajah (Tampilan) Kota	(W5.O3.O4)	Meningkatkan inovasi pembangunan tampilan infrastruktur kota untuk mempersiapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu pintu gerbang IKN	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern
	(W5.T4)	Meningkatkan inovasi bentuk infrastruktur perwajahan kota yang khas (tidak sama dengan daerah lain)	

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3. Analisis TOWS Smart Economy

Smart economy didefinisikan sebagai suatu sistem tata kelola perekonomian yang cerdas, sehingga mampu mengatasi tantangan pada era disrupsi ekonomi yang memerlukan adaptasi yang cepat. *Smart economy* terdiri dari tiga subpilar, yaitu pengembangan ekosistem industri yang berdaya saing, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekosistem transaksi ekonomi. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penerapan *smart economy* bisa mencakup penggunaan teknologi informasi, digitalisasi proses bisnis, pengembangan industri berbasis teknologi, dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan keterampilan yang relevan.Masing-masing subpilar *smart economy* dirumuskan sasaran yang diharapkan dari implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setiap sasaran dapat dicapai melalui strategi-strategi yang telah dirumuskan dari analisis TWOS, sebagai berikut:

Internal			
Kekuatan (S) X Peluang (O)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Peluang (O)**	**Strategi**
(S1.O2.O4)	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar daerah	(W1.W2.O1.O5. O6)	Meningkatkan daya saing produk UMKM berbasis digital
		(W2.O1.O6)	Membangun iklim Investasi industri dengan memanfaatkan teknologi informasi
(S2.S5.O1.O5. O6)	Meningkatkan promosi secara digital produk UMKM yang telah memenuhi standar	(W7.O2.O5.O6)	Berkolaborasi dengan daerah lain (kota/kabupaten tetangga) terkait pasar domestik untuk perluasan pemasaran produk
(S3.S4.O3)	Membangun kolaborasi dengan asosiasi petani kayu manis untuk meningkatkan produksi kayu manis	(W1.W4.O6)	Penguatan kelembagaan pelaku UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas
		(W3.O1)	Meningkatkan pengetahuan literasi keuangan terhadap transaksi *digital cashless*
		(W6.O1.O2.O5. O6)	Meningkatkan diversifikasi produk UMKM di pasaran

Kekuatan (S) X Peluang (O)	Strategi	Kelemahan (W) X Peluang (O)	Strategi
		(W5.O6)	Membangun UMKKM untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
Kekuatan (S) X Ancaman (T)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Ancaman (T)**	**Strategi**
(S3.S4.T1)	Menjaga kualitas produk kayu manis untuk mendorong indikasi geografis hak paten kayu manis	(W8.T3)	Meningkatkan sumber daya permodalan melalui bantuan modal sistem KUR
(S1.T2)	Meningkatkan inovasi teknologi pertanian terhadap serangan hama dan perubahan iklim		
Eksternal			

Dari matriks TOWS untuk dimensi *Smart Economy* diperoleh 13 (tigabelas) strategi, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengelompokkan strategi berdasarkan subdimensi-subdimensi *smart economy* (lihat Tabel 3.4).

Strategi untuk subdimensi Ekosistem Industri adalah meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan berbasis digital yang terintegrasi. Penguatan kewirausahaan dan UMKM melibatkan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan keuangan serta memfasilitasi akses keuangan. Memanfaatkan teknologi termasuk mendorong UMKM mengadopsi teknologi produksi modern dan memastikan pemanfaatan TIK. Berbasis digital yang terintegrasi melibatkan dukungan UMKM dalam berpartisipasi dalam *e-commerce* lokal, pemantauan tren pasar, dan pembentukan jaringan bisnis. Sosialisasi dan pemasaran digital melibatkan pelatihan strategi pemasaran *online* dan dukungan dalam memanfaatkan media sosial. Kebijakan pendukung mencakup pembentukan kebijakan untuk pertumbuhan UMKM dan pengurangan hambatan administratif.

Strategi untuk subdimensi Kesejahteraan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui UMKM dan pengembangan usaha

produktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan merangsang partisipasi aktif dan kemandirian ekonomi. Melalui pemberdayaan masyarakat, strategi ini berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM serta pengembangan usaha yang produktif, dengan harapan dapat merangsang lahirnya wirausaha baru yang mandiri. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perbaikan kondisi kesejahteraan umum.

Strategi untuk subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan menekankan dua aspek utama. Pertama, fokus pada pengembangan infrastruktur transaksi keuangan berbasis digital, termasuk pembangunan platform aplikasi digital seperti aplikasi perbankan, dompet digital, dan platform transaksi online yang efisien dan ramah pengguna. Selain itu, strategi ini melibatkan pengembangan perangkat lunak pendukung untuk menjaga keamanan dan kinerja infrastruktur digital, termasuk sistem manajemen risiko, integrasi teknologi terbaru, dan pembaruan berkala. Kedua, strategi ini mencakup pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan digital melalui program pelatihan, mencakup pemahaman manajemen *platform* digital, keamanan siber, dan penerapan teknologi keuangan terbaru. Tujuan strategi ini adalah menciptakan lingkungan transaksi keuangan yang modern, efisien, dan terkini, dengan infrastruktur digital yang canggih dan SDM yang kompeten dalam keahlian digital untuk meningkatkan layanan keuangan, keamanan, dan efisiensi operasional.

Tabel 3.4
Subdimensi dan Strategi *Smart Economy*

Subdimensi			Strategi
Ekosistem Industri	(S1.O2.O4)	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar daerah	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi
	(S2.S5.O1. O5.O6)	Meningkatkan promosi secara digital produk UMKM yang telah memenuhi standar	
	(S3.S4.O3)	Membangun kolaborasi dengan asosiasi petani kayu manis untuk meningkatkan produksi kayu manis	
	(W1.W2.O1. O5.O6)	Meningkatkan daya saing produk UMKM berbasis digital	
	(W2.O1.O6)	Membangun iklim investasi industri dengan memanfaatkan teknologi informasi	
	(W7.O2.O5. O6)	Berkolaborasi dengan daerah lain (kota/ kabupaten tetangga) terkait pasar domestik untuk perluasan pemasaran produk	
	(W6.O1.O2. O5.O6)	Meningkatkan diversifikasi produk UMKM di pasaran	
	(S3.S4.T1)	Menjaga kualitas produk kayu manis untuk mendorong indikasi geografis hak paten kayu manis	
	(S1.T2)	Meningkatkan inovasi teknologi pertanian terhadap serangan hama dan perubahan iklim	

Subdimensi			Strategi
Kesejahteraan Masyarakat	(W1.W4.O6)	Penguatan kelembagaan pelaku UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri
	(W5.O6)	Membangun UMKKM untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat	
Ekosistem Transaksi Keuangan	(W3.O1)	Meningkatkan pengetahuan literasi keuangan terhadap transaksi *digital cashless*	Mengembangkan infrastruktur transaksi keuangan berbasis digital berupa pengembangan *platform* aplikasi digital dan *sofware* pendukung serta mengembangkan SDM yang memiliki keahlian dan talenta digital
	(W8.T3)	Meningkatkan sumber daya permodalan melalui bantuan modal sistem KUR	

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4. Analisis TOWS *Smart Living*

Sesuai dengan namanya, istilah "*smart*" dalam *smart living* merujuk pada kecerdasan yang digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas manusia sehari- hari. Dimensi *smart living* bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tercukupi baik dari aspek fisik, kesehatan, dan transportasi sehingga dapat meningkatkan kualitas baik dari segi infrastruktur dasar, kualitas fasilitas kesehatan masyarakat dan berbagai bentuk penunjang kegiatan dan interaksi masyarakat. Dimensi ini terdiri dari tiga subdimensi yaitu Harmonisasi Tata Ruang (*harmony*), Kesehatan (*health*), dan Transportasi (*mobility*). Setiap sasaran dapat dicapai melalui strategi- strategi yang telah dirumuskan dari analisis TOWS.

Internal			
Kekuatan (S) X Peluang (O)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Peluang (O)**	**Strategi**
(S2.O1)	Penguatan kemampuan teknis dan fungsional pelayanan SDM kesehatan berbasis teknologi	(W2.W5.W7.W8.O1.O3.O4.O5)	Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik
(S1.O1.O3)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan kerja sama multipihak	(W3.W4.O3)	Sinkronisasi sistem informasi skrining kesehatan terpadu
(S4.O4.O5)	Meningkatkan pemeliharaan RTH yang nyaman untuk aktivitas publik	(W9.O5)	Mendorong ketersediaan informasi dan peta kawasan Rawan bencana berbasis digital
(S3.O4.O5.O6)	Meningkatkan infrastruktur penunjang transportasi daerah	(W5.O4.O6)	Meningkatkan kualitas kuantitas moda transportasi umum
(S5.O3)	Memperluas jangkuan konektivitas angkutan pelajar		
(S6.S8.O4.O5)	Meningkatkan pemerataan sarana ruang publik		
(S7.O1.O3)	Transformasi digital pada pelayanan kesehatan di semua level		

Kekuatan (S) X Ancaman (T)	Strategi	Kelemahan (W) X Ancaman (T)	Strategi
(S3.T2)	Menciptakan konektivitas antarmoda transportasi daerah	(W9.T1)	Pembekalan pengetahuan mitigasi bencana kepada masyarakat
(S3.T3)	Mendorong perumusan peraturan daerah terhadap larangan angkutan berat melebihi kapasitas muatan	(W8.T2)	Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang aman untuk kenyamanan dan kemudahan mobilisasi
		(W1.T4)	Sinergitas antara daerah, provinsi dan pusat untuk pemerataan layanan tenaga kesehatan
Eksternal			

Dari matriks TOWS untuk dimensi *Smart Living* diperoleh 16 (enambelas) strategi, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengelompokkan strategi berdasarkan subdimensi *smart living* (lihat Tabel 3.5). Strategi yang diusulkan untuk subdimensi Harmonisasi Tata Ruang bertujuan mewujudkan keselarasan dalam tata ruang wilayah. Pendekatan ini melibatkan serangkaian langkah yang terfokus pada peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), pembangunan infrastruktur, dan pemerataan layanan publik. Selain itu, strategi ini juga mencakup penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana secara digital yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pentingnya sinergi dengan para pemangku kepentingan terkait menonjol dalam implementasi strategi ini, karena kolaborasi yang kokoh dengan pemangku kepentingan akan mendukung pencapaian harmonisasi tata ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Strategi yang dirancang untuk subdimensi Kesehatan bertujuan mewujudkan modernisasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Fokus utamanya adalah menciptakan sinergi yang harmonis di seluruh spektrum layanan kesehatan. Langkah - langkah strategis melibatkan peningkatan infrastruktur dan teknologi di fasilitas kesehatan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi sistem informasi kesehatan. Dengan demikian, strategi ini berupaya untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diperbarui dan

termodernisasi dapat diakses secara merata oleh masyarakat, menciptakan ekosistem kesehatan yang terkoordinasi dan efisien.

Tabel 3.5
Subdimensi dan Strategi *Smart Living*

Subdimensi			Strategi
Harmonisasi Tata Ruang	(S4.O4.O5)	Meningkatkan pemeliharaan RTH yang nyaman untuk aktivitas publik	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan *stakeholder* terkait
	(S6.S8. O4.O5)	Meningkatkan pemerataan sarana ruang publik	
	(W2.W5.W7.W8. O1.O3.O4.O5)	Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik	
	(W9.O5)	Mendorong ketersediaan informasi dan peta kawasan rawan bencana berbasis digital	
	(W9.T1)	Pembekalan pengetahuan mitigasi bencana kepada masyarakat	
Kesehatan	(S2.O1)	Penguatan kemampuan teknis dan fungsional pelayanan SDM kesehatan berbasis teknologi	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga tercipta sinergitas pelayanan kesehatan
	(S1.O1.O3)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan kerja sama multipihak	
	(W3.W4.O3)	Sinkronisasi sistem informasi skrining kesehatan terpadu	
	(W1.T4)	Sinergitas antara daerah, provinsi dan pusat untuk pemerataan layanan tenaga kesehatan	
Transportasi	(S3.O4.O5.	Meningkatkan infrastruktur O6) penunjang transportasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transportasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya
	(S5.O3)	Memperluas jangkuan konektivitas angkutan pelajar	
	(S7.O1.O3)	Transformasi digital pada pelayanan kesehatan di semua level	
	\ (W5.O4.O6)	Meningkatkan kualitas kuantitas moda transportasi umum	
	(S3.T2)	Menciptakan konektivitas Antarmoda transportasi daerah	
	(S3.T3)	Mendorong perumusan peraturan daerah terhadap larangan angkutan berat melebihi kapasitas muatan	
	(W8.T2)	Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang aman untuk kenyamanan dan kemudahan mobilisasi	

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

5. Analisis TOWS *Smart Society*

Smart society bertujuan untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, produktif, komunikatif, dinamis, interaktif baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi. Dengan demikian, *smart society* atau masyarakat cerdas dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem sosio-teknis (sosial-virtual) masyarakat yang humanis, produktif, dinamis, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi. Konsep *smart society* diterapkan dan diukur dalam tiga subdimensi, yaitu Interaksi Masyarakat, Ekosistem Belajar, dan Keamanan Masyarakat. Masing-masing subdimensi ini telah dirumuskan sasaran dan strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam impementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui analisis TOWS.

Internal			
Kekuatan (S) X Peluang (O)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Peluang (O)**	**Strategi**
(S1.S6.S8.S9. O2.O3.O6)	Meningkatkan *paltform* digital pendidikan formal dan non-formal (*smart school*, *smart* pesantren) melalui penguatan kemampuan teknis SDM dan kerja sama *stakeholders*	(W1.W4.W6.O1. O2)	Kolaborasi *stakeholder* dalam percepatan pembangunan struktur dan infrastruktur untuk kemudahan masyarakat
		(W2.O1)	Peningkatan kualitas SDM melalui pelayanan pendidikan yang baik
(S2.S4.S9.O2. O4.O5)	Percepatan pembangunan ruang publik ramah anak, disabilitas, dan lansia		
(S4.S5.O1.O4)	Penguatan Kelembagaan kelompok perempuan di tengah masyarakat	(W3.W5.O1.O6)	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial warga miskin

Kekuatan (S) X Peluang (O)	Strategi	Kelemahan (W) X Peluang (O)	Strategi
(S7.O1.04)	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah		melalui Aplikasi Data SatuNIK
		(W7.O7)	Menciptakan jalinan kemitraan
(S5.O1.O7)	Meningkatkan fungsi siskamling dengan kerja sama aparat Polri dan TNI		aparat dan masyarakat dalam membina sikap toleransi
(S3.O1.O6)	Meningkatkan fungsi layanan ULD (Unit Layanan Disabilitas) berbasis *database* kaum disabilitas daerah	(W8.O1.O3)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
		(W9.O1)	Meningkatkan sosialisasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dengan kerja sama pemerintah
Kekuatan (S) X Ancaman (T)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Ancaman (T)**	**Strategi**
(S4.S5.T1)	Penguatan kelembagaan kelompok perempuan di tengah masyarakat	(W2.T1.T2)	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan pelatihan berbasis digital
(S7.T1)	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	(W3.W5.T2.T3)	Mengoptimalikan pemanfaatan sistem digital SatuNIK *tracking* warga miskin
Eksternal			

Dari matriks TOWS untuk dimensi *Smart Society* diperoleh 16 (enambelas) strategi, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengelompokkan strategi berdasarkan subdimensi smart *society* (lihat Tabel 3.6). Hasil analisis untuk strategi subdimensi Interaksi Masyarakat menunjukkan bahwa untuk memperkuat keterhubungan dan keterbukaan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui beberapa pendekatan. Pertama, melalui pendidikan. Kedua, kolaborasi dan elaborasi diupayakan untuk membangun sinergi antara berbagai kelompok dalam masyarakat, menciptakan kerja

sama yang berarti. Ketiga, penanaman nilai-nilai positif dijadikan landasan untuk menciptakan modal sosial yang tangguh, memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Sementara subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan, strategi berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur pendidikan yang memadai, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan, peningkatan kompetensi guru melalui pendekatan inovatif dan pelibatan teknologi, serta membangun kerja sama dengan mitra pembangunan. Terakhir, untuk subdimensi Keamanan Masyarakat, strategi difokuskan pada menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dengan digitalisasi yang inklusif.

Tabel 3.6
Subdimensi dan Strategi *Smart Society*

Subdimensi			Strategi
Keamanan Masyarakat	(S5.01.07)	Meningkatkan fungsi siskamling dengan kerja sama aparat Polri dan TNI	Menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan
	(W3.W5.01.06)	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial warga miskin melalui Aplikasi Data SatuNIK	
	(W3.W5.T2.T3)	Mengoptimalisasi pemanfaatan sistem digital SatuNIK *tracking* warga miskin	

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

6. Analisis TOWS Smart Environment

Smart environment merupakan pembangunan tata kelola lingkungan yang cerdas, dimana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. *Smart environment* tidak hanya terpaku kepada *smart building*. Konsep *smart environment* memiliki gagasan yang berlandaskan pengelolaan sumber daya alam dan menggunakan teknologi dalam mengatasi permasalahan, serta menjalankan program sesuai dengan permasalahan dalam lingkungan yang terjadi. Secara umum, *smart environment* memiliki beberapa sasaran terkait proteksi lingkungan, pengelolaan sampah, dan tata kelola energi. Berbagai strategi dalam mewujudkan berbagai dan sasaran pada dimensi *Smart Environment* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dianalisis dengan analisis TOWS.

Internal			
Kekuatan (S) X Peluang (O)	**Strategi**	**Kelemahan (W) X Peluang (O)**	**Strategi**
(S1.S2.S7.04)	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah efektif efisien metode *sanitary landfill*	(W1.04)	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah efektif efisien metode *sanitary landfill*
(S1.S4.S5.S6. 02.05.07)	Meningkatkan sistem pengawasan kawasan wisata Alam	(W4.05)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang lingkungan melalui kolaborasi pemerintah dengan komunitas peduli lingkungan
(S1.S7.01.03.04. 06)	Digitalisasi sistem perdagangan limbah karbon (*carbon trading*) pada lahan gambut	(W3.W6.07)	Restrukturisasi kawasan bangunan yang berpotensi merusak lingkungan
(S1.S3.S4.S6. 02.04.07)	Meningkatkan pengelolaan lahan Konservasi keanekaragaman Hayati	(W2.06.07)	Pengembangan sistem informasi digital layanan peduli lingkungan
(S7.04)	Meningkatkan kualitas pengolahan energi terbarukan gas metan menjadi sumber daya listrik	(W5.W7.W8.06)	Mengembangkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) peta bencana
(S4.S6.05)	Meningkatkan kerja sama asosiasi komunitas pecinta alam peduli lingkungan dan pemerintah daerah		
(S8.03.06)	Meningkatkan produktivitas pertanian berbasis teknologi *smart Farming*		

Kekuatan (S) X Ancaman (T)	Strategi	Kelemahan (W) X Ancaman (T)	Strategi
(S1.S4.S6.T1. T2.T3)	Meningkatkan pengawasan eksploitasi SDA melalui sistem informasi terintegrasi peduli lingkungan	(W3.T1.T2.T3)	Mendorong perumusan peraturan kewenangan dearah terhadap perusahaan ilegal Sistem Informasi Geospasial (SIG) peta bencana
(S2.T4)	TPA yang menggunakan metode *sanitary landfill* mengurangi dampak perubahahan iklim global di daerah	(W3.W6.T4)	Restrukturisasi kawasan bangunan yang berpotensi merusak lingkungan
(S3.S8.T4.T5)	Meningkatkan konservasi petanian terpadu sistem *agroforestry*	(W5.W7.W8.W9. T4)	Restrukturisasi kawasan bangunan yang berpotensi merusak lingkungan
Eksternal			

Dari matriks TOWS untuk dimensi *Smart Environment* diperoleh 18 (delapanbelas) strategi, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengelompokkan strategi berdasarkan subdimensi *smart environment* (lihat Tabel 3.7). Strategi untuk subdimensi Proteksi Lingkungan bertujuan meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, penguatan regulasi menjadi landasan untuk mengatur aktivitas yang dapat berdampak pada lingkungan. Kedua, pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan menjadi fokus, memastikan bahwa aturan-aturan tersebut diterapkan secara konsisten. Ketiga, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi sumber daya manusia di bidang lingkungan menjadi prioritas, termasuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Keempat, kolaborasi multipihak diupayakan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan. Terakhir, penggunaan teknologi informasi yang mumpuni menjadi alat untuk memantau, mengevaluasi, dan mengelola lingkungan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan menyatukan semua aspek ini, strategi ini bertujuan mencapai perlindungan lingkungan yang optimal dan berkelanjutan.

Strategi untuk subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah berfokus pada peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan pendekatan yang efektif dan efisien, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah-langkah tersebut melibatkan implementasi metode yang inovatif dan berbasis teknologi untuk mengoptimalkan pengumpulan, pemrosesan, dan daur ulang sampah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, strategi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dalam seluruh rantai pengelolaan sampah, meminimalkan dampak lingkungan, dan mendukung upaya menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sementara, strategi untuk subdimensi Energi Terbarukan mengusung pendekatan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan dengan dukungan teknologi digital. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam, mengurangi jejak karbon, dan mempercepat transisi ke energi terbarukan dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam prosesnya.

Tabel 3.7
Subdimensi dan Strategi *Smart Environment*

Subdimensi			Strategi
Proteksi Lingkungan	(S1.S4.S5. S6.O2. O5.O7)	Meningkatkan sistem pengawasan kawasan wisata alam	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi mulitipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni
	(S1.S3.S4.S6. O2. O4.O7)	Meningkatkan pengelolaan lahan konservasi keanekaragaman hayati	
	(S4.S6.O5)	Meningkatkan kerja sama asosiasi komunitas pecinta alam peduli lingkungan dan pemerintah daerah	
	(S8.O3.O6)	Meningkatkan produktivitas pertanian berbasis teknologi *smart farming*	
	(W4.O5)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang lingkungan melalui kolaborasi pemerintah dengan komunitas peduli lingkungan	
	(W3.W6.O7)	Restrukturisasi kawasan bangunan yang berpotensi merusak lingkungan	
	(W3.W6.T4)	Restrukturisasi kawasan bangunan yang berpotensi merusak lingkungan	
	(W2.O6.O7)	Pengembangan sistem informasi digital layanan peduli lingkungan	
	(W5.W7.W8. O6)	Mengembangkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) peta bencana	
	(S1.S4.S6.T1. T2.T3)	Meningkatkan pengawasan eksploitasi	

Subdimensi			Strategi
		SDA melalui sistem informasi terintegrasi peduli lingkungan	
	(S3.S8.T4.T5)	Meningkatkan konservasi petanian terpadu sistem *agroforestry*	
	(W3.T1.T2.T3)	Mendorong perumusan peraturan kewenangan dearah terhadap perusahaan ilegal	
	(W5.W7.W8. W9.T4)	Mengembangkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) peta bencana	
Pengelolaan Sampah dan Limbah	(S1.S2.S7.O4)	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah efektif dan efisien dengan metode *sanitary landfill*	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital
	(W1.O4)	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah efektif dan efisien dengan metode *sanitary landfill*	
	(S2.T4)	TPA yang menggunakan metode *sanitary landfill* mengurangi dampak perubahahan iklim global di daerah	
Energi Terbarukan	(S1.S7.O1.O3. O4.O6)	Digitalisasi sistem perdagangan limbah karbon (*carbon trading*) pada lahan gambut	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital
	(S7.O4)	Meningkatkan kualitas pengolahan energi terbarukan gas metan menjadi sumber daya listrik	

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

BAB IV
ANALISIS VISI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu bagian wilayah pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi dan peluang untuk maju dan berkembang. Implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus berlandaskan pada visi pembangunan *smart city* sehingga dapat ditentukan sasaran pencapaian pembangunan *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Visi *smart city* ini kemudian diturunkan ke dalam misi pembangunan *smart city*. Adapun Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempertimbangkan visi dan misi daerah yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Nasional; harapan warga masyarakat; dan faktor eksternal di masa depan. Penjelasan visi, misi, dan sasaran *smart city* diuraikan sebagai berikut.

4.1 Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Daerah

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C/17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 (enam) kabupaten administratif dan 3 (tiga) swapraja. Salah satunya *Afdeling Van Hoeloe Soengai* dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibu kota Kandangan. Untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan suatu inisiatif untuk menjadi paradigma yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan rencana pembangunan melalui penerapan *smart city*. Oleh karena itu, penyusunan *masterplan smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tahun 2023, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berakhir. Namun, terdapat kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan akan terdapat masa transisi menjelang Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 sehingga dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam menganalisis visi pembangunan daerah ini menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.

Visi pengembangan smart city di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi dasar perumusan prioritas pengembangan pembangunan daerah selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dengan terus melakukan inovasi untuk mencapai peningkatan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Rumusan Visi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai:

"Hulu Sungai Selatan yang Sehat, Makmur, Agamis, Rakat, dan Berbasis Teknologi (HSS SMART)"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. HSS SMART dimaknai sebagai Hulu Sungai Selatan yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi kreatif, inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Secara keseluruhan, visi pembangunan *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada kata kunci utama yaitu:

- **Sehat**: Kota yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan inklusif, dan berupaya menyediakan dimensi permukiman, lalu lintas dan transportasi, industri, perkantoran dan pariwisata yang sehat.
- **Makmur**: Kota dengan kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

- **Agamis**: Kota yang mendasarkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, dan implementasi nilai sosial, moral, norma, etika, tradisi, kearifan lokal dan toleransi sebagai fondasi kehidupan.
- **Rakat**: Kota yang mengedepankan konsep kerja sama yang dinamis, dialogis, namun tetap harmonis untuk mencapai kondisi yang lebih baik, serta menyediakan lingkungan dan dinamika kehidupan perkotaan yang terbuka, ramah, dan menghormati pluralisme.
- **Berbasis Teknologi**: Kota yang menggunakan teknologi secara optimal dan bijak untuk kemudahan, kecepatan, keteraksesan dan kualitas layanan sebagai dimensi utama pada semua aspek.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan misi yang jelas, karena misi merupakan suatu pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun Misi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama.
2. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Agribisnis- Agroindustri yang Berteknologi Tinggi.
4. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

4.2 Sasaran *Smart City* Daerah

Dalam upaya mewujudkan implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperlukan penetapan sasaran yang menjadi penjabaran konkret dari visi dan misi yang telah ditetapkan untuk *smart city* tersebut. Perumusan sasaran ini didasarkan pada subdimensi dari setiap dimensi *smart city*, serta mempertimbangkan landasan pemikiran pembentukannya. Untuk meningkatkan percepatan pencapaian visi dan misi, sangat penting untuk menetapkan indikator berkualitas yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana tujuan *smart city* dapat tercapai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Indikator-indikator yang ditetapkan untuk setiap sasaran didasarkan pada Indikator Pembangunan Daerah yang telah dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta mengacu pada indikator *smart city* yang terdefinisi

dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37122:2019. Uraian mengenai berbagai indikator *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam setiap dimensi, yang akan menjadi fokus pembangunan *smart city* hingga tahun 2034 adalah sebagai berikut.

4.2.1 Sasaran *Smart Governance*

Dimensi *Smart Governance* menggambarkan implementasi tata kelola pemerintahan dengan pendekatan cerdas. Organisasi pemerintahan menjadi fokus utama dalam mencapai *smart governance* yang efektif. Kesuksesan *smart governance* diukur dengan pencapaian sasaran dari setiap subdimensi, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta perancangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran utama dimensi ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas dengan orientasi layanan yang mencakup hingga tingkat desa. Dengan mencapai tujuan ini, *smart governance* diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan masyarakat. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Governance* dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi *Smart Governance*

Subdimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Layanan Publik	Dengan konsep *smart governance* akan meningkatkan kualitas layanan publik pemerintahan daerah yang merata hingga ke desa dengan menyederhanakan proses, mempersingkat waktu, dan efektif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas berorientasi pada layanan sampai Desa	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	*18.2* Persentase area kota di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi *18.3* Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota

Subdimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Birokrasi	Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan mendorong terciptanya birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan hingga di level desa	Memantapkan reformasi birokrasi berbasis digital sampai di tingkat desa	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	*10.2* Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
Perancangan Kebijakan	Membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sampai di tingkat desa	Meningkatnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sampai di tingkat Desa	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	Nilai SAKIP	*21.1* Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.2.2 Sasaran *Smart Branding*

Dimensi *Smart Branding* menjadi komponen yang sangat penting dengan tujuan utama meningkatkan sektor pariwisata, daya saing bisnis, dan wajah kota. Sebagai elemen kunci yang mengemban peran sentral dalam evolusi perkotaan, keberhasilan *smart branding* terletak pada efektivitas implementasi kebijakan perkotaan serta partisipasi aktif semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan implementasi *smart branding* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan memiliki peran strategis karena tidak hanya menciptakan identitas yang menarik dan positif untuk suatu kota, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan

meningkatkan daya saing bisnis. Daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah. Sementara itu, peningkatan daya saing bisnis membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Maka dari itu, dimensi ini menjadi kunci untuk membangun perkotaan yang berdaya saing dan berkesinambungan. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Branding* dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi *Smart Branding*

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Pariwisata	Dengan Berkembangnya destinasi wisata alam dan wisata budaya diharapkan akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang berwirausaha bagi masyarakat lokal sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran	Berkembangnya destinasi wisata alam, budaya, dan religi	Meningkatkan Pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat	Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks Pembangunan Kebudayaan	14.1 Persentase Layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17b.1 Jumlah Pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk 17b.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan
Daya Saing Bisnis	Dengan penetrasi branding ini diharapkan akan meningkatkan daya saing produk daerah	Meningkatnya penetrasi brand produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	Meningkatkan Branding melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Persentase Peningkatan Kualitas Produk Industri Pengolahan	5.2 Tingkat Kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk 20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian 20.3 Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring
Wajah (Tampilan) Kota	Dengan terwujudnya sebagai sentra UMKM dan wisata religi diharapkan akan menjadi daya tarik bagi investor maupun wisatawan	Terwujudnya kota sentra UMKM	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	Persentase Peningkatan Produktivitas Per Unit Usaha	5.2 Tingkat Kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.2.3 Sasaran *Smart Economy*

Implementasi *smart economy* akan membawa sejumlah manfaat penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan efisiensi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dengan proses bisnis yang lebih cerdas, pemborosan dapat diminimalkan, produktivitas ditingkatkan, dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Selain itu, *smart economy* juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru dengan mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, seperti teknologi informasi, industri kreatif, dan layanan terkait teknologi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi dampak positif, diwujudkan melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap pekerjaan, dan pelayanan publik yang lebih

baik. Tak kalah pentingnya, implementasi *smart economy* juga berfokus pada inklusivitas, memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di antara masyarakat. Peningkatan akses dan partisipasi dalam ekonomi digital bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan lapisan masyarakat yang lebih luas. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Economy* dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi *Smart Economy*

Subdimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Ekosistem Industri	Dengan meningkatkan daya saing sektor industri akan meningkatkan pangsa pasar terhadap komoditas UMKM, sehingga industri daerah *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi dengan industri primer, sekunder dan tersier	Meningkatnya daya saing sektor industri Yang terintegrasi dengan sektor primer, sekunder, dan Tersier	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase Peningkatan Kuantitas Bahan Baku Lokal	*20.1* Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan
Kesejahteraan Masyarakat	Dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri karena memiliki pendapatan yang meningkat dan tersedianya kesempatan kerja	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berdaya dan mandiri	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri	Persentase Penduduk Miskin Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (Angkatan Kerja yang Bekerja)	*5.3* Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) *5.4* Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan

Ekosistem Transaksi Keuangan	Menciptakan ekosistem transaksi keuangan yang mudah, murah, dan terjangkau melalui berbasis digital yang dapat mendorong industri *e-commerce* dan *marketplace* dengan terbangunnya budaya masyarakat menggunakan transaksi keuangan digital	Terwujudnya ekosistem transaksi keuangan berbasis digital	Mengembangkan infrastruktur transaksi keuangan berbasis digital berupa pengembangan *platform* aplikasi digital dan *sofware* pendukung. Serta mengembangkan SDM yang memiliki keahlian dan talenta digital	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	*9.1* Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri *9.2* Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.2.4 Sasaran *Smart Smart Living*

Konsep *smart living* atau kehidupan cerdas akan dapat diimplementasikan dan memberi kebermanfaatan yang signifikan jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama berpartisipasi dalam membangun sasaran prioritas *smart living*. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran kunci dalam merancang kebijakan, menciptakan infrastruktur cerdas, dan menyediakan layanan publik yang trintegrasi. Keikutsertaan aktif pemerintah dalam membangun sasaran prioritas *smart living* mencakup aspek-aspek seperti teknologi informasi, keberlanjutan lingkungan dalam tata ruang, sistem transportasi, dan layanan kesehatan yang terhubung. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Living* dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi *Smart Living*

Subdimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman, lingkungan pusat bisnis, yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga sehingga menciptakan kenyamanan dan kualitas hidup yang baik	Meningkatnya tata ruang wilayah yang harmonis untuk mendukung daya saing daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan *stakeholder* terkait	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	*21.4* Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi
Kesehatan	Dengan derajat kesehatan yang baik akan meningkatkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk mendukung akses terhadap kualitas pendidikan, dan komoditi pangan dan non-pangan masyarakat	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	*11.1* Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan

Subdimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Transportasi	Mewujudkan transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik daerah	Meningkatnya ekosistem transportasi yang lancar dan aman untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komiditi pangan dan non-pangan masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transportasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	Persentase Konektivitas Jalan dalam Kondisi Mantap	*19.5* Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses publik *19.9* Persentase lampu lalu lintas yang cerdas *19.12* Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.2.5 Sasaran *Smart Society*

Smart society merupakan kondisi ideal dimana interaksi antara individu, komunitas, dan dunia digital terjalin secara harmonis. Dalam *smart society*, setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan yang didukung oleh fasilitas belajar secara digital. Artinya, pemberian pendidikan tidak hanya terfokus pada akses fisik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung proses belajar-mengajar. Selain itu, pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan *smart society* dengan memastikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, properti, dan mengelola risiko bencana bagi masyarakat. Ini mencakup implementasi kebijakan dan infrastruktur yang mendukung keamanan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek kejahatan, kecelakaan, maupun bencana alam. Perlindungan ini juga mencakup upaya pencegahan dan tanggap darurat yang efektif untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, implementasi *smart society* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya menciptakan konektivitas digital, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses pendidikan yang merata dan perlindungan yang efektif, menciptakan lingkungan yang aman, cerdas, dan berdaya

saing. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Society* dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi *Smart Society*

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Interaksi Masyarakat	Dengan terbangunnya modal sosial masyarakat akan mendorong toleransi dan kerukunan serta harmonisasi masyarakat di tengah masyarakat yang semakin beragam	Terciptanya modal sosial masyarakat yang tangguh	Menguatkan keterhubungan dan keterbukaan sosial melalui pendidikan, kolaborasi dan elaborasi, serta nilai-nilai positif untuk menciptakan modal sosial yang tangguh	Indeks Desa Membangun	*13.4* Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
				Persentasi Pemuda yang Berwirausaha	
				Persentase Penyandang Disabilitas yang Memiliki Keterampilan	*13.2* Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan program formal dan non-formal untuk meningkatkan kompetensi SDM terutama	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non-formal	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui infrastruktur yang memadai, kurikulum relevan, pengembangan guru, pendekatan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	*6.3* Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
	penduduk miskin dan penganggguran untuk suplai tenaga kerja yang berkualitas di segala bidang dan sesuai dengan survei kebutuhan pasar kerja		inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan mitra pembangunan, program pembelajaran seumur hidup, serta evaluasi berkelanjutan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	*6.2* Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa
				Indeks Literasi	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul *e-book* per 100.000 penduduk *17.4* Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif
Keamanan Masyarakat	Peningkatan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin/kurang mampu melalui bantuan sosial berbasis digital dalam rangka menahan beban pengeluaran	Terciptanya keamanan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata dan digitalisasi	Menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan	Indeks Keamanan dan Ketertiban	*15.1* Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.2.6 Sasaran *Smart Environment*

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diidentifikasi sebagai wilayah tropis, yang terletak di tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan memiliki ciri iklim tropis lembab. Kendati demikian, terdapat perubahan pola cuaca dengan seringnya hujan di tengah musim kemarau panjang. Kabupaten ini ditandai oleh keberadaan hutan yang cukup luas, meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena berbagai faktor seperti eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, dan pembukaan lahan baru untuk pemukiman.

Dalam konteks ini, implementasi smart environment menjadi sangat penting. Smart environment mencerminkan komitmen sebuah kota atau daerah terhadap pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi secara berkelanjutan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini menjadi relevan mengingat tekanan eksploitasi lahan dan industrialisasi yang berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan konsep *smart environment*, diharapkan wilayah ini dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih bijak, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan di tengah dinamika perubahan iklim. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Environment* dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi *Smart Environment*

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Proteksi Lingkungan	Dengan terjaganya kualitas air, udarta dan tutupan lahan dalam kondisi baik dapat meningkatkan potensi pariwisata dan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Memastikan terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam kondisi baik untuk menunjang potensi unggulan ekonomi lokal berkesinam-bungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi mulitipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*23.3* Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh sistem air cerdas
				Indeks Risiko Bencana	*11.3* Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (*real-time*) untuk saran akualitas udara dan air
Pengelolaan Sampah dan Limbah	1. Dengan terkelolanya persampahan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat 2. Dengan efektifnya pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan dapat meminimalkan terjadinya potensi pencemaran dan bencana	Memastikan terciptanya pengelolaan sampah dan limbah yang cerdas untuk menunjang potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	Indeks Cakupan Pengelolaan Persampahan	*16.3* Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi *16.4* Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota *16.6* Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Tata Kelola Energi	Dengan penggunaan gas metan sebagai pengganti bahan bakar minyak dapat mengurangi emisi GRK	Meningkatnya potensi penggunaan energi terbarukan melalui pengolahan sampah menjadi gas metan kemudian menjadi energi listrik	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	-	*7.1* Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat, dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu *7.3* Energi listrik dan panas dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

BAB V
PENUTUP

Buku I Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan keluaran pertama hasil dari tahap awal Bimbingan Teknis Penyusunan *Masterplan Smart City*. Buku ini merupakan dasar dalam penyusunan *masterplan smart city* karena berisi analisis visi pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan daerah yang masih berlaku, analisis masa depan daerah, analisis kesiapan daerah dalam implementasi *smart city*, analisis kesenjangan daerah, analisis SWOT dan TWOS untuk menetapkan strategi pada setiap dimensi *smart city*, serta perumusan visi, misi, dan sasaran pembangunan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026

BUKU II

MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kota cerdas atau smart city telah menjadi tren di seluruh dunia. Gerakan-gerakan ini memberikan tekanan pada keputusan strategis perusahaan, bisnis, kemudian pemerintah pusat dan daerah, dan penelitian untuk menemukan cara optimal dalam membangun kota masa depan. Di sisi lain, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya telah menjadi suatu kebutuhan utama. Selain itu, masyarakat telah menjadi semakin modern seiring perkembangan zaman sehingga masyarakat sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka (Darmawan, 2018).

Smart city adalah sebuah impian dari semua kota-kota besar di seluruh dunia. Konsep *smart city* sendiri sebenarnya dapat didefinisikan secara luas, bahkan dapat dikatakan tidak ada definisi yang benar-benar tepat atau absolut. Sebagai parameter, terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda tentang definisi *smart city* (Kajian Pengembangan *Smart City* di Indonesia, 2015). Menurut KSPPN Bappenas (2013), *smart city* pada dasarna merupakan pengembangan lebih lanjut dari kawasan perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya dan menuju kepada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, sejak tahun 2017 telah dimulai inisiasi pengembangan *smart city* di Indonesia melalui Gerakan Menuju *Smart City*. Pada tahun 2023, telah terpilih 50 kota/kabupaten yang akan menerapkan konsep *smart city* dalam pencapaian pembangunan daerahnya, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 km sebelah utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, memiliki peran strategis dalam mendukung IKN. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah sekaligus kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang telah terbentuk secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Potensi pengembangan daerah yang ada ini harus digali sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui inovasi-inovasi dalam perspektif konsep smart city. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah

berkomitmen sesuai dengan Inpres Nomor 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government untuk memanfaatkan teknologi informasi pemerintah sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Komitmen ini diwujudkan dalam Misi 5 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis.

Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kota cerdas, maka disusun Masterplan *Smart City* sebagai dokumen perencanaan yang dapat memandu dalam mengintegrasikan konsep *smart city* dalam pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Tujuan Pendampingan Penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah untuk:

1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan smart city di tingkat pusat dan daerah;
2. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep smart city;
3. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMN dalam dokumen perencanaan smart city daerah; dan
4. Mendorong proses pengembangan smart city yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.2.2 Sasaran

Sasaran Pendampingan Penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Tersusunnya dokumen Panduan Penyusunan *Masterplan* Smart City yang komprehensif dan aplikatif;
2. Tersusunnya dokumen Masterplan Implementasi *Smart City* jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) kapubaten/kota di Indonesia;

3. Terlaksananya program pembangunan smart city daerah sesuai dengan masterplan yang telah disusun termasuk program quickwin dalam 1 (satu) tahun ke depan; dan
4. Membantu pemerintah daerah dalam tata pamong (governance) dan tata kelola (manajemen) pengembangan smart city sehingga dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai pendukung implementasi konsep *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
3. Surat Edaran Kementerian Komunikasi Dan Informatika Nomor B-349/ DJAI/AI.01.02/06/2022 Tentang Asemen Penetapan 50 Kabupaten/ Kota Menuju Gerakan Smart City 2023;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan;
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelengaraan Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Penyelengaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (e- Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
8. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 415.4/03/NK/ PEM/2023 tanggal 28 Februari 2023 Tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023.

1.4 Kerangka Pikir *Smart City*

Teori *smart city* terus berkembang dan setidaknya dipengaruhi oleh tiga teori yaitu *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan), *Smart Growth*, dan *Digital/Cyber City*. Dari ketiga teori tersebut, Pembangunan Berkelanjutan memiliki umur yang paling tua dan hingga sekarang beradaptasi dengan teori-teori lain. *Smart city* dinilai memiliki pendekatan yang memudahkan kota dalam berkembang antara lain: 1) Konsep yang tidak menghilangkan adaptasi teknologi sebelumnya dimana teknologi tersebut juga sudah menjadi konsumsi dunia saat ini. Teknologi tersebut termasuk teknologi sensor dan *system control* digital pada infrastruktur perkotaan; 2) Pertumbuhan jaringan nirkabel yang memungkinkan banyak jaringan dan distribusi data terhubung sehingga dapat saling bertukar informasi; 3) Perkembangan teknik manajemen informasi dengan model semantik (berdasarkan arti kata) yang terstandarisasi sehingga setiap orang mudah menerjemahkan suatu informasi; dan 4) Perkembangan komputasi dan algoritma baru yang menjadikan arus informasi menjadi makin *real-time* (Rusadi, 2014).

Secara definisi, smart city merupakan sebuah konsep kota cerdas yang mampu mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan membagi informasi secara luas (Tomordy, 2010). Selain itu, smart city merupakan kota yang mampu mengintegrasikan infrastruktur keras (modal fisik) dengan sumber daya manusia, modal sosial (social infrastructure), dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2009). Dengan kata lain, prinsip utama smart city adalah mengintegrasikan peran pemerintah dan peran masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Secara khusus, kerangka pikir smart city yang dikembangkan sesuai konteks Indonesia yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam implementasi smart city di seluruh kota/kabupaten terpilih termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan digambarkan dalam Gambar 1.1 yang disusun berdasarkan Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

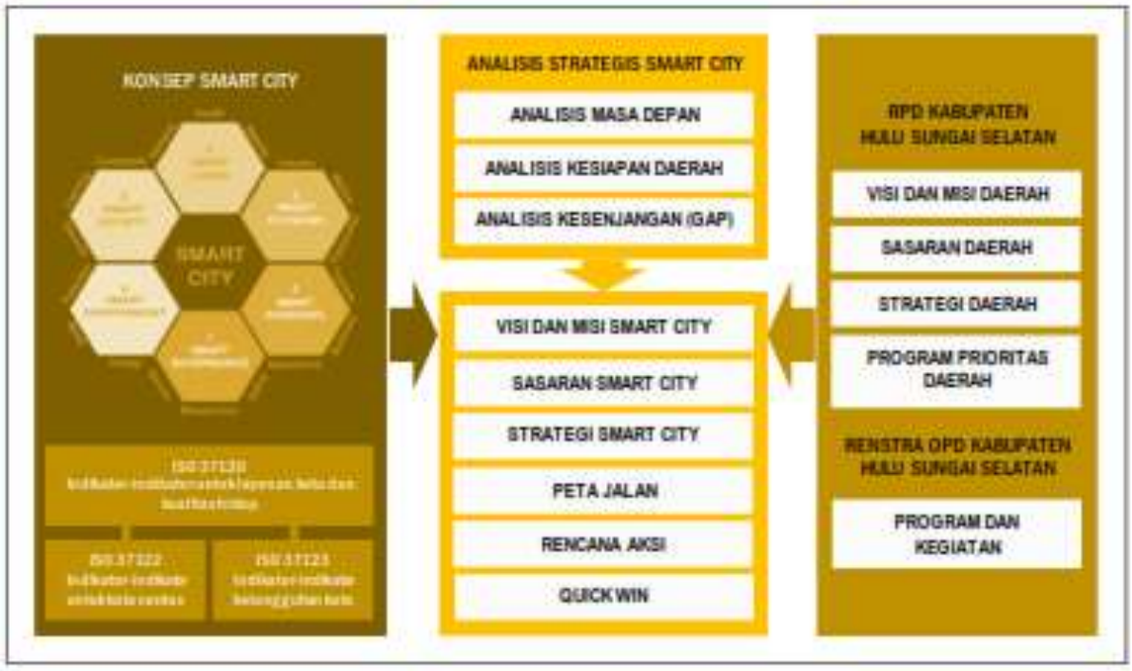

(*Sumber*: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; diolah, 2023)

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam kerangka pikir tersebut digambarkan bahwa seluruh tahapan penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada konsep yang terdiri dari enam dimensi pembangunan *smart city*, dijelaskan sebagai berikut.

1. Smart *Governance*

Dimensi pertama ini didefinisikan sebagai tata kelola *smart city* yang menyoroti tata kelola pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan seluruh kehidupan kota. Dengan mengimplementasikan tata kelola kota yang pintar maka pemerintah diharapkan mampu mengubah birokrasi tradisional menuju birokrasi yang lebih cepat, efisien, efektif, komunikatif, dan selalu mampu melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga dapat mencapai kualitas kinerja birokrasi yang baik dengan melakukan inovasi dan adopsi teknologi terpadu.

2. Smart *Branding*

Dimensi kedua ini didefinisikan sebagai kemampuan daerah dalam membuat inovasi untuk memasarkan daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah yang berfokus pada bidang pariwisata, bisnis, dan membangun citra/wajah kota. Melalui dimensi ini maka diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan mencapai kehidupan sosial yang layak dengan tetap menjaga kelestarian budaya lokal sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan.

3. Smart *Economy*

Dimensi ketiga *smart city* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang dapat mendukung seluruh aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan potensi dan sektor unggulan daerah sehingga masyarakat secara ekonomi mampu adaptif terhadap segala perubahan yang muncul dalam era VUCA (*volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity*) saat ini. Dimensi ini berfokus pada upaya membangun ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan membangun ekosistem transaksi keuangan.

4. Smart *Living*

Dimensi keempat ini bertujuan untuk mendorong kelayakan taraf hidup masyarakat melalui pola hidup yang layak, kualitas kesehatan yang layak, dan ketersediaan moda transportasi yang dapat mendukung mobilitas orang dan barang di daerah.

5. Smart *Society*

Dimensi kelima ini menjadikan manusia sebagai unsur utama kota. Tujuan elemen ini adalah untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik secara fisik maupun virtual sehingga tercipta masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang mumpuni. Perwujudan dimensi ini melalui interaksi masyarakat yang efektif, ekosistem belajar yang efektif, dan terbentuknya sistem keamanan masyarakat.

6. Smart *Environment*

Dimensi terakhir ini memiliki ide untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang berfokus pada perlindungan lingkungan, pengembangan tata kelola sampah dan limbah, serta kemampuan mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab. Dimensi ini diharapkan dapat mendorong perhatian pada lingkungan hidup alih-alih hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik.

Keenam dimensi ini merupakan arsitektur pendukung perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, konsep *smart city* merupakan bagian dari pendukung rencana strategis daerah baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Oleh karena itu, *masterplan smart city* meliputi isu- isu strategis, tujuan, dan sasaran, serta mengutamakan peristiwa pembangunan. Dalam konstruksi ini, maka kerangka pikir penyusunan *masterplan smart city* daerah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan dokumen perencanaan pembangunan *smart city* daerah yang disusun dengan

mempertimbangkan seluruh dokumen perencanaan daerah dalam hal ini RPJPD, RPD, Renstra, dan Renja. Secara khusus, untuk dapat mengukur ketercapaian implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka indikator yang digunakan adalah indikator perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan SNI 37122:2019.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu bagian wilayah pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi dan peluang untuk maju dan berkembang. Implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus berlandaskan pada visi pembangunan *smart city* sehingga dapat ditentukan sasaran pencapaian pembangunan *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Visi *smart city* ini kemudian diturunkan ke dalam misi pembangunan *smart city*. Adapun Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Nasional; harapan warga masyarakat; dan faktor eksternal di masa depan. Penjelasan visi, misi, dan sasaran *smart city* diuraikan sebagai berikut.

2.1 Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Daerah

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C/17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 (enam) kabupaten administratif dan 3 (tiga) swapraja. Salah satunya *Afdeling Van Hoeloe Soengai* dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibu kota Kandangan. Untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan suatu inisiatif untuk menjadi paradigma yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan rencana pembangunan melalui penerapan *smart city*. Oleh karena itu, penyusunan *masterplan smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Pada tahun 2023, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berakhir. Namun, terdapat kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kebijakan

dimaksud, maka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terdapat masa transisi menjelang Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 sehingga dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam menganalisis visi pembangunan daerah ini menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.

Visi pengembangan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi dasar perumusan prioritas pengembangan pembangunan daerah selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dengan terus melakukan inovasi untuk mencapai peningkatan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Visi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai:

"Hulu Sungai Selatan yang Sehat, Makmur, Agamis,
Rakat, dan Berbasis Teknologi (HSS SMART)"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. HSS SMART dimaknai sebagai Hulu Sungai Selatan yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi kreatif, inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Secara keseluruhan, visi pembangunan *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada kata kunci utama yaitu:

- **Sehat**: Kota yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan inklusif, dan berupaya menyediakan dimensi permukiman, lalu lintas dan

transportasi, industri, perkantoran dan pariwisata yang sehat.

- **Makmur**: Kota dengan kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.
- ***Agamis***: Kota yang mendasarkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, dan implementasi nilai sosial, moral, norma, etika, tradisi, kearifan lokal dan toleransi sebagai fondasi kehidupan.
- **Rakat**: Kota yang mengedepankan konsep kerja sama yang dinamis, dialogis, namun tetap harmonis untuk mencapai kondisi yang lebih baik, serta menyediakan lingkungan dan dinamika kehidupan perkotaan yang terbuka, ramah, dan menghormati pluralisme.
- **Berbasis Teknologi**: Kota yang menggunakan teknologi secara optimal dan bijak untuk kemudahan, kecepatan, keteraksesan dan kualitas layanan sebagai dimensi utama pada semua aspek.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan misi yang jelas, karena misi merupakan suatu pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun Misi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama.
2. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Agribisnis- Agroindustri yang Berteknologi Tinggi.
4. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

2.2 Indikator Utama *Smart City* Daerah

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2023 menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu dari 50 (lima puluh) kabupaten/kota terpilih dalam implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Oleh karena itu, penyusunan *masterplan smart city* diharapkan dapat membantu akselerasi pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan. Dengan demikian dapat diidentifikasi sinkronisasi sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan enam dimensi *smart city* (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1

Sinkronisasi Misi, Tujuan, dan Sasaran RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Enam Dimensi *Smart City*

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi *Smart City*					
				Smart Governance	*Smart Branding*	*Smart Economy*	*Smart Living*	*Smart Society*	*Smart Environment*
Misi 4 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Agribisnis - Agroindustri **Misi 5** Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	**Tujuan 1** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan	**Sasaran 1.1** Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan	**Indikator 1** Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan **Indikator 2** Indeks Daya Saing Pariwisata **Indikator 3** Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur **Indikator 4** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup **Indikator 5** Indeks Risiko Bencana		✓	✓	✓	✓	✓
		Sasaran 1.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan	**Indikator 1** Tingkat Pengangguran Terbuka **Indikator 2** Rasio Gini **Indikator 3** Indeks Desa Membangun			✓		✓	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi *Smart City*					
				Smart Governance	*Smart Branding*	*Smart Economy*	*Smart Living*	*Smart Society*	*Smart Environment*
Misi 1 Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama serta Membangun Sikap Religius	**Tujuan 2** Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	**Sasaran 2.1** Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komiditi Pangan dan Non-Pangan Masyarakat	**Indikator 1** Harapan Lama Sekolah **Indikator 2** Rata-rata Lama Sekolah **Indikator 3** Pengeluaran Per Kapita **Indikator 4** Indeks Literasi						
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing		**Sasaran 2.2** Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**Indikator 1** Keamanan dan Ketertiban **Indikator 2** Indeks Pembangunan Kebudayaan						
Misi 3 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Tujuan 3** Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	**Sasaran 3.1** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Layanan Sampai ke Tingkat Desa	**Indikator 1** SAKIP **Indikator 2** Indeks Reformasi Birokrasi **Indikator 3** Sistem Merit ASN **Indikator 4** Indeks Inovasi Daerah						

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Kemudian secara rinci dapat dirumuskan keterkaitan antara misi dengan dimensi *smart city* sebagai berikut. Pertama, Misi 1 *Smart City* adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama disokong oleh dua dimensi *smart city*, yaitu *Smart Living* dan *Smart Society*. Kedua, Misi *Smart City* adalah Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas disokong oleh dimensi *Smart Governance*. Ketiga, Misi 3 *Smart City* adalah Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Agribisnis-Agroindu stri yang Berteknologi Tinggi disokong oleh dimensi *Smart Economy*. Terakhir, Misi 4 *Smart City* adalah Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan disokong oleh dimensi tiga dimensi, yaitu dimensi Smart Branding, Smart Economy, dan Smart Environment. Pemetaan keterkaitan antara misi smart city dengan dimensi smart city disajikan pada Gambar 2.1.

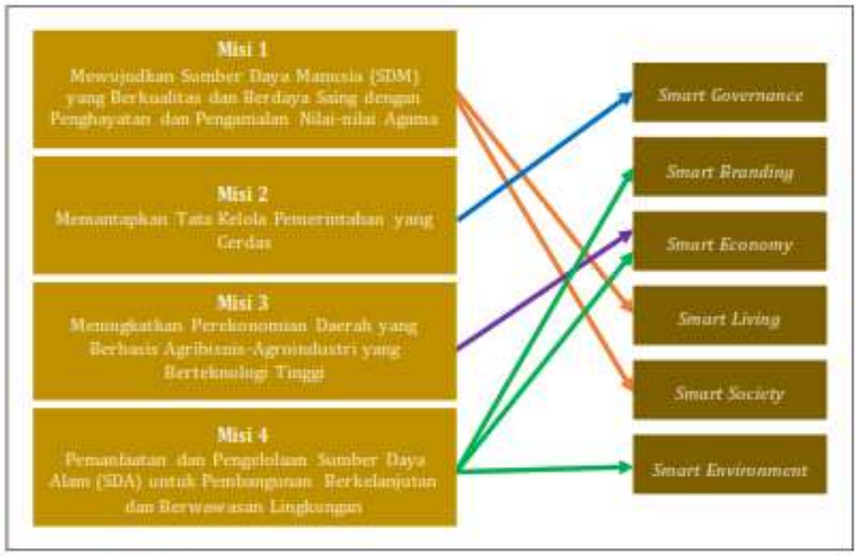

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Gambar 2.1
Keterkaitan Misi *Smart City* dengan Dimensi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi maka perlu dilakukan penjabaran atas visi dan misi *smart city* terpilih ke dalam rumusan sasaran berdasarkan subdimensi dari masing-masing dimensi *smart city* beserta dasar pemikiran pembentuknya serta menetapkan indikator berkualitas yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan diterapkannya *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun indikator yang ditetapkan pada masing-masing sasaran merupakan Indikator Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD dan indikator *smart city* yang ada dalam SNI ISO 37122:2019. Berikut ini disampaikan uraian berbagai indikator *smart*

city Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan sasaran pembangunan *smart city* dalam rentang waktu 2024-2034.

2.2.1 Sasaran *Smart Governance*

Dimensi *Smart Governance* menggambarkan implementasi tata kelola pemerintahan dengan pendekatan cerdas. Organisasi pemerintahan menjadi fokus utama dalam mencapai *smart governance* yang efektif. Kesuksesan *smart governance* diukur dengan pencapaian sasaran dari setiap subdimensi, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta perancangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran utama dimensi ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas dengan orientasi layanan yang mencakup hingga tingkat desa. Dengan mencapai tujuan ini, *smart governance* diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan masyarakat. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Governance* dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi Smart Governance

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Layanan Publik	Dengan konsep *smart governance* akan meningkatkan kualitas layanan publik pemerintahan daerah yang merata hingga ke desa dengan menyederhanakan proses, mempersingkat waktu, dan efektif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas berorientasi pada layanan sampai desa	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	*18.2* Persentase area kota di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi *18.3* Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota
Birokrasi	Memperkuat Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintaha daerah dan mendorong terciptanya birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan hingga di level desa	Memantapkan reformasi birokrasi berbasis digital sampai di tingkat desa	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	*10.2* Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Perancangan Kebijakan	Membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sampai di tingkat desa	Meningkatnva kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sampai di tingkat desa	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	Nilai SAKIP	*21.1* Iumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.2.2 Sasaran *Smart Branding*

Dimensi *Smart Branding* menjadi komponen yang sangat penting dengan tujuan utama meningkatkan sektor pariwisata, daya saing bisnis, dan wajah kota. Sebagai elemen kunci yang mengemban peran sentral dalam evolusi perkotaan, keberhasilan *smart branding* terletak pada efektivitas implementasi kebijakan perkotaan serta partisipasi aktif semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan implementasi *smart branding* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan memiliki peran strategis karena tidak hanya menciptakan identitas yang menarik dan positif untuk suatu kota, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan meningkatkan daya saing bisnis. Daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah. Sementara itu, peningkatan daya saing bisnis membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Maka dari itu, dimensi ini menjadi kunci untuk membangun perkotaan yang berdaya saing dan berkesinambungan. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Branding* dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi Smart Branding

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Pariwisata	Dengan berkembangnya destinasi wisata alam dan wisata budaya diharapkan akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang berwirausaha bagi masyarakat lokal sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran	Berkembangnya destinasi wisata alam, budaya, dan religi	Meningkatkan pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat	Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks Pembangunan Kebudayaan	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring 17b.1 Jumlah pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk 17b.2 Persentase catatan budaya yang telah Didigitalkan
Daya Saing Bisnis	Dengan penetrasi *branding* ini diharapkan akan meningkatkan daya saing produk daerah	Meningkatnya penetrasi *brand* produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Persentase Peningkatan Kualitas Produk Industri Pengolahan	*5.2* Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk *20.1* Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif Pertanian *20.3* Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan Daring
Wajah (Tampilan) Kota	Dengan terwujudnya sebagai sentra UMKM dan wisata religi diharapkan akan menjadi daya tarik bagi investor maupun wisatawan	Terwujudnya kota sentra UMKM	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	Persentase Peningkatan Produktivitas Per Unit Usaha	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.2.3 Sasaran *Smart Economy*

Implementasi *smart economy* akan membawa sejumlah manfaat penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan efisiensi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dengan proses bisnis yang lebih cerdas, pemborosan dapat diminimalkan, produktivitas ditingkatkan, dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Selain itu, *smart economy* juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru dengan mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, seperti teknologi informasi, industri kreatif, dan layanan terkait teknologi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi dampak positif, diwujudkan melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap pekerjaan, dan pelayanan publik yang lebih baik. Tak kalah pentingnya, implementasi *smart economy* juga berfokus pada inklusivitas, memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di antara masyarakat. Peningkatan akses dan partisipasi dalam ekonomi digital bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan lapisan masyarakat yang lebih luas. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Economy* dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi Smart Economy

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Ekosistem Industri	Dengan meningkatkan daya saing sektor industri akan meningkatkan pangsa pasar terhadap komoditas UMKM, sehingga industri daerah *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi dengan industri primer, sekunder dan tersier	Meningkatnya daya saing sektor industri yang terintegrasi dengan sektor primer, sekunder, dan tersier	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausaha-an dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	Laju Pertum-buhan Ekonomi Persentase Peningkat-an Kuantitas Bahan Baku Lokal	*20.1* Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan
Kesejahteraan Masyarakat	Dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri karena memiliki pendapatan yang meningkat dan tersedianya kesempatan kerja	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berdaya dan mandiri	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembang-an usaha produktif sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri	Persentase Penduduk Miskin Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (Angkatan Kerja yang Bekerja)	*5.3* Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) *5.4* Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan
Ekosistem Transaksi Keuangan	Menciptakan ekosistem transaksi keuangan yang mudah, murah, dan terjangkau melalui berbasis digital yang dapat mendorong industri *e-commerce* dan *marketplace* dengan terbangunnya budaya masyarakat menggunakan transaksi keuangan digital	Terwujudnya ekosistem transaksi keuangan berbasis digital	Mengembang-kan infrastruktur transaksi keuangan berbasis digital berupa pengembang-an *platform* aplikasi digital dan *sofware* pendukung, serta mengembang-kan SDM yang memiliki keahlian dan talenta digital	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	*9.1* Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri *9.2* Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.2.4 Sasaran *Smart Smart Living*

Konsep *smart living* atau kehidupan cerdas akan dapat diimplementasikan dan memberi kebermanfaatan yang signifikan jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama berpartisipasi dalam membangun sasaran prioritas *smart living*. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran kunci dalam merancang

kebijakan, menciptakan infrastruktur cerdas, dan menyediakan layanan publik yang terintegrasi. Keikutsertaan aktif pemerintah dalam membangun sasaran prioritas *smart living* mencakup aspek-aspek seperti teknologi informasi, keberlanjutan lingkungan dalam tata ruang, sistem transportasi, dan layanan kesehatan yang terhubung. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Living* dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi Smart Living

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator Capaian	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman, lingkungan pusat bisnis, yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga sehingga menciptakan kenyamanan dan kualitas hidup yang baik	Meningkatnya tata ruang wilayah yang harmonis untuk mendukung daya saing daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan Harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), Pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan *stakeholder* terkait	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	*21.4* Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi
Kesehatan	Dengan derajat kesehatan yang baik akan meningkatkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk mendukung akses terhadap kualitas pendidikan, dan komoditi pangan dan non-pangan masyarakat	Mewujudkan Modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	*11.1* Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan
Transportasi	Mewujudkan transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik daerah	Meningkatnya ekosistem transportasi yang lancar dan aman untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komiditi pangan dan non-pangan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transportasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	Persentase Konektivitas Jalan dalam Kondisi Mantap	*19.5* Persentase Jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses publik *19.9* Persentase lampu lalu lintas yang cerdas *19.12* Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.2.5 Sasaran *Smart Society*

Smart society merupakan kondisi ideal dimana interaksi antara individu, komunitas, dan dunia digital terjalin secara harmonis. Dalam *smart society*, setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan yang didukung oleh fasilitas belajar secara digital. Artinya, pemberian pendidikan tidak hanya terfokus pada akses fisik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung proses belajar-mengajar. Selain itu, pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan *smart society* dengan memastikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, properti, dan mengelola risiko bencana bagi masyarakat. Ini mencakup implementasi kebijakan dan infrastruktur yang mendukung keamanan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek kejahatan, kecelakaan, maupun bencana alam. Perlindungan ini juga mencakup upaya pencegahan dan tanggap darurat yang efektif untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, implementasi *smart society* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya menciptakan konektivitas digital, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses pendidikan yang merata dan perlindungan yang efektif, menciptakan lingkungan yang aman, cerdas, dan berdaya saing. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Society* dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi Smart Society

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Interaksi Masyarakat	Dengan terbangunnya modal sosial masyarakat akan mendorong toleransi dan kerukunan serta harmonisasi masyarakat di tengah masyarakat yang semakin beragam	Terciptanya modal sosial masyarakat yang tangguh	Menguatkan keterhubungan dan keterbukaan sosial melalui pendidikan, kolaborasi dan elaborasi, serta nilai-nilai positif untuk menciptakan modal sosial yang tangguh	Indeks Desa Membangun Persentasi Pemuda yang Berwirausaha Persentase Penyandang Disabilitas yang Memiliki Keterampilan	*13.4* Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital *13.2* Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan program formal dan non-formal untuk meningkatkan kompetensi SDM terutama penduduk miskin dan pengangguran untuk suplai tenaga kerja yang berkualitas di segala bidang dan sesuai dengan survei kebutuhan pasar kerja	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non-formal	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui infrastruktur yang memadai, kurikulum relevan, pengembangan guru, pendekatan inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan mitra pembangunan, program pembelajaran seumur hidup, serta evaluasi berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	*6.3* Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	*6.2* Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa
				Indeks Literasi	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul *e-book* per 100.000 penduduk *17.4* Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Keamanan Masyarakat	Peningkatan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin/kurang mampu melalui bantuan sosial berbasis digital dalam rangka menahan beban pengeluaran	Terciptanya keamanan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata dan digitalisasi	Menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan	Indeks Keamanan dan Ketertiban	*15.1* Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.2.6 Sasaran *Smart Environment*

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diidentifikasi sebagai wilayah tropis, yang terletak di tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan memiliki ciri iklim tropis lembab. Kendati demikian, terdapat perubahan pola cuaca dengan seringnya hujan di tengah musim kemarau panjang. Kabupaten ini ditandai oleh keberadaan hutan yang cukup luas, meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena berbagai faktor seperti eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, dan pembukaan lahan baru untuk pemukiman.

Dalam konteks ini, implementasi *smart environment* menjadi sangat penting. *Smart environment* mencerminkan komitmen sebuah kota atau daerah terhadap pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi secara berkelanjutan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hal ini menjadi relevan mengingat tekanan eksploitasi lahan dan industrialisasi yang berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan konsep *smart environment*, diharapkan wilayah ini dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih bijak, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan di tengah dinamika perubahan iklim. Rumusan subdimensi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi dari dimensi *Smart Environment* dapat dilihat pada Tabel 2**.7.**

Tabel 2.7
Subdimensi, Dasar Pemikiran, Sasaran, dan Strategi Dimensi *Smart Environment*

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Proteksi Lingkungan	Dengan terjaganya kualitas air, udarta dan tutupan lahan dalam kondisi baik dapat meningkatkan potensi pariwisata dan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Memastikan terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam kondisi baik untuk menunjang potensi unggulan ekonomi lokal berkesinam-bungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi mulitipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*23.3* Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem
				Indeks Risiko Bencana	*11.3* Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (*real-time*) untuk sarana kualitas udara dan air
Pengelolaan Sampah dan Limbah	1. Dengan terkelolanya persampahan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat 2. Dengan efektifnya pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan dapat meminimalkan terjadinya potensi pencemaran dan bencana	Memastikan terciptanya pengelolaan sampah dan limbah yang cerdas untuk menunjang potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	Indeks Cakupan Pengelolaan Persampahan	*16.3* Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi *16.4* Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota *16.6* Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang

Sub-dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Tata Kelola Energi	Dengan penggunaan gas metan sebagai pengganti bahan bakar minyak dapat mengurangi emisi GRK	Meningkatnya potensi penggunaan energi terbarukan melalui pengolahan sampah menjadi gas metan kemudian menjadi energi listrik	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	-	*7.1* Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padar, dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu *7.3* Energi listrik dan panas dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis kesenjangan dan strategi yang ditetapkan untuk dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah jitu mewujudkan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan strategi dilakukan pada setiap sasaran dari setiap dimensi *smart city*, yaitu tata kelola birokrasi dan pemerintahan (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), ekonomi (*smart economy*), dan ekosistem perumahan (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*) dan perlindungan terhadap lingkungan (*smart environment*).

3.1 Analisis Kesenjangan (*Gap*)

Pada bagian ini telah teridentifikasi kesenjangan (*gap*) pada seluruh dimensi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan analisis ini akan diketahui kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang diinginkan atau keadaan yang diinginkan di masa depan. Analisis kesenjangan dari seluruh dimensi *smart city* dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Analisis Kesenjangan Berdasarkan Dimensi *Smart City*
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
Smart Governance		
Belum semua sistem pelayanan terintegrasi	Akselerasi sistem pelayanan yang terintegrasi	Meningkatkan sistem pelayanan yang terintegrasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas data
Belum adanya basis data terpadu dan terintegrasi antarsektor pemerintahan	Basis data antarsektor pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang valid dan memiliki integritas yang tinggi	Membangun *database* terintegrasi dengan memperbaiki mekanisme sistem pengelolaan *database* antarsektor pemerintahan

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
Partisipasi publik melalui *platform* digital belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan sistem pelayanan publik berbasis digital	Masih perlunya sosialisasi dan komunikasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membangun *smart governance*
Komitmen pimpinan daerah untuk melaksanakan *smart governance* yang tinggi	Terwujudnya *smart governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan *smart governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan *smart governance*	Penyelenggaraan tata kelola dan kinerja pemerintahan yang baik	Perlunya integrasi regulasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi kepastian regulasi yang memadai dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi cerdas untuk pelaksanaan *smart governance*
Kesenjangan infrastruktur dan konektivitas digital yang menghambat adopsi teknologi cerdas secara menyeluruh dan pemanfaatan data yang efektif	Infrastruktur dan konektivitas digital yang merata guna adopsi teknologi cerdas secara menyeluruh dan pemanfaatan data yang efektif	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas digital yang menyeluruh
Tingginya kebutuhan akan ketersediaan data yang *real-time* dari berbagai sumber untuk memudahkan pengambilan kebijakan dan operasional perangkat daerah demi terciptanya pemerintah yang efektif dan efisien	Kualitas pelayanan publik yang prima dengan tersedianya informasi pengambilan keputusan dan operasional yang berkualitas dan cepat	Peningkatan penggunaan *Internet of Things* (IoT) dan jaringan sensor akan memungkinkan pengumpulan data secara *real-time* dari berbagai sumber
Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas pengetahuan	Kualitas SDM yang dapat mendukung *smart governance*	Peningkatan kualitas SDM yang dapat meningkatkan penggunaan sistem informasi yang

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
dan keterampilan dalam mengelola teknologi cerdas untuk implementasi *smart governance*		memanfaatkan kecerdasan buatan dan analitik data dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan
	Smart Branding	
Produk UMKM secara *packaging* kurang menarik dan pemasaran secara konvensional	Produk UMKM masuk *e-commerce* nasional maupun internasional	Meningkatkan kreativitas pelaku usaha dan menumbuhkan semangat kompetitif
Event pariwisata belum teragendakan secara baik dan masih tergantung pada musim/iklim	*Event* pariwisata diekspos dari awal tahun dan dipromosikan secara terpadu	Optimalisasi *branding* pada potensi budaya yang sudah ada dengan pengembangan wisata digital
Potensi wisata alam yang begitu unik dan menarik dengan ditetapkannya Loksado sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan masuk ke dalam *Geopark* Meratus dan wisata religi	Terciptanya akses satu pintu bagi wisatawan yang ingin mengunjungi daya tarik wisata	Pemberdayaan sumber daya manusia pariwisata dan TIK
Penentuan kawasan belum teroganisir dengan baik (RTRW - RDTR)	Mewujudkan keterpaduan pembangunan di dalam kabupaten	RTRW - RDTR masih dalam proses penyusunan, akibatnya proses persetujuan tata ruang memerlukan waktu yang lama
Harga jual produk pada saat panen raya terutama komoditas hortikultura seperti lombok, tomat dan lain-lain mengalami penurunan harga	Sistem informasi pemasaran pertanian yang terintegrasi	Pengembangan sistem informasi pasar yang efisien agar petani dapat memperoleh informasi tentang harga pasar yang sedang berlaku dan permintaan pasar, sehingga dapat menentukan waktu yang tepat untuk menjual produk mereka dan mendapatkan harga yang lebih tinggi

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
	Smart Economy	
Penjualan/pemasaran produksi pertanian masih konvensional dan diatur pedagang perantara sehingga harga murah	Digitalisasi pemasaran pertanian yang terintegrasi, lincah, dan kolaboratif	Pengembangan UKM dan petani milenial dalam sistem digitalisasi pemasaran
Rendahnya nilai tambah produk pertanian karena belum dijadikan sebagai produk olahan	Produk olahan dengan kualitas ekspor	Meningkatkan pemberdayaan terhadap potensi sumber daya alam terutama sektor pertanian pada UKM dan industri kecil menengah
Pertanian masih konvensional dan banyak tergantung pada musim/iklim	Pertanian menggunakan teknologi pertanian modern untuk menjawab tantangan iklim dan kemajuan (*smart farming*)	Penerapan teknologi dan inovasi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif pertanian pada lingkungan
Belum seluruh UMKM mendapatkan pendampingan dan bantuan fasilitas UMKM	UMKM yang cakap dan berdaya saing	Terlaksananya pembinaan secara merata terhadap semua UMKM serta fasilitas (sertifikasi halal, SNI, dan PIRT) yang diperlukan oleh UMKM dapat terpenuhi secara maksimal
Transaksi masih didominasi pembayan tunai (konvensional)	Terciptanya budaya transaksi pembayaran non-tunai secara merata di seluruh prasarana publik	Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pemanfaatan media transaksi non-tunai
Masih adanya penduduk miskin sebesar 4,54 persen tahun 2022	Terbangunnya ekosistem usaha masyarakat	Membangun hubungan kolaboratif dengan multipihak untuk membina UMKM dan kemudahan dalam modal usaha
	Smart Living	
Kurang tersedianya sarana prasarana publik yang ramah untuk penyandang disabilitas	Kabupaten yang ramah disabilitas	Meningkatkan aksesibilitas kaum disabilitas di area publik dengan ketersediaan sarana prasarana ramah difabel

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
Sarana prasarana pariwisata yang belum menunjang untuk memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung setiap akhir pekan	Sarana dan prasarana rekreasi yang keluarga yang mendukung	Peningkatan manajemen pariwisata yang berorientasi pada keluarga
Kualitas kondisi jalan yang yang menurun akibat kondisi alam dan angkutan alat berat melintasi jalan	Ekosistem transportasi yang berkualitas dan aman	Pemeliharaan jalan yang rusak oleh alam dan pengendalian angkutan berat yang melintasi jalan
Jumlah sarana prasarana rambu petunjuk jalan masih terbatas		Peningkatan survei serta evaluasi dan penyedia rambu petunjuk jalan
Tenaga ahli yang menguasai teknologi kesehatan masih terbatas	Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang baik	Meningkatkan kapasitas tenaga ahli bidang kesehatan yang menguasai teknologi secara merata
Kesenjangan SDM berkualitas pada fasilitas kesehatan		Pemerataan pelatihan teknis kesehatan untuk semua tenaga kesehatan
Tidak semua puskesmas menggunakan aplikasi sistem informasi puskesmas	Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	Meningkatkan aplikasi sistem informasi puskesmas yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah
Integrasi informasi kesehatan baru terintegrasi cukup rendah di bidang subspesialis		Peningkatan kualitas pengumpulan informasi kesehatan yang terkini dan terintegrasi
Smart Society		
Kekurangan tenaga pendidik di daerah terpencil seperti di Kecamatan Loksado dan Kecamatan Daha	Pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Terpenuhinya tenaga pendidik di daerah Loksado dan Daha dengan adanya pengadaan formasi PPPK
Sarana TIK untuk pendidikan saat ini masih kurang	Terbentuknya ekosistem digitalisasi dalam bidang pendidikan	Pemetaan sekolah yang belum mempunyai sumber daya listrik, internet dan

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
		sarana TIK dari segi geografis
Banyak siswa kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi karena keterbatasan biaya	Tersedianya SDM daerah yang unggul	Alokasi dana yang tersedia sangat terbatas karena kewenangan SMA/SMK ada pada pemerintah provinsi dan santri di Kemenag
		Terfasilitasinya siswa dan santri kurang mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa maupun sumber bantuan lainnya
		Pemetaan siswa SMA/SMK dan santri BNBA
Rendahnya minat baca masyarakat di perpustakaan daerah	Tumbuhnya budaya literasi membaca masyarakat	Meningkatkan sosialisasi budaya baca ke masyarakat dan sekolah
		Meningkatkan taman baca digital untuk masyarakat dan sekolah
Pencari kerja dari lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi belum memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pemberi kerja	Tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing	Pengadaan pelatihan dan pemagangan kerja berdasar klaster kompetensi berbasis NIK penduduk dan lokasi (geospasial) yang terhubung dengan aplikasi SIAPKERJA
		Membangun BLK
		Memastikan suplai tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar dengan berkolaborasi dengan lembaga survei resmi untuk survei pasar kebutuhan tenaga kerja
Pencari kerja dari penyandang disabilitas belum memiliki tingkat pendidikan yang baik	Optimalisasi layanan inklusi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas	Peningkatan pendidikan dan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas dengan pendidikan non-formal dan pelatihan kompetensi
		Pemetaan tenaga kerja penyandang disabilitas berbasis NIK dan lokasi

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
		Optimalisasi aplikasi SIAPKERJA dan aplikasi pemetaan BNBA dan lokasi untuk tenaga kerja penyandang disabilitas
Data BNBA penduduk miskin sudah berbasis NIK namun Bantuan sosial masih belum didukung pemetaan berbasis lokasi (geospasial)	Menciptakan keamanan sosial berbasis lokasi (geospasial) yang terintegrasi dan mudah digunakan	Peningkatan Data BNBA penduduk miskin sudah berbasis data *geotagging*
		Mengoptimalkan peran Sumber daya manusia (sarjana pendamping) yang sudah ada untuk digitalisasi data bansos berbasis lokasi
Smart Environment		
Kualitas air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kondisi baik	Kualitas air menjadi kelas I	Menjaga dan meningkatkan kualitas air mengingat ada potensi penurunan kualitas akibat adanya tambang pasir ilegal di aliran sungai yang perizinannya adalah kewenangan pusat sehingga sulit untuk diintervensi
Kualitas udara saat ini dalam kondisi sangat baik	Kualitas udara yang memadai	Mengantisipasi perubahan iklim yang dapat mengakibatkan terjadinya karhutla sehingga kualitas udara menurun karena kabut asap
Nilai kualitas tutupan lahan saat ini masih dalam kategori kurang, hal ini disebabkan oleh 40% luasan lahan adalah rawa yang tidak bisa ditanami dengan pepohonan sehingga nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak bisa ditingkatkan	Tumbuhnya vegetasi di lahan rawa	Membangun gerakan penanaman pohon produktif yang mampu hidup di lahan rawa yang dapat menciptakan vegetasi sehingga nilai tutupan lahan dapat meningkat dan bernilai ekonomis
Pengolahan sampah plastik baru sampai pencacah belum ada aplikasi pengelolaan sampah B3	Manajemen pengolahan sampah sampai menjadi bijih plastik	Memanfaatkan teknologi pengolahan sampah plastik yang mendukung sampai menjadi bijih plastik

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi *Gap*/Kesenjangan
Pengelolaan sampah sudah mencapai pedesaan walaupun belum menyeluruh 100 persen	Bank sampah digital berbasis masyarakat yang terintegrasi hingga level desa	Penyediaan aplikasi bank sampah yang hingga di level desa
Telah menggunakan energi ramah lingkungan (gas metan) namun baru terbatas untuk penerangan di TPA	Penggunaan energi ramah lingkungan yang menyeluruh	Dukungan untuk mengembangkan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan
Edukasi lingkungan dan kebencanaan belum merata	Terbangunnya sistem edukasi lingkungan dan kebencanaan berbasis digital	Peningkatan aplikasi kebencanaan yang selama ini masih menggunakan aplikasi milik BNPB (aplikasi INARISK) untuk edukasi lingkungan dan bencana

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3.2 Strategi Pembangunan *Smart City* Daerah

Strategi pembangunan *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berdasarkan menjadi enam dimensi *smart city*, yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society*, dan *smart environment*. Setiap dimensi terdapat tiga subdimensi yang kemudian memiliki sasaran, masing-masing sasaran dari subdimensi ini kemudian dirumuskan strategi untuk mencapai sasaran.

1. Strategi *Smart Governance*

Dimensi *Smart Governance* didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar. Dimensi *Smart Governance* diwujudkan dengan tercapainya sasaran berupa kualitas Layanan Publik, Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Perancangan Kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masing-masing sasaran pada dimensi *Smart Governance* dapat diwujudkan melalui strategi/kebijakan yang harus diambil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Subdimensi dan Strategi Smart Governance

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Layanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang cerdas berorientasi pada layanan sampai desa	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak
Birokrasi	Mantapnya reformasi birokrasi berbasis digital sampai di tingkat desa	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien
Perancangan Kebijakan	Meningkatnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sampai di tingkat desa	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2. Strategi *Smart Branding*

Smart branding merupakan salah satu dimensi dalam *smart city* yang dibutuhkan dalam era informasi seperti saat ini dimana sebuah kota tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi juga harus mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerah. Pada dasarnya konsep *branding* bertujuan untuk peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan ini maka ditetapkan sasaran-sasaran *smart branding* Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan subdimensi. Untuk mencapai masing-masing sasaran telah dirumuskan strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat Tabel 3.3).

Tabel 3.3
Subdimensi dan Strategi Smart Branding

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Pariwisata	Berkembangnya destinasi wisata alam, budaya, dan religi	Meningkatkan pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat
Branding/ Daya Saing Bisnis	Meningkatnya penetrasi *brand* produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan
Wajah (Tampilan) Kota	Terwujudnya kota sentra UMKM	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3. Strategi *Smart Economy*

Smart economy didefinisikan sebagai suatu sistem tata kelola perekonomian yang cerdas, sehingga mampu mengatasi tantangan pada era disrupsi ekonomi yang memerlukan adaptasi yang cepat. *Smart economy* terdiri dari tiga subpilar, yaitu pengembangan ekosistem industri yang berdaya saing, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekosistem transaksi keuangan. Masing-masing subpilar *smart economy* dirumuskan sasaran yang diharapkan dari implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setiap sasaran dapat dicapai melalui strategi- strategi yang telah dirumuskan dari analisis TWOS (lihat Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Subdimensi dan Strategi Smart Economy

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Ekosistem Industri	Meningkatnya daya saing sektor industri yang terintegrasi dengan sektor primer, sekunder, dan tersier	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat yang berdaya dan mandiri	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri
Ekosistem Transaksi Keuangan	Terwujudnya ekosistem transaksi keuangan berbasis digital	Mengembangkan infrastruktur transaksi keuangan berbasis digital berupa pengembangan *platform* aplikasi digital dan *sofware* pendukung, serta mengembangkan SDM yang memiliki keahlian dan talenta digital

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4. Strategi *Smart Living*

Sesuai dengan namanya, istilah "*smart*" dalam *smart living* merujuk pada kecerdasan yang digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas manusia sehari - hari. Dimensi *Smart Living* bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tercukupi baik dari aspek fisik, kesehatan, dan transportasi sehingga dapat meningkatkan kualitas baik dari segi infrastruktur dasar, kualitas fasilitas kesehatan masyarakat dan berbagai bentuk penunjang kegiatan dan interaksi masyarakat. Dimensi ini terdiri dari tiga subdimensi yaitu Harmonisasi Tata Ruang (*harmony*), Kesehatan (*health*), dan Transportasi (*mobility*). Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan *smart living* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Subdimensi dan Strategi Smart Living

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya tata ruang wilayah yang harmonis untuk mendukung daya saing daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan *stakeholder* terkait
Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komoditi pangan dan non-pangan Masyarakat	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan
Transportasi	Meningkatnya ekosistem transportasi yang lancar dan aman untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komoditi pangan dan non-pangan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transportasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

5. Strategi *Smart Society*

Smart society bertujuan untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, produktif, komunikatif, dinamis, interaktif baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi. Dengan demikian, *smart society* atau masyarakat cerdas dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem sosio-teknis (sosial-virtual) masyarakat yang humanis, produktif, dinamis, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi. Konsep *smart society* diterapkan dan diukur dalam tiga subdimensi, yaitu Interaksi Masyarakat, Ekosistem Belajar, dan Keamanan Masyarakat. Masing-masing subdimensi ini telah dirumuskan sasaran dan strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat Tabel 3.6).

Tabel 3.6
Subdimensi dan Strategi Smart Society

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Interaksi Masyarakat	Terciptanya modal sosial masyarakat yang tangguh	Menguatkan keterhubungan dan keterbukaan sosial melalui pendidikan, kolaborasi dan elaborasi, serta nilai-nilai positif untuk menciptakan modal sosial yang tangguh
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non-formal	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui infrastruktur yang memadai, kurikulum relevan, pengembangan guru, pendekatan inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan mitra pembangunan, program pembelajaran seumur hidup, serta evaluasi berkelanjutan
Keamanan Masyarakat	Terciptanya keamanan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata dan digitalisasi	Menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

6. Strategi *Smart Environment*

Smart environment merupakan pembangunan tata kelola lingkungan yang cerdas, dimana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. *Smart environment* tidak hanya terpaku kepada *smart building*. Konsep *smart environment* memiliki gagasan yang berlandaskan pengelolaan sumber daya alam dan menggunakan teknologi dalam mengatasi permasalahan, serta menjalankan program sesuai dengan permasalahan dalam lingkungan yang terjadi.

Secara umum, *smart environment* memiliki beberapa sasaran terkait Proteksi Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, dan Tata Kelola Energi. Berbagai strategi dalam mewujudkan berbagai dan sasaran pada dimensi Smart Environment Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Subdimensi dan Strategi Smart Environment

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Proteksi Lingkungan	Memastikan terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam kondisi baik untuk menunjang potensi unggulan ekonomi lokal berkesinambungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi mulitipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memastikan terciptanya pengelolaan sampah dan limbah yang cerdas untuk menunjang potensi ekonomi lokal yang berkesinambungan/ berkelanjutan	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital
Tata Kelola Energi	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan potensi energi terbarukan	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

BAB IV
RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka disusun rencana aksi yang merupakan panduan pelaksanaan *smart city.* Dalam melaksanakan rencana aksi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibutuhkan suprastruktur berupa kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur jaringan dan *data center*, serta pengembangan aplikasi yang sesuai dengan potensi daerah dan tuntutan perkembangan teknologi.

4.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan

Pengembangan kebijakan dan struktur kelembagaan menjadi faktor utama dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan konsep *smart city*. Kebijakan dapat berupa aturan yang membimbing arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan berkelanjutan program *smart city*, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terus menerus. Regulasi tersebut menjadi dasar yang mengatur proses implementasi dan pengawasan. Sementara itu, kelembagaan merujuk pada aspek non-fisik dari pemerintah yang bertujuan mengatur pembagian peran dalam menerapkan konsep *smart city* di daerah tersebut.

Beberapa pengembangan kebijakan pendukung *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi Perda *Masterplan Smart City*, Perda Dewan *Smart City*, Tim Pelaksana *Smart City.*
2. Penetapan kebijakan program smart city yang disesuaikan dengan perencanaan anggaran tahunan guna menjamin pelaksanaan.
3. Adanya kebijakan manajemen bandwidth, public internet protocol (IP) dan pemanfaatan akses internet.Selain itu, untuk memastikan keberhasilan implementasi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu dibentuk kelembagaan berupa pembentukan Dewan *Smart City* Daerah, pembentukan tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana *Smart City* Daerah, Pembentukan Tim Perencana dan Evaluator Kebijakan Pendukung *Smart City*, pembentukan Tim Perencana dan Evaluator Aplikasi Pendukung *Smart City*, pembentukan Tim Perencana dan

Pengelola Infrastruktur Pendukung *Smart City*, pembentukan Tim Penguatan Literasi Pendukung *Smart City.*

4.2 Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Pengembangan infrastruktur pendukung menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi *smart city.* Pengembangan infrastruktur pendukung mengacu pada pengembangan infrastruktur fisik dan pembangunan infrastruktur digital. Pengembangan infrastruktur fisik Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi *smart city* meliputi:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar baik fasilitas umum, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah;
2. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan kualitas jalur transportasi antarwilayah;
3. Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
4. Pengembangan fasilitas pelayanan masyarakat;
5. Pembangunan wajah kota;
6. Jaringan listrik yang memadai; dan
7. Moda transportasi umum yang layak.

Sementara, pengembangan infrastruktur digital Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi smart city meliputi:

1. Perluasan dan penguatan akses jaringan internet di seluruh wilayah;
2. Pengembangan free hotspot di area publik;
3. Pengadaan server; dan
4. Pengembangan infrastruktur jaringan broadband access untuk masyarakat.

4.3 Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak

Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak merupakan sarana pendukung dalam ketercapaian visi dan misi *smart city.* Hal ini karena pengembangan aplikasi dan perangkat lunak dapat mendukung integrasi proses kerja pembangunan daerah, pemerataan pelayanan publik yang mudah dan cepat, serta dapat memperkuat dan memperluas pencitraan daerah sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berikut adalah kebutuhan aplikasi dan perangkat lunak untuk mendukung implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah

aplikasi dan perangkat lunak dalam bentuk aplikasi, sistem operasi *server, data warehouse,* aplikasi, *website*, *tool assessment*, media sosial, antivirus, *domain* dan *hosting.*

4.4 Penguatan Literasi

Penguatan literasi merupakan penting dalam implementasi *smart city* untuk meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku seluruh pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, mengakses, mengelola, menganalisis, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan melakukan sintesis suatu sumber daya, membangun pengetahuan baru, dan memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif. Penguatan literasi dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, baik kepada SDM pemerintah untuk peningkatan kapasitas SDM maupun penguatan literasi masyarakat.

4.5 Rencana Aksi *Smart City* Setiap Dimensi

Rencana Aksi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun untuk setiap dimensi.

4.5.1 Rencana Aksi *Smart Governance*

Pada dimensi *Smart Governance,* rencana aksi dirumuskan untuk 21 (duapuluh satu) inovasi (lihat Tabel 4.1). Uraian jumlah inovasi pada setiap subdimensi *smart governance* adalah sebagai berikut:

- 14 inovasi dari subdimensi Pelayanan Publik
- 2 inovasi dari subdimensi Birokrasi
- 5 inovasi dari subdimensi Perancangan Kebijakan

Rencana aksi *smart governance* ini merupakan dokumen strategis yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai tujuan. Rencana aksi ini berfungsi sebagai panduan operasional yang rinci untuk mengimplementasikan smart governance di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun rencana aksi ini dibagi dalam empat kategori, yaitu pengembangan kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur pendukung, perangkat lunak pendukung, dan penguatan literasi.

Tabel 4.1

Rencana Aksi Dimensi *Smart Governance*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Layanan Publik	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	P1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelatihan ASN Berbasis *e-Learning*	Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2024-2026	1. Penguatan *media center*/CA 2. Memperkuat *server* 3. Menambah jaringan internet	2024-2026	Membangun LMS	2024-2026	1. Penguatan kompetensi SDM sesuai dengan jenis jabatan 2. Sosialisasi pelatihan berbasis *e-learning* 3. Membuat panduan penggunaan *e-learning* 4. Menyediakan *helpdesk*	2024-2026
			Assessment Center	Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2024-2026	1. Penguatan Media Center/CA 2. Memperkuat *Server* 3. Menambah Jaringan Internet	2024-2026	Membangun aplikasi manajemen talenta	2024-2026	1. Sosialisasi *Assessment Center* 2. Membuat panduan aplikasi manajemen talenta 3. Menyediakan *helpdesk*	2024-2026
			Talent Pool	Implementasi Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta ASN	2024-2026	Memperkuat *Server*, Jaringan, dan Pusat Data	2024-2026	Membangun aplikasi manajemen talenta (*talent pool*)	2024-2026	1. Sosialisasi *Talent Pool* 2. Membuat Panduan Aplikasi Manajemen Talenta	2024-2026
			Ruang *Media Center* yang Terstandarisasi		2024-2026	1. Pengadaan Komputer 2. Menambah Jaringan Internet	2024-2026		2024-2026	Sosialisasi adanya *Media Center* yang dapat digunakan untuk keperluan CAT serta menunjang pelatihan dan asesmen	2024-2026
			Kerja sama dengan beberapa lembaga terakreditasi	Melakukan Nota Kesepakatan	2024-2026		2024-2026		2024-2026		2024-2026

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		P2. Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengajuan cuti bagi ASN secara online melalui SIMPEGNAS		2024-2026	Pengadaan: 1. Komputer 2. Jaringan	2024-2026	Membangun SIMPEGNAS	2024-2026	Sosialisasi layanan kepegawaian dimana pengajuan cuti ASN dapat dilakukan secara *online* melalui SIMPEGNAS	2024-2026
		P4. Pendaftaran Penduduk K(1). Pelayanan Pendaftaran Penduduk	MENTANG MENTANG (Melahirkan Tenang Dokumen Datang)	1. Implementasi SK Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 (MENTANG MENTANG)	2024-2026	Pengadaan: 1. Server 2. Komputer 3. Alat *M to M* untuk perekaman KTP di daerah terpencil 4. Jaringan VPN Kominfo	2024-2026	1. Membangun Aplikasi WhatsApp 2. Membangun SIAK Terpusat	2024-2026	1. Sosialisasi penggunaan inovasi melalui media sosial 2. Kerja sama dengan perangkat desa dan kantor pos untuk pengiriman dokumen kependudukan 3. Kerja sama dengan serikat kematian untuk penerbitan Akta Kematian 4. Penerbitan dokumen kependudukan bagi yang terkena musibah kebakaran/ banjir. 5. Sosialisasi ke SMA/SMK untuk rekam KTP pemula	2024-2026
		P5. Pencatatan Sipil K(1). Pelayanan Pencatatan Sipil	KETUPAT PECEL (Pelayanan Kependudukan Tunggu Di Tempat Pedalaman Terpencil	2. SK Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021 (KETUPAT PECEL)							
			JULAK DIVAKSIN (Ajukan Layanan Administrasi Kependudukan Via Aplikasi Online Dokumen Diantar Ke Rumah)	3. SK Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2020 (JULAK DIVAKSIN DOKTER)							
			ANANDA BAJU DANSA (Pelayanan Didatangi Bagi Lanjut Usia dan Disabilitas)	4. SK Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2020 (ANANDA BAJU DANSA)							
			MADAM (Meninggal Dapat Akta Kematian)	5. SK Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 45 Tahun 2022 (MADAM)							
			LACANA (Layanan Cepat Tanggap Bencana)	6. SK Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 470/11/2019 (LACANA)							
		K(1). Pelayanan Pendaftaran Penduduk	KIWA (Pelayanan KIA via Whatsapp)	-							
		P6. Program Administrasi Pemerintahan Desa K(1). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	SI DODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa *On-Line*) terintegrasi dengan SIDEKA-NG (Sistem Informasi Pelayanan Desa	Implementasi Keputusan Kepala Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Peningkatan Tata Kelola	2024-2026	Membangun Server	2024-2026	Membangun Aplikasi SI DODOL	2024-2026	1. Sosialisasi SI DODOL 2. Bimtek SI DODOL 3. Sosialisasi SIDEKA-NG 4. Bimtek SIDEKA-NG	2024-2026

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Administrasi Pemerintahan Desa	dan Kawasan-New Generation)	Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui SI DODOL				Membangun Aplikasi SIDEKA-NG			
Birokrasi	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	P1. Program Aplikasi Informatika Ki 1) Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Digitalisasi Layanan Pemkab HSS	Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPBE	2024-2026	Membangun 1. Pusat Data 2.Jaringan Intra 3.Sistem Penghubung Layanan	2024-2026	Aplikasi Mobile	2024-2026	1. Sosialisasi 2. Diseminasi 3. Launching	2024-2026
		P1. Program Pengelolaan Arsip K. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota P2. Program Pengelolaan Arsip K. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Melaksanakan implementasi: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) 2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 5) 3. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/319/KUM/2022 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan	2024	Membangun 1. Pusat Data 2.Jaringan Intra	2024			Sosialisasi	2024

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/315/KUM/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/69/KUM/ 2022 Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Kabupaten dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/ 192/KUM/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/320/KUM/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 6. Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 045/555/DispersipTentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah							

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Kabupaten Hulu Sungai Selatan							
Perancangan Kebijakan	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	P1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	*Computer Security Incident Response Team* (CSIRT)	Implementasi Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/190/KUM Tentang Pembentukan CSIRT Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2024-2026	Membangun SOC (*Security Operation Center*)	2024-2026	Membangun: 1. Aplikasi *e-Ticketing* 2. Website CSIRT 3. Aplikasi Monitoring	2024-2026	Sosialisasi Keamanan Informasi	2024-2026
		P3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Portal Satu Data HSS	Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2021	2024-2026	Membangun Server	2024-2026	Membangun Aplikasi Portal Satu Data HSS	2024-2026	1. Sosialisasi Statistik Sektoral 2. Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM	2024-2026
		P2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD KI 1). Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	ePropemperda HSS (Program Pembentukan Peraturan Daerah Elektronik)	Implementasi: 1. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penetapan Inovasi ePropemperda 2. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengelola dan Tim Inovasi ePropemperda	2024-2026	Membangun Server	2024-2026	Membangun *Content Management System* (CMS)	2024-2026	Sosialisasi ePropemperda	2024-2026
			SIPI DPRD HSS (Sistem Informasi dan Publikasi DPRD HSS)	Implementasi: 1. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9a Tahun 2020 Tentang Inovasi Sistem Informasi dan Publikasi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9b Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pengelola dan	2024-2026	Membangun Server	2024-2026	Membangun *Content Management System* (CMS)	2024-2026	Sosialisasi SIPI DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2024-2026

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana AksiTahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Tim Inovasi Sistem Informasi dan Publikasi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan							
			EPROKIR (Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD)	-	2024-2026	Membangun Server	2024-2026	Membuat Aplikasi Web	2024-2026	Sosialisasi SIPI DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2024-2026

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Langkah stategis yang akan dilaksanakan dalam implementasi *smart governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersusun berdasarkan subdimensi. Pengembangan layanan publik ditetapkan strategi berupa optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak. Langkah-langkah ini melibatkan upaya bersama melalui kerja sama multipihak antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Infrastruktur digital yang handal dan peningkatan keterampilan SDM IT menjadi fokus utama untuk memastikan penyediaan layanan publik yang efisien, responsif, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut, membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik.

Untuk pengembangan birokrasi menggunakan strategi dengan meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi pemerintahan mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses administratif, memberikan akses yang lebih cepat dan mudah bagi warga, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan fokus pada pelayanan yang efektif dan efisien, pengembangan birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan.

Sementara untuk perancangan kebijakan dilakukan dengan menerapkan strategi menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi. Dengan memiliki data yang lengkap dan terhubung, proses perancangan kebijakan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Keamanan sistem informasi menjadi prioritas untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diandalkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, strategi ini mendukung pembuatan kebijakan yang responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Rencana aksi *smart governance* bersifat dinamis dan dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan lingkungan operasional pemerintah. Hal ini penting untuk mencapai kesuksesan dalam menerapkan *smart governance* yang berkelanjutan.

4.5.2 Rencana Aksi *Smart Branding*

Pada dimensi *smart branding,* rencana aksi dirumuskan untuk 12 (duabelas) inovasi (lihat Tabel 4.2). Uraian jumlah inovasi pada setiap subdimensi *smart branding* adalah sebagai berikut:

- 4 inovasi dari subdimensi Pariwisata
- 7 inovasi dari subdimensi Daya Saing Bisnis
- 1 inovasi dari subdimensi Wajah (Tampilan) Kota

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai tujuan penguatan *branding* Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas secara lengkap dan sistematis disusun berdasarkan subdimensi.

Tabel 4.2

Rencana Aksi Dimensi *Smart Branding*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pariwisata	Meningkatkan pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat	K(1). Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota K(2). Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota K(3). Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1. SIPANDU WISATA (Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan) 2. SIMPAI (Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi)	1. Pembentukan UPT pariwisata 2. Mengintegrasikan SIPANDU dengan SIMPAI serta penambahan fitur seperti layanan kesehatan, UMKM/ oleh-oleh, layanan transportasi 3. Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Keparwisataan Daerah Tahun 2019-2034	2024-2026	Membangun dan pengadaan: 1. Server 2. Jaringan internet 3. Ruangan server dan fasilitas (AC, listrik, APAR, dll) 4. *Laptop development*	2024-2026	Pemasaran digital (*event* pariwisata waktu, jenis, tempat dan pendukung lainnya)	2024-2026	1. Peningkatan profesionalisme dan jumlah SDM keparwisata 2. Membangun kolaborasi lintas *stakeholder* keparwisataan 3. Promosi keparwisataan	2024-2026
		K(3). Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	3. WETKAWA (Wisata Edukasi Kerbau Rawa)	1. Pembentukan UPT pariwisata 2. Integrasi antara SIPANDU dengan SIMPAI serta penambahan fitur seperti layanan kesehatan, UMKM/ oleh-oleh, layanan transportasi 3. Membuka Lembaga Pendidikan Keparwisataan 4.Melakukan promosi untuk mengundang investor untuk menanamkan modal/ berinvestasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Pembentukan paguyuban komunitas 6. Kerja sama dengan masyarakat dan perguruan		1. Mmebangun Sentra kerajinan bambu 2. Membangun Gedung pendidikan dan perkantoran 3. Membangun Sarana pendukung pariwisata (jalan, gazebo, fasilitas umum, listrik, air, jaringan telekomunikasi) 4. Membangun SISKAMLING di sekitar destinasi wisata dan mitigasi bencana (SOP) 5. Membanggun pendukung destinasi wisata utama dll. (homestay, sentra oleh-oleh)					

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				tinggi (seperti untuk KKN bagi mahasiswa)		6. Penambahan keragaman destinasi wisata 7. Pembuatan paket wisata dengan menggabungkan beberapa objek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan					
		(K1). Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	4. *Community Bassed Tourism* (CBT) - Event pariwisata berbasis komunitas			1. Membangun media promosi 2. Menetapkan Lokasi dan perlengkapan acara					
Daya Saing Bisnis	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan	K(1). Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota	1. HSS *Techno Park*	1. Menetapkan Perda tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha bagi masyarakat dan/atau investor 2. Pembentukan kelembagaan HSS *Techno Park*	2024-2026	1. Membangun gedung 2. Membangun sarana dan prasarana gedung 3. Pengadaan *studio streaming* dan perlengkapannya	2024-2026	Menyediakan Software OBS	2024-2026	Sosialisasi dan bimtek bagi pelaku usaha untuk implementasi perijinan dan pengawasan berbasis risiko	2024-2026
			2. Portal Pemkab Hulu Sungai Selatan	Merancang Peraturan Bupati mengenai tata kelola portal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2024-2026	1. Membangun server 2. Memperkuat jaringan internet 3. Membangun ruangan server dan fasilitas (AC, listrik, APAR, dll) 4. *Laptop development*	2024-2026	Menyediakan Text Editor	2024-2026	Bimtek dan sosialisasi	
		K(1). Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	3. Klinik UMKM	Kerja sama dengan *stakeholder* untuk pembinaan UMKM (perbankan, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, institusi pendidikan, pegiat ekonomi kreatif)	2024-2026	Membangun fasilitas diklat (gedung dan perangkat pendukung)	2024-2026	Menyediakan Software office	2024-2026	Sosialisasi dan bimtek secara periodik (3 bulan)	2024-2026
			4. Inkubator Bisnis		2024-2026		2024-2026		2024-2026		2024-2026
		K(1). Pelaksanaan penyuluhan pertanian	5. Padi Apung - Teknik Penanaman Padi di Daerah Rawa	1. Memaksimalkan Poktan 2. Penetapan kebijakan harga produksi hasil pertanian 3. Penetapan standar harga sewa alat pertanian dan upah buruh tani	2024-2026	1. Menyiapkan lahan 2. Pengadaan bibit 3. Pengadaan alat pertanian	2024-2026	-	2024-2026	Bimtek dan sosialisasi	2024-2026

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		P5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	6. Telah Berkemas (Tetap Lestari Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat)	1. Pembentukan kelompok masyarakat pengawas perikanan 2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum. 3.Kerja sama antardaerah untuk wilayah perbatasan	2024-2026	1. Pengadaan kapal 2. Kerja sama dengan pihak keamanan 3. Membangun pos pantau 4. Pengadaan drone	2024-2026	-	2024-2026		
		P4. Program Perizinan Usaha Pertanian	7. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	1. Pembentukan Tim Layanan Sentra UMKM	2024-2026	1. Membangun ruang layanan sentra UMKM 2. Pengadaan alat kemasan 3. Pengadaan peralatan kantor dan alat cetak	2024-2026	Pengadaan software desain grafis	2024-2026	Pelatihan bagi pelaku UMKM	2024-2026
Wajah (Tampilan) Kota	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif, dan modern	P1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Aplikasi Tata Ruang Berbasis Geospasial - Informasi Pola Ruang secara online yang terintegrasi	1.Revisi RTRW sesuai peraturan yang berlaku 2.Penyusunan RDTR perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3.Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah	2024-2026	Pengadaan: 1. Drone dan GPS 2. PC dan laptop pemetaan	2024-2026	Pengadaan software pemetaan	2024-2026	1. Bimtek Pemetaan dan Geospasial 2. Kolaborasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi 3. Kolaborasi Geospasial dengan BIG 4. Kolaborasi batas daerah dengan Biro Pemerintahan Provinsi	2024-2026

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Strategi untuk implementasi pariwisata adalah dengan melakukan pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa pengembangan pariwisata dapat dipercepat melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sumber daya manusia, serta sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam memperkuat infrastruktur pariwisata, memberikan insentif bagi UMKM, dan meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia dalam sektor ini. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam promosi pariwisata, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, dan pengembangan produk UMKM lokal. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat untuk meningkatkan daya tarik destinasi, meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, dan memberdayakan ekonomi lokal melalui pertumbuhan UMKM.

Strategi untuk membangun daya saing daerah adalah dengan meningkatkan branding melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan. Pemanfaatan kanal digital, seperti media sosial dan *platform* daring, membantu mempromosikan identitas dan potensi daerah secara lebih luas. Peningkatan kualitas UMKM melibatkan pengembangan produk dan layanan yang berkualitas untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Sementara itu, penambahan nilai produktivitas di sektor pertanian dan perikanan dapat mengoptimalkan sumber daya lokal dan meningkatkan daya saing produk. Melalui strategi ini, daerah dapat memperkuat citra *brand*nya, meningkatkan potensi ekonomi lokal, dan menciptakan lingkungan yang berdaya saing tinggi.

Terakhir, untuk membangun subdimensi Wajah (Tampilan) Kota, dilaksanakan dengan strategi membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya menciptakan citra yang memadukan warisan budaya, nilai inovasi, dan elemen-elemen modern dalam pembangunan kota, dengan harapan dapat menjadi daya tarik sebagai gerbang IKN serta meningkatkan identitas visual dan daya saing kota di tingkat nasional dan internasional.

Rencana aksi yang disusun ini disesuaikan dengan perubahan di lingkungan bisnis dan pasar, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung kesuksesan *branding* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam era digital.

4.5.3 Rencana Aksi *Smart Economy*

Rencana aksi *smart economy* mencerminkan strategi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertanggung jawab dalam mendorong transformasi ekonomi. Implementasinya dapat melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang cerdas dan berkelanjutan.

Pada dimensi *Smart Economy,* rencana aksi dirumuskan untuk 12 (duabelas) inovasi (lihat Tabel 4.3). Uraian jumlah inovasi pada setiap subdimensi *smart economy* adalah sebagai berikut:

- 4 inovasi dari subdimensi Ekosistem Industri
- 7 inovasi dari subdimensi Kesejahteraan Masyarakat
- 1 inovasi dari subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan

Langkah-langkah dan inisiatif yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendorong dan mengimplementasikan konsep ekonomi cerdas disusun berdasarkan subdimensi terkait.

Tabel 4.3

Rencana Aksi Dimensi *Smart Economy*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Industri	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	P1. Program Pengembangan Sentra Industri	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	Membuat SK Bupati	2024	Memperkuat Jaringan Internet	2024	Pengadaan: 1. Laptop 2. Printer	2025	Literasi Produk Halal	2025
			2. RuPaku (Rumah Packaging Produk UMKM)	Membuat SK Kepala Dinas	2024	1.Membangun Rumah Kemasan 2. Pengadaan Alat Pengemas	2025	Pengadaan: 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Cetak Kemasan	2025	Literasi Desain Kemasan	2024
		K(1). Kegiatan Sertifikasi Halal Produk Pangan	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Membuat SK Kepala Dinas	2024	1. Memperkuat Jaringan Internet 2. Membangun Ruang rapat	2024	Pengadaan: 1. Komputer 2. LCD, Printer 3. Sound system	2024	Literasi SP-IRT	2024
		P2. Program Penyuluhan Pertanian	4.PETANI BERDASI (Pemberdayaan Petani Mileneal melalui Peningkatan Manajemen Kelembagaan, Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi)	Membuat SK Bupati	2024	1. Memperkuat Jaringan Internet 2. Membangun Ruang rapat	2024	Pengadaan: 1. Komputer 2. LCD, Printer 3. Sound system	2024	Literasi Keuangan	2024
Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri	P1. Program Pengembangan UMKM	Penyediaan web/aplikasi bank data UMKM	Membuat SK Kepala Dinas	2024	1. Memperkuat Jaringan Internet 2. Membangun Ruang rapat	2024	Pengadaan: 1. Komputer 2. LCD, Printer 3. Sound system	2024	Data UMKM	2024
		P2. Program Penyuluhan Pertanian	PETANI BERDASI (Pemberdayaan Petani Milenial melalui Peningkatan Manajemen Kelembagaan, Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi)	Membuat SK Kepala Dinas	2024	Memperkuat Jaringan Internet	2024	Pengadaan: 1.Komputer 2.Printer	2024	Literasi Sektor Pertanian	2024
		P3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	BERMANDIKAN GAHARU (Berdayakan Masyarakat dengan Budidaya Ikan Gabus Haruan)	Membuat SK Bupati 2. Implementasi SK Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Membuat SK Kepala Dinas	2021 - 2024	Membangun Sarana Prasarana Perikanan	2021 sd 2024	Pengadaan: 1. Komputer 2. Printer	2021 - 2024	Masterplan Kabupaten dan Provinsi	2024-2026

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		P5. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RUMPAK (Rumah Pangan Kita) / TOTAL (Toko Tani Mobile - Gelar Pangan Murah)	1. Membuat SK Bupati 2. Membuat SK Kabulog	2024	1. Membuat Bangunan Kios Rumah Pangan Kita 2. Pengadaan Mobil Box / Angkutan	2024 2025	1. Mendesain Kemasan Bahan Pangan 2. Sealer	2024	1. Literasi Keamanan Pangan 2. Literasi Desain Kemasan 3. Literasi Inflasi	2024 2025
		P4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5. TELAH BERKEMAS (Tetap Lestari Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat)	Membuat SK BUPATI	2023	1. Memperkuat Jaringan Internet 2.Membangun Ruang rapat	2024	Pengadaan: 1. Komputer 2. LCD, Printer 3. Sound system	2024	Literasi Data KUB/Pokmaswas	2024-2026
		P6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	6.SIDODOL (Sistem Informasi Produk Lokal)	Membuat SK Kepala Dinas	2024	Pengadaan Mobil operasional	2025	Pengadaan: 1. Komputer/laptop 2. Kamera	2025	Literasi Digital	2025
		K(1). Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7.UMKM go Digital (pendampingan dan bimtek SDM UMKM)	Membuat SK Kepala Dinas	2024	1. Memperkuat Jaringan Internet 2.Membangun Ruang rapat	2024	Pengadaan: 1. Komputer 2. LCD, Printer 3. Sound system	2024	Mengumpulkan Data UMKM	2024
Ekosistem Transaksi Keuangan	Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan dengan membangun infrastruktur transaksi keuangan, mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas perbankan	K(2). Kegiatan Digitalisasi Transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	SI KETUPAD (Sistem Informasi Keuangan Terpadu Pajak Daerah) aplikasi yang bisa diunduh melalui *Playstore*, yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung besar pajak, melakukan pembayaran dan mendapat bukti setor pajak	Membuat: SK Kepala Dinas SOP	2024	1. Memperkuat Jaringan Internet 2. Operator	2024	Membangun Aplikasi	2024	Literasi Kewajiban Pajak Daerah	2024

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

*P*engembangan ekosistem industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan strategi meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi. Fokusnya adalah pada penguatan kewirausahaan dan UMKM agar dapat berperan lebih aktif dalam mendukung ekonomi lokal. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi diintegrasikan ke dalam ekosistem untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung inovasi, pertumbuhan UMKM, dan pengembangan produk lokal yang memiliki daya saing baik di pasar regional maupun nasional. Penguatan ekosistem industri ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri. Dengan memberikan dukungan kepada UMKM, baik melalui pelatihan, akses keuangan, atau fasilitas lainnya, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, strategi ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan wirausaha baru, meningkatkan peluang pekerjaan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian, untuk membangun ekonomi yang cerdas pada subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan diimplementasikan dengan menggunakan strategi mengembangkan ekosistem transaksi keuangan dengan membangun infrastruktur transaksi keuangan, mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas perbankan. Fokus strategi ini adalah memastikan adanya sistem yang efisien dan handal untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Selain itu, strategi ini mencakup pengembangan SDM pelaku usaha dengan meningkatkan kesadaran digital, sehingga pelaku usaha dapat lebih efektif memanfaatkan teknologi dalam aktivitas keuangan mereka. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas perbankan menjadi poin penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan merata ke layanan keuangan. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan

terbentuklah ekosistem transaksi keuangan yang inklusif, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.5.4 Rencana Aksi *Smart Living*

Pada dimensi *Smart Living,* rencana aksi dirumuskan untuk 12 (duabelas) inovasi (lihat Tabel 4.4). Uraian jumlah inovasi pada setiap subdimensi *smart living* adalah sebagai berikut:

- 5 inovasi dari subdimensi Harmonisasi Tata Ruang
- 4 inovasi dari subdimensi Kesehatan
- 3 inovasi dari subdimensi Transportasi.

Inisiatif strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan disusun berdasarkan subdimensi. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan masyarakat yang terkoneksi, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan hidup. Dengan rencana aksi *smart living*, diharapkan terwujudnya ekosistem yang mendukung kehidupan modern yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.

Tabel 4.4

Rencana Aksi Dimensi *Smart Living*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan *stakeholder* terkait.	P1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) K1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	PENA SANG ANAK (Pelayanan Prima Satuan Pengamanan Gasan Anak-anak)	1. Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2024-2033	1. Membangun Ruang Bermain Ramah Anak 2. Membangun RTH/Taman yang berstandar nasional (Taman Palidangan Sehati dan Taman Darmansyah Dzauhidie)	2024-2033	Integrasi program digitalisasi peningkatan kualitas pemeliharaan RTH	2024-2033	1. Peningkatan Kompetensi SDM Petugas Pemeliharaan RTH 2. Peningkatan Kompetensi Manajerial Pengawas Pemeliharaan RTH 3. Sosialisasi Program Pengelolaan RTH/Green Open Space yang bertujuan mewujudkan jejaring RTH dalam pemeliharaan taman kota dan kontrol vegetasi	2024-2033
			MALAM JUM'AT (Menanam Pohon di Lahan Masyarakat Setiap Hari Jum'at)	2. Implementasi Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 237 Tahun 2012 Tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1. Mobil Angkutan 2. Mobil Penyiram Tanaman 3. Transportasi Petugas Pemeliharaan RTH 4. Kendaraan Operasional Pengawas Pemeliharaan RTH					
				3. Implementasi Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 449 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 237 Tahun 2012 Tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Hulu Sungai Selatan							
				4. Implementasi Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/192/KUM/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 237 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Hulu Sungai Selatan							
		P2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Detak PJU+ (Deteksi Tangkai Kerusakan	Implementasi: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun	2024-2033	1. Menyediakan lahan yang *clean & clear* 2. Menyediakan armada *Skylift*	2024-2033	Membangun Sistem IT	2024-2033	1. Membangun kolaborasi lintas-*stakeholder* dalam pembangunan dan	2024-2033

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		(PSU) K(1). Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penerangan Jalan Umum Plus) SI MANTAN (Sistem Informasi Perumahan dan Pertanahan)	2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		3. Menyediakan Kendaraan Operasional Pengawas				pemerataan infrastruktur 2. Peningkatan kompetensi SDM Petugas Teknis PJU dan petugas administrasi 3. Peningkatan Kompetensi Manajerial Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan 4. Sosialisasi Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pelaku usaha, SKPD teknis terkait dan masyarakat sebagai penerima layanan	

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 8. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/46/KUM/2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 9. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/117/KUM/2023 Tentang Penetapan							

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Langgan/Musala Dengan Pembebanan Biaya Listrik Pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan							
		P2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) K(1). Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	*Early Warning System* (Sistem Peringatan Dini Kejadian Alam), Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik dan Rehalbitasi Dampak Pasca Bencana	Membuat SK (Surat Keputusan) Bupati	2024-2033	Pengadaan: 1. Komputer/Server 2. Tranportasi Pengawas 3. Drone	2024-2033	Membangun Sistem IT	2024-2033	Peningkatan Kompetensi SDM pada Bidang Pengawasan Bencana berbasis Digitalisasi	2024-2033
Kesehatan	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	P4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat K(1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. SI CANTIK BUMILKU (Strategi Pelacakan Untuk Peningkatan Pemeriksaan *Ante Natal Care* Sesuai Standar Pada Ibu Hamil Melalui Kunjungan Rumah)	Implementasi: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita 2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.4 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita	2024-2026	1. Pembangunan Puskesmas 2. Pembangunan Poskesdes/Pustu Prima 3. Pengadaan Alkes dan BMHP	2024-2026	Integrasi digitalisasi pelayanan kesehatan	2024-2026	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	2024-2026
			2. SI MIDUN CHATING KE FASKES (Strategi Kemitraan Dukun dan Bidan Cegah Stunting dan Merujuk Ibu Bersalin ke Fasilitas Kesehatan)								
			3.Pengembangan Pendaftaran Pasien Online	Implementasi: 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	2023 - 2033	1. Penyediaan Server Rumah Sakit 2. Penyediaan Perangkat Keras 3. Memperkuat Jaringan Internet	2023 - 2033	Integrasi digitalisasi pelayanan kesehatan	2023 - 2033	Sosialisasi pendaftaran antrian online	2023 - 2033

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				3. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis							
			4. Integrasi data rekam medis	Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan							
			5. Sistem rujukan pasien terpadu	Implementasi Permenkes RI No. 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan							
Transportasi	Mewujudkan pelayanan dan moda sarana transportasi yang berkeselamatan dan nyaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui peningkatan kualitas pemeliharaan terminal dan rambu-rambu, pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan stakeholder terkait.	P4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat K(1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota P1. Penyediaan Fasilitas Angkutan Publik Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. SIMPKB (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor) 2. Pelayanan Transportasi Gratis Khusus Angkutan Bis Pelajar 3. Sistem Layanan Angkutan Umum Terpadu	Perda masih dalam proses pengesahan oleh pejabat berwenang	2024-2033	1. Membangun Terminal 2. Membangun Dermaga 3. Pengujian Kendaraan Bermotor	2024-2033	Integrasi Digitalisasi Pelayanan Manajemen dan Keselamatan Transportasi	2024-2033	Peningkatan Kompetensi SDM Manajemen dan Keselamatan Transportasi	2024-2033

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Strategi yang akan dilakukan untuk subdimensi Harmonisasi Tata Ruang dengan mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan stakeholder terkait. Dengan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), mencakup infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pengembangan wilayah secara holistik. Selanjutnya, melalui pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik, strategi ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang lebih terorganisir dan efisien. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan tercipta tata ruang wilayah yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi setiap daerah.

Pada subdimensi Kesehatan diimplementasikan dengan strategi mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan. Strategi ini bertujuan menciptakan sinergitas yang kuat dalam sistem pelayanan kesehatan. Pendekatan ini mencakup pembaruan dalam penyediaan layanan kesehatan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, seperti puskesmas, hingga tingkat lanjut seperti rumah sakit. Langkah pertama melibatkan integrasi teknologi di seluruh jaringan layanan kesehatan, memastikan rekam medis elektronik yang terhubung dan memperkenalkan solusi cerdas untuk manajemen data pasien.

Selain itu, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kesehatan, serta pengembangan keahlian tenaga medis dan paramedis menjadi fokus utama. Modernisasi pelayanan kesehatan juga mencakup pengenalan inovasi seperti telemedicine untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Dengan memastikan bahwa pelayanan kesehatan di semua tingkatan dijalankan dengan pendekatan yang terintegrasi dan terkoordinasi, strategi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih efisien, responsif, dan berkualitas tinggi kepada masyarakat.

Sementara, pada subdimensi Transportasi menggunakan strategi mewujudkan pelayanan dan moda sarana transportasi yang berkeselamatan dan nyaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui peningkatan kualitas pemeliharaan terminal dan rambu-rambu, pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi digital yang mudah diakses publik melalui

sinergitas dengan *stakeholder* terkait. Pemerataan layanan publik menjadi faktor kunci dalam strategi ini, dengan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari fasilitas transportasi yang ditingkatkan. Selain itu, penyediaan informasi mitigasi digital yang mudah diakses oleh publik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan potensi risiko dan langkah-langkah keselamatan. Sinergi dengan *stakeholder* terkait, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, menjadi pondasi utama untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan dari strategi ini. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan berdaya guna bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.5.5 Rencana Aksi *Smart Society*

Pada dimensi Smart *Society,* rencana aksi dirumuskan untuk 13 (tigabelas) inovasi (lihat Tabel 4.5). Uraian jumlah inovasi pada setiap subdimensi *smart society* adalah sebagai berikut:

- 2 inovasi dari subdimensi Interaksi Masyarakat
- 4 inovasi dari subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan
- 7 inovasi dari subdimensi Keamanan Masyarakat

Konsep *smart society* mencakup integrasi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, interaksi sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Rencana aksi ini melibatkan serangkaian langkah konkret sebagai inisiatif strategis yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan pada setiap subdimensi.

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Peningkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Keamanan Masyarakat	Menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan	P1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Rumah Sejahtera (PRS) terintegrasi	Membuat dan menetapkan: 1. Perda 2. Perbup 3. SK 4. Juknis	2024	Mmebangun: 1. Sistem IT 2. Sarana Prasarana 3. Operator 4. Bimtek	2025-2026	Membangun: 1. *Software* 2. *Hardware* 3. Jaringan	2025-2026	Literasi Digital	2025-2026
		P2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Sarjana Pendamping Desa		2024	1. Mengidentifikasi Potensi Sosial 2. Membangun Sarana Prasarana 3. Memberikan Kantor/ Sekretariat di Masing-masing Kecamatan	2025-2026	Membangun Jaringan Internet	2025-2026	Literasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melaksanakan Bimtek	2025-2026
		P1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Lansia Asuh Sehat — PESAN LIA+ (Pejabat Sayang Lanjut Usia)	Menerbitkan: 1. PERDA 2. PERBUP 3. SK 4. JUKNIS 5. MOU Pemeriksaan Kesehatan	2024	1. Mengidentifikasi Potensi Sosial	2025-2026			Literasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2025-2026
		P3. Program Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Penerbitan Kartu Angkatan Kerja Digital (AK1)	Menerbitkan: 1. PERBUB 2. SK 3. JUKNIS 4. SOP	2024	1. Mengidentifikasi Potensi Sosial 2. Membangun Sarana Prasarana 3. Membangun Mal Pelayanan Publik 4. Menyediakan Anggaran	2025-2026	Membangun: 1. Aplikasi SIAP KERJA HSS 2. Sarana Prasarana 3. *Manual Book*	2025-2026	1. Peningkatan Kompetensi Petugas AK1 2. Promosi dan sosialisasi media *online* dan offline	2025-2026
			Integrasi Aplikasi SIAP KERJA Kemenaker dengan aplikasi SIAP KERJA HSS Berbasis Android/IOS	Menerbitkan: 1. MoU dengan Kemenaker 2. SK 3. Juknis 4. SOP	2024	1. Mengidentifikasi Potensi Sosial 2. Membangun Sarana Prasarana 3. Membangun Mal Pelayanan Publik 4. Menyediakan Anggaran	2026-2026	Membangun: 1. SIAP KERJA HSS versi *mobile* 3. Manajemen *Database* Tenaga Kerja HSS 4. *Manual Book*	2026-2026	1. Peningkatan Kompetensi Petugas AK1 2. Promosi dan sosialisasi media *online* dan offline	2026-2026

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			PENTAMAKS (Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas) berbasis NIK dan GIS	Menerbitkan: 1. SK 2. JUKNIS 3. SOP 4. MoU dgn BPJS Ketenagakerjaan 5. MoU dengan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta	2024	1. Mengidentifikasi Potensi Sosial 2. Membangun Sarana Prasarana 3. Membangun Mal Pelayanan Publik 4. SLB dan Balai Pelatihan Disabilitas	2026-2026	1. Aplikasi SIAP KERJA HSS 2. Sarana Prasarana 3. Manual Book	2026-2026	1. Peningkatan Fungsional Antar Kerja dan Tenaga Ahli Pendamping Inklusi 2. Promosi dan Sosialisasi Media Online Dan Offline	2026-2026
		P2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pembentukan Satgas Keamanan Sosial di masing-masing Kecamatan	Menerbitkan 1. SK 2. JUKNIS 3. SOP	2024	Koordinasi antara: 1. Kepala Seksi Ketertiban Umum Kecamatan Sekabupaten HSS 2. Subkoordinator Bidang Ideologi, Wawasan Kebagsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama 3. Subkoordinator Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	2024	Membuat WA Group Satgas	2024	1. Sosialisasi	2024

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Strategi untuk pengembangan Interaksi Masyarakat adalah memperkuat keterhubungan dan keterbukaan sosial melalui pendidikan, kolaborasi dan elaborasi, serta nilai-nilai positif untuk menciptakan modal sosial yang tangguh. Dengan mempromosikan keterhubungan dan keterbukaan ini, masyarakat dapat mengatasi perbedaan, memperkuat solidaritas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya membangun modal sosial yang tangguh, tetapi juga menciptakan dasar untuk pembangunan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan sosial.

Di sisi yang lain, implementasi *smart society* Ekosistem Belajar/Pendidikan dibangun dengan strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui infrastruktur yang memadai, kurikulum relevan, pengembangan guru, pendekatan inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan mitra pembangunan, program pembelajaran seumur hidup, serta evaluasi berkelanjutan. Program pembelajaran seumur hidup menjadi landasan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya terfokus pada tahap-tahap awal, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pengembangan terus menerus sepanjang hidup. Evaluasi berkelanjutan digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas strategi, memungkinkan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan menggabungkan semua elemen ini, strategi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang berdaya saing, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Strategi untuk subdimensi Keamanan Masyarakat dilakukan dengan menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan. Dengan demikian, strategi untuk subdimensi Keamanan Masyarakat mengusung pendekatan holistik yang mengintegrasikan upaya pemenuhan kebutuhan dasar secara merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat kemajuan teknologi dalam konteks kesejahteraan dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan, menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan fondasi masyarakat yang aman dan sejahtera.

Digitalisasi yang inklusif merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan inovasi digital yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini melibatkan pengembangan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal, pelatihan

masyarakat dalam literasi digital, dan memastikan aksesibilitas teknologi yang merata. Dengan menggabungkan dua dimensi ini, strategi ini berusaha menciptakan lingkungan dimana masyarakat tidak hanya terlindungi secara fisik, tetapi juga dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh revolusi digital untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan.

4.5.6 Rencana Aksi *Smart Environment*

Pada dimensi *Smart Environment,* rencana aksi dirumuskan untuk 7 (tujuh) inovasi (lihat Tabel 4.6). Uraian jumlah inovasi pada setiap subdimensi smart *environment* adalah sebagai berikut:

- 2 inovasi dari subdimensi Proteksi Lingkungan
- 4 inovasi dari subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah
- 1 inovasi dari subdimensi Tata Kelola Energi.

Rencana aksi *smart environment* merupakan suatu kerangka strategis yang dirancang untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Fokus utama dari rencana ini adalah menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Inisiatif ini mencakup serangkaian langkah konkret pada setiap subdimensi.

Tabel 4.6

Rencana Aksi Dimensi *Smart Environment*

Subdimensi	Strategi	Program/ kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Proteksi Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi multipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	P1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. GERAK MAS DARLING (Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Menerbitkan SK Bupati dan Perda 2. Implementasi UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 3. Implementasi UU RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup 4. Implementasi UU RI Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan	2024	Pengadaan: 1. Sistem IT 2. Kantor 3. Laboratorium 4. Transportasi pengawasan 5. SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	2025	Membangun dan pengadaan: 1. *Software* 2. *Hardware* 3. Drone	2026		2027
		P2. Pengendalian dan Penaggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	CEKARLABUN (Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)		2024	Pengadaan: 1. Sistem IT 2. Kantor 3. Transportasi Pengawasan 4. SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	2025	Pengadaan: 1. *Software* 2. *Hardware* 3. Drone	2026	1. Melakukan Literasi Digital 2. Melakukan Literasi Sains 3. Melakukan Literasi Finansial dan Budaya	2027
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Meningkatkan Mutu Lingkungan Perkotaan dalam Penerapan Pengelolaan Sampah dan Limbah secara aman, ramah serta berkelanjutan dan berbasis IT	P1. Penanganan Persampahan Skala Kota dan Kabupaten dengan Teknologi Terbarukan	SAPI GEMUK (Sampah Pilah Gerakan Masyarakat Untuk Keluarga)	Menerbitkan: 1. Jakstrada 2. Perda 3. UU Lingkungan	2024	Membangun: 1. Sistem IT 2. Kantor 3. Sarpras Angkutan dan Mesin Pengolah	2025	Menyediakan: 1. *Software* 2. *Hardware*	2026	1. Melakukan Literasi Digital 2. Melakukan Literasi Sains 3.Melakukan Literasi Finansial dan Budaya	2027
		P2. Pengurangan Sampah Skala Kota dan Kabupaten dengan Teknologi Terbarukan	GALA SAJADAH (Gerakan Layanan Sampah Jadi Ibadah Dunia Akhirat)		2024	Membangun: 1. Sistem IT 2. Kantor 3. Sarpras Angkutan dan Mesin Pengolah	2025	Menyediakan: 1. *Software* 2. *Hardware*	2026	1. Melakukan Literasi Digital 2. Melakukan Literasi Sains	2027

Subdimensi	Strategi	Program/ kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
										3.Melakukan Literasi Finansial dan Budaya	
			3. LAPOR PAK (Pelaporan Pengaduan Sampah)		2024	Membangun: 1. Sistem IT 2. Kantor 3. Sarpras Angkutan dan Mesin Pengolah	2025	Menyediakan: 1. *Software* 2. *Hardware*	2026	1. Melakukan Literasi Digital 2. Melakukan Literasi Sains 3.Melakukan Literasi Finansial dan Budaya	2027
		P3.Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah/Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah	4. SIRUNG SINTAK PAH (Pelaporan Layanan Sampah)		2024	Membangun: 1. Sistem IT 2. Kantor 3. Sarpras Angkutan dan Mesin Pengolah	2025	Menyediakan: 1. *Software* 2. *Hardware*	2026	1. Melakukan Literasi Digital 2. Melakukan Literasi Sains 3.Melakukan Literasi Finansial dan Budaya	2027
Tata Kelola Energi	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	P1. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah/Subkegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	BIOCHAR ORGANIK (Arang Hasil Konversi dari Limbah Organik)	Menerbitkan: 1. UU Energi 2. Perda	2024	Membangun: 1. Sistem IT 2. Workshop 3. Mesin Pengolahan	2025	Menyediakan: 1. *Software* 2. *Hardware*	2026	1. Melakukan Literasi Digital 2. Melakukan Literasi Sains 3.Melakukan Literasi Finansial dan Budaya	2027

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

*R*encana aksi *smart environment* dapat melibatkan pemanfaatan sensor dan teknologi monitoring untuk mengumpulkan data lingkungan secara *real- time*. Analisis data ini kemudian dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, memprediksi pola-pola lingkungan, dan merancang kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Pemanfaatan teknologi juga dapat mencakup solusi inovatif seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah pintar, dan teknologi ramah lingkungan lainnya.

Selain itu, pendekatan ini seringkali melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan menjadi bagian integral dari rencana aksi *smart environment*. Dengan demikian, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang cerdas, adaptif, dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya.

Strategi untuk subdimensi Proteksi Lingkungan adalah meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi mulitipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni. Dengan demikian, strategi ini melalui sejumlah pendekatan strategis. Pertama, melibatkan penguatan regulasi untuk memastikan bahwa peraturan perlindungan lingkungan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif. Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan menjadi fokus penting, dengan memastikan bahwa kebijakan dan regulasi tersebut dijalankan secara konsisten dan efisien.

Optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi sumber daya manusia di bidang lingkungan menjadi landasan utama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Ini mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan, sehingga para profesional di bidang lingkungan dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dengan pemahaman yang mendalam. Kolaborasi multipihak menjadi komponen integral dari strategi ini, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga lainnya. Sinergi ini bertujuan menciptakan kekuatan bersama dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Teknologi informasi yang mumpuni juga diterapkan, termasuk pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) atau solusi berbasis teknologi lainnya untuk memudahkan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya perlindungan lingkungan. Dengan

kombinasi berbagai elemen ini, strategi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan lingkungan secara holistik dan berkelanjutan.

Untuk subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah dibangun strategi yaitu meningkatkan mutu lingkungan perkotaan dalam penerapan pengelolaan sampah dan limbah secara aman, ramah serta berkelanjutan dan berbasis IT. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan sampah dan limbah dengan cara yang tidak hanya efektif tetapi juga berdampak positif pada lingkungan sekitar. Pendekatan ini melibatkan infrastruktur pengelolaan sampah yang canggih, termasuk fasilitas daur ulang dan pembuangan yang aman.

Selain itu, strategi ini berupaya merancang solusi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan plastik dan penerapan praktik daur ulang yang lebih luas. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat mencakup kampanye edukasi masyarakat, promosi perilaku hidup bersih, dan partisipasi aktif warga dalam upaya pengelolaan sampah. Pentingnya teknologi informasi dalam strategi ini dapat terlihat dari penggunaan sistem informasi untuk pemantauan dan pengelolaan data limbah, pembaruan dalam proses pelaporan, dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi untuk mendukung kampanye kesadaran masyarakat. Dengan menyatukan semua elemen ini, strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan secara menyeluruh.

Terakhir, strategi pada subdimensi Tata Kelola Energi adalah meningkatkan tata kelola pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut yang efisien melalui energi alternatif yang ramah lingkungan. Pendekatan ini mencakup dua aspek penting dalam konteks energi dan lingkungan. Pertama, strategi ini mencakup pengelolaan pemanfaatan limbah dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Ini dapat melibatkan peningkatan proses daur ulang, pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi biogas, dan pengurangan dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Pemanfaatan limbah sebagai sumber energi bukan hanya mengurangi pencemaran lingkungan tetapi juga menciptakan alternatif energi yang lebih bersih dan terbarukan.

Selanjutnya, strategi ini juga menekankan pemanfaatan potensi lahan gambut secara berkelanjutan sebagai sumber energi alternatif. Lahan gambut memiliki potensi besar untuk menghasilkan bioenergi, seperti *biomassa* dan *biofuel*, yang dapat digunakan sebagai alternatif ramah lingkungan terhadap energi fosil. Pemanfaatan lahan

gambut dengan cara yang berkelanjutan juga mendukung pelestarian ekosistem gambut yang rentan terhadap degradasi.

Melalui penerapan strategi ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola energi yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan jejak karbon.

BAB V
PETA JALAN *SMART CITY* DAERAH

Peta Jalan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun melalui diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan dari setiap dimensi. Masing- masing dimensi disusun peta jalan ini disusun dalam tiga periode waktu, yaitu jangka pendek (dilaksanakan pada tahun 2024), jangka menengah (dilaksanakan pada tahun 2025-2028), dan jangka panjang (dilaksanakan pada tahun 2029-2033). Uraian peta jalan setiap dimensi dalam masing- masing periode waktu adalah sebagai berikut.

5.1 Peta Jalan Dimensi *Smart Governance*

Peta jalan dimensi *smart governance* mengacu pada rencana atau strategi untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang cerdas atau pintar. *Smart governance* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan mengelola sumber daya secara lebih efektif. Terdapat 10 (sepuluh) program yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *smart governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 5 (Lima) program dari subdimensi Pelayanan Publik, yaitu:
  1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  2. Program Pendaftaran Penduduk
  3. Program Pencatatan Sipil
  4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
  5. Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Pegawai ASN
- 2 (Dua) program dari subdimensi Birokrasi, yaitu:
  1. Program Pengelolaan Arsip
  2. Program Aplikasi Informatika
- 3 (Tiga) program dari subdimensi Perancangan Kebijakan, yaitu:
  1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
  2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD
  3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Peta jalan implementasi *smart governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 5.1), peta jalan jangka menengah (Tabel 5.2), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 5.3).

Tabel 5.1

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Governance*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Layanan Publik	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	P1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. *Assesment Center* 2. *Talent Pool* 3. Ruang *Media Center* untuk CAT	1. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi teknis dan kompetensi fungsional 2. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi manajerial	16.2 Persentase area kota (kabupaten) di bawah zona pusvitik matifidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi 16.3 Persentase area kota (kabupaten) yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota (kabupaten)	1. 79,65% 2. 93,65%	5.235.364.000	APBD	BKPSDM
		P2. PENDAFTARAN PENDUDUK K1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. MENTANG MENTANG (Melahirkan Tenang Dokumen Datang) 2. KIWA (Pelayanan KIA via Whatsapp) 3. KETUPAT PECEL (Pelayanan Kependudukan Tunggu di Tempat Pedalaman Terpencil) 4. JULAK DIVAKSIN DOKTER (Ajukan Layanan Administrasi Kependudukan via Aplikasi *Online* Dokumen Diantar ke Rumah) 5. LACANA (Layanan Cepat Tanggap Bencana) 6. MADAM (Meninggal Dapat Akta Kematian) 7. ANANDA BAJU DANSA (Pelayanan Didatangi Bagi Lanjut Usia dan Disabilitas)	Persentase penerbitan dokumen kependudukan		100%	950.795.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		P3. PENCATATAN SIPIL K1. Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil		100%	160.860.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024 (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA K1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8. SI DODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa On-Line)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dalam administrasi desa serta tertib pengelolaan Dana Desa		47,92%	332.462.650	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Birokrasi	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	P1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP K1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	9. SRIKANDI ((Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Persentase kebijakan instrumen wajib kearsipan	10.2 Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	100%	30.959.300	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		K2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Nilai audit pengelolaan arsip elektronik		65 (Nilai B)	121.551.300	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perancangan Kebijakan	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	P1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	10. Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT)	Persentase tata kelola keamanan informasi yang dilaksanakan dengan status baik	21.1 Jumlah warga kota (kabupaten) per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	67,5%	243.419.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
		P2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD K1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	11. ePropemperda HSS (Program Pembentukan Peraturan Daerah) SIPI DPRD HSS (Sistem Informasi dan Publikasi DPRD Kab HSS)	Persentase dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun		100%	299.776.500	APBD	Sekretariat DPRD
		P3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	12. Portal Satu Data Hulu Sungai Selatan	Jumlah produsen data yang menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi		39 Produsen Data	86.246.600	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Layanan Publik	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	P1. PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Pengajuan cuti bagi ASN secara *online* melalui SIMPEGNAS (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional)	Jumlah data kepegawaian berbasis teknologi yang dikelola	16.2 Persentase area kota (kabupaten) di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi 16.3 Persentase area kota (kabupaten) yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota (kabupaten)	4634 Data	1.956.697.300	4634 Data	1.956.697.300	4634 Data	1.956.697.300 (Belum dianggarkan)	4634 Data	1.956.697.300 (Belum dianggarkan)	APBD	BKPSDM
Birokrasi	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	P1. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA K1. Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Digitalisasi Layanan Pemkab HSS	Jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik menurut SPBE dan Aplikasi Khusus Daerah	10.2 Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	66 Aplikasi	3.847.636.800	74 Aplikasi	4.040.018.640	80 Aplikasi	4.444.020.504 (Belum dianggarkan)	66 Aplikasi	4.866.422.554 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Perancangan Kebijakan	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	P2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD K2. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	EPOKIR (Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD)	Persentase Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sesuai Ketentuan	21.1 Jumlah warga kota (kabupaten) per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan							100%	2.613.345.000 (Belum dianggarkan)		Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 5.3

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Governance*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Layanan Publik	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	P1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelatihan ASN berbasis *e-learning*	1. Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional 2. Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial	16.2 Persentase area kota (kabupaten) di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi 16.3 Persentase area kota (kabupaten) yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota (kabupaten)	1. 96,66% 2. 96,15%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	1. 100% 2. 100%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	1. 100% 2. 100%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	1. 100% 2. 100%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	1. 100% 2. 100%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	APBD	BKPSDM
		K1. Pengembangan Kompetensi Teknis	Melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga terakreditasi	Jumlah kerja sama dengan Lembaga yang terakreditasi untuk pelaksanaan pelatihan kompetensi Teknis dan Fungsional		7 Lembaga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	7 Lembaga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	7 Lembaga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	7 Lembaga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	7 Lembaga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	APBD	BKPSDM
Birokrasi	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang	P1. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Digitalisasi Layanan Pemkab HSS	Jumlah aplikasi layanan publik dan layanan	10.2 Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat	92 Aplikasi	4.666.422.554 (Belum dianggarkan)	96 Aplikasi	4.666.422.554 (Belum dianggarkan)	100 Aplikasi	4.666.422.554 (Belum dianggarkan)	100 Aplikasi	4.666.422.554 (Belum dianggarkan)	100 Aplikasi	4.666.422.554 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
	akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	K1.Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik menurut SPBE dan Aplikasi Khusus Daerah	diakses dan yang dapat diminta secara daring												
Perancangan Kebijakan	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	P2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD K2. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	EPOKIR (Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD)	Persentase Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sesuai Ketentuan	21.1 Jumlah warga kota (kabupaten) per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	100%	2.613.348.000 (Belum dianggarkan)	100%	2.613.348.000 (Belum dianggarkan)	100%	2.613.348.000 (Belum dianggarkan)	100%	2.613.348.000 (Belum dianggarkan)	100%	2.613.348.000 (Belum dianggarkan)	APBD	Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

5.2 Peta Jalan Dimensi *Smart Branding*

Peta jalan *smart branding* ini dirancang untuk membimbing Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mencapai citra *brand* yang cerdas, modern, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat di era digital. Dengan fokus pada teknologi, inovasi, dan pengalaman pelanggan, *smart branding* bertujuan untuk menjaga daya saing dan relevansi *brand* di pasar yang terus berubah. Terdapat 10 (sepuluh) program/kegiatan yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *Smart Branding* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 4 (Empat) program/kegiatan dari subdimensi Pariwisata, yaitu:
  1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  2. Program Pengembangan Kebudayaan
  3. Program Pemasaran Pariwisata
  4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 5 (Lima) program/kegiatan dari subdimensi Daya Saing Bisnis, yaitu:
  1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  2. Program Pengembangan UMKM
  3. Program Penyuluhan Pertanian
  4. Program Perizinan Usaha Pertanian
  5. Program Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
- 1 (Satu) program/kegiatan dari subdimensi Wajah (Tampilan) Kota, yaitu:
  1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  2. Peta jalan implementasi smart branding di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 5.4), peta jalan jangka menengah (Tabel 5.5), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 5.6).

Tabel 5.4

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Branding*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Pariwisata	Meningkatkan pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat	P1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. SIPANDU WISATA – Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	14.1 Presentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	6,86	2.535.950.000	APBD	Disporapar
		K1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah pokdarwis yang aktif mengelola daya tarik wisata		4			
		K2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52			
		K3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52			
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Community Bassed Tourism* (CBT)	Persentasi Pengembangan OPK yang Mendukung Pariwisata	17b.1 Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	90			
		K1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase OPK yang dikembangkan		90			
		P3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. SIPANDU WISATA – Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi *event* berskala nasional/provinsi	14.1 Presentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring		1.076.233.600	APBD	Disdikbud
		K1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah media promosi pariwisata daerah yang digunakan					
		P4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. WETKAWA – Wisata Edukasi Kerbau Rawa	Persentase desa wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif	17b.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan	8	1.076.233.600	APBD	Disporapar
		K1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah pelaku ekonomi kreatif di desa wisata		50			
Daya Saing Bisnis	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan	P1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Portal Pemkab Hulu Sungai Selatan	Jumlah Kunjungan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	25	999.721.000	APBD	Disporapar
		K1. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota		Jumlah Dokumen Pemetaan Pengguna Data					

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM K1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	6000			Disporapar
				Jumlah Wirausaha yang mengikuti Pelatihan		4			
		P3. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN K1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.Padi Apung	Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	40%	3.143.160.000	APBD	Pertanian
				Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani		105			
		P4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN K1. Penerbitan Iztn usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	100	350.651.345	APBD	Disnakerkop UKMP
				Persentase Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian		7			
		P5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN K1. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	1. Telah Berkemas - Tetap Lestari Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat	Persentase nelayan yang menggunakan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang ramah lingkungan	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	100	34.194.183	APBD	Perikanan
				Persentase unit pengolah ikan (UPI) yang memenuhi standar pengolahan ikan		100			
Wajah (Tampilan) Kota	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	P1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG K1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota	Aplikasi Tata Ruang Berbasis Geospasial	Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	1	2.459.135.500	APBD	PUTR
				Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN		100			

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.5

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Branding*

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Pariwisata	Meningkatkan pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat	P1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	14.1 Presentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	7.66	3.119.545.000	8.66	3.431.499.500	9.66	3.774.649.450	10.66	41.152.114.395	APBD	Disporapar
		K1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah pokdarwis yang aktif mengelola daya tarik wisata		7		10		13		16			Disporapar
		K2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat dapat diakses kendaraan R4 dan R2		62		72		82		92			
		K3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota		Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52.83403994		62.94608974		73.36792652		83.55826395			
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Community Bassed Tourism* (CBT)	Persentase Pengembangan OPK yang Mendukung Pariwisata	17b.1 Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	100		100		100		100			Disdikbud
		K1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase OPK yang dikembangkan		100		100		100		100			

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional / provinsi	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	0.87644278 1	Rp1,163,856,96 0	1.31900935 2	Rp1,302,242,65 6	1.49323691 1	Rp1,432,466,92 2	2.04323172 4	Rp1,575,713,61 4	APBD	Disporapar
		K(1). Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah media promosi pariwisata daerah yang digunakan		6.12590421		9.06650049 1		9.24474462 9		9.80395070 4			
		P4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. WETKAWA - Wisata Edukasi Kerbau Rawa	Persentase desa wisata yang mengembang-kan ekonomi kreatif	17b.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan	50.0659676 8	999.721.000	51.0604539 7	999.721.000	51.2027015 6	999.721.000	51.9550121	999.721.000	APBD	Disporapar
		K1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah pelaku ekonomi kreatif di desa wisata		25.8154354 3		26.1656695 2		26.6413939 4		26.9955005 3			Disporapar
Daya Saing Bisnis	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan	P1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Portal Pemkab Hulu Sungai Selatan	Jumlah Kunjungan pada Sitem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	7000	3.143.160.000	8000	3.143.160.000	9000	3.143.160.000	10000	3.143.160.000	APBD	Diskominfo
		K1. Pengelolaan e-		Jumlah Dokumen		4		4		4					

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		Pemetaan Pengguna Data											
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	0.4	350.651.345	0.4	350.651.345	0.4	350.651.345	0.4	350.651.345	APBD	Disnakerkop UKMP
		K1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah Wirausaha yang mengikuti Pelatihan		105		105		105		105			
		P3. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.Padi Agung	Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	100		100		100		100			Pertanian
		K1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian		Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani		9		11		13		17			
		P4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	100		100		100		100		APBD	Pertanian
		K1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian		100		100		100		100			

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Telah Berkemas - Tetap Lestari Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat	Persentase nelayan yang menggunakan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang ramah lingkungan	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembang-an	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	APBD	Perikanan
		K1. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		Persentase unit pengolah ikan (UPI) yang memenuhi standar pengolahan ikan		100		100		100		100			
Wajah (Tampilan) Kota	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangun-an infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	P1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	APLIKASI TATA RUANG BERBASIS GEO-SPASIAL	Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	APBD	PUTR
		K1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN		2		2		2		2			

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.6

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Branding*

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Pariwisata	Meningkatkan pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat	P1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase destinasi wisata yang memenuhi Sapta Pesona	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	6.66	2.635.950.000	7.66		8.66	3.431.499.500	9.66	3.774.649.450	10.66	4.152.114.395	APBD	Disporapar
		K1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah pokdarwis yang aktif mengelola daya tarik wisata		4		7		10		13		16			
		K2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52		62		72		82		92			
		K3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52		62		75		100		-			
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Community Based Tourism* (CBT)	Persentasi Pengembangan OPK yang Mendukung Pariwisata	17b.1 Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	100	5.283.403.994	100	5.294.605.974	100	5.336.792.652	100	5.355.826.395	100		APBD	Disdikbud
		K1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase OPK yang dikembangkan		90		100		100		100		100			

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional/ provinsi	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring		1.076.233.600	0,67	1.183.856.960	1,32	1.302.242.656	1,49	1.432.466.922	2,04	1.575.713.614	APBD	Disporapar
		K1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah media promosi pariwisata daerah yang digunakan		5		5		9		9		9			
		P4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	WETKAWA - Wisata Edukasi Kerbau Rawa	Persentase desa wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif	17b.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan	50	999.721.000	60	999.721.000	70	999.721.000	80	999.721.000	90	999.721.000	APBD	Disporapar
		K1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah pelaku ekonomi kreatif di desa wisata		25		25		25		25		25			
Daya Saing Bisnis	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan	P1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Portal Pemkab Hulu Sungai Selatan	Jumlah Kunjungan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 tahun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	6000	3.143.160.000	7000	3.143.160.000	8000	3.143.160.000	9000	3.143.160.000	10000	3.143.160.000	APBD	Diskominfo
		K1. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah		Jumlah Dokumen Pemetaan Pengguna Data		4		4		4		4		4			

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		daerah kabupaten/ kota															
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemas-an UMKM)	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	40%	350.651. 345	50%	350.651. 345	60%	350.651. 345	70%	350.651. 345	80%	350.651. 345	APBD	Disnakerko p UKMP
		K1. Pengembang-an usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah Wirausaha yang mengikuti Pelatihan		105		105		105		105		105			
		P3. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Padi Apung	Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	100	3.143.160. 000	100	3.143.160. 000	100	3.143.160. 000	100	3.143.160. 000	100	3.143.160. 000	APBD	Pertanian
		K1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian		Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani		7		9		11		13		17			
		P4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemas-an UMKM)	Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	100	350.651. 345	100	350.651. 345	100	350.651. 345	100	350.651. 345	100	350.651. 345	APBD	Pertanian
		K1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota		Persentase Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian		100		100		100		100		100			
		P5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	TELAH BERKEMAS (Tetap Lestari Harus Berdayakan	Persentase nelayan yang menggunakan sarana dan prasarana perikanan	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	APBD	Perikanan

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			Kelompok Masyarakat)	tangkap yang ramah lingkungan	pendidikan, penelitian, dan pengembangan												
		K1. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		Persentase unit pengolah ikan (UPI) yang memenuhi standar pengolahan ikan		100		100		100		100		100			
Wajah (Tampilan Kota	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	P1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Aplikasi Tata Ruang Berbasis Geo-Spasial	Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	APBD	PUTR
		K1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN		2		2		2		2		2			

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

5.3 Peta Jalan Dimensi *Smart Economy*

Peta jalan untuk implementasi dimensi *smart economy* dalam konteks *Smart City* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melibatkan sejumlah langkah strategis untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terdapat 11 (sebelas) program yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 2 (Dua) program dari subdimensi Ekosistem Industri, yaitu:
    1. Program Pengembangan Sentra Industri
    2. Program Pengembangan UMKM
- 7 (Tujuh) program dari subdimensi Kesejahteraan Masyarakat, yaitu:
    1. Program Pengembangan Sentra Industri
    2. Program Pengembangan UMKM
    3. Program Penyuluhan Pertanian
    4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
    5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
    6. Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
    7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 2 (Dua) program dari subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan, yaitu:
    1. Program Pengembangan UMKM
    2. Program Peningkatan PAD

Peta jalan implementasi smart economy di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 5.7), peta jalan jangka menengah (Tabel 5.8), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 5.9).

Tabel 5.7

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Economy*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						2024 (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran		
Ekosistem Industri	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	P1. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	1.Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	16,1	60.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
			2. RuPaku (Rumah Packaging Produk UMKM). Rumah Kemasan yang melayani desain, cetak dan pendampingan pembuatan kemasan sesuai standar dan menarik	2. Persentase pengembangan sentra industri		4 IKM	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K1. Kegiatan Sertifikasi Halal Produk Pangan	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	1. Jumlah produk pangan yang disertifikasi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	10 IKM	Belum dianggarkan		Dinas NakerKopUKP
			3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	2. Persentasi peningkatan kapasitas produk industri kecil		27,9	Belum dianggarkan		Dinas NakerKopUKP
		K2. Kegiatan Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Dan Aneka	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Jumlah IKM kerajinan dan aneka yang dibina	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	4 IKM	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K3. Kegiatan Pengembangan Sentra Industri Sandang Dan Pangan	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Jumlah IKM sandang dan pangan yang dibina	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	30	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif. Sehingga	P1. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Penyediaan web/aplikasi bank data UMKM	Persentase UMKM yang dibina	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	20%	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K1. Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Klinik UMKM	Jumlah UMKM skala mikro menjadi skala kecil	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	25 UMKM	30.000.000		Dinas NakerKopUKP

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024 (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran		
	akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri.	P2. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PETANI BERDASI (Pemberdayaan Petani Milenial melalui Peningkatan Manajemen Kelembagaan, Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi)	Jumlah petani milenial yang memiliki kompetensi wirausahawan	20.1 Pesentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	150	275.696.900	APBD	Dinas Pertanian
		P3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BERMANDIKAN GAHARU (Berdayakan Masyarakat dengan Budidaya Ikan Gabus Haruan	Persentase luasan budidaya yang diintervensi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk 5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	35%	613.039.537	APBD	Dinas Perikanan
		P4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	TELAH BERKEMAS (Tetap Lestari Harus Berdayakan Masyarakat)	Persentase KUB memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	100%	710.992.300	APBD	Dinas Perikanan
		P5. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	RUMPAK (Rumah Pangan Kita) / TOTAL (Toko Tani Mobile - Gelar Pangan Murah)	Bahan Pangan Terjangkau Bagi Masyarakat baik dari sisi Ketersediaan maupun harga	20.1 Pesentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	20 RPK / 86 Desa	84.495.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
		P6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	SIDODOL (Sistem Informasi Produk Lokal terintegrasi)	Persentase Pedagang yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Online	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	31%	16.214.600	APBD	Dinas Perdagangan
		K1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	UMKM Go Digital (pendampingan, sosialisasi dan bimtek SDM UMKM)	Jumlah UMKM per kecamatan yang dilkukan Bimtek	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	30 UMKM/ 3 Kecamatan	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
Ekosistem Transaksi Keuangan	Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan dengan membangun	P1. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Klinik UMKM	Pesentase UMKM yang dibina	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	25 UMKM	30.000.000		Dinas NakerKopUKP

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran		
	Infrastruktur transaksi keuangan, mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas perbankan	K1. Kegiatan digitalisasi transaksi keuangan UMKM	Klinik UMKM	Persentase UMKM yang menggunakan QRIS	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	20%	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
		P2. Program Peningkatan PAD	SI KETUPAD (Sistem Informasi Keuangan Terpadu Pajak Daerah) aplikasi yang bisa diunduh melalui Playstore, yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung besar pajak, melakukan pembayaran dan mendapat bukti setor pajak	Persentase Peningkatan PAD	-				
		K2. Kegiatan digitalisasi Transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah		Persentase Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dibayar secara digital	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	50%	100.000.000	APBD	BPKPD

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.8

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Economy*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Ekosistem Industri	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	P1. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	1.Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	18,1	230.000.000	18,1	230.000.000	18,1	230.000.000	18,1	230.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif. Sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri.	P1. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI	2. RUPAKU (Rumah Packaging Produk UMKM)/ Rumah Kemasan yang melayani desain, cetak dan pendampingan pembuatan kemasan sesuai standar dan menarik	2. Persentase pengembangan sentra industri		4 IKM	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K1. Kegiatan Sertifikasi Halal Produk Pangan	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	1. Jumlah produk pangan yang disertifikasi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	10 IKM	50.000.000	10 IKM	50.000.000	10 IKM	50.000.000	10 IKM	50.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
			3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	2. Persentasi peningkatan kapasitas produk industri kecil		27,9	150.000.000	27,9	150.000.000	27,9	150.000.000	27,9	150.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K2. Kegiatan Pengembangan sentra industri kerajinan dan aneka	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Jumlah IKM kerajinan dan aneka yang dibina	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	4 IKM	150.000.000	4 IKM	150.000.000	4 IKM	150.000.000	4 IKM	150.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		KI. Kegiatan Pengembangan sentra industri sandang dan pangan	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Jumlah IKM sandang dan pangan yang dibina		30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Penyediaan web/aplikasi bank data UMKM	Persentase UMKM yang dibina	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	300.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		KI. Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Klinik UMKM	Jumlah UMKM skala mikro menjadi skala kecil	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	30 UMKM	150.000.000	35	200.000.000	40	250.000.000	25	300.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		P3. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PETANI BERDASI (Pemberdayaan Petani Milenial melalui Peningkatan Manajemen Kelembagaan, Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi)	Jumlah petani milenial yang memiliki kompetensi wirausahawan	20.1 Pesentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	165	300.000.000	180	300.000.000	200	300.000.000	220		APBD	Dinas Pertanian
		P4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BERMANDIKAN GAHARU (Berdayakan Masyarakat dengan Budidaya Ikan Gabus Haruan	Persentase Luasan Budidaya yang diintervensi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk 5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor	40%	674.343.490	60%	613.039.537	70%	613.039.537	80%	613.000.000	APBD	Dinas Perikanan

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
					pendidikan, penelitian, dan pengembangan										
		P5. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	TELAH BERKEMAS (Tetap Lestari Harus Berdayakan Masyarakat)	Persentase KUB memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	40%	710.992.300	50%	720.000.000	60%	720.000.000	70%	720.000.000	APBD	Dinas Perikanan
		P6. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	RUMPAK (Rumah Pangan Kita)/ TOTAL (Toko Tani Mobile - Gelar Pangan Murah)	Bahan Pangan Terjangkau bagi Masyarakat baik dari sisi Ketersediaan maupun harga	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	20 RPK / 88 Desa	84.496.000	22 RPK / 100 Desa	110.000.000	24 RPK / 120 Desa	140.000.000	26 RPK / 144 Desa	200.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
		P7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	SIDODOL (Sistem Informasi Produk Lokal terintegrasi)	Persentase Pedagang yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Online	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	30%	16.214.600	60%	16.214.600	90%	16.214.600	100%	16.214.600	APBD	Dinas Perdagangan
		K1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	UMKM Go Digital (pendampingan, Sosialisasi dan bimtek SDM UMKM)	Jumlah UMKM per kecamatan yang dilkukan Bimtek	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	30 UMKM/ 3 Kecamatan	150.000.000 (Belum dianggarkan)	30 UMKM/ 3 Kecamatan	150.000.000 (Belum dianggarkan)	-	-	-	-	APBD	Dinas Nakerkop UKP
		P8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Klinik UMKM	Pesentase UMKM yang dibina	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	25 %	30.000.000 (Belum dianggarkan)	50%	30.000.000 (Belum dianggarkan)	75%	30.000.000 (Belum dianggarkan)	100%	30.000.000 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas NakerKop UKP

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Ekosistem Transaksi Keuangan	Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan dengan membangun infrastruktur transaksi keuangan, mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas perbankan	P1. PROGRAM PENINGKATAN PAD K1. Kegiatan digitalisasi transaksi keuangan UMKM	Klinik UMKM	Persentase UMKM yang menggunakan QRIS	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	20%	20.000.000 (Belum dianggarkan)	40%	20.000.000 (Belum dianggarkan	60%	20.000.000 (Belum dianggarkan	100%	20.000.000 (Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKop UKP
		K2. Kegiatan Digitalisasi Transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	SI KETUPAD (Sistem Informasi Keuangan Terpadu Pajak Daerah) aplikasi yang bisa diunduh melalui Playstore, yang bisa digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung besar pajak, melakukan pembayaran dan mendapat bukti setor Pajak	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dibayar secara digital	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	50%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	APBD	BPKPD

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.9

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Economy*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Ekosistem Industri	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	KLINIK UMKM	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	APBD	
Kesejahteraaan Masyarakat	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif. Sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri	P6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	SIDODOL (Sistem Informasi Produk Lokal)	Persentase Pedagang yang menggunakan aplikasi berbasis online	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi	35%	50.000.000	50%	50.000.000	75%	50.000.000	-	-	-	-	APBD	Dinas Perdagangan
Ekosistem Transaksi Keuangan	Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan dengan membangun infrastruktur transaksi keuangan, mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas perbankan	P2. PROGRAM PENINGKATAN PAD	SI KETUPAD	Persentase pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan secara digital	9.2 Persentase pembayaran pajak dan retribusi yang dibayarkan secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	APBD	BPKPD

5.4 Peta Jalan Dimensi *Smart Living*

Peta jalan dimensi *smart living* untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan melibatkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi dan inovasi. Terdapat 5 (lima) Program yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *Smart Living* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 3 (tiga) program dari subdimensi Harmonisasi Tata Ruang, yaitu:
  1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
  2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).
  3. Program Penanggulangan Bencana.
- 1 (satu) program dari subdimensi Kesehatan, yaitu:
  1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat.
- 1 (satu) program dari subdimensi Transportasi, yaitu:
  1. Penyediaan Fasilitas Angkutan Publik Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Peta jalan implementasi *smart living* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 5.10), peta jalan jangka menengah (Tabel 5.11), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 5.12).

Tabel 5.10

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Living*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan *stakeholder* terkait.	P1. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) K1. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	1. Pena Sang Anak (Pelayanan Prima Satuan Pengamanan Gasan Anak-anak) 2. Malam Jum'at (Menanam Pohon di Lahan Masyarakat Setiap Hari Jum'at)	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	15.1 Persentase area kota yang dicakup kamera pengintai digital	6.97 %	4.458.433.447	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Rakyat dan Lingkungan Hidup
		P2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) K1.Urusan penyelenggraan PSU perumahan	1. Detak PJU+ (Deteksi Tangkai Kerusakan Penerangan Jalan Umum Plus) 2. SI MANTAN (Sistem Informasi Perumahan dan Pertanahan)	Persentase PSU Perumahan yang berkualitas	7.6 Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/ lampu 21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan dan populasi sedang hingga tinggi	69,23%	5.153.269.616	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Rakyat dan Lingkungan Hidup
		P3. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA K1. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana K2. Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	*Early Warning System* (EWS), Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik dan Rehabilitasi Dampak Pasca Bencana	Persentase cakupan penanggulangan bencana yang dapat ditangani	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	100 %	600.000.000	APBD	BPBD
Kesehatan	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	P1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT K(1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Si Cantik Bumiku (Strategi Pelacakan Untuk Peningkatan Pemeriksaan *Ante Natal Care* Sesuai Standar Pada Ibu Hamil Melalui Kunjungan Rumah) 2. Si Mbun Chating ke Faskes (Strategi Kemitraan Dukun Dan	1. Persentase penurunan balita gizi kurang 2. Persentase cakupan desa UCI	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10%	17.051.039.000	APBD	Dinas Kesehatan

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	*Leading Sector*
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			Bidan Cegah Stunting Dan Merujuk Ibu Bersalin Ke Fasilitas Kesehatan) 3. Pengembangan pendaftaran pasien online 4. Integrasi data rekam medis antar-fasyankes 5. Sistem rujukan pasien terpadu	3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 4. Persentase penurunan komplikasi obstetri 5. Persentase cakupan pelayanan ibu nifas 6. Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM 7. Persentase kelahiran di faskes 8. Persentase BBLR 9. Persentase pelayanan bayi dan balita 10. Kolaborasi dengan *stakeholder* terkait	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	9. 100% 10 100%"			
Transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transfortasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	P1. PENYEDIAAN FASILITAS ANGKUTAN PUBLIK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. SIMPKB (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor) 2. Pelayanan Transportasi Gratis Khusus Angkutan Bis Pelajar 3. Sistem Layanan Angkutan Umum Terpadu	1. Meningkatkan keselamatan penyelengaraan transportasi publik dengan mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dan unsur – unsur masyarakat 2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) tranfortasi publik	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses publik 19.9 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas 9.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter	1. 1,7 % 2. 50 % 3. 50% 4. 100% 5 100%	779.268.000	APBD	Dinas Perhubungan

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
				3. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan publik 4. Mengintegrasikan pelayanan publik 5. Meningkatkan keterjangkauan (aksesibilitas) masyarakat terhadap layanan angkutan publik					

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan stakeholder terkait	P1. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) K1. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	1. Pena Sang Anak (Pelayanan Prima Satuan Pengamanan Gasan Anak-anak) 2. Malam Jum'at (Menanam Pohon di Lahan Masyarakat Setiap Hari Jum'at)	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	15.1 Persentase area kota yang dicakup kamera pengintai digital	7,02 %	5.795.963.461 (Belum dianggarkan)	7,10 %	6.375.559.839 (Belum dianggarkan)	7,18 %	7.013.115.823 (Belum dianggarkan)	7,26 %	7.714.427.405 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		P2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) K1. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	1. Detak PJU+ (Deteksi Tangkal Kerusakan Penerangan Jalan Umum Plus) 2. SI MANTAN (Sistem Informasi Perumahan dan Pertanahan)	Persentase PSU Perumahan yang berkualitas	7.6 Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahayalampu 21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan dan populasi sedang hingga tinggi	73,08%	6.699.276.500 (Belum dianggarkan)	76,92%	7.369.204.150 (Belum dianggarkan)	80,77%	8.106.124.565 (Belum dianggarkan)	84,61%	8.916.737.021 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		P3. PROGRAM PENANGGULANGAN	*Early Warning System* (EWS), Sistem	Persentase cakupan penanggulangan	10.2 Persentase layanan kota	100 %	660.000.000 (Belum dianggarkan)	100 %	966.000.000 (Belum dianggarkan)	100 %	1.064.600.000 (Belum dianggarkan)	100 %	1.171.260.000 (Belum dianggarkan)	APBD	BPBD

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		BENCANA K1. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana K2. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Informasi Manajemen Bantuan Logistik dan Rehalibilasi Dampak Pasca Bencana	bencana yang dapat ditangani	yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring										
Kesehatan	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	P4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT K1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Si Cantik Bumiku (Strategi Pelacakan Untuk Peningkatan Pemeriksaan Ante Natal Care Sesuai Standar Pada Ibu Hamil Melalui Kunjungan Rumah) 2. Si Midun Chating ke Faskes (Strategi Kemitraan Dukun Dan Bidan Cegah Stunting Dan Merujuk Ibu Bersalin Ke Fasilitas Kesehatan) 3. Pengembangan	1. Persentase penurunan balita gizi kurang 2. Persentase cakupan desa UCI 3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 4. Persentase penurunan komplikasi obstetri 5. Persentase cakupan pelayanan ibu nifas 6. Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM. 7. Persentase kelahiran di faskes 8. Persentase BBLR 9. Persentase	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan 11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	10.319.660.000	1. 6% 2. 85% 3. 93% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%	10.240.160.000	1. 6% 2. 85% 3. 93% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10. 100 %	37.194.960.000	1. 6% 2. 85% 3. 93% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100%	37.194.960.000	APBD	Dinas Kesehatan

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			Pendaftaran pasien online 4. Integrasi data rekam medis antar-fasyankes 5. Sistem rujukan pasien terpadu	pelayanan bayi dan balita 10. Kolaborasi dengan *stakeholder* terkait											
Transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transfortasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	P1. PENYEDIAAN FASILITAS ANGKUTAN PUBLIK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. SIMPKB (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor) 2. Pelayanan Transportasi Gratis Khusus Angkutan Bis Pelajar 3. Sistem Layanan Angkutan Umum Terpadu	1. Persentasi Populasi Jalur Keselamatan Transportasi menggunakan Kamera digital 2. Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 3. Koordinasi Lintas Sektor	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik 19.9 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas 9.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter	1. 1,7 % 2. 50 % 3. 50% 4. 100% 5 100%	875.216.600	1. 2,1 % 2. 55 % 3. 60% 4. 100% 5 100 %	942.936.480	1. 3 % 2. 60 % 3. 65% 4. 100% 5 100%	1,037.272.328	1. 4 % 2. 65 % 3. 70% 4. 100% 5 100%	1.140.955.561	APBD	Dinas Perhubungan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.12

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Living*

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergitas dengan stakeholder terkait	P1. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARA-GAMAN HAYATI (KEHATI) K1. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	1. PENA SANG ANAK (Pelayanan Prima Satuan Pengamanan Gasan Anak-anak) 2. MALAM JUM'AT (Menanam Pohon di Lahan Masyarakat Setiap Hari Jum'at)	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	15.1 Persentase area kota yang dicakup kamera pengintai digital	7,34 %	6.465.670.145 (Belum dianggarkan)	7,42 %	9.334.457.160 (Belum dianggarkan)	7,50 %	10.267.902876 (Belum dianggarkan)	7,58 %	11.294.693164 (Belum dianggarkan)	7,66 %	12.424.162480 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		P2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) K1.Urusan penyelenggraan PSU perumahan	1. DETAK PJU+ (Deteksi Tangkal Kerusakan Penerangan Jalan Umum Plus) 2. SI MANTAN (Sistem Informasi Perumahan dan Pertanahan)	Persentase PSU Perumahan yang berkualitas	7.6 Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/ lampu 21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan dan populasi sedang hingga tinggi	86,45 %	9.606.410.724 (Belum dianggarkan)	92,29 %	10.769.251796 (Belum dianggarkan)	96,13 %	11.965.176976 (Belum dianggarkan)	99,97 %	13.054.994673 (Belum Dianggarkan)	100 %	14.360.494140 (Belum Dianggarkan)	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P3. PROGRAM PENANGGU-LANGAN BENCANA K1. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana K2. Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Early Warning System (EWS), Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik dan Rehalibitasi Dampak Pasca Bencana	Persentase cakupan penanggulangan bencana yang dapat ditangani	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	100 %	1.266.406.000	100 %	1.266.406.000	100 %	1.266.406.000	100 %	1.266.406.000	100 %	1.266.406.000	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	BPBD
Kesehatan	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	P4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT K(1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. SI CANTIK BUMILKU (Strategi Pelacakan Untuk Peningkatan Pemeriksaan Ante Natal Care Sesuai Standar Pada Ibu Hamil Melalui Kunjungan Rumah) 2. SI MIDUN CHATING KE FASKES (Strategi Kemitraan Dukun Dan Bidan Cegah Stunting Dan Merujuk Ibu	1. Persentase penurunan balita gizi kurang 2. Persentase cakupan desa UCI 3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 4. Persentase penurunan kompilikasi obstetri 5. Persentase cakupan pelayanan ibu nifas	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan 11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh	1. 6% 2. 64% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	18.756.142900 (Belum dianggarkan)	1. 6% 2. 64% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	20.631.757190 (Belum dianggarkan)	1. 6% 2. 64% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	22.694.932909 (Belum dianggarkan)	1. 6% 2. 64% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	24.964.426200 (Belum dianggarkan)	1. 6% 2. 64% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	27.460.668820 (Belum dianggarkan)	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Kesehatan HSS

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			Bersalin Ke Fasilitas Kesehatan) 3. Pengembangan Pendaftaran pasien online 4. Integrasi data rekam medis antar Fasyankes 5. Sistem rujukan pasien terpadu	6. Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM 7. Persentase kelahiran di faskes 8. Persentase BBLR 9. Persentase pelayanan bayi dan balita 10. Kolaborasi dengan stakeholder terkait	per 100.000 penduduk													
Transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transportasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	PI. PENYEDIAAN FASILITAS ANGKUTAN PUBLIK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. SIMPKB (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor) 2. Pelayanan Transportasi Gratis Khusus Angkutan Bis Pelajar 3. Sistem Layanan Angkutan Umum Terpadu	1. Persentasi Populasi Jalur Keselamatan Transportasi menggunakan Kamera digital 2. Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 3. Koordinasi Lintas Sektor	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik 19.9 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas 9.12 Persentase rute angkutan	1. 4 % 2. 70 % 3. 75% 4. 100% 5 100%	1.240.955.561	1. 4 % 2. 75 % 3. 80% 4. 100% 5 100%	1.350.955.561	1. 4 % 2. 80 % 3. 85% 4. 100% 5 100%	1.450.955.561	1. 4 % 2. 80 % 3. 85% 4. 100% 5 100%	1.450.955.561	1. 4 % 2. 100 % 3. 100% 4. 100% 5 100%	1.550.955.561	APBD	Dinas Perhubungan

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
					umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter												

(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

5.5 Peta Jalan Dimensi *Smart Society*

Peta jalan dimensi *Smart Society* berisi tentang rencana strategis yang merinci langkah-langkah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas. *Smart society* melibatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat. Terdapat 11 (sebelas) program/kegiatan yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *Smart Society* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 7 (tujuh) program dari subdimensi Interaksi Masyarakat, yaitu:
  1. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
  2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa.
  3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
  4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
  5. Program Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja.
  6. Program Rehabilitasi Sosial.
  7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 2 (dua) program dari subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan, yaitu:
  1. Program Pengelolaan Pendidikan.
  2. Program Pembinaan Perpustakaan.
- 2 (dua) program dari subdimensi Keamanan Masyarakat, yaitu:
  1. Pengembangan Dan Pengelolaan Kabupaten/Kota Cerdas.
  2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Peta jalan implementasi smart society di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 5.13), peta jalan jangka menengah (Tabel 5.14), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 5.15).

Tabel 5.13

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Society*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Interaksi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Inklusi Sosial Masyarakat melalui Pembangunan Ruang Publik Inklusif dan Kolaborasi Stakeholder dalam pelayanan terhadap anak, disabilitas dan lansia	P1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA P2. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA P3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. SIDODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa Online) 2. SIA PKK (Sistem Informasi Administrasi PKK)	1. Prosentase Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengikuti Bimtek 2. Persentase Pengurus BUMDes yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Bumdes	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	1. 100% (664 orang) 2. 24.07% 3. 75.69%	1. 173.200.250 2. 12.475.000 3. 666.690.800	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil
		P4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Sarjana Pendamping Desa			9,12 %	1.365.114.600	APBD	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM & Perindustrian
		P5. PROGRAM PRODUKTIVITAS DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA P6. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PENTAMAKS (Penempatan Tenaga Kerja Mutual dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas) Konsentrasi: Pelatihan digital (kelas e-Training bagi calon pekerja Penyandang Disabilitas). Fasilitasi pemagangan bagi calon pekerja penyandang disabilitas		13.1 Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus 13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	0,30 % (0,30 % dari total jumlah pekerja se HSS)	500.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM & Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, BPSDM, BPKPD, Bappelitbangda
		P7. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL K1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	PESAN LIA+ (Pejabat Sayang Lanjut Usia)	Persentase orang penerima rehabilitasi sosial sesuai dengan peruntukannya	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat dan	593 orang	2.373.300.000	APBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan semua perangkat daerah di HSS

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	*Leading Sector*
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial			teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus				
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Infrastruktur yang Memadai, Kurikulum Relevan, Pengembangan Guru, Pendekatan Inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan Mitra Pembangunan, Program Pembelajaran Seumur Hidup, serta Evaluasi Berkelanjutan	P1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan proses belajar non-formal / kesetaraan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	95%	1.646.532.900	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil
			1 Laptop 1 siswa	Harapan Lama Sekolah (HLS)	6.2 Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	0,1%	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil
		P2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IHSS (Literasi Digital Hulu Sungai Selatan)	1. Persentase Pemerataan Layanan Perpustakaan Desa dan Kelurahan 2. Persentase masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk 17.4 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	100	Rp 271.564.600	APBD	Dispersip, Dinas Komunikasi Dan Informatika
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui sistem keamanan sosial yang kolaboratif berbasis digital dan terintegrasi	P1. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KABUPATEN/KOTA CERDAS P2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Mata HSS (Kegiatan pengadaan dan operasional kamera pengawas pada titik strategis di kota Kandangan dan kota-kota kecamatan di Kab. Hulu Sungai Selatan	Indeks Keamanan dan Ketertiban	15.1 Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	APBD	Satpol PP dan Damkar, Diskominfo, Dinas PMD

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.14

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Society*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Interaksi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Inklusi Sosial Masyarakat melalui Pembangunan Ruang Publik Inklusif dan Kolaborasi Stakeholder dalam pelayanan terhadap anak, disabilitas dan lansia	P1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA P2. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	SIDODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa Online)	1. Prosentase Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengikuti Bimtek 2. Persentase Pengurus BUMDes yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Bumdes	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	1. 100% (664 orang) 2. 24.07%	1. 173.200.250 2. 12.475.000	1. 100% (664 orang) 2. 24.07%	1. 173.200.250 2. 12.475.000	1. 100% (664 orang) 2. 24.07%	1. 173.200.250 2. 12.475.000	1. 100% (664 orang) 2. 24.07%	1. 173.200.250 2. 12.475.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
		P3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	SIA PKK (Sistem Informasi Administrasi PKK)	Persentase Desa Sehat Sejahtera		66.06	666.690.800	66.06	666.690.800	75.7	666.690.800	6334	666.690.800	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Infrastruktur yang Memadai, Kurikulum Relevan, Pengembangan Guru, Pendekatan Inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan Mitra Pembangunan, Program Pembelajaran Seumur Hidup, serta Evaluasi Berkelanjutan	P1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Guru Penggerak	1. Rata-rata kemampuan Literasi SD dan SMP berdasarkan asesmen nasional	6.3 jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	4.5	600.000.000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil
			Penyelenggaraan proses belajar non-formal / kesetaraan			0.95	1.646.532.900	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil
			1 Laptop 1 siswa	2. Rata-rata kemampuan Numerasi SD dan SMP berdasarkan asesmen nasional	6.2 Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran	0,1%	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			BERKEMAS (Berupaya Kembali Masuk Sekolah)	6. Angka Partisipasi Pendidikan Non-Formal	digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa										
		P1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IHSS (Literasi Digital Hulu Sungai Selatan)	1. Persentase Pemerataan Layanan Perpustakaan Desa dan Kelurahan 2. Persentase masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk 17.4 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	100	271.564.500	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui sistem keamanan sosial yang kolaboratif berbasis digital dan terintegrasi	P1. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KABUPATEN/KOTA CERDAS P2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Mata HSS (Kegiatan pengadaan dan operasional kamera pengawas pada titik strategis di Kota Kandangan dan Kota Kecamatan di Kab. Hulu Sungai Selatan	Indeks Keamanan dan Ketertiban	-	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	APBD	Dispersip, Dinas Komunikasi Dan Informatika

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.15

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Society*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Interaksi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Inklusi Sosial Masyarakat melalui Pembangunan Ruang Publik Inklusif dan Kolaborasi Stakeholder dalam pelayanan terhadap anak, disabilitas dan lansia	P1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA P2. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	SIDODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa Online)	1. Persentase Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengikuti Bimtek 2. Persentase Pengurus BUMDes yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Bumdes	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
		P3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADA	SIA PKK (Sistem Informasi Administrasi PKK)	3. Persentase Desa Sehat Sejahtera		75.69%	666.890.800	80 %	666.890.800	85%	666.890.800	90%	666.890.800	95%	666.890.800	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
		P4. PROGRAM PRODUKTIVITAS DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	PENTAMAKS (Penempatan Tenaga Kerja Mutual dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas)	Persentase Penyandang Disabilitas yang Memiliki Keterampilan	13.2 Pesentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi	1% (1% dari total jumlah pekerja se HSS)	Rp 500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM & Perindustrian

Subdimensi	Strategi	Program Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
					pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus												
		P5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL K1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	PESAN LIA+ (Pejabat Sayang Lanjut Usia)	Persentase orang penerima rehabilitasi sosial sesuai dengan peruntukkannya		593 Orang	2.373.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan semua perangkat daerah di HSS
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Infrastruktur yang Memadai, Kurikulum Relevan, Pengembangan Guru, Pendekatan Inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan Mitra Pembangunan, Program Pembelajaran Seumur Hidup,	P1. PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1 Laptop 1 siswa	Harapan Lama Sekolah (HLS)	6.2 Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	0,1%	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELIT BANGDA, Disdukcatpil

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
	serta Evaluasi Berkelanjutan																
		P1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN K1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/ kota	IHSS (Literasi Digital Hulu Sungai Selatan)	1. Persentase Pemerataan Layanan Perpustakaan Desa dan Kelurahan 2. Persentase masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk 17.4 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	1. 100% 2. 35%	271.564.600	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui sistem keamanan sosial yang kolaboratif berbasis digital dan terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.6 Peta Jalan Dimensi *Smart Environment*

Terdapat 5 (lima) program/kegiatan yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *Smart Environment* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 2 (dua) program dari subdimensi Keamanan Masyarakat, yaitu:
  1. Pengembangan Dan Pengelolaan Kabupaten/Kota Cerdas.
- Dua (2) program dari subdimensi Proteksi Lingkungan, yaitu:
  1. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
  2. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
- Dua (2) program dari subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah, yaitu:
  1. Program Pengelolaan Persampahan.
  2. Program Penanganan Persampahan Skala Kota Dan Kabupaten Dengan Teknologi Terbarukan.
- Satu (1) program dari subdimensi Tata Kelola Energi, yaitu:
  1. Program Pengelolaan Persampahan.

Peta jalan implementasi *smart environment* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 5.16), peta jalan jangka menengah (Tabel 5.17), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 5.18).

Tabel 5.16
Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Environment*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Proteksi Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi,pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi multipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	P1. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Gerak Mas Darling (Gerakan Masyarakat sadar lingkungan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Meningkatnya Nilai IKA	11.3 Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (real-time) untuk sarana kualitas udara dan air 23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	1. IKA (66,36) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (36,66)	2.094.539.500	APBD / APBN	Dispera KPLH
		P2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/ KOTA	CEKARLABUN (Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)			Jumlah Mesin Kebakaran dan Kebun (5 Unit Mesin)	400.000.000	APBD	DisperaKPLH, Distan
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	P1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN K1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	SURUNG SINTAK PAH (Pelaporan Layanan Sampah)	Jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah	16.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Jumlah kelompok masyarakat (2 kelompok)	500.000.000	APBD	DisperaKPLH
		P2. PROGRAM PENANGANAN PERSAMPAHAN SKALA KOTA DAN KABUPATEN DENGAN TEKNOLOGI TERBARUKAN	SAPI GEMUK (Sampah Pilah Gerakan Masyarakat Untuk keluarga)	Persentase sampah yang ditangani		75%	15.000.000.000	APBD/ APBN	DisPera KPLH
Tata Kelola Energi	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	P1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN K1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	BIOCHAR ORGANIK (arang hasil konversi dari limbah organik)	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Jumlah kelompok masyarakat (2 kelompok)	400.000.000	APBD	DisperaKPLH, Distan

(Sumber Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.17

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Environment*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Proteksi Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi multipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	P1. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Gerak Mas Darling (Gerakan Masyarakat sadar lingkungan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 4. Terbentuknya tim terpadu pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang antar-kabupaten dan provinsi	11.3 Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (real-time) untuk sarana kualitas udara dan air 23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	1. IKA (66,36) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (36,68)	2.094.639.500	1. IKA (67,27) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (36,93)	2.304.323.450	1. IKA (68,57) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,52)	2.676.231.350	1. IKA (69,12) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,66)	2.946.054.530	APBD	Dispera KPLH
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	P1. PENANGANAN PERSAMPAHAN SKALA KOTA DAN KABUPATEN DENGAN TEKNOLOGI TERBARUKAN	SAPI GEMUK (Sampah Pilah Gerakan Masyarakat Untuk keluarga) SURUNG SINTAK PAH (Pelaporan Layanan Sampah)	1. Persentase sampah yang dimanfaatkan kembali 2. Persentase sampah yang ditangani	16.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	52%% 73%	80.000.000 16.500.000.000	54%% 72%	85.0000.000 18.150.000.000	56%% 71%	90.000.000 19.965.000.000	60% 70%	95.000.000 21.961.500.000	APBD/ APBN	Dispera KPLH
Tata Kelola Energi	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	P1. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN K1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	BIOCHAR ORGANIK (arang hasil konversi dari limbah organik)	1. Persentase sampah organik yang dimanfaatkan kembali	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap	12%	440.000.000	15%	484.000.000	20%	532.400.000	25%	585.640.000	APBD	Dispera KPLH

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
					jumlah sampah rumah tangga										

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 5.18

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Environment*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Proteksi Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi,pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi multipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	PI. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Gerak Mas Darling (Gerakan Masyarakat sadar lingkungan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 4. Terbentuknya tim terpadu pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang antar kabupaten dan provinsi	11.3 Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (real-time) untuk sarana kualitas udara dan air 23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	1. IKA (66,36) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (38,66)	2.094.839.500	1. IKA (66,37) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (38,93)	2.304.323.450	1. IKA (66,19) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,27)	2.434.755.600	1. IKA (66,57) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,52)	2.678.231.350	1. IKA (69,12) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,66)	2.946.054.530	APBD	Dispera KPLH
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	PI. PENANGANAN PERSAMPAHAN SKALA KOTA DAN KABUPATEN DENGAN	SAPI GEMUK (Sampah Pilah Gerakan Masyarakat Untuk keluarga)	Persentase sampah yang ditangani	16.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	75%	15.000.000.000	73%	16.500.000.000	72%	18.150.000.000	71%	19.965.000.000	70%	21.961.500.000	APBD	Dispera KPLH

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		TEKNOLOGI TERBARUKAN	GALA SAJADAH (Gerakan Layanan Sampah jadi Ibadah Dunia Akhirat)	Persentase sampah yang dikurangi	7.1 Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat, pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total baruan energi kota untuk tahun tertentu	23%	6.000.000.000	25%	7.260.000.000	27%	7.986.000.000	29%	8.784.600.000	30%	9.663.060.000	APBD	Dispera KPLH
Tata Kelola Energi	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	P1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN K1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	BIOCHAR ORGANIK (arang hasil konversi dari limbah organik)	Persentase sampah organik yang dimanfaatkan kembali	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	10%	400.000.000	12%	440.000.000	15%	484.000.000	20%	532.400.000	25%	585.640.000	APBD	Dispera KPLH

BAB VI
PENUTUP

Masterplan Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan acuan dalam implementasi menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas pada tahun 2023-2033. Dokumen ini merupakan dokumen strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara utuh, dokumen ini menyajikan visi dan misi *smart city*, strategi pembangunan *smart city*, rencana aksi, serta peta jalan pembangunan *smart city* yang diuraikan dalam enam dimensi *smart city*. Dalam penyusunannya, dokumen ini dirancang selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan pemerintah daerah.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026

BUKU III

RINGKASAN EKSEKUTIF MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I
LATAR BELAKANG

Implementasi kota cerdas atau *smart city* telah menjadi tren di seluruh dunia. Gerakan-gerakan ini memberikan tekanan pada keputusan strategis perusahaan, bisnis kemudian pemerintah pusat dan daerah, dan penelitian untuk menemukan cara optimal dalam membangun kota masa depan. Di sisi lain, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya telah menjadi suatu kebutuhan utama. Selain itu, masyarakat telah menjadi semakin modern seiring perkembangan zaman sehingga masyarakat sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka (Darmawan, 2018).

Smart city adalah sebuah impian dari semua kota-kota besar di seluruh dunia. Konsep smart city sendiri sebenarnya dapat didefinisikan secara luas, bahkan dapat dikatakan tidak ada definisi yang benar-benar tepat atau absolut. Sebagai parameter, terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda tentang definisi smart city (Kajian Pengembangan Smart City di Indonesia, 2015). Menurut KSPPN Bappenas (2013), smart city pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari kawasan perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya dan menuju kepada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, sejak tahun 2017 telah dimulai inisiasi pengembangan smart city di Indonesia melalui Gerakan Menuju Smart City. Pada tahun 2023, telah terpilih 50 kota/kabupaten yang akan menerapkan konsep smart city dalam pencapaian pembangunan daerahnya, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 km sebelah utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, memiliki peran strategis dalam mendukung IKN. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah sekaligus kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang telah terbentuk secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Potensi pengembangan daerah yang ada ini harus digali sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui inovasi-inovasi dalam perspektif konsep smart city. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan telah berkomitmen sesuai dengan Inpres Nomor 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government untuk memanfaatkan teknologi informasi pemerintah sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Komitmen ini diwujudkan dalam Misi 5 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis.

Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kota cerdas, maka disusun Masterplan Smart City sebagai dokumen perencanaan yang dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan konsep smart city dalam pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan.

BAB II
VISI SMART CITY DAERAH

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu bagian wilayah pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi dan peluang untuk maju dan berkembang. Implementasi smart city di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus berlandaskan pada visi pembangunan smart city sehingga dapat ditentukan sasaran pencapaian pembangunan smart city Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Visi smart city ini kemudian diturunkan ke dalam misi pembangunan smart city. Adapun Visi dan Misi Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Nasional; harapan warga masyarakat; dan faktor eksternal di masa depan. Penjelasan visi, misi, dan sasaran smart city diuraikan sebagai berikut.

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C/17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 (enam) kabupaten administratif dan 3 (tiga) swapraja. Salah satunya Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibu kota Kandangan. Untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan suatu inisiatif untuk menjadi paradigma yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan rencana pembangunan melalui penerapan smart city. Oleh karena itu, penyusunan masterplan smart city Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tahun 2023, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berakhir. Namun, terdapat kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terdapat masa transisi menjelang Pemilu Kepala

Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 sehingga dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam menganalisis visi pembangunan daerah ini menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.

Visi pengembangan smart city di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi dasar perumusan prioritas pengembangan pembangunan daerah selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dengan terus melakukan inovasi untuk mencapai peningkatan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Rumusan visi smart city Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai:

“Hulu Sungai Selatan yang Sehat, Makmur, Agamis, Rakat, dan Berbasis Teknologi (HSS SMART)”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. HSS SMART dimaknai sebagai Hulu Sungai Selatan yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi kreatif, inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Secara keseluruhan, visi pembangunan smart city Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada kata kunci utama yaitu:

Sehat: Kota yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan inklusif, dan berupaya menyediakan dimensi permukiman, lalu lintas dan transportasi, industri, perkantoran dan pariwisata yang sehat.

Makmur: Kota dengan kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Agamis: Kota yang mendasarkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, dan implementasi nilai sosial, moral, norma, etika, tradisi, kearifan lokal dan toleransi sebagai fondasi kehidupan.

Rakat: Kota yang mengedepankan konsep kerja sama yang dinamis, dialogis, namun tetap harmonis untuk mencapai kondisi yang lebih baik, serta menyediakan lingkungan dan dinamika kehidupan perkotaan yang terbuka, ramah, dan menghormati pluralisme.

Berbasis Teknologi: Kota yang menggunakan teknologi secara optimal dan bijak untuk kemudahan, kecepatan, keteraksesan dan kualitas layanan sebagai dimensi utama pada semua aspek.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan misi yang jelas, karena misi merupakan suatu pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun Misi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama.
2. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Agribisnis- Agroindustri yang Berteknologi Tinggi.
4. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Untuk dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi maka perlu dilakukan penjabaran atas visi dan misi *smart city* terpilih ke dalam rumusan sasaran berdasarkan subdimensi dari masing-masing dimensi *smart city* beserta dasar pemikiran pembentuknya serta menetapkan indikator berkualitas yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan diterapkannya *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun indikator yang ditetapkan pada masing-masing sasaran merupakan indikator pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD dan indikator *smart city* yang ada dalam SNI ISO 37122:2019. Berikut ini disampaikan uraian berbagai indikator *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan sasaran pembangunan *smart city* dalam rentang waktu 2024-2034 (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Dimensi, Subdimensi, Sasaran, dan Indikator Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dimensi	Sub-dimensi	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Smart Governance	Layanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang cerdas berorientasi pada layanan sampai desa	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	*18.2* Persentase area kota di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi *18.3* Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas internet yang Disediakan oleh kota
	Birokrasi	Mantapnya reformasi birokrasi berbasis digital sampai di tingkat desa.	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	*10.2* Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	Perancangan Kebijakan	Meningkatnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sampai di tingkat desa	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	Nilai SAKIP	*21.1* Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan
Smart Branding	Pariwisata	Berkembang-nya destinasi wisata alam, budaya, dan religi	Pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat	Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks Pembangun An Kebudayaan	*14.1* Persentase Layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring *17b.1* Jumlah Pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk *17b.2* Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan

Dimensi	Sub-dimensi	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
	Daya Saing Bisnis	Meningkatnya penetrasi brand produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan.	Persentase Pertumbuh-an Industri Pengolahan Persentase Peningkatan Kualitas Produk Industri Pengolahan	*5.2* Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 Penduduk *20.1* Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian *20.3* Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring
	Wajah (Tampilan) Kota	Terwujudnya kota sentra UMKM	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	Persentase Peningkatan Produktivi-tas Per Unit Usaha	*5.2* Tingkat kelangsung-an bisnis baru per 100.000 penduduk
Smart Economy	Ekosistem Industri	Meningkatnya daya saing sektor industri yang terintegrasi dengan sektor primer, sekunder, dan tersier	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan Kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	Laju Pertumbuh-an Ekonomi Persentase Peningkatan Kuantitas bahan baku lokal	*20.1* Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan
	Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berdaya dan mandiri	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri	Persentase Penduduk Miskin Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (Angkatan Kerja yang Bekerja)	*5.3* Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) *5.4* Persentase Angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan

Dimensi	Sub-dimensi	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Terwujudnya ekosistem transaksi keuangan berbasis digital	Mengembangkan infrastruktur transaksi keuangan berbasis digital berupa pengembang-an *platform* aplikasi digital dan *sofware* pendukung, serta mengembangkan SDM yang memiliki keahlian dan talenta digital	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	*9.1* Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri *9.2* Persentase Pembayaran ke kota yang dibayar secara elektron berdasarkan faktur elektronik
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya tata ruang wilayah yang harmonis untuk mendukung daya saing daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergisitas dengan *stakeholder* terkait	Persentase Kesesuaian Pemanfaat-an Ruang	*21.4* Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi
	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk mendukung akses terhadap kualitas pendidikan, dan komoditi pangan dan non-pangan masyarakat	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	*11.1* Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan
	Transportasi	Meningkatnya ekosistem transportasi yang lancar dan aman untuk mendukung akses dan kualitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transportasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	Persentase Konektivitas Jalan dalam Kondisi Mantap	*19.5* Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung

Dimensi	Sub-dimensi	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
		pendidikan, kesehatan, komiditi pangan dan non-pangan masyarakat			(*real-time*) yang dapat diakses publik *19.9* Persentase lampu lalu lintas yang cerdas *19.12* Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter
Smart Society	Interaksi Masyarakat	Terciptanya modal sosial masyarakat yang tangguh	Memperkuat keterhubungan dan keterbukaan sosial melalui pendidikan, kolaborasi dan elaborasi, serta nilai-nilai positif untuk menciptakan modal sosial yang tangguh	Indeks Desa Membangun Persentase Pemuda yang Berwirausa-ha	*13.4* Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjemba-tani kesenjangan digital
				Persentase Penyandang Disabilitas yang Memiliki Keterampil-an	*13.2* Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendamping an bagi warga negara dengan kebutuhan khusus

Dimensi	Sub-dimensi	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
	Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non-formal.	Peningkatan kualitas pendidikan melalui infrastruktur yang memadai, kurikulum relevan, pengembangan guru, pendekatan inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan mitra pembangunan, program pembelajaran seumur hidup, serta evaluasi berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)	*6.3* Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk *6.2* Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajar-an digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa
				Indeks Literasi	17.3 Jumlah buku perpustaka-an umum dan judul *e-book* per 100.000 penduduk *17.4* Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustaka-an umum yang aktif
	Keamanan Masyarakat	Terciptanya keamanan Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata dan digitalisasi	Dengan menggabungkan Upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan	Indeks Keamanan dan Ketertiban	*15.1* Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital

Dimensi	Sub-dimensi	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	Memastikan terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam kondisi baik untuk menunjang potensi unggulan ekonomi lokal berkesinam-bungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi multipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Risiko Bencana	*23.3* Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem *11.3* Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (*real-time*) untuk saran akualitas udara dan air
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memastikan terciptanya pengelolaan sampah dan limbah yang cerdas untuk menunjang potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	Indeks Cakupan Pengelolaan Persampahan	*16.3* Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasil-kan energi *16.4* Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota *16.6* Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang

Dimensi	Sub-dimensi	Sasaran	Strategi	Indikator	
				RPJMD	ISO 37122:2019
	Tata Kelola Energi	Meningkatnya potensi penggunaan energi terbarukan melalui pengolahan sampah menjadi gas metan kemudian menjadi energi listrik	Optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	-	*7.1* Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat, dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu *7.3* Energi listrik dan panas dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis kesenjangan dan strategi yang ditetapkan untuk dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah jitu mewujudkan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan strategi dilakukan pada setiap sasaran dari setiap dimensi *smart city*, yaitu tata kelola birokrasi dan pemerintahan (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), ekonomi (*smart economy*), dan ekosistem perumahan (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*) dan perlindungan terhadap lingkungan (*smart environment*). Setiap dimensi terdapat tiga subdimensi yang kemudian memiliki sasaran, masing-masing sasaran dari subdimensi ini kemudian dirumuskan strategi untuk mencapai sasaran.

3.1 Strategi *Smart Governance*

Dimensi *smart governance* didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar. Dimensi *smart* governance diwujudkan dengan tercapainya sasaran berupa kualitas layanan publik, birokrasi yang efektif dan efisien, serta perancangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masing-masing sasaran pada dimensi *smart governance* dapat diwujudkan melalui strategi/kebijakan yang harus diambil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat Tabel 3.1).

Tabel 3.1
Subdimensi dan Strategi Smart Governance

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Layanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang cerdas berorientasi pada layanan sampai desa	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak
Birokrasi	Mantapnya reformasi birokrasi berbasis digital sampai di tingkat desa	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien
Perancangan Kebijakan	Meningkatnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sampai di tingkat desa	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3.2 Strategi *Smart Branding*

Smart branding merupakan salah satu dimensi dalam *smart city* yang dibutuhkan dalam era informasi seperti saat ini dimana sebuah kota tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi juga harus mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerah. Pada dasarnya konsep *branding* bertujuan untuk peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan ini maka ditetapkan sasaran-sasaran *smart branding* Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan subdimensi. Untuk mencapai masing-masing sasaran telah dirumuskan strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Subdimensi dan Strategi Smart Branding

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Pariwisata	Berkembangnya destinasi wisata alam, budaya, dan religi	Pengembangan pariwisata melalui peningkatan promosi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sentra UMKM secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat
Branding/ Daya Saing Bisnis	Meningkatnya penetrasi *brand* produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	Meningkatkan *branding* melalui kanal-kanal digital, kualitas UMKM, nilai tambah produktivitas hasil pertanian dan perikanan
Wajah (Tampilan) Kota	Terwujudnya kota sentra UMKM	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3.3 Strategi *Smart Economy*

Smart economy didefinisikan sebagai suatu sistem tata kelola perekonomian yang cerdas, sehingga mampu mengatasi tantangan pada era disrupsi ekonomi yang memerlukan adaptasi yang cepat. *Smart economy* terdiri dari tiga subpilar, yaitu pengembangan ekosistem industri yang berdaya saing, peningkatan kesejahteraan

masyarakat, dan pembangunan ekosistem transaksi ekonomi. Masing-masing subpilar *smart economy* dirumuskan sasaran yang diharapkan dari implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setiap sasaran dapat dicapai melalui strategi-strategi yang telah dirumuskan dari analisis TWOS (lihat Tabel 3.3).

Tabel 3.3
Subdimensi dan Strategi Smart Economy

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Ekosistem Industri	Meningkatnya daya saing sektor industri yang terintegrasi dengan sektor primer, sekunder, dan tersier	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berdaya dan mandiri	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri
Ekosistem Transaksi Keuangan	Terwujudnya ekosistem transaksi keuangan berbasis digital	Mengembangkan infrastruktur transaksi keuangan berbasis digital berupa pengembangan platform aplikasi digital dan *sofware* pendukung. Serta mengembangkan SDM yang memiliki keahlian dan talenta digital.

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3.4 Strategi *Smart Living*

Sesuai dengan namanya, istilah "*smart*" dalam *smart living* merujuk pada kecerdasan yang digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas manusia sehari- hari. Dimensi *smart living* bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tercukupi baik dari aspek fisik, kesehatan, dan transportasi sehingga dapat meningkatkan kualitas baik dari segi infrastruktur dasar, kualitas fasilitas kesehatan masyarakat dan berbagai bentuk penunjang kegiatan dan interaksi masyarakat. Dimensi ini terdiri dari tiga subdimensi yaitu harmonisasi tata ruang (*harmony*), kesehatan (*health*), dan transportasi (*mobility*). Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan *smart living* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Subdimensi dan Strategi Smart Living

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya tata ruang wilayah yang harmonis untuk mendukung daya saing daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergisitas dengan *stakeholder* terkait.
Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komoditi pangan dan non-pangan masyarakat	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan
Transportasi	Meningkatnya ekosistem transportasi yang lancar dan aman untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komoditi pangan dan non- pangan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transportasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3.5 Strategi *Smart Society*

Smart society bertujuan untuk mewujudkan ekosistem sosioteknis masyarakat yang humanis, produktif, komunikatif, dinamis, interaktif baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi. Dengan demikian, *smart society* atau masyarakat cerdas dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem sosial-teknis (sosial-virtual) masyarakat yang humanis, produktif, dinamis, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi. Konsep *smart society* diterapkan dan diukur dalam tiga subdimensi, yaitu 1) interaksi masyarakat, 2) ekosistem belajar, dan 3) keamanan masyarakat. Masing-masing subdimensi ini telah dirumuskan sasaran dan strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam impementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat Tabel 3.5).

Tabel 3.5
Subdimensi dan Strategi Smart Society

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Interaksi Masyarakat	Terciptanya modal sosial masyarakat yang tangguh	Memperkuat keterhubungan dan keterbukaan sosial melalui pendidikan, kolaborasi dan elaborasi, serta nilai- nilai positif untuk menciptakan modal sosial yang tangguh
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non-formal	Peningkatan kualitas pendidikan melalui infrastruktur yang memadai, kurikulum relevan, pengembangan guru, pendekatan inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan mitra pembangunan, program pembelajaran seumur hidup, serta evaluasi berkelanjutan
Keamanan Masyarakat	Terciptanya keamanan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata dan digitalisasi	Dengan menggabungkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang merata dengan strategi digitalisasi yang inklusif, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam memajukan kesejahteraan dan keamanan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

3.6 Strategi *Smart Environment*

Smart environment merupakan pembangunan tata kelola lingkungan yang cerdas, dimana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. *Smart environment* tidak hanya terpaku kepada smart *building*. Konsep *smart environment* memiliki gagasan yang berlandaskan pengelolaan sumber daya alam dan menggunakan teknologi dalam mengatasi permasalahan, serta menjalankan program sesuai dengan permasalahan dalam lingkungan yang terjadi. Secara umum, *smart environment* memiliki beberapa sasaran terkait proteksi lingkungan, pengelolaan sampah, dan tata kelola energi. Berbagai strategi dalam mewujudkan berbagai dan sasaran pada dimensi *smart environment* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Subdimensi dan Strategi Smart Environment

Subdimensi	Sasaran	Strategi
Proteksi Lingkungan	Memastikan terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam kondisi baik untuk menunjang potensi unggulan ekonomi lokal berkesinambungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi mulitipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memastikan terciptanya pengelolaan sampah dan limbah yang cerdas untuk menunjang potensi ekonomi lokal yang berkesinambungan/ berkelanjutan	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital
Tata Kelola Energi	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan potensi energi terbarukan	Optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

BAB IV
PETA JALAN SMART CITY DAERAH

Peta jalan Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun melalui diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan dari setiap dimensi. Masing- masing dimensi disusun peta jalan ini disusun dalam tiga periode waktu, yaitu jangka pendek (dilaksanakan pada tahun 2024), jangka menengah (dilaksanakan pada tahun 2025-2028), dan jangka panjang (dilaksanakan pada tahun 2029-2033). Peta jalan setiap dimensi dalam masing-masing periode waktu adalah sebagai berikut.

4.1 Peta Jalan Dimensi *Smart Governance*

Peta jalan dimensi smart governance mengacu pada rencana atau strategi untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang cerdas atau pintar. Smart governance melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan mengelola sumber daya secara lebih efektif. Terdapat 11 (sebelas) program/kegiatan yang terkait dengan implementasi smart city dimensi smart governance di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 5 program/kegiatan dari subdimensi Pelayanan Publik
- 3 program/kegiatan dari subdimensi Birokrasi
- 3 program/kegiatan dari subdimensi Perancangan Kebijakan

Peta jalan implementasi *smart governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 4.1), peta jalan jangka menengah (Tabel 4.2), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 4.3).

Tabel 4.1

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Governance*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	*Leading Sector*
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Layanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	P1. PROGRAM PENGEM-BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. *Assesment Center* 2. *Talent Pool* 3. Ruang *Media Center* untuk CAT	1. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi teknis dan kompetensi fungsional 2. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi manajerial	16.2 Persentase area kota (kabupaten) di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi 16.3 Persentase area kota (kabupaten) yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota (kabupaten)	1. 79,65% 2. 93,65%	5.235.364.000	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	BKPSDM
		P4. PENDAFTARAN PENDUDUK K1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. MENTANG MENTANG (Melahirkan Tenang Dokumen Datang) 2. KIWA (Pelayanan KIA via Whatsapp) 3. KETUPAT PECEL (Pelayanan Kependudukan Tunggu di Tempat Pedalaman Terpencil) 4. JULAK DIVAKSIN DOKTER (Ajukan Layanan Administrasi Kependudukan via Aplikasi Online Dokumen Diantar ke Rumah) 5. LACANA (Layanan Cepat Tanggap Bencana) 6. MADAM (Meninggal Dapat Akta Kematian) 7. ANANDA BAJU DANSA (Pelayanan Didatangi Bagi Lanjut Usia dan Disabilitas)	Persentase penerbitan dokumen kependudukan		100%	950.795.000	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		P5. PENCATATAN SIPIL K1. Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil		100%	150.660.000	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P6. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA K1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8. SI DODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa On-Line)	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dalam administrasi desa serta tertib pengelolaan Dana Desa		47,92%	332.462.650	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Birokrasi	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	P. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP K. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	9. SRIKANDI ((Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Persentase kebijakan instrumen wajib kearsipan	10.2 Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	100%	30.959.300	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		P. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP K. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Nilai audit pengelolaan arsip elektronik		65 (Nilai B)	121.551.300	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perancangan Kebijakan	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	P1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	10. Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT)	Persentase tata kelola keamanan informasi yang dilaksanakan dengan status baik	21.1 Jumlah warga kota (kabupaten) per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	67,5%	243.419.000	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		P2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD K1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	11. ePropemperda HSS (Program Pembentukan Peraturan Daerah) SIPI DPRD HSS (Sistem Informasi dan Publikasi DPRD Kab HSS)	Persentase dokumen Peraturan Paerah dan Peraturan DPRD yang disusun		100%	299.776.500	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretariat DPRD
		P3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	12. Portal Satu Data Hulu Sungai Selatan	Jumlah produsen data yang menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi		39 Produsen Data	56.246.600	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Komunikasi dan Informatika

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.2

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Governance*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Layanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	P2. PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Pengajuan cuti bagi ASN secara online melalui SIMPEGNAS (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional)	Jumlah data kepegawaian berbasis teknologi yang dikelola	16.2 Persentase area kota (kabupaten) di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi 16.3 Persentase area kota (kabupaten) yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota (kabupaten)	4634 Data	1.956.697.300	4634 Data	1.956.697.300	4634 Data	1.956.697.300 (Belum dianggarkan)	4634 Data	1.956.697.300 (Belum dianggarkan)	APBD	BKPSDM
Birokrasi	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	P1. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA K1. Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Digitalisasi Layanan Pemkab HSS	Jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik menurut SPBE dan Aplikasi Khusus Daerah	10.2 Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	66 Aplikasi	3.647.636.800	74 Aplikasi	4.040.016.640	60 Aplikasi	4.444.020.504 (Belum dianggarkan)	66 Aplikasi	4.888.422.554 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Perancangan Kebijakan	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi														

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.3

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Governance*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Layanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dengan melakukan pemenuhan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas SDM IT melalui kerja sama multipihak	P1. PROGRAM PENGEM-BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelatihan ASN berbasis e-learning	1. Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional 2. Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial	16.2 Persentase area kota (kabupaten) di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi 16.3 Persentase area kota (kabupaten) yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota (kabupaten)	1. 96,66% 2. 96,15%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	1. 100% 2. 100%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	1. 100% 2. 100%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	1. 100% 2. 100%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	1. 100% 2. 100%	5.235.364.000 (Belum dianggarkan)	APBD	BKPSDM
		P1.PROGRAM PENGEM-BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA K1. Pengem-bangan Kompetensi Teknis	Melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga terakreditasi	Jumlah kerja sama dengan Lembaga yang terakreditasi untuk pelaksanaan pelatihan kompetensi Teknis dan Fungsional		7 Lem-baga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	7 Lem-baga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	7 Lem-baga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	7 Lem-baga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	7 Lem-baga	1.742.562.000 (Belum dianggarkan)	APBD	BKPSDM
Birokrasi	Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	P1. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA K1.Pengelolaan *E-government* di Lingkup	Digitalisasi Layanan Pemkab HSS	Jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis	10.2 Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat	92 Aplikasi	4.888.422.554 (Belum dianggarkan)	96 Aplikasi	4.888.422.554 (Belum dianggarkan)	100 Aplikasi	4.888.422.554 (Belum dianggarkan)	100 Aplikasi	4.888.422.554 (Belum dianggarkan)	100 Aplikasi	4.888.422.554 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
	melalui digitalisasi pemerintahan berbasis pelayanan yang efektif dan efisien	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		elektronik menurut SPBE dan Aplikasi Khusus Daerah	diminta secara daring												
Perancangan Kebijakan	Menciptakan perancangan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan data yang terintegrasi dan terjaminnya keamanan sistem informasi	P2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD K(2). Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	EPOKIR (Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD)	Persentase fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat sesuai Ketentuan	21.1 Jumlah warga kota (kabupaten) per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	100%	2.613.346.000 (Belum dianggarkan)	100%	2.613.346.000 (Belum dianggarkan)	100%	2.613.346.000 (Belum dianggarkan)	100%	2.613.346.000 (Belum dianggarkan)	100%	2.613.346.000 (Belum dianggarkan)	APBD	Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.2 Peta Jalan Dimensi *Smart Branding*

Peta jalan *smart branding* ini dirancang untuk membimbing Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mencapai citra *brand* yang cerdas, modern, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat di era digital. Dengan fokus pada teknologi, inovasi, dan pengalaman pelanggan, *Smart branding* bertujuan untuk menjaga daya saing dan relevansi *brand* di pasar yang terus berubah. Terdapat 11 (sebelas) program/kegiatan yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *smart branding* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 5 program/kegiatan dari subdimensi Pariwisata
- 5 program/kegiatan dari subdimensi Daya Saing Bisnis
- 1 program/kegiatan dari subdimensi Wajah (Tampilan) Kota

Peta jalan implementasi Smart Branding di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 4.4), peta jalan jangka menengah (Tabel 4.5), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 4.6).

Tabel 4.4

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Branding*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Pariwisata	Berkembangnya destinasi wisata alam dan wisata budaya	P1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	14.1 Presentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	6,66	2.635.950.000	APBD	Disporapar
		K(1). Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah pokdarwis yang aktif mengelola daya tarik wisata		4			
		K(2). Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52			
		K(3). Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52			
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Community Bassed Tourism* (CBT)	Persentasi Pengembangan OPK yang Mendukung Pariwisata	17b.1 Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	90			
		(K1). Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase OPK yang dikembangkan		90			
		P3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional/provinsi	14.1 Presentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring		1.076.233.600	APBD	Disdikbud
		K(1). Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah media promosi pariwisata daerah yang digunakan					
		P4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. WETKAWA - Wisata Edukasi Kerbau Rawa	Persentase desa wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif	17b.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan	6	1.076.233.600	APBD	Disporapar
		K(1). Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah pelaku ekonomi kreatif di desa wisata		50			
Daya Saing Bisnis	Meningkatnya penetrasi brand produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.	P1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA K(1). Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota	1. Portal Pemkab Hulu Sungai Selatan	Jumlah Kunjungan pada Sitem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	25	999.721.000	APBD	Disporapar
				Jumlah Dokumen Pemetaan Pengguna Data					

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	*Leading Sector*
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Ki(1). Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	6000			Disporapar
				Jumlah Wirausaha yang mengikuti Pelatihan		4			
		P3. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Ki(1). Pelaksanaan penyuluhan pertanian	1.Padi Apung	Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	40%	3.143.150.000	APBD	Pertanian
				Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani		105			
		P4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Ki(1). Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	100	350.651.345	APBD	Disnakerkop UKMP
				Persentase Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian		7			
		P5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Ki(1). Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	1. Telan Berkemas - Tetap Lestari Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat	Persentase nelayan yang menggunakan sarana dan prasarana perikanan lengkap yang ramah lingkungan	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	100	34.194.183	APBD	Perikanan
				Persentase unit pengolah ikan (UPI) yang memenuhi standar pengolahan ikan		100			
Wajah (Tampilan) Kota	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	P1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	APLIKASI TATA RUANG BERBASIS GEOSPASIAL	Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	1	2.459.135.500	APBD	PUTR
		Ki(1). Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN		100			

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.5

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Branding*

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Pariwisa-ta	Berkembang-nya destinasi wisata alam dan wisata budaya	P1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	14.1 Presentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	7.66	3.119.545.000	8.66	3.431.499.500	9.66	3.774.649.450	10.66	41.152.114.395	APBD	Disporapar
		Ki(1). Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah pokdarwis yang aktif mengelola daya tarik wisata		7		10		13		16			Disporapar
		Ki(2). Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat dapat diakses kendaraan R4 dan R2		62		72		82		92			
		Ki(3). Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52.63403994		52.94606974		53.36792652		53.55526395			
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Community Bassed Tourismn (CBT)	Persentasi Pengembangan OPK yang Mendukung Pariwisata	17b.1 Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	100		100		100		100			Disdikbud
		(K1). Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase OPK yang dikembangkan		100		100		100		100			

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional / provinsi	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	0.876442781	Rp1,153,856,960	1.319009352	Rp1,302,242,656	1.493238911	Rp1,432,466,922	2.043231724	Rp1,575,713,614	APBD	Disporapar
		K(1). Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah media promosi pariwisata daerah yang digunakan		8.12590421		9.066500491		9.244744629		9.603950704			
		P4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. WETKAWA - Wisata Edukasi Kerbau Rawa	Persentase desa wisata yang mengembang-kan ekonomi kreatif	17b.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan	50.06696765	999.721.000	51.06045397	999.721.000	51.20270156	999.721.000	51.9550121	999.721.000	APBD	Disporapar
		K(1). Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah pelaku ekonomi kreatif di desa wisata		25.61543543		26.16566952		26.64139394		26.99550053			Disporapar
Daya Saing Bisnis	Meningkatnya penetrasi brand produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.	P1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Portal Pemkab Hulu Sungai Selatan	Jumlah Kunjungan pada Sitem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	7000	3.143.150.000	8000	3.143.150.000	9000	3.143.150.000	10000	3.143.150.000	APBD	Diskominfo
		K(1). Pengelolaan e government di lingkup		Jumlah Dokumen		4		4		4					

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		pemerintah daerah kabupaten/kota		Pemetaan Pengguna Data											
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	0.4	350.651.345	0.4	350.651.345	0.4	350.651.345	0.4	350.651.345	APBD	Disnakerkop UKMP
		K(1). Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah Wirausaha yang mengikuti Pelatihan		105		105		105		105			
		P3. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.Padi Apung	Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	100		100		100		100			Pertanian
		K(1). Pelaksanaan penyuluhan pertanian		Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani		9		11		13		17			
		P4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemasan UMKM)	Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	100		100		100		100		APBD	Pertanian
		K(1). Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian		100		100		100		100			
		P5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN	1. Telah Berkemas -	Persentase nelayan yang	5.4 Persentase	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	APBD	Perikanan

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tetap Lestari Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat	menggunakan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang ramah lingkungan	angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembang-an										
		K(1). Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		Persentase unit pengolah ikan (UPI) yang memenuhi standar pengolahan ikan		100		100		100		100			
Wajah (Tampilan) Kota	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangun-an infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	P1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	APLIKASI TATA RUANG BERBASIS GEO-SPASIAL	Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	APBD	PUTR
		K(1). Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN		2		2		2		2			

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.6

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Branding*

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Pariwisata	Berkem-bangnya destinasi wisata alam dan wisata budaya	P1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	SIPANDU WISATA - Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	14.1 Persen-tase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	6.66	2.635.950.000	7.66		8.66	3.431.499.500	9.66	3.774.649.450	10.66	4.152.114.395	APBD	Dispoapar
		K(1). Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah pokdarwis yang aktif mengelola daya tarik wisata		4		7		10		13		16			
		K(2). Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52		62		72		82		92			
		K(3). Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah DTW yang dapat diakses kendaraan R4 dan R2		52		62		75		100		-			
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Community Bassed Tourismn (CBT)	Persentasi Pengembangan OPK yang Mendukung Pariwisata	17b.1 Jumlah perne-sanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	100	52.83403994	100	52.94606874	100	53.36792852	100	53.55626395	100		APBD	Disdikbud
		(K1). Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota		Persentase OPK yang dikembangkan		90		100		100		100		100			
		P3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	SIPANDU WISATA - Sistem	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata	14.1 Persen-tase layanan rekreasi		1.076.233.600	0.87644275 1	1.163.656.960	1.31900836 2	1.302.242.656	1.49023691 1	1.432.466.922	2.04323172 4	1.575.713.614	APBD	Disporapar

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	melalui media partisipasi event berskala nasional / provinsi	publik yang dapat dipesan secara daring												
		K(1). Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Jumlah media promosi pariwisata daerah yang digunakan		6		6.12550421		9.06650049 1		9.24474462 9		9.60395070 4			
		P4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	WETKAWA - Wisata Edukasi Kerbau Rawa	Persentase desa wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif	17b.2 Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan	50	999.721.000	60	999.721.000	70	999.721.000	80	999.721.000	90	999.721.000	APBD	Disporapar
		K(1). Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Jumlah pelaku ekonomi kreatif di desa wisata		25		25		25		25		25			
Daya Saing Bisnis	Meningkatnya penetrasi brand produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	P1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Portal Pemkab Hulu Sungai Selatan	Jumlah Kunjungan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam 1 tahun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	6000	3.143.160.000	7000	3.143.160.000	8000	3.143.160.000	9000	3.143.160.000	10000	3.143.160.000	APBD	Diskominfo
		K(1). Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota		Jumlah Dokumen Pemetaan Pengguna Data		4		4		4		4					

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemas-an UMKM)	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	40%	350.651.345	50%	350.651.345	60%	350.651.345	70%	350.651.345	80%	350.651.345	APBD	Disnakerkop Ukmp
		K(1). Pengembang-an usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah Wirausaha yang mengikuti Pelatihan		105		105		105		105		105			
		P3. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Padi Apung	Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	100	3.143.160.000	100	3.143.160.000	100	3.143.160.000	100	3.143.160.000	100	3.143.160.000	APBD	Pertanian
		K(1). Pelaksanaan penyuluhan pertanian		Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani		7		9		11		13		17			
		P4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Klinik UMKM 2. Inkubator Bisnis 3. Rumah Kemasan (Sentra Pelayanan Pengemas-an UMKM)	Persentase Kelompok Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	100	350.651.345	100	350.651.345	100	350.651.345	100	350.651.345	100	350.651.345	APBD	Pertanian
		K(1). Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota		Persentase Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanian		100		100		100		100		100			
		P5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	TELAH BERKEMAS (Tetap Lestari Harus Berdayakan	Persentase nelayan yang menggunakan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan,	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	100	34.194.163	APBD	Perikanan

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			Kelompok Masyarakat)	ramah lingkungan	penelitian, dan pengembangan												
		K(1). Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		Persentase unit pengolah ikan (UPI) yang memenuhi standar pengolahan ikan		100		100		100		100		100			
Wajah (Tampilan) Kota	Membangun citra Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai gerbang IKN melalui pembangunan infrastruktur kota yang khas memuat budaya lokal, inovatif dan modern	P1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	APLIKASI TATA RUANG BERBASIS GEO-SPASIAL	Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	1	2.459.135.500	APBD	PUTR
		K(1). Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN		2		2		2		2		2			

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.3 Peta Jalan Dimensi *Smart Economy*

Peta jalan untuk implementasi dimensi *smart economy* dalam konteks Smart City di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melibatkan sejumlah langkah strategis untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terdapat 11 (sebelas) program/ kegiatan yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *smart economy* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 3 program/kegiatan dari subdimensi Ekosistem Industri
- 7 program/kegiatan dari subdimensi Kesejahteraaan Masyarakat
- 1 program/kegiatan dari subdimensi Ekosistem Transaksi
- Keuangan

Peta jalan implementasi smart economy di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 4.7), peta jalan jangka menengah (Tabel 4.8), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 4.9).

Tabel 4.7

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Economy*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	*Leading Sector*
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran		
Ekosistem Industri	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	P1. Program Pengembangan sentra industri	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	1.Persentase produk industri yang bersertifikasi mutu	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	16,1	60,000,000	APBD	Dinas NakerKopUKP
			2. RuPaku (Rumah Packaging Produk UMKM). Rumah Kemasan yang melayani desain, cetak dan pendampingan pembuatan kemasan sesuai standar dan menarik	2. Persentase pengembangan sentra industri		4 IKM	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K(1). Kegiatan Sertifikasi halal produk pangan	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	1. Jumlah produk pangan yang disertifikasi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	10 IKM	Belum dianggarkan		Dinas NakerKopUKP
			3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	2. Persentasi peningkatan kapasitas produk industri kecil		27,9	Belum dianggarkan		Dinas NakerKopUKP
		K(2). Kegiatan Pengembangan sentra industri kerajinan dan aneka	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Jumlah IKM kerajinan dan aneka yang dibina	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	4 IKM	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K(3). Kegiatan Pengembangan sentra industri sandang dan pangan	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Jumlah IKM sandang dan pangan yang dibina	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	30	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP
Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif. Sehingga akan mendorong	P1. Program Pengembangan UMKM	Penyediaan web/aplikasi bank data UMKM	Persentase UMKM yang dibina	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	20%	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKopUKP

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran		
	muncumya wirausaha baru yang mandiri.								
		K(1). Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Klinik UMKM	Jumlah UMKM skala mikro menjadi skala kecil	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	25 UMKM	30.000.000		Dinas NakerKopUKP
		P2. Program Penyuluhan Pertanian	PETANI BERDASI (Pemberdayaan Petani Milenial melalui Peningkatan Manajemen Kelembagaan, Keuangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi)	Jumlah petani milenial yang memiliki kompetensi wirausahawan	20.1 Pesentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	150	275.696.900	APBD	Dinas Pertanian
		P3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	BERMANDIKAN GAHARU (Berdayakan Masyarakat dengan Budidaya Ikan Gabus Haruan	Persentase luasan budidaya yang diintervensi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk 5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	35%	613.039.537	APBD	Dinas Perikanan
		P4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	TELAH BERKEMAS (Telap Lestari Harus Berdayakan Masyarakat)	Persentase KUB memiliki alat langkap yang ramah lingkungan	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	100%	710.992.300	APBD	Dinas Perikanan
		P5. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RUMPAK (Rumah Pangan Kita) / TOTAL (Toko Tani Mobile - Gelar Pangan Murah)	Bahan Pangan Terjangkau Bagi Masyarakat baik dari sisi Ketersediaan maupun harga	20.1 Pesentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	20 RPK / 66 Desa	64.496.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
		P6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	SIDODOL (Sistem Informasi Produk Lokal terintegrasi)	Persentase Pedagang yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Online	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	31%	16.214.800	APBD	Dinas Perdagangan

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran		
		K(1). Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	UMKM go Digital (pendampingan, sosialisasi dan bimtek SDM UMKM)	Jumlah UMKM per kecamatan yang dilkutkan Bintek	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	30 UMKM/ 3 Kecamatan	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKop/UKP
Ekosistem Transaksi Keuangan	Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan dengan membangun infrastruktur transaksi keuangan, mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas perbankan	P1. Program Pengembangan UMKM	Klinik UMKM	Pesentase UMKM yang dibina	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	25 UMKM	30.000.000		Dinas NakerKop/UKP
		K(1). Kegiatan digitalisasi transaksi keuangan UMKM	Klinik UMKM	Persentase UMKM yang menggunakan QRIS	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	20%	Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKop/UKP
		P2. Program Peningkatan PAD	SI KETUPAD (Sistem Informasi Keuangan Terpadu Pajak Daerah) aplikasi yang bisa diunduh melalui Playstore, yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung besar pajak, melakukan pembayaran dan mendapat bukti setor pajak	Persentase Peningkatan PAD	-				
		K(2). Kegiatan digitalisasi transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah		Persentase Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dibayar secara digital	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	50%	100.000.000	APBD	BPKPD

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.8

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Economy*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	*Leading Sector*
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Ekosistem Industri	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	P1. Program Pengembangan sentra industri	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk		16,1	230.000.000	16,1	230.000.000	16,1	230.000.000	16,1	230.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif. Sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri.		2. RUPAKU (Rumah Packaging Produk UMKM)/Rumah Kemasan yang melayani desain, cetak dan pendampingan pembuatan kemasan sesuai standar dan menarik			4 IKM	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
Ekosistem Transaksi Keuangan	Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan dengan membangun infrastruktur transaksi keuangan, mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas perbankan	K(1). Kegiatan Sertifikasi halal produk pangan	1.JEBOL HALAL (Jemput Bola Sertifikat Halal)	1. Jumlah produk pangan yang disertifikasi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
			3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	2. Persentasi peningkatan kapasitas produk industri kecil		27,9	150.000.000	27,9	150.000.000	27,9	150.000.000	27,9	150.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K(2). Kegiatan Pengembangan sentra industri	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Jumlah IKM kerajinan dan aneka yang dibina	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per	4 IKM	150.000.000	4 IKM	150.000.000	4 IKM	150.000.000	4 IKM	150.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	*Leading* Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		kerajinan dan aneka			100.000 penduduk										
		K(3). Kegiatan Pengembangan sentra industri sandang dan pangan	3. SITIKA INDAH (Sosialisasi sertifikat industri kecil dan menengah pangan)	Jumlah IKM sandang dan pangan yang dibina		30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		P1. Program Pengembangan UMKM	Penyediaan web/aplikasi bank data UMKM	Persentase UMKM yang dibina	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	300.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		K(1). Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Klinik UMKM	Jumlah UMKM skala mikro menjadi skala kecil	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	30 UMKM	150.000.000	35	200.000.000	40	250.000.000	25	300.000.000	APBD	Dinas NakerKopUKP
		P2. Program Penyuluhan Pertanian	PETANI BERDASI (Pemberdayaan Petani Milenial melalui Peningkatan Manajemen Kelembagaan, Keuangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi)	Jumlah petani milenial yang memiliki kompetensi wirausahawan	20.1 Pesentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	165	300.000.000	180	300.000.000	200	300.000.000	220		APBD	Dinas Pertanian
		P3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	BERMANDIKAN GAHARU (Berdayakan Masyarakat dengan Budidaya Ikan Gabus Haruan	Persentase Luasan Budidaya yang diintervensi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	40%	674.343.490	60%	613.039.537	70%	613.039.537	80%	613.000.000	APBD	Dinas Perikanan

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
					5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan										
		P4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	TELAH BERKEMAS (Tetap Lestari Harus Berdayakan Masyarakat)	Persentase KUB memiliki alat tangkap yang ramah lingkungan	5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	40%	710.992.300	50%	720.000.000	60%	720.000.000	70%	720.000.000	APBD	Dinas Perikanan
		P5. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RUMPAK (Rumah Pangan Kita) / TOTAL (Toko Tani Mobile - Gelar Pangan Murah)	Bahan Pangan Terjangkau Bagi Masyarakat baik dari sisi Ketersediaan maupun harga	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	20 RPK / 66 Desa	64.496.000	22 RPK / 100 Desa	110.000.000	24 RPK / 120 Desa	140.000.000	26 RPK / 144 Desa	200.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
		P6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	SIDOIDOL (Sistem Informasi Produk Lokal terintegrasi)	Persentase Pedagang yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Online	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	30%	16.214.600	60%	16.214.600	90%	16.214.600	100%	16.214.600	APBD	Dinas Perdagangan
		K(1). Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	UMKM go Digital (pendampingan, Sosialisasi dan bintek SDM UMKM)	Jumlah UMKM per kecamatan yang dilkutkan Bintek	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	30 UMKM/ 3 Kecamatan	150.000.000 (Belum dianggarkan)	30 UMKM/ 3 Kecamatan	150.000.000 (Belum dianggarkan)	-	-	-	-	APBD	Dinas Nakerkop UKP
		P1. Program Pengembangan UMKM	Klinik UMKM	Peserlase UMKM yang dibina	5.2 Tingkat ketangsungan bisnis baru per	25 %	30.000.000 (Belum dianggarkan)	50%	30.000.000 (Belum dianggarkan)	75%	30.000.000 (Belum dianggarkan)	100%	30.000.000 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas NakerKop UKP

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
					100.000 penduduk										
		K(1). Kegiatan digitalisasi transaksi keuangan UMKM	Klinik UMKM	Persentase UMKM yang menggunakan QRIS	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	20%	20.000.000 (Belum dianggarkan)	40%	20.000.000 (Belum dianggarkan	60%	20.000.000 (Belum dianggarkan	100%	20.000.000 (Belum dianggarkan	APBD	Dinas NakerKop UKP
		P2. Program Peningkatan PAD													
		K(2). Kegiatan digitalisasi transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	SI KETUPAD (Sistem Informasi Keuangan Terpadu Pajak Daerah) aplikasi yang bisa diunduh melalui Playstore, yang bisa digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung besar pajak, melakukan pembayaran dan mendapat bukti setor Pajak	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dibayar secara digital	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	50%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	APBD	BPKPD

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.9

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Economy*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Ekosistem Industri	Meningkatkan daya saing dan produksi produk unggulan lokal melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, pemanfaatan teknologi, dan berbasis digital yang terintegrasi	P2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	KLINIK UMKM	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	APBD	
Kesejahteraaan Masyarakat	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pengembangan usaha produktif. Sehingga akan mendorong munculnya wirausaha baru yang mandiri.	P6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	SIDODOL (Sistem Informasi Produk Lokal)	Persentase Pedagang yang menggunakan aplikasi berbasis online	5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi	35%	50.000.000	50%	50.000.000	75%	50.000.000	-	-	-	-	APBD	Dinas Perdagangan
Ekosistem Transaksi Keuangan	Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan dengan membangun infrastruktur transaksi keuangan, mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas perbankan	P2. PROGRAM PENINGKATAN PAD	SI KETUPAD	Persentase pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan secara digital	9.2 Persentase pembayaran pajak dan retribusi yang dibayarkan secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	APBD	BPKPD

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.4 Peta Jalan Dimensi *Smart Living*

Peta jalan dimensi *smart living* untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan melibatkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi dan inovasi. Terdapat 5 (lima) program/kegiatan yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *smart living* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 3 program/kegiatan dari subdimensi Harmonisasi Tata Ruang
- 1 program/kegiatan dari subdimensi Kesehatan
- 1 program/kegiatan dari subdimensi Transportasi

Peta jalan implementasi smart living di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 4.10), peta jalan jangka menengah (Tabel 4.11), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 4.12).

Tabel 4.10

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Living*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	*Leading Sector*
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergisitas dengan stakeholder terkait.	P1. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) K1. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	1. Pena Sang Anak (Pelayanan Prima Satuan Pengamanan Gasan Anak-anak) 2. Malam Jum'at (Menanam Pohon di Lahan Masyarakat Setiap Hari Jum'at)	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	15.1 Persentase area kota yang dicakup kamera pengintai digital	6,57 %	4.458.433.447	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Rakyat dan Lingkungan Hidup
		P2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) K(1).Urusan penyelenggraan PSU perumahan	1. Delak PJU+ (Deteksi Tangkal Kerusakan Penerangan Jalan Umum Plus) 2. SI MANTAN (Sistem Informasi Perumahan dan Pertanahan)	Persentase PSU Perumahan yang berkualitas	7.6 Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/ lampu 21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan dan populasi sedang hingga tinggi	69,23%	5.153.269.616	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Rakyat dan Lingkungan Hidup
		P3. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA K(1). Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana K(2). Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	*Early Warning System* (EWS), Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik dan Rehabilitasi Dampak Pasca Bencana	Persentase cakupan penanggulangan bencana yang dapat ditangani	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	100 %	600.000.000	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	BPBD
Kesehatan	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga	P4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	1. SI Cantik Bumiku (Strategi Pelacakan Untuk Peningkatan Pemeriksaan *Ante Natal Care* Sesuai Standar Pada Ibu Hamil	1. Persentase penurunan balita gizi kurang 2. Persentase cakupan desa UCI	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100%	17.051.039.000	APBD	Dinas Kesehatan

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
	terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	K(1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Melalui Kunjungan Rumah) 2. SI Midun Chating ke Faskes (Strategi Kemitraan Dukun Dan Bidan Cegah Stunting Dan Merujuk Ibu Bersalin Ke Fasilitas Kesehatan) 3. Pengembangan pendaftaran pasien online 4. Integrasi data rekam medis antar-fasyankes 5. Sistem rujukan pasien terpadu	3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 4. Persentase penurunan komplikasi obstetri 5. Persentase cakupan pelayanan ibu nifas 6. Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM 7. Persentase kelahiran di faskes 8. Persentase BBLR 9. Persentase pelayanan bayi dan balita 10. Kolaborasi dengan stakeholder terkait	diakses oleh penyedia layanan kesehatan 11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"			
Transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transfortasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	P1. PENYEDIAAN FASILITAS ANGKUTAN PUBLIK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. SIMPKB (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor) 2. Pelayanan Transportasi Gratis Khusus Angkutan Bis Pelajar 3. Sistem Layanan Angkutan Umum Terpadu	1. Meningkatkan keselamatan penyelengaraan transportasi publik dengan mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dan unsur – unsur masyarakat 2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) tranfortasi publik 3. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan publik 4. Mengintegrasikan pelayanan publik 5. Meningkatkan keterjangkauan (aksesibilitas) masyarakat terhadap layanan angkutan publik	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik 19.9 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas 9.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter	1. 1,7 % 2. 50 % 3. 50% 4. 100% 5 100%	779.266.000	APBD Hulu Sungai Selatan	Dinas Perhubungan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.11

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Living*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergisitas dengan stakeholder terkait	P1. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) K1. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	1. Pena Sang Anak (Pelayanan Prima Satuan Pengamanan Gasan Anak-anak) 2. Malam Jum'at (Menanam Pohon di Lahan Masyarakat Setiap Hari Jum'at)	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	15.1 Persentase area kota yang dicakup kamera pengintai digital	7,02 %	5.795.963.461 (Belum dianggarkan)	7,10 %	6.375.559.839 (Belum dianggarkan)	7,15 %	7.013.115.823 (Belum dianggarkan)	7,26 %	7.714.427.405 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		P2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) K(1). Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	1. Detak PJU+ (Deteksi Tangkai Kerusakan Penerangan Jalan Umum Plus) 2. SI MANTAN (Sistem Informasi Perumahan dan Pertanahan)	Persentase PSU Perumahan yang berkualitas	7.6 Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu 21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan dan populasi sedang hingga tinggi	73,08%	6.699.276.500 (Belum dianggarkan)	76,92%	7.369.204.150 (Belum dianggarkan)	80,77%	8.106.124.565 (Belum dianggarkan)	84,61%	8.916.737.021 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		P3. PROGRAM PENANGGULANGAN	Early Warning System (EWS), Sistem	Persentase cakupan penanggulangan	10.2 Persentase layanan kota	100 %	550.000.000 (Belum dianggarkan)	100 %	968.000.000 (Belum dianggarkan)	100 %	1.064.800.000 (Belum dianggarkan)	100 %	1.171.280.000 (Belum dianggarkan)	APBD Kabupaten Hulu	BPBD

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		BENCANA K(1). Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana K(2). Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Informasi Manajemen Bantuan Logistik dan Rehalibitasi Dampak Pasca Bencana	bencana yang dapat ditangani	yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring									Sungai Selatan	
Kesehatan	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	P4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT K(1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Si Cantik Bumiku (Strategi Pelacakan Untuk Peningkatan Pemeriksaan Ante Natal Care Sesuai Standar Pada Ibu Hamil Melalui Kunjungan Rumah) 2. Si Midun Chating ke Faskes (Strategi Kemitraan Dukun Dan Bidan Cegah Stunting Dan Merujuk Ibu Bersalin Ke Fasilitas Kesehatan)	1. Persentase penurunan balita gizi kurang 2. Persentase cakupan desa UCI 3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 4. Persentase penurunan komplikasi obstetri 5. Persentase cakupan pelayanan ibu nifas 6. Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM. 7. Persentase kelahiran di faskes 8. Persentase BBLR	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan 11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	10.319.660.000	1. 6% 2. 85% 3. 93% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%	10.240.160.000	1. 6% 2. 85% 3. 93% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10. 100 %	37.194.960.000	1. 6% 2. 85% 3. 93% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100%	37.194.960.000	APBD	Dinas Kesehatan

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			3. Pengembangan Pendaftaran pasien online 4. Integrasi data rekam medis antar-fasyankes 5. Sistem rujukan pasien terpadu	9. Persentase pelayanan bayi dan balita 10. Kolaborasi dengan stakeholder terkait											
Transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transfortasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	P1. PENYEDIAAN FASILITAS ANGKUTAN PUBLIK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. SIMPKB (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor) 2. Pelayanan Transportasi Gratis Khusus Angkutan Bis Pelajar 3. Sistem Layanan Angkutan Umum Terpadu	1. Persentasi Populasi Jalur Keselamatan Transportasi menggunakan Kamera digital 2. Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 3. Koordinasi Lintas Sektor	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik 19.9 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas 9.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter	1. 1,7 % 2. 50 % 3. 50% 4. 100% 5 100%	575.216.600	1. 2,1 % 2. 55 % 3. 60% 4. 100% 5 100 %	942.936.460	1. 3 % 2. 60 % 3. 65% 4. 100% 5 100%	1,037.272.326	1. 4 % 2. 65 % 3. 70% 4. 100% 5 100%	1.140.955.561	APBD	Dinas Perhubungan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.12

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Living*

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	*Leading Sector*
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Harmonisasi Tata Ruang	Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah melalui peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan publik, penyediaan informasi mitigasi bencana dan peta kawasan bencana digital yang mudah diakses publik melalui sinergisitas dengan stakeholder terkait	P1. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARA-GAMAN HAYATI (KEHATI) K1. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	1. PENA SANG ANAK (Pelayanan Prima Satuan Pengamanan Gasan Anak-anak) 2. MALAM JUM'AT (Menanam Pohon di Lahan Masyarakat Setiap Hari Jum'at)	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	15.1 Persentase area kota yang dicakup kamera pengintai digital	7,34 %	8.485.870.145 (Belum dianggarkan)	7,42 %	9.334.457.160 (Belum dianggarkan)	7,50 %	10.267.902.876 (Belum dianggarkan)	7,58 %	11.294.693.164 (Belum dianggarkan)	7,66 %	12.424.162.480 (Belum dianggarkan)	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		P2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) K(1).Urusan penyelenggraan PSU perumahan	1. DETAK PJU+ (Deteksi Tangkal Kerusakan Penerangan Jalan Umum Plus) 2. SI MANTAN (Sistem Informasi Perumahan dan Pertanahan)	Persentase PSU Perumahan yang berkualitas	7.6 Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/ lampu 21.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan dan populasi sedang hingga tinggi	66,45 %	9.605.410.724 (Belum dianggarkan)	92,29 %	10.789.251.796 (Belum dianggarkan)	96,13 %	11.866.176.976 (Belum dianggarkan)	99,97 %	13.054.994.673 (Belum Dianggarkan)	100 %	14.360.494.140 (Belum Dianggarkan)	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P3. PROGRAM PENANGGU-LANGAN BENCANA K(1). Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana K(2). Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Early Warning System (EWS), Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik dan Rehalbilitasi Dampak Pasca Bencana	Persentase cakupan penanggulangan bencana yang dapat ditangani	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	100 %	1.266.406.000	100 %	1.266.406.000	100 %	1.266.406.000	100 %	1.266.406.000	100 %	1.266.406.000	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	BPBD
Kesehatan	Mewujudkan modernisasi pelayanan kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut, sehingga terciptanya sinergitas pelayanan kesehatan	P4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT K(1). Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. SI CANTIK BUMILKU (Strategi Pelacakan Untuk Peningkatan Pemeriksaan Ante Natal Care Sesuai Standar Pada Ibu Hamil Melalui Kunjungan Rumah) 2. SI MIDUN CHATING KE FASKES (Strategi Kemitraan Dukun Dan Bidan Cegah	1. Persentase penurunan balita gizi kurang 2. Persentase cakupan desa UCI 3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 4. Persentase penurunan komplikasi obstetri 5. Persentase cakupan pelayanan ibu	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan 11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	16.756.142.900 (belum dianggarkan)	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	20.631.757.190 (belum dianggarkan)	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	22.694.932.909 (belum dianggarkan)	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	24.964.426.200 (belum dianggarkan)	1. 6% 2. 84% 3. 92% 4. 15% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 10% 9. 100% 10 100%"	27.460.868.620 (belum diaggarkan)	APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Kesehatan HSS

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			Stunting Dan Merujuk Ibu Bersalin Ke Fasilitas Kesehatan) 3. Pengembangan Pendaftaran pasien online 4. Integrasi data rekam medis antar Fasyankes 5. Sistem rujukan pasien terpadu	nifas 6. Persentase penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM. 7. Persentase kelahiran di faskes 8. Persentase BBLR 9. Persentase pelayanan bayi dan balita 10. Kolaborasi dengan steakholder terkait	melalui jarak jauh per 100.000 penduduk											
Transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda transfortasi publik dan pelajar serta memperluas jangkauannya	P1. PENYEDIAAN FASILITAS ANGKUTAN PUBLIK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. SIMPKB (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor) 2. Pelayanan Transportasi Gratis Khusus Angkutan Bis Pelajar 3. Sistem Layanan Angkutan Umum Terpadu	1. Persentasi Populasi Jalur Kesetamatan Transportasi menggunakan Kamera digital 2. Pelajar Pelopor Kesetamatan Lalu Lintas Jalan 3. Koordinasi Lintas Sektor	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik 19.9 Persentase lampu lalu lintas yang	1. 4 % 2. 70 % 3. 75% 4. 100% 5 100%	1.240.955.561	1. 4 % 2. 75 % 3. 80% 4. 100% 5 100%	1.350.955.561	1. 4 % 2. 80 % 3. 85% 4. 100% 5 100%	1.450.955.561	1. 4 % 2. 80 % 3. 85% 4. 100% 5 100%	1.450.955.561	1. 4 % 2. 100 % 3. 100% 4. 100% 5 100%	1.550.955.561	APBD	Dinas Perhubungan

Sub-dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
					cerdas 9.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau untuk komuter												

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

4.5 Peta Jalan Dimensi *Smart Society*

Peta jalan dimensi *smart society* berisi tentang rencana strategis yang merinci langkah-langkah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas. *Smart society* melibatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat. Terdapat 11 (sebelas) program/kegiatan yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *smart society* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 5 program/kegiatan dari subdimensi Interaksi Masyarakat
- 2 program/kegiatan dari subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan
- 4 program/kegiatan dari subdimensi Keamanan Masyarakat

Peta jalan implementasi smart living di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 4.13), peta jalan jangka menengah (Tabel 4.14), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 4.15).

Tabel 4.13

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Society*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	*Leading Sector*
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Interaksi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup dan Inklusi Sosial Masyarakat melalui Pembangunan Ruang Publik Inklusif dan Kolaborasi Stakeholder dalam pelayanan terhadap anak, disabilitas dan lansia	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. SIDODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa Online) 2. SIA PKK (Sistem Informasi Administrasi PKK)		13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	1. 100% (864 orang) 2. 24.07% 3. 75.69%	1. 173.200.250 2. 12.475.000 3. 686.890.800	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
		1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Sarjana Pendamping Desa			9,12 %	1.365.114.600	APBD	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM & Perindustrian
		1. Program Produktivitas Dan Penempatan Tenaga Kerja 2. Program Rehabilitasi Sosial	PENTAMAKS (Penempatan Tenaga Kerja Mutual dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas) Konsentrasi: Pelatihan digital (kelas e-Training bagi calon pekerja Penyandang Disabilitas), Fasilitasi pemagangan bagi calon pekerja penyandang disabilitas		13.1 Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus 13.2 Pesentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	0,30 % (0,30 % dari total jumlah pekerja se HSS)	500.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM & Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, BPSDM, BPKPD, Bappelitbangda
		P1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial K(1). Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar	PESAN LIA+ (Pejabat Sayang Lanjut Usia)	Persentase orang penerima rehabilitasi sosial sesuai dengan peruntukannya	13.2 Pesentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan	593 orang	2.373.300.000	APBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan semua perangkat daerah di HSS

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						2024/ (n+1)			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		serta gelandangan pengemis di luar panti sosial			bagi warga negara dengan kebutuhan khusus				
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Infrastruktur yang Memadai, Kurikulum Relevan, Pengembangan Guru, Pendekatan Inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan Mitra Pembangunan, Program Pembelajaran Seumur Hidup, serta Evaluasi Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan proses belajar non-formal / kesetaraan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	95%	1.646.532.900	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil
		1. Program Pengelolaan Pendidikan	1 Laptop 1 siswa	Harapan Lama Sekolah (HLS)	6.2 Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	0,1%	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil
		P1. Program Pembinaan Perpustakaan	IHSS (Literasi Digital Hulu Sungai Selatan)	1. Persentase Pemerataan Layanan Perpustakaan Desa dan Kelurahan 2. Persentase masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk 17.4 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	100	Rp 271.564.600	APBD	Dispersip, Dinas Komunikasi Dan Informatika
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui sistem keamanan sosial yang kolaboratif berbasis digital dan terintegrasi	1. Pengembangan dan pengelolaan kabupaten/kota cerdas P2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Mata HSS (Kegiatan pengadaan dan operasional kamera pengawas pada titik strategis di kota Kandangan dan kota-kota kecamatan di HSS	Indeks Keamanan dan Ketertiban	15.1 Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	APBD	Satpol PP dan Damkar, Diskominfo, Dinas PMD

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.14

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Society*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Interaksi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup dan Inklusi Sosial Masyarakat melalui Pembangunan Ruang Publik Inklusif dan Kolaborasi Stakeholder dalam pelayanan terhadap anak, disabilitas dan lansia	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	SIDODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa Online)	1. Prosentase Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengikuti Bimtek 2. Persentase Pengurus BUMDes yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Bumdes	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	1. 100% (664 orang) 2. 24.07%	1. Rp 173.200.250 2. Rp. 12.475.000	1. 100% (664 orang) 2. 24.07%	1. Rp 173.200.250 2. Rp. 12.475.000	1. 100% (664 orang) 2. 24.07%	1. Rp 173.200.250 2. Rp. 12.475.000	1. 100% (664 orang) 2. 24.07%	1. Rp 173.200.250 2. Rp. 12.475.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
		P3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	SIA PKK (Sistem Informasi Administrasi PKK)	Persentase Desa Sehat Sejahtera		66.06	Rp 686.690.800	66.06	Rp 686.690.800	75.7	Rp 686.690.800	5334	Rp 686.690.800	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Infrastruktur yang Memadai, Kurikulum Relevan, Pengembangan Guru, Pendekatan Inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan Mitra Pembangunan, Program Pembelajaran Seumur Hidup, serta Evaluasi Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Guru Penggerak	1. Rata-rata kemampuan Literasi SD dan SMP berdasarkan asesmen nasional	6.3 jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	4.5	Rp 500.000.000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil
			Penyelenggaraan proses belajar non-formal / kesetaraan			0.95	Rp 1.646.532.900	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil
			1 Laptop 1 siswa	2. Rata-rata kemampuan Numerasi SD dan SMP berdasarkan asesmen nasional	6.2 Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran digital lainnya	0,1%	Rp 1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELITBANGDA, Disdukcatpil

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	*Leading Sector*
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
			BERKEMAS (Berupaya Kembali Masuk Sekolah)	8. Angka Partisipasi Pendidikan Non-Formal	yang tersedia per 1.000 siswa										
		P1. Program Pembinaan Perpustakaan	iHSS (Literasi Digital Hulu Sungai Selatan)	1. Persentase Pemerataan Layanan Perpustakaan Desa dan Kelurahan 2. Persentase masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk 17.4 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	100	Rp 271.564.800	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui sistem keamanan sosial yang kolaboratif berbasis digital dan terintegrasi	1. Pengembangan dan pengelolaan kabupaten/kota cerdas P2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Mata HSS (Kegiatan pengadaan dan operasional kamera pengawas pada titik strategis di Kota Kandangan dan Kota Kecamatan di HSS	Indeks Keamanan dan Ketertiban	-	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	21 titik (100%)	1. 437.350.000 2. 550.000.000	APBD	Dispersip, Dinas Komunikasi Dan Informatika

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.15

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Society*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Interaksi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup dan Inklusi Sosial Masyarakat melalui Pembangunan Ruang Publik Inklusif dan Kolaborasi Stakeholder dalam pelayanan terhadap anak, disabilitas dan lansia	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	SIDODOL (Sistem Informasi dan Optimalisasi Layanan Desa Online)	1. Persentase Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengikuti Bimtek 2. Persentase Pengurus BUMDes yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Bumdes	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	100% (864 orang) 24.07%	1. 73.200.250 2. 12.475.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
		3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Ada	SIA PKK (Sistem Informasi Administrasi PKK)	3. Persentase Desa Sehat Sejahtera		75.69%	666.890.800	80 %	666.890.800	85%	666.890.800	90%	666.890.800	95%	666.890.800	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominfo, Dinas Dukcatpil
		Program Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	PENTAMAKS (Penempatan Tenaga Kerja Mutual dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas)	Persentase Penyandang Disabilitas yang Memiliki Keterampilan	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga	1% (1% dari total jumlah pekerja se HSS)	Rp 500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM & Perindustrian

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	*Leading Sector*
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
					negara dengan kebutuhan khusus												
		P1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial K(1). Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	PESAN LIA+ (Pejabat Sayang Lanjut Usia)	Persentase orang penerima rehabilitasi sosial sesuai dengan peruntukkannya		593 Orang	2.373.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan semua perangkat daerah di HSS
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Infrastruktur yang Memadai, Kurikulum Relevan, Pengembangan Guru, Pendekatan Inovatif berbasis teknologi, kerja sama dengan Mitra Pembangunan, Program Pembelajaran Seumur Hidup, serta Evaluasi Berkelanjutan	P1. Pengelolaan Pendidikan	1 Laptop 1 siswa	Harapan Lama Sekolah (HLS)	6.2 Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	0,1%	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan, BAPPELIT BANGDA, Disdukcatpil

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P1. Program pembinaan perpustakaan K1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	IHSS (Literasi Digital Hulu Sungai Selatan)	1. Persentase Pemerataan Layanan Perpustakaan Desa dan Kelurahan 2. Persentase masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk 17.4 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	1. 100% 2. 35%	271.564.500	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui sistem keamanan sosial yang kolaboratif berbasis digital dan terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6 Peta Jalan Dimensi *Smart Environment*

Terdapat 6 (enam) program/kegiatan yang terkait dengan implementasi *smart city* dimensi *smart environment* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan uraian sebagai berikut:

- 2 program/kegiatan dari subdimensi Proteksi Lingkungan
- 3 program/kegiatan dari subdimensi Pengelolaan Sampah dan
- Limbah
- 1 program/kegiatan dari subdimensi Tata Kelola Energi

Peta jalan implementasi *smart environment* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga, yaitu peta jalan jangka pendek (Tabel 4.16), peta jalan jangka menengah (Tabel 4.17), dan peta jalan jangka panjang (Tabel 4.18).

Tabel 4.16

Peta Jalan Jangka Pendek Dimensi *Smart Environment*

Subdimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah) 2024/ (n+1)		Sumber Dana	Leading Sector
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Proteksi Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi,pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi multipihak, serta bertasis teknologi informasi yang mumpuni	P1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Gerak Mas Daling (Gerakan Masyarakat sadar lingkungan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Meningkatnya Nilai IKA	11.3 Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (*real-time*) untuk sarana kualitas udara dan air 23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (*real-time*) per 100.000 populasi	1. IKA (66,36) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (36,68)	2.094.639.500	APBD / APBN	DISPERA KPLH
		Pengendalian dan Penaggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	CEKARLABUN (Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)			1. Jumlah Mesin Kebakaran dan Kebun (5 Unit Mesin)	400.000.000	APBD	DisperaKPLH, Distan
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah/ Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah	SURUNG SINTAK PAH (Pelaporan Layanan Sampah)	Jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah	16.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Jumlah kelompok masyarakat (2 kelompok)	500.000.000	APBD	DisperaKPLH
		P1. Penanganan Persampahan Skala Kota dan Kabupaten dengan teknilogi terbarukan	SAPI GEMUK (Sampah Pilah Gerakan Masyarakat Untuk keluarga)	Persentase sampah yang ditangani		75%	15.000.000.000	APBD/APBN	DisPera KPLH
Tata Kelola Energi	Optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah/ Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	BIOCHAR ORGANIK (arang hasil konversi dari limbah organik)	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Jumlah kelompok masyarakat (2 kelompok)	400.000.000	APBD	DisperaKPLH, Distan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.17

Peta Jalan Jangka Menengah Dimensi *Smart Environment*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Proteksi Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi multipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	P1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Gerak Mas Darling (Gerakan Masyarakat sadar lingkungan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 4. Terbentuknya tim terpadu pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang antar-kabupaten dan provinsi	11.3 Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (real-time) untuk sarana kualitas udara dan air 23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	1. IKA (66,36) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (36,68)	2.094.639.500	1. IKA (67,27) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (36,93)	2.304.323.450	1. IKA (68,57) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,52)	2.676.231.350	1. IKA (69,12) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,86)	2.946.054.530	APBD	DISPERA KPLH
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	P1. Penanganan Persampahan Skala Kota dan Kabupaten dengan teknilogi terbarukan	SAPI GEMUK (Sampah Pilah Gerakan Masyarakat Untuk keluarga) SURUNG SINTAK PAH (Pelaporan Layanan Sampah)	1. Persentase sampah yang dimanfaatkan kembali 2. Persentase sampah yang ditangani	16.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	52%% 73%	50.000.000 16.500.000.000	54%% 72%	55.0000.000 18.150.000.000	56%% 71%	90.000.000 19.965.000.000	60% 70%	95.000.000 21.961.500.000	APBD/ APBN	DISPERA KPLH
Tata Kelola Energi	Optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah/ Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan	BIOCHAR ORGANIK (arang hasil konversi dari limbah organik)	1. Persentase sampah organik yang dimanfaatkan kembali	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap	12%	440.000.000	15%	484.000.000	20%	532.400.000	25%	585.640.000	APBD	DISPERA KPLH

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			jumlah sampah rumah tangga										

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Tabel 4.18

Peta Jalan Jangka Panjang Dimensi *Smart Environment*

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
Proteksi Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi,pelaksanaan pengawasan berkesinambungan, optimalisasi kapasitas, peran, dan fungsi SDM bidang lingkungan, kolaborasi multipihak, serta berbasis teknologi informasi yang mumpuni	P1. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Gerak Mas Darling (Gerakan Masyarakat sadar lingkungan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 4. Terbentuknya tim terpadu pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang antar kabupaten dan provinsi	11.3 Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (real-time) untuk sarana kualitas udara dan air 23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	1. IKA (66,36) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (38,66)	2.084.639.500	1. IKA (67,27) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (38,93)	2.304.323.450	1. IKA (68,19) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,27)	2.434.755.600	1. IKA (68,57) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,52)	2.676.231.350	1. IKA (69,12) 2. IKU (94,00) 3. IKTL (39,66)	2.946.054.530	APBD	DISPERA KPLH
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan metode yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital	P1. Penanganan Persampahan Skala Kota dan Kabupaten dengan teknilogi terbarukan	SAPI GEMUK (Sampah Pilah Gerakan Masyarakat Untuk keluarga)	Persentase sampah yang ditangani	16.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	75%	15.000.000.000	73%	16.500.000.000	72%	18.150.000.000	71%	19.965.000.000	70%	21.961.500.000	APBD	DISPERA KPLH

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
		P2. Pengurangan Sampah Skala kota dan Kabupaten dengan teknologi terbarukan	GALA SAJADAH (Gerakan Layanan Sampah jadi Ibadah Dunia Akhirat)	Persentase sampah yang dikurangi	7.1 Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat, pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total baruan energi kota untuk tahun tertentu	23%	6.000.000.000	25%	7.260.000.000	27%	7.986.000.000	29%	8.784.600.000	30%	9.663.060.000	APBD	DISPERA KPLH
Tata Kelola Energi	Optimalisasi pemanfaatan limbah dan potensi lahan gambut sebagai sumber energi terbarukan berbasis teknologi digital	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah/ Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	BIOCHAR ORGANIK (arang hasil konversi dari limbah organik)	Persentase sampah organik yang dimanfaatkan kembali	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	10%	400.000.000	12%	440.000.000	15%	484.000.000	20%	532.400.000	25%	585.640.000	APBD	DISPERA KPLH

BAB V
PENUTUP

Masterplan Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebuah panduan komprehensif yang menjadi landasan utama dalam mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai entitas yang cerdas dalam rentang waktu 2023-2033. Dokumen ini tak sekadar merupakan arahan teknis, melainkan juga sebuah dokumen strategis yang akan mengakselerasi proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Secara utuh, dokumen ini memaparkan visi dan misi *smart city*, strategi pembangunan *smart city*, rencana aksi yang terperinci, dan peta jalan pembangunan *smart city* yang terstruktur berdasarkan enam dimensi *smart city*. Keenam dimensi ini melibatkan sektor-sektor penting seperti teknologi, infrastruktur, pelayanan publik, keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola.

Dalam proses penyusunannya, dokumen ini didesain dengan memperhatikan keselarasan dengan visi, misi, dan kebutuhan pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, masterplan tidak hanya menjadi sebuah pedoman praktis tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen untuk menyelaraskan setiap langkah pembangunan dengan visi yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

Melalui implementasi *masterplan* ini, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjadi kota cerdas yang terus inovatif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dokumen ini menjadi instrumen penting dalam menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai model inspiratif bagi daerah-daerah lain dalam mencapai visi smart city di Indonesia.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026

BUKU IV

QUICKWIN SMART CITY

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I
VISI DAN PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

1.1 Visi, Misi, dan Sasaran Daerah

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 (enam) kabupaten administratif dan 3 (tiga) swapraja. Salah satunya, *Afdeling Van Hoeloe Soengai*, dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibu kota Kandangan. Untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan suatu inisiatif untuk menjadi paradigma yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan rencana pembangunan melalui penerapan *smart city*. Oleh karena itu, penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tahun 2023, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berakhir. Namun, terdapat kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 sehingga dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam menganalisis visi pembangunan daerah ini menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-

2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025. Dengan demikian, Visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 menggunakan Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, yaitu

"**Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Daerah Agropolitan yang Didasari Nilai-nilai Agama**".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (12), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah model mental masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut. Penjabaran arti dari visi tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai Agama diartikan sebagai:

a. Suatu nilai kebenaran dan kejujuran yang senantiasa harus melekat dalam hati sanubari setiap anggota masyarakat.
b. Suatu nilai agama yang senantiasa harus diyakini dan dijunjung tinggi, diamalkan serta diterapkan dalam segenap perilaku kehidupan oleh setiap insan anggota masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan yang dianutnya.
c. Suatu nilai yang akan membentuk insan anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa, mempunyai sikap religius, bersikap jujur, sehat, berkarakter serta mempunyai kepedulian sosial.
d. Suatu nilai yang akan mampu membentuk insan anggota masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai pemahaman dan pengamalan agama secara *kaffah* serta mempunyai kecerdasan spritual.

e. Nilai-nilai agama juga harus dijadikan sumber motivasi, inspirasi dan pedoman oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, iptek, lingkungan dan keamanan ketertiban. Oleh sebab itu, nilai-nilai agama harus dapat dijadikan "sumber energi" untuk menggerakkan proses pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

f. Nilai-nilai agama diartikan juga sebagai suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akherat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, serta material spiritual.

Daerah Agropolitan mengandung pengertian:

a. Agropolitan adalah kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau juga kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistim dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik serta menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

b. Bahwa pada tahun 2025 mendatang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil diwujudkan menjadi pusat pengembangan agribisnis- agroindustri yang utama di Kalimantan Selatan

c. Sebagai daerah yang identik sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis dengan subsistem usaha dari hulu sampai hilir.

d. Sebagai daerah yang berfungsi menjadi pusat pertumbuhan baik bagi setiap wilayah perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun juga kabupaten sekitarnya dengan tidak terbatas pada sektor pertanian saja tetapi juga terkait dengan agroindustri, perdagangan, pariwisata dan jasa pelayanan lainnya.

e. Sebagai daerah pertanian berbasis agroindustri yang mampu mendukung dan mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

f. Daerah agropolitan juga mengandung pengertian perlu adanya proses pengolahan terhadap produk pertanian yang dihasilkan sehingga mampu memberi nilai tambah serta mempunyai kemampuan memasarkannya yang terintegrasi dalam konsep petik-olah-jual.

g. Daerah agropolitan memberikan pengertian adanya pemberian kesempatan tumbuh dan berusaha yang seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha khususnya UMKM serta adanya kemudahan akses permodalan.

h. Daerah agropolitan akan menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selain mampu mandiri dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi; juga diharapkan

semakin meningkatkan daya saing serta mampu memelihara dan meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya dengan daerah lain.

i. Daerah agropolitan berarti juga memberikan pengertian bahwa setiap investor baik asing, nasional maupun lokal dapat tertarik dan merasa aman, nyaman serta mendapat pelayanan yang profesional dalam berinvestasi.

j. Daerah agropolitan berarti juga dalam visi jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan perekayasaan potensi sumber daya alam dan ekonomi khususnya pertanian; potensi SDM; potensi sosial budaya masyarakat termasuk kearifan lokal serta potensi ruang.

Adapun 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ditetapkan sesuai dengan Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama serta Membangun Sikap Religius.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan berdaya Saing.
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada pengembangan Agribisnis – Agroindustri.
5. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan misi pembangunan tersebut ditetapkan 3 (tiga) Tujuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 seperti dijabarkan pada Tabel 1.1.

Misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025	Tujuan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026
Misi 3 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Tujuan 3** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

(*Sumber*: RPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026)

Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 juga berdasarkan

pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Dokumen RPD 2024-2026 berada pada periode tahapan keempat dari RPJPD Kalimantan Selatan 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 ini. Pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing. Untuk itu, sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan maka sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
    a. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan; dan
    b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan.
2. Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia maka sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:
    a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non-Pangan Masyarakat; dan
    b. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.
3. Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik maka sasaran pembangunan ditetapkan adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Layanan sampai ke Tingkat Desa.

1.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi *Smart City*

Kementerian Komunikasi Informatika RI pada tahun 2023 menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu dari 50 (lima puluh) kabupaten/kota terpilih dalam implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Oleh karena itu, penyusunan *masterplan smart city* diharapkan dapat membantu akselerasi

pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian dapat diidentifikasi sinkronisasi sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan enam dimensi *smart city* (lihat Tabel 1.2).

Tabel 1.2
Sinkronisasi Misi, Tujuan, dan Sasaran RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Enam Dimensi *Smart City*

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi *Smart City*					
				Smart Governance	*Smart Branding*	*Smart Economy*	*Smart Living*	*Smart Society*	*Smart Environment*
Misi 4 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Pada Pengembangan Agribisnis - Agroindustri	**Tujuan 1** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan	**Sasaran 1.1** Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan	**Indikator 1** Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan			✓			
			Indikator 2 Indeks Daya Saing Pariwisata		✓	✓			
			Indikator 3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		✓	✓	✓	✓	✓
			Indikator 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		✓	✓	✓	✓	✓
			Indikator 5 Indeks Risiko Bencana		✓	✓	✓	✓	✓
Misi 5 Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan		**Sasaran 1.2** Menurunnya Tingkat Pengguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan	**Indikator 1** Tingkat Pengangguran Terbuka			✓			
			Indikator 2 Rasio Gini			✓			
			Indikator 3 Indeks Desa Membangun		✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi *Smart City*					
				Smart Governance	*Smart Building*	*Smart Economy*	*Smart Living*	*Smart Society*	*Smart Environment*
Misi 1 Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama serta Membangun Sikap Religius	**Tujuan 2** Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	**Sasaran 2.1** Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komiditi Pangan dan Non Pangan Masyarakat	**Indikator 1** Harapan Lama Sekolah **Indikator 2** Rata-rata Lama Sekolah **Indikator 3** Pengeluaran Per Kapita **Indikator 4** Indeks Literasi						
Misi 2 Mewujudkan Sumber daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing		**Sasaran 2.2** Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**Indikator 1** Keamanan dan Ketertiban **Indikator 2** Indeks Pembangunan Kebudayaan						
Misi 3 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Tujuan 3** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	**Sasaran 3.1** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Ke Tingkat Desa	**Indikator 1** SAKIP **Indikator 2** Indeks Reformasi Birokrasi **Indikator 3** Sistem Merit ASN **Indikator 4** Indeks Inovasi Daerah						

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Kemudian secara rinci dapat dirumuskan keterkaitan antara misi dengan dimensi *smart city* sebagai berikut. Pertama, Misi 1 *Smart City* adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama disokong oleh dua dimensi *smart city*, yaitu *Smart Living* dan *Smart Society*. Kedua, Misi 2

Smart City adalah Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas disokong oleh dimensi *Smart Governance*. Ketiga, Misi 3 *Smart City* adalah Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Agribisnis-Agroindustri yang Berteknologi Tinggi disokong oleh dimensi *Smart Economy*. Terakhir, Misi 4 *Smart City* adalah Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan disokong oleh dimensi tiga dimensi, yaitu dimensi Smart Branding, Smart Economy, dan Smart Environment. Pemetaan keterkaitan antara misi smart city dengan dimensi smart city disajikan pada Gambar 1.1.

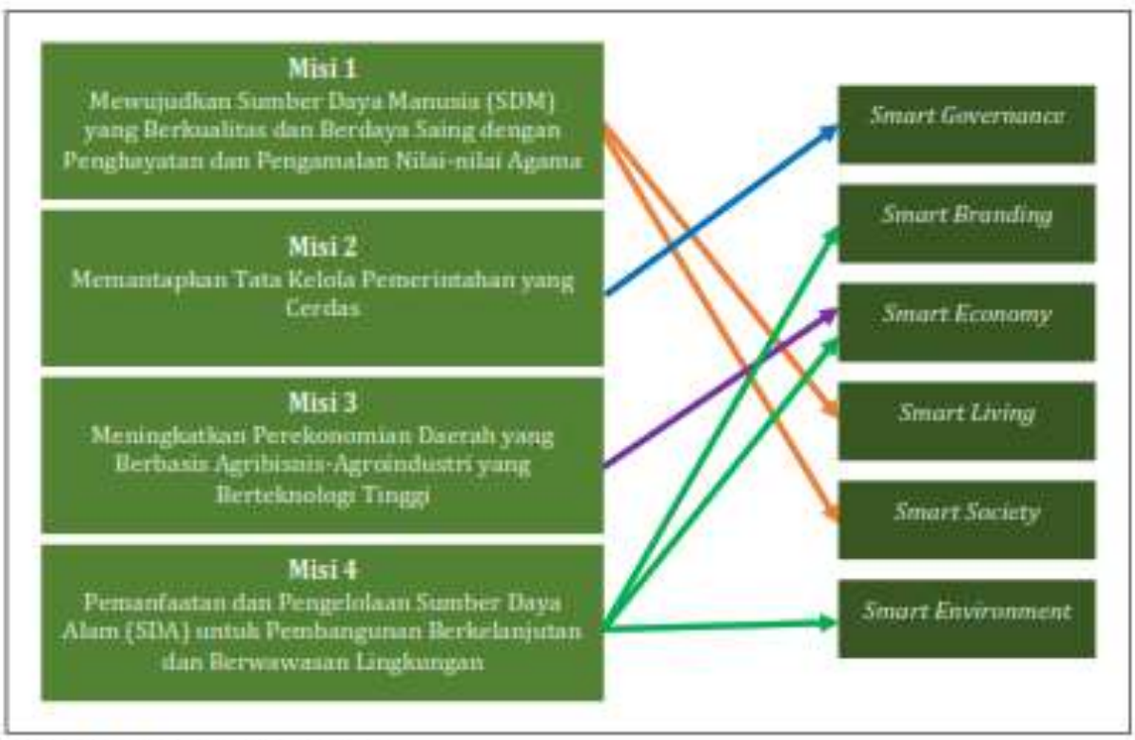

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Gambar 1.1
Keterkaitan Misi Smart City dengan Dimensi Smart City Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB II
VISI DAN SASARAN SMART CITY DAERAH

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu bagian wilayah pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi dan peluang untuk maju dan berkembang. Implementasi *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus berlandaskan pada visi pembangunan *smart city* sehingga dapat ditentukan sasaran pencapaian pembangunan *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Visi *smart city* ini kemudian diturunkan ke dalam misi pembangunan *smart city*. Adapun Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Nasional; harapan warga masyarakat; dan faktor eksternal di masa depan. Penjelasan visi, misi, dan sasaran *smart city* diuraikan sebagai berikut.

2.1 Visi dan Misi *Smart City* Daerah

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C/17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 (enam) kabupaten administratif dan 3 (tiga) swapraja. Salah satunya, *Afdeling Van Hoeloe Soengai* dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibu kota Kandangan. Untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan suatu inisiatif untuk menjadi paradigma yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan rencana pembangunan melalui penerapan *smart city*. Oleh karena itu, penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tahun 2023, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berakhir. Namun, terdapat kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun

2024. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terdapat masa transisi menjelang Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 sehingga dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam menganalisis visi pembangunan daerah ini menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024- 2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.

Visi pengembangan *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi dasar perumusan prioritas pengembangan pembangunan daerah selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dengan terus melakukan inovasi untuk mencapai peningkatan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Visi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai:

"Hulu Sungai Selatan yang Sehat, Makmur, Agamis, Rakat, dan Berbasis Teknologi (HSS SMART)"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. HSS SMART dimaknai sebagai Hulu Sungai Selatan yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi kreatif, inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Secara keseluruhan, visi pembangunan *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada kata kunci utama yaitu:

Sehat: Kota yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan inklusif, dan berupaya menyediakan dimensi permukiman, lalu lintas dan transportasi, industri, perkantoran dan pariwisata yang sehat.

Makmur: Kota dengan kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Agamis: Kota yang mendasarkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, dan implementasi nilai sosial, moral, norma, etika, tradisi, kearifan lokal dan toleransi sebagai fondasi kehidupan.

Rakat: Kota yang mengedepankan konsep kerja sama yang dinamis, dialogis, namun tetap harmonis untuk mencapai kondisi yang lebih baik, serta menyediakan lingkungan dan dinamika kehidupan perkotaan yang terbuka, ramah, dan menghormati pluralisme.

Berbasis Teknologi: Kota yang menggunakan teknologi secara optimal dan bijak untuk kemudahan, kecepatan, keteraksesan dan kualitas layanan sebagai dimensi utama pada semua aspek.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan misi yang jelas, karena misi merupakan suatu pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun Misi *Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama.
2. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Agribisnis- Agroindustri yang Berteknologi Tinggi.
4. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Penjabaran visi dan misi *smart city* terpilih dirumuskan ke dalam sasaran berdasarkan subdimensi dari masing-masing dimensi *smart city*. Untuk dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi maka perlu ditetapkan indikator berkualitas yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan diterapkannya *smart city* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun indikator yang ditetapkan pada masing-masing sasaran merupakan Indikator Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD dan indikator *smart city* yang ada dalam SNI ISO 37122:2019. Berikut ini disampaikan

uraian berbagai indikator *smart city* Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tiap dimensi untuk pembangunan *smart city* dalam jangka pendek.

2.2 Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance*

Pada dimensi *Smart Governance* terdapat beberapa beberapa sasaran jangka pendek, yaitu: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang cerdas berorientasi pada layanan sampai desa untuk subdimensi Layanan Publik, Memantapkan reformasi birokrasi berbasis digital sampai di tingkat desa untuk subdimensi Birokrasi, dan Meningkatnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sampai di tingkat desa untuk subdimensi Perancangan Kebijakan. Sasaran dan indikator capaian pada RPJMD maupun yang sesuai dengan ISO 37122:2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Pendek Smart Governance

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Indikator	
			RPJMD	ISO 37122:2019
Smart Governance	Layanan Publik	Meningkatkannya tata kelola pemerintahan yang cerdas berorientasi pada layanan sampai di tingkat desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	*18.2* Persentase area kota di bawah zona putih/titik mati/tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi *18.3* Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota
	Birokrasi	Memantapkan reformasi birokrasi berbasis digital sampai di tingkat desa	Indeks Reformasi Birokrasi	*10.2* Persentase layanan kota (kabupaten) yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	Perancangan Kebijakan	Meningkatnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sampai di tingkat desa	Nilai SAKIP	*21.1* Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.3 Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*

Pada dimensi *Smart Branding* terdapat beberapa sasaran jangka pendek, yaitu: Berkembangnya destinasi wisata alam, budaya, dan religi untuk subdimensi Pariwisata,

Meningkatnya penetrasi *brand* produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata untuk subdimensi Daya Saing Bisnis, dan Terwujudnya kota sentra UMKM untuk subdimensi Wajah (Tampilan) Kota. Sasaran dan indikator capaian pada RPJMD maupun yang sesuai dengan ISO 37122:2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Pendek Smart Branding

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Indikator	
			RPJMD	ISO 37122:2019
Smart Branding	Pariwisata	Berkembangnya destinasi wisata alam, budaya, dan religi	Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks Pembangunan Kebudayaan	*14.1* Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring *17b.1* Jumlah pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk *17b.2* Persentase catatan budaya yang telah didigitalkan
	Daya Saing Bisnis	Meningkatnya penetrasi *brand* produk lokal pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Persentase Peningkatan Kualitas Produk Industri Pengolahan	*5.2* Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk *20.1* Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian *20.3* Persentase luas tanah kota yang dicakup pleh sistem pemetaan pemasok makanan daring
	Wajah (Tampilan) Kota	Terwujudnya kota sentra UMKM	Persentase Peningkatan Produktivitas Per Unit Usaha	*5.2* Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.4 Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy*

Pada dimensi *Smart Economy* terdapat beberapa sasaran jangka pendek, yaitu: Meningkatnya daya saing sektor industri yang terintegrasi dengan sektor primer, sekunder, dan tersier untuk subdimensi Ekosistem Industri, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berdaya dan mandiri untuk subdimensi Kesejahteraan Masyarakat, dan Terwujudnya ekosistem transaksi keuangan berbasis digital untuk subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan. Sasaran dan indikator capaian pada RPJMD maupun yang sesuai dengan ISO 37122:2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sasaran Jangka Pendek Smart Economy

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Indikator	
			RPJMD	ISO 37122:2019
Smart Economy	Ekosistem Industri	Meningkatnya daya saing sektor industri yang terintegrasi dengan sektor primer, sekunder, dan tersier	Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase peningkatan kuantitas bahan baku lokal	*20.1* Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan
	Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berdaya dan mandiri	Persentase Penduduk Miskin Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (Angkatan Kerja yang Bekerja)	*5.3* Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) *5.4* Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Terwujudnya ekosistem transaksi keuangan berbasis digital	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	*9.1* Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri *9.2* Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.5 Sasaran Jangka Pendek *Smart Living*

Pada dimensi *Smart Living* terdapat beberapa sasaran jangka pendek, yaitu: Meningkatnya tata ruang wilayah yang harmonis untuk mendukung daya saing daerah yang berkelanjutan untuk subdimensi Harmonisasi Tata Ruang, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk mendukung akses terhadap kualitas pendidikan, dan komoditi pangan dan non-pangan masyarakat untuk subdimensi Kesehatan, dan Meningkatnya ekosistem transportasi yang lancar dan aman untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komiditi pangan dan non-pangan masyarakat untuk subdimensi Transportasi. Sasaran dan indikator capaian pada RPJMD maupun yang sesuai dengan ISO 37122:2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sasaran Jangka Pendek Smart Living

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Indikator	
			RPJMD	ISO 37122:2019
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya tata ruang wilayah yang harmonis untuk mendukung daya saing daerah yang berkelanjutan.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	*21.4* Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi
	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk mendukung akses terhadap kualitas pendidikan, dan komoditi pangan dan non-pangan masyarakat.	Usia Harapan Hidup (UHH)	*11.1* Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan
	Transportasi	Meningkatnya ekosistem transportasi yang lancar dan aman untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komiditi pangan dan non-pangan masyarakat.	Persentase Konektivitas Jalan dalam Kondisi Mantap	*19.5* Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses publik *19.9* Persentase lampu lalu lintas yang cerdas *19.12* Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan atau untuk komuter

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.6 Sasaran Jangka Pendek *Smart Society*

Pada dimensi *Smart Society* terdapat beberapa sasaran jangka pendek, yaitu: Terciptanya modal sosial masyarakat yang tangguh untuk subdimensi Interaksi Masyarakat, Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non-formal untuk subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan, dan Terciptanya keamanan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata dan digitalisasi untuk subdimensi Keamanan Masyarakat. Sasaran dan indikator capaian pada RPJMD maupun yang sesuai dengan ISO 37122:2019 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Sasaran Jangka Pendek Smart Society

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Indikator	
			RPJMD	ISO 37122:2019
Smart Society	Interaksi Masyarakat	Terciptanya modal sosial masyarakat yang tangguh	Indeks Desa Membangun	*13.4* Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
			Persentasi Pemuda yang Berwirausaha	
			Persentase Penyandang Disabilitas yang Memiliki Keterampilan	*13.2* Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus
	Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat baik secara formal maupun non-formal	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	*6.3* Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	*6.2* Jumlah komputer, laptop, tablet, atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa
			Indeks Literasi	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul *e-book* per 100.000 penduduk *17.4* Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Indikator	
			RPJMD	ISO 37122:2019
	Keamanan Masyarakat	Terciptanya keamanan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata dan digitalisasi	Indeks Keamanan dan Ketertiban	*15.1* Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

2.7 Sasaran Jangka Pendek *Smart Environment*

Pada dimensi *Smart Environment* terdapat beberapa sasaran jangka pendek, yaitu: Memastikan terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam kondisi baik untuk menunjang potensi unggulan ekonomi lokal berkesinambungan untuk subdimensi Proteksi Lingkungan, Memastikan terciptanya pengelolaan sampah dan limbah yang cerdas untuk menunjang potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah, dan Meningkatnya potensi penggunaan energi terbarukan melalui pengolahan sampah menjadi gas metan kemudian menjadi energi listrik untuk subdimensi Tata Kelola Energi. Sasaran dan indikator capaian pada RPJMD maupun yang sesuai dengan ISO 37122:2019 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Sasaran Jangka Pendek Smart Environment

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Indikator	
			RPJMD	ISO 37122:2019
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	Memastikan terjaganya kualitas lingkungan hidup dalam kondisi baik untuk menunjang potensi unggulan ekonomi lokal berkesinambungan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*23.3* Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem
			Indeks Risiko Bencana	*11.3* Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (*real-time*) untuk saran akualitas udara dan air

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Indikator	
			RPJMD	ISO 37122:2019
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memastikan terciptanya pengelolaan sampah dan limbah yang cerdas untuk menunjang potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan.	Indeks Cakupan Pengelolaan Persampahan	*16.3* Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi *16.4* Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota *16.6* Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang
	Tata Kelola Energi	Meningkatnya potensi penggunaan energi terbarukan melalui pengolahan sampah menjadi gas metan kemudian menjadi energi listrik.	-	*7.1* Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padar, dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu *7.3* Energi listrik dan panas dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

BAB III
PROFIL QUICKWINS SMART CITY DAERAH

Pada bab ini akan dijabarkan Program Unggulan atau yang disebut dengan `program *Quickwins.* Program unggulan ini disusun berdasarkan permasalahan yang harus diselesaikan secara cepat dan tepat dalam bentuk inovasi. Program unggulan ini terdiri dari program yang sudah ada (akan dikembangkan) maupun yang baru. Pengembangan program unggulan ini pengembangannya akan terus dilakukan pada kurun waktu satu tahun ke depan.

Program unggulan ditetapkan pada setiap sasaran dari setiap dimensi *smart city*, yaitu tata kelola birokrasi dan pemerintahan (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), ekonomi (smart *economy*), dan ekosistem perumahan (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*) dan perlindungan terhadap lingkungan (*smart environment*).

3.1 Quickwins *Smart Governance*

Untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong pelayanan publik yang optimal maka inovasi yang akan diimplementasikan adalah sebagai berikut:

		Penjelasan
1.	Nama Singkat Inovasi	JULAK DIVAKSIN DOKTER
2.	Penjelasan Singkat	JULAK DIVAKSIN DOKTER (Ajukan Layanan Administrasi Kependudukan via Aplikasi Online, Dokumen Diantar ke Rumah). Inovasi ini merupakan layanan pembuatan dokumen kependudukan tanpa proses tatap muka, dan dokumen yang diajukan akan diantar ke rumah oleh perangkat desa. Ke depannya, inovasi ini akan dikembangkan sehingga masyarakat

		Penjelasan
		pemohon dapat menerima dokumen melalui media online/elektronik seperti WhatsApp atau email.
3.	Status Saat Ini a. Kode Status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	 a. Implementasi Inovasi sedang berlangsung dan dalam rencana pengembangan lebih lanjut (6). b. Persentase penyelesaian adalah 75%. c. Layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung datang ke kantor sehingga pemohon tidak perlu mengantri.
4.	Manfaat dari Inovasi	Inovasi ini memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mempersingkat birokrasi dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan administrasi secara digital dengan cepat, akurat, dan transparan.
5.	Keunikan/ Kreativitas	1. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya administrasi dan transportasi. 2. Berbasis digital sehingga penggunaannya tidak dibatasi waktu selama dapat terkoneksi internet dengan baik. 3. Dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
6.	Kemitraan	Perangkat Desa, Diskominfo
7.	Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Inovasi ini dirancang adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Inovasi ini ke depan dikembangkan untuk penerimaan dokumen melalui media online (email atau WhatsApp). Inovasi ini dapat dengan mudah diadopsi, dimodifikasi, dan digunakan pada instansi lainnya.
8.	Strategi Menjaga Keberlangsungan	Untuk menjaga keberlangsungan inovasi ini maka perlu dilakukan beberapa upaya: • Peningkatan kapasitas SDM operator • Peningkatan kualitas dan jangkauan implementasi inovasi • Sosialisasi kepada masyarakat • Kepastian ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana penunjang sesuai standar
9.	Sumber Daya yang Digunakan	Sumber daya manusia (operator, programer, pengelola) Sumber daya infrastruktur (HP, Komputer, Internet, listrik, jaringan internet, aplikasi)
10.	Analisa Risiko	Dalam implementasi inovasi terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat, yaitu: • Ketergantungan dengan internet • Literasi digital masyarakat • Ketergantungan dengan listrik

3.2 *Quickwins Smart Branding*

Salah satu potensi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Loksado merupakan salah satu kawasan wisata yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Loksado memiliki banyak potensi wisata yang menarik dan layak dipasarkan kepada wisatawan baik lokal maupun asing. Namun, Loksado belum terlalu dikenal oleh wisatawan secara luas. Untuk itu diperlukan pencitraan untuk memperkenalkan identitas Loksado sebagai daerah tujuan wisata sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

Gambar 3.1
Potensi Objek Wisata Loksado Bamboo Rafting

Dalam upaya membangun *branding* daerah yang lebih pintar sesuai dengan potensi dan peluang pengembangan daerah maka diterapkan inovasi untuk memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dalam bentuk aplikasi untuk pelayanan terpadu.

Gambar 3.2
Tampilan SI PANDU WISATA

		Penjelasan
1.	Nama Singkat Inovasi	SI PANDU WISATA (Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata)
2.	Penjelasan Singkat	Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan inovasi pengelolaan sistem pelayanan terpadu pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Loksado.
3.	Status Saat Ini a. Kode Status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	 a. Implementasi Inovasi sedang berlangsung dan dalam rencana pengembangan lebih lanjut (6). b. Persentase penyelesaian adalah 50%. c. Sistem informasi sudah berlangsung tetapi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, aplikasi ini masih memerlukan fitur-fitur seperti layanan kesehatan, layanan fasilitas umum, layanan transportasi, layanan sentra oleh-oleh, layanan informasi akomodasi, layanan tanggap darurat, layanan pemandu wisata, serta layanan lainnya yang dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4.	Manfaat dari Inovasi	• Manfaat Eksternal: Kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh sumber daya informasi kepariwisataan di kabupaten hulu sungai selatan • Manfaat Internal: Meningkatkan produktivitas serta pendapatan bagi pelaku usaha
5.	Keunikan/ Kreativitas	Integrasi layanan transportasi, kesehatan, darurat bencana, akomodasi dan sentra oleh-oleh

		Penjelasan
6.	Kemitraan	▪ UMKM ▪ Dinas Perdagangan ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Kesehatan ▪ RSUD ▪ Dinas Koperasi UKMP ▪ Dinas Penanaman Modal ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Perhubungan ▪ Satpol PP ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
7.	Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Masuk ke dalam kalender event wisata nasional
8.	Strategi Menjaga Keberlangsungan	Untuk menjaga keberlangsungan inovasi ini maka perlu dilakukan beberapa upaya: ▪ Sumber daya manusia pengelola aplikasi SI PANDU WISATA ▪ Membuat Peraturan Daerah untuk keberlangsungan ekosistem pariwisata di kabupaten hulu sungai selatan ▪ UPT pariwisata
9.	Sumber Daya yang Digunakan	▪ Sumber daya manusia ▪ Anggaran ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung ekosistem aplikasi
10.	Analisa Risiko	Dalam implementasi inovasi terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat, yaitu: ▪ Server yang digunakan belum dengan spesifikasi yang tinggi. ▪ Koneksi internet yang masih kecil dan belum stabil. ▪ Keamanan cyber yang masih rendah.

3.3 Quickwins Smart Economy

Dalam implementasi *smart city* pada dimensi *Smart Economy* diperlukan inovasi strategis yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat dengan pembinaan para pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen bisnis dan manajemen keuangan. Inovasi pembinaan pelaku UMKM disebut Klinik UMKM. Klinik UMKM ini adalah sebuah inovasi yang sudah digagas sejak awal tahun 2020 karena HSS memiliki UMKM hampir sebanyak 40.000 UMKM. Profil Klinik UMKM tersaji sebagai berikut:

		Penjelasan
1.	Nama Singkat Inovasi	Klinik UMKM
2.	Penjelasan Singkat	Klinik UMKM adalah inovasi yang dilakukan untuk membantu mengembangkan SDM pelaku usaha yang sadar digital, serta meningkatkan aksesibilitas penjualan. Ada beberapa asistensi layanan yang disiapkan pada Klinik UMKM ini, yaitu: ada asistensi dari kualitas, asistensi bidang permodalan, asistensi bidang promosi dan distribusi dan asistensi bidang perizinan. Asistensi-asistensi yang diberikan ini dilakukan oleh Tim Klinik UMKM tidak hanya dari dari Disnakerkop UKP tetapi juga dibantu oleh instansi-instansi lain yang terkait dengan materi asistensi. Klinik UMKM ini akan dikembangkan agar pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman dan berinovasi dengan produknya sehingga dapat dikenal, menjalankan usaha dari rumah dan terhubung ke sistem digital. Pelaku UMKM didorong untuk melakukan diversifikasi produk dan mampu memanfaatkan *e-commerce* baik di dalam maupun luar negeri. Klinik UMKM yang selama ini masih analog atau dalam bentuk pertemuan langsung dapat dikembangkan menjadi klinik yang berbasis digital.
3.	Status Saat Ini a. Kode Status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	 a. Implementasi inovasi sedang berlangsung dan dalam rencana pengembangan lebih lanjut (6). b. Persentase penyelesaian adalah 75%. c. Inovasi ini menunjang penguatan kapasitas pelaku UMKM sehingga UMKM yang merupakan salah satu pondasi penjaga angka kemiskinan dapat bertahan bahkan berkembang. Dengan demikian, pelaku UMKM yang mampu dan berhasil akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah.
4.	Manfaat dari Inovasi	• Pelaku usaha memiliki kapasitas dalam pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan. • Pelaku usaha mendapatkan pendampingan yang baik sehingga segera mendapatkan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.

		Penjelasan
5.	Keunikan/ Kreativitas	Membantu pelaku usaha agar memiliki kemampuan menjalankan usaha dan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan profit.
6.	Kemitraan	Dinas Kominfo, Dinas Perdagangan, Dinas Porapar, dan dinas lainnya yang terkait dengan bidang usaha dan permasalahan yang dihadapi.
7.	Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Banyak dan terus berkembangnya jumlah UMKM serta kerja sama multipihak yang telah terbangun tinggal memperkuat dan memperluas mitra kerja sama dan jenis asistensi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
8.	Strategi Menjaga Keberlangsungan	Untuk menjaga keberlangsungan inovasi ini maka perlu dilakukan beberapa upaya: • Aplikasi harus stabil dan terintegrasi • Memberikan pelayanan asistensi yang mudah, cepat, dan berbasis digital. • Membangun literasi digital pelaku UMKM
9.	Sumber Daya yang Digunakan	Komputer, Internet, Kertas, Operator, Programmer, narasumber.
10.	Analisa Risiko	Dalam implementasi inovasi terdapat beberapa risiko yang dapat menjadi tantangan yaitu ketergantungan dengan internet, rendahnya literasi digital, dan kapasitas narasumber.

3.4 Quickwins *Smart Living*

Untuk menjamin kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang baik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka implementasi *smart city* di kabupaten ini difokuskan pada layanan kesehatan yang terus bertransformasi menuju sistem kesehatan yang kuat, tangguh dan terintegrasi. Berikut adalah profil dari *quickwins smart living*.

		Penjelasan
1.	Nama Singkat Inovasi	Sistem Pendaftaran Pasien Online Terintegrasi
2.	Penjelasan Singkat	Sistem Pendaftaran Pasien Online Terintegrasi adalah inovasi untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran pengobatan rawat jalan dari manapun berada. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sering terjadi dimana seringkali masyarakat kesulitan mendapatkan tempat rawat inap saat ingin melakukan pendaftaran.

		Penjelasan
3.	Status Saat Ini	
	a. Kode Status	a. Ide/konsep inovasi awal dalam proses penulisan/ penggambaran (2)
	b. Persentase Selesai	b. Persentase penyelesaian adalah 15%.
	c. Penjelasan	c. Masih dalam tahap rencana pengembangan
4.	Manfaat dari Inovasi	Masyarakat mendapatkan pelayanan hanya dalam satu aplikasi. Hal ini memberikan kemudahan pelayanan kesehatan, karena pasien tidak perlu lama antri dan meningkatkan efisiensi waktu tunggu pendaftaran.
5.	Keunikan / Kreativitas	Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat saat ini harus dimanfaatkan oleh rumah sakit untuk tujuan pelayanan lebih cepat, akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas rumah sakit.
6.	Kemitraan	Dinkes, Kominfo, BPJS Kesehatan, RSUD Milik Pemda HSS
7.	Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Program ini berpotensi untuk dikembangkan ke arah integrasi dengan data kependudukan dan data dokter. Selain itu juga program ini juga memiliki *roadmap* signifikan dalam pelayanan farmasi dan konsultasi kesehatan berkala secara *online*.
8.	Strategi Menjaga Keberlangsungan	Strategi pengembangan yang dilakukan akan berfokus pada aspek kerja sama, SDM, dan *hardware*, *software*, dan *policyware*. Pada aspek kerja sama strategi yang akan dilakukan adalah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan OPD terkait. *Hardware* yang mendukung aplikasi akan terus didukung terutama dengan menambah kapasitas penyimpanan dan kecepatan aksesibilitas. Strategi terkait *software* akan terus dilakukan dengan selalu melakukan pemukhtahiran fitur sesuai kebutuhan pasien, keamanan privasi data, dan kemudahan penggunaan. Sedangkan untuk strategi pada aspek kebijakan adalah dengan menyusun regulasi dan pedoman terkait operasional penggunaan aplikasi bagi pasien.
9.	Sumber Daya yang Digunakan	SDM terkait operator, programmer, dan teknologi informasi Perangkat lunak utama dan pendukung aplikasi Infrastruktur *hardware* utama untuk aplikasi dan infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung kinerja aplikasi Kebijakan terkait sosialiasi aplikasi
10.	Analisa Risiko	Dalam implementasi inovasi terdapat beberapa risiko yang dapat menjadi tantangan yaitu: Tidak semua masyarakat memiliki *smartphone* Kendala jaringan Server turun Rendahnya literasi digital masyarakat.

3.5 *Quickwins* Smart *Society*

Implementasi *smart society* merupakan dimensi yang berfokus pada interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosioteknis dengan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif dan inklusif. Berikut adalah profil *quickwins smart society*.

		Penjelasan
1.	Nama Singkat Inovasi	PENTAMAKS (Pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja Mutual dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas)
2.	Penjelasan Singkat	PENTAMAKS merupakan inovasi untuk memenuhi kuota pekerja penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi perusahaan swasta sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian PENTAMAKS bertujuan untuk meningkatkan kuota pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah kabupaten, BUMN/ BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta.
3.	Status Saat Ini a. Kode Status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	 a. Implementasi inovasi sedang berlangsung (5) b. Persentase penyelesaian adalah 75% c. Dalam tahap uji coba dan implementasi untuk pengembangan lebih lanjut
4.	Manfaat dari Inovasi	Salah satu sektor pembangunan inklusif bidang kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kuota pekerja disabilitas di instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta Berperan dalam mitigasi kemiskinan ekstrim
5.	Keunikan / Kreativitas	Gambaran alur dari Inovasi PENTAMAKS antara lain meliputi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan MAKSI HSS, pendataan dan verifikasi tenaga kerja penyadang disabilitas secara periodik. Inovasi ini mempunyai ciri: 1. Layanan Jemput bola 2. Fasilitasi akun SIAP KERJA 3. Pemberian Jamsostek ketenaga kerjaan bagi calon pekerja penyandang disabilitas 4. Rekomendasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai potensi dan kompetensi yang dimiliki

		Penjelasan
6.	Kemitraan	Kemenaker, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Tenaga Kerja KUKMP, BPJS Ketenaga kerjaan, Badan Usaha
7.	Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Berpotensi untuk pengembangan karena dukungan dari pemerintah daerah dan legal standing yang kuat (UU Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
8.	Strategi Menjaga Keberlangsungan	• Monitoring dan evaluasi rutin target kinerja dari pimpinan daerah • Pemberian *reward* bagi instansi atau badan usaha yang memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan yang mempekerjakan • Program pelatihan dan pemagangan bagi penyandang disabilitas yang dianggarkan secara rutin per tahun
9.	Sumber Daya yang Digunakan	• APBD • SDM terkait: operator, pendamping inklusi, fungsional pengantar kerja, fungsional rehabilitasi sosial • Perangkat keras dan perangkat lunak utama dan pendukung aplikasi • Kebijakan terkait keberlanjutan inovasi
10.	Analisa Risiko	Dalam implementasi inovasi terdapat beberapa risiko yang dapat menjadi tantangan yaitu: • Karena merupakan layanan baru yang belum pernah dilaksanakan, tidak ada contoh dan tidak pernah menemui kasus pekerja disabilitas, sehingga SDM bidang tenaga kerja akan canggung dalam pelayanan • Staff pelayanan terbatas dan belum memiliki keterampilan inklusi untuk komunikasi dan interaksi lainnya dengan penyandang disabiitas • Kesulitan ekstra dalam memberikan layanan yang maksimal, peduli dan responsif bagi pekerja penyandang disabilitas

3.6 *Quickwins* Smart *Environment*

Implementasi *smart environment* bertujuan untuk pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Sementara, selama ini paradigma manusia tentang sampah hanyalah dengan membuangnya ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun dibakar dan dibuang ke sungai, namun hal itu tentu berdampak buruk untuk lingkungan. Padahal sampah-sampah tersebut dapat dimafaatkan agar lebih bernilai guna dengan menjadikan sampah-sampah organik menjadi kompos atau dengan melakukan daur ulang sampah-sampah anorganik. Selanjutnya dengan penanganan sampah dari sumbernya, yang meliputi pemisahan/sortasi, penyimpanan dan pengolahan merupakan tahapan dalam kegiatan pengelolaan karakteristik sampah karena dalam tahapan program ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik sampah, kesehatan

masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah, maka sangatlah penting untuk memahami bagaimana sebaiknya penanganan sampah on-site dilakukan. Oleh karena itu implementasi *smart environment* jangka pendek di Hulu Sungai Selatan berfokus pada isu pengelolaan sampah. Adapun profil *quickwins smart environment* adalah sebagai berikut.

		Penjelasan
1.	Nama Singkat Inovasi	SAPI GEMUK (Sampah Pilah Gerakan Masyarakat Untuk Keluarga)
2.	Penjelasan Singkat	SAPI GEMUK adalah inovasi pemilihan sampah Rumah Tangga di Lingkungan Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Inovasi ini mempunyai tujuan memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat yang secara umum terkait pengelolaan persampahan karena permasalahan sampah adalah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masayarakat dengan melakukan perubahan pola pikir atau paradigma dan perilaku masyarakat terhadap sampah. Program ini melakukan pilah sampah mulai dari rumah tangga supaya sampah mempunyai nilai ekonomis atau dapat dimamfaatkan kembali. Memastikan kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan dan pengolahan agar menjadi material yang tidak membahayakan terhadap manusia dan lingkungan.
3.	Status Saat Ini a. Kode Status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	a. Implementasi inovasi sedang berlangsung (5) b. Persentase penyelesaian adalah 75 % c. Layanan pengelolaan sampah skala rumah tangga
4.	Manfaat dari Inovasi	Dapat membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan menjadikan sampah yang dihasilkan dari rumah bernilai ekonomis atau bisa juga dibuat produk baru yang bernilai ekonomis.
5.	Keunikan/ Kreativitas	Program ini memiliki keunikan dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilahan sampah organik dan anorganik serta dapat menambah pendapatan keluarga dari penjualan sampah anorganik ke bank sampah terdekat.
6.	Kemitraan	CSR perusahaan, Bank sampah, Dispera KPLH, Desa, Sekolah, RT dan TPS3R
7.	Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Praktik ini dapat dikembangkan menjadi skala yang lebih besar.
8.	Strategi Menjaga Keberlangsungan	Penyuluhan kepada masyarakat di desa, kecamatan dan sekolah/lembaga pendidikan. Memanfatkan teknologi informasi.
9.	Sumber Daya yang digunakan	SDM terkait penyuluh persampahan, aparat desa, aparat RT, pengurus Persampahan TPS3R
10.	Analisa Risiko	• Tidak semua masyarakat teredukasi tentang pemilahan sampah organik dan sampah anorganik • Belum tersedianya sarana dan prasarana fasilitas pendukung sesuai standar

BAB IV
MANAJEMEN RISIKO QUICKWINS

Salah satu tantangan pembangunan saat ini dalam bentuk *volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity* atau lebih dikenal sebagai VUCA. Kerugian atas unsur ketidakpastian ini (risiko) dapat berwujud dalam berbagai hal aktivitas. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam implementasi program unggulan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Dalam konteks *smart city*, manajemen risiko *quickwins* meliputi:

Pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini melibatkan proses pengenalan dan penilaian terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi dalam implementasi *quickwins* atau solusi cepat dalam konteks *smart city*. Proses identifikasi risiko ini dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu *Nature*, *Infrastructure*, *Structure*, *Suprastructure*, dan *Culture*. Kategori Alam (*Nature*) merupakan risiko yang bersumber dari faktor alam seperti bencana alam, perubahan iklim, atau gejala alam lainnya yang dapat memengaruhi implementasi *smart city*. Kategori Infrastruktur (*Infrastructure*) merupakan risiko-risiko terkait dengan infrastruktur teknologi, transportasi, energi, dan lainnya. Misalnya, kegagalan perangkat keras, kerentanan keamanan siber, atau masalah infrastruktur kritis. Kategori Struktur (*Structure*) merupakan risiko yang terkait dengan struktur organisasi dan kelembagaan dalam mengadopsi teknologi *smart city*. Ini melibatkan potensi hambatan birokratis, resistensi internal, atau ketidaksesuaian dengan struktur yang ada. Kategori Suprastruktur (*Suprastructure*) merupakan faktor-faktor tingkat tinggi yang memengaruhi *smart city*, seperti kebijakan pemerintah, regulasi, dan kerja sama antarlembaga. Risiko-risiko di sini mungkin mencakup perubahan kebijakan yang mendadak atau hambatan hukum. Sementara, kategori Budaya (Culture) merupakan risiko-risiko terkait dengan perubahan budaya dalam penerapan teknologi *smart city*. Ini bisa mencakup resistensi masyarakat terhadap perubahan, isu privasi, atau masalah adopsi teknologi. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini dalam kategori-kategori yang terstruktur, manajemen

risiko *quickwins* dapat merinci dan memahami potensi dampak serta sumber risiko yang mungkin muncul selama implementasi solusi cepat dalam konteks *smart city*. Langkah identifikasi ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi pengelolaan risiko yang efektif dan dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan dari upaya *smart city* tersebut.

Kedua, Analisis Risiko. Proses analisis risiko ini dilakukan dengan menilai tingkatan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penilaian risiko ini didasarkan pada dua faktor utama, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Tingkat kemungkinan (*probability*) mengacu pada sejauh mana kemungkinan risiko tersebut terjadi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan faktor- faktor seperti sejarah kejadian serupa, kondisi lingkungan, atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi probabilitas terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan biasanya dinyatakan dalam skala seperti rendah, sedang, atau tinggi, ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Kategori dan Deskripsi Tingkat Kemungkinan Risiko

Tingkat Kemungkinan	**Deskripsi**	
1	**Kecil**	Kemungkinan terjadi 1 - 2 kali dalam satu periode
2	**Sedang**	Kemungkinan terjadi 3 - 4 kali dalam satu periode
3	**Besar**	Kemungkinan terjadi >5 kali dalam satu periode

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Periode yang disebutkan pada tabel tingkat kemungkinan dapat disesuaikan dan disepakati, namun secara praktik umumnya, satu periode adalah dalam kurun waktu satu tahun.

Proses selanjutnya adalah menentukan dampak risiko dengan mengukur sejauh mana konsekuensi atau kerugian yang mungkin terjadi jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Dampak dapat mencakup aspek finansial, operasional, reputasi, atau faktor-faktor lain yang relevan. Seperti tingkat kemungkinan, dampak juga sering dinyatakan dalam kategori seperti rendah, sedang, atau tinggi (ditunjukkan pada Tabel 4.2).

Tabel 4.2
Kategori dan Deskripsi Tingkat Dampak Risiko

Tingkat Dampak	**Deskripsi**	
1	**Kecil**	Dampak secara finansial atau non-finansial tidak terlalu serius, tidak menyebabkan banyak masalah atau kerusakan
2	**Sedang**	Dampak secara finansial atau non-finansial besar atau punya pengaruh untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut

3	**Besar**	Dampak secara finansial atau non-finansial sangat buruk, serius, atau kerusakan yang tidak dikehendaki

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Setelah tingkat kemungkinan dan dampak dinilai, nilai risiko dapat dikuantifikasi dengan menggabungkan dua faktor tersebut atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut dikuantifikasi menjadi nilai risiko dengan rumus:

Nilai Risiko = Nilai Tingkat Kemungkinan x Nilai Tingkat Dampak

Hasil dari nilai risiko kemudian dipadankan dalam matriks risiko, di mana tingkat kemungkinan dan dampak diplotkan untuk memberikan gambaran visual tentang tingkat risiko (lihat Tabel 4.3).

Tabel 4.3
Hasil Nilai Risiko (Tingkat Dampak x Tingkat Kemungkinan)

		Tingkat Kemungkinan		
		1	**2**	**3**
Tingkat Dampak	**1**	**Rendah (1)**	**Rendah (2)**	**Rendah (3)**
	2	**Rendah (2)**	**Sedang (4)**	**Sedang (6)**
	3	**Rendah (3)**	**Sedang (6)**	**Tinggi (9)**

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Risiko yang terjadi perlu ditangani secara cepat dan tepat. Penanganan risiko merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah diidentifikasi dalam konteks manajemen risiko disebut Aksi Penanganan Risiko. Namun demikian penanganan setiap risiko sangat bergantung pada hasil nilai risiko yang didapatkan dari perhitungan di atas. Secara praktik umum, aksi penanganan risiko berdasarkan nilai tingkat risikonya ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Kategori Aksi Penanganan Risiko

Tingkat	**Deskripsi**	**Deskripsi**
≥7	**Tinggi**	Aksi perbaikan harus dilakukan maksimum dalam jangka waktu tiga bulan
4 - 6	**Sedang**	Aksi perbaikan harus dilakukan maksimum dalam jangka waktu enam bulan
≤3	**Rendah**	Perlu dilakukan pemantauan

(*Sumber*: Hasil Analisis, 2023)

Ketiga, Mitigasi Risiko. Mitigasi risiko merupakan tahap lanjutan dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya. Dalam konteks ini, risiko diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural. Mitigasi struktural melibatkan tindakan yang bersifat fisik atau teknis untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampaknya. Ini seringkali mencakup perubahan pada infrastruktur fisik atau sistem teknologi. Mitigasi non-struktural melibatkan pendekatan yang tidak bersifat fisik, seperti kebijakan, prosedur, atau pendekatan organisasional untuk mengelola risiko. Fokusnya pada perubahan perilaku, kebijakan, atau tindakan manusia. Manajemen risiko pada setiap program unggulan dari setiap dimensi adalah sebagai berikut.

4.1 Manajemen Risiko *Quickwins Smart Governance*

No	IDENTIFIKASI RISIKO (*RISK IDENTIFICATION*)						ANALISA RISIKO (*RISK ANALYSIS*)			PENANGANAN RISIKO (*RISK TREATMENT*)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Subkategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	*Opportunity* (Risiko Positif)	Nilai Kemung-kinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non-Struktural
	Structure	SDM	Tingkat pendidikan	Sulit beradaptasi dengan kemajuan teknologi	Kemampuan masyarakat dalam penguasaan teknologi masih rendah	Tigkat penggunaan teknologi meningkat	2	1	2	Disdikbud	Per tahun	1) Tenaga pendidik yang kompeten 2) Materi dan sumber belajar yang memadai	Aksesibilitas Pendidikan	Pemberdayaan Guru
		SDM Pemerintah	Tingkat pendidikan, tingkat kompetensi	Tidak tersedianya operator yang kompeten	Kemampuan operator dalam penguasaan teknologi dan penguasaan teknis masih rendah	Banyak ASN yang belajar secara mandiri	1	2	2	BKPSDM	Per tahun	1) Program Pelatihan 2) Tenaga Pengajar dengan kompetensi yang sesuai	Pengembangan Kompetensi Pegawai	Pengakuan dan Penghargaan
		Keuangan Daerah	Pembiayaan daerah terbatas	Sarana dan prasarana belum memadai	Ketergantungan pada sumber pendapatan daerah	Meningkatkan inovasi daerah	1	2	2	BPKPD dan dinas terkait	Per tahun	Anggaran yang memadai	Diversifikasi Pendapatan dan Perencanaan Keuangan Jangka Panjang	Kerja Sama Regional
	Infra-structure	Infrastruktur Digital	Wi-Fi, Jaringan, Ponsel, Komputer	Tidak dapat mengakses aplikasi	Kegagalan jaringan dan kerusakan perangkat	*Mainfenance system*	2	3	6	Diskominfo	Per bulan	1) Kerja sama dengan pihak ketiga	Pemantauan dan Pemeliharaan Berkala	SOP Penanganan Gangguan
		Teknologi	Aplikasi berbasis web	Ketergantungan dengan internet, tidak dapat mengakses aplikasi	Keamanan informasi	*Mainfenance system*	2	2	4	Diskominfo dan dinas terkait	Per bulan	1) SDM dengan keahlian teknis 2) Kebijakan dan prosedur keamanan informasi	Backup, Pembaruan Aplikasi	Kebijakan terkait Keamanan Informasi
	Culture	Sosial	Budaya (Individualisme)	Berkurangnya interaksi sosial	Isolasi sosial	Budaya kolektivisme	1	1	1	Dinas Sosial	Per bulan		Pengembangan Sistem Dukungan Kesehatan Mental	Mendorong Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial

4.2 Manajemen Risiko *Quickwins Smart Branding*

No	IDENTIFIKASI RISIKO (*RISK IDENTIFICATION*)						ANALISA RISIKO (*RISK ANALYSIS*)			PENANGANAN RISIKO (*RISK TREATMENT*)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Subkategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemung-kinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non-Struktural
	Nature	Lingkungan	Banjir	Tidak nyaman dan penurunan omset	Hujan	Gotong royong	3	2	3	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	1 x 1 tahun	Tenaga kebersihan, alat berat excapator ukuran kecil	Melakukan pelebaran dan pengerukan selokan	Larangan membuang sampah di selokan
			Tanah Longsor	Kehilangan tempat tinggal	Pohon tumbang	Tanah gembur	1	1	1		1 x 1 tahun		Melakukam penanaman pohon	Pemasangan rambu rawan longsor
			Puting Beliung	Kerusakan lahan pertanian	Angin	Mengurangi pencemaran udara dan polutan	1	1	1		1 x 1 tahun		Melakukan pemangkasan ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh	Membuat peta rawan bencana puting beliung
	Structure	SDM Pemerintah	Kualitas dan kuantitas SDM yang rendah	Produktivitas Rendah	Kurangnya pendidikan dan pelatihan	Menciptakan peluang pendidikan dan pelatihan kerja	3	3	3	BKPSDM	1 x 1 tahun	Tenaga profesional dan berdaya saing	Melakukan pendidikan dan pelatihan	Wajib memiliki sertifikasi keterampilan
		Keuangan Daerah	Dukungan anggaran yang tidak memadai untuk operasional	Terbatasnya biaya operasional	Fluktuasi pendapatan daerah	Efisiensi kegiatan	3	3	3	BPKPD	1 x 1 tahun	Peningkatan sumber-sumber PAD	Meminimalkan kebocoran sumber daya pendapatan	Pengurangan penggunaan anggaran yang tidak prioritas
	Infra-structure	Infrastruktur Digital	Tidak memperoleh sinyal	Tidak dapat berkomunikasi secara digital	Kurangnya BTS pada area *blank spot*	Kontak sosial langsung meningkat	1	1	1	Diskominfo		Masyarakat *blank spot*	Pemasangan tower BTS atau satelit	Tidak berada pada area *blank spot*
		Teknologi	Sistem informasi tidak dapat diakses	Kekurangan informasi	tidak memperoleh sinyal	Maintenance sistem	2	2	2	Diskominfo	1 x 1 tahun	Pengguna sistem informasi	Monitoring sistem informasi	Optimalisasi sistem informasi
	Culture	Sosial	Tatanan sosial yang ada di masyarakat	Hukum Adat	Sulitnya memperoleh lahan untuk pembangunan BTS	Penghijauan	1	1	1	Bag. Hukum	1 x 1 tahun	Lahan		

4.3 Manajemen Risiko *Quickwins Smart Economy*

No	IDENTIFIKASI RISIKO (*RISK IDENTIFICATION*)						ANALISA RISIKO (*RISK ANALYSIS*)			PENANGANAN RISIKO (*RISK TREATMENT*)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Subkategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportu-nity (Risiko Positif)	Nilai Kemung-kinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non-Struktural
	Infra-structure	Teknologi	Jaringan internet	Kebocoran data, ketertambatan akses web	Keamanan Aplikasi	Cepat menerima informasi	2	2	4	Dinas Kominfo	Per Tahun		Menjaga keamanan data dan melakukan *back up* data	Optimalisasi sistem
		Infrastruktur Digital	Wi-fi, jaringan	Tidak dapat mengakses aplikasi	Blank Spot	Pelayanan online	2	3	6	Dinas Kominfo	Per Tahun		Menambah akses internet	
	Structure	SDM Masyarakat	Kompetensi SDM yang rendah	Kegiatan tidak berjalan secara optimal	Tidak ada *transfer knowledge*	Adanya keinginan untuk belajar menggunakan aplikasi digital	2	3	6	Dinas NakerkopUKP	Per Tahun		Melakukan sosialisasi dan pelatihan	Melaksanakan edukasi kepada masyarakat
		Keuangan Daerah	Tidak tersedianya anggaran	Kegiatan tidak berjalan optimal	Kemampuan keuangan daerah rendah	Adanya dana CSR	1	2	2	Dinas NakerkopUKP	Per Tahun		Meminimalkan belanja yang tidak prioritas	Pengurangan penggunaan anggaran yang tidak prioritas
	Culture	Sosial	Persaingan bebas	Gap antara pengusaha mikro dan pengusaha besar	Tidak terbiasa melakukan transaksi online	Luasnya pemasaran produk	1	3	3	Dinas NakerkopUKP	Per Tahun		Sosialisasi terkait transaksi online	
		Ekonomi	Persaingan bebas	*Income* penjualan kecil	Pendapatan masyarakat rendah	Tersedianya lapangan pekerjaan	1	3	3	Dinas NakerkopUKP	Per Tahun		Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan serta memperbaiki kemasan	Wajib memiliki serfikasi
	Supra-structure	Hukum	Penyimpangan regulasi	Tidak sesuai prosedur	Pelanggaran Hukum	Prosedur sesuai aturan	1	1	1	Dinas NakerkopUKP	Per Tahun		Melakukan sosialisasi regulasi	Membuat SOP
		Kelembagaan	Rendahnya tingkat keaktifan anggota	Kelembagaan tidak efektif	Kelembagaan tidak efektif	Memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelompok UMKM	1	2	2	Dinas NakerkopUKP	Per Tahun		Membuat struktur organisasi	Membuat SK Bupati Kepengurusan

4.4 Manajemen Risiko *Quickwins Smart Living*

No	IDENTIFIKASI RISIKO (*RISK IDENTIFICATION*)						ANALISA RISIKO (*RISK ANALYSIS*)			PENANGANAN RISIKO (*RISK TREATMENT*)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Subkategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non-Struktural
	Infra-structure	Infrastruktur Digital	Terganggunya server	Tidak bisa mengakses aplikasi	(1) Listrik mati (2) *Human error* (3) Server error (4) Serangan *hacker*	Lebih tanggap	3	3	9	Rumah Sakit dan Kominfo	3 jam		UPS dan genset	
			Kerusakan pada perangkat keras		(1) Listrik mati (2) Penggunaan berlebihan		2	3	6	Rumah Sakit dan Kominfo	3 jam		Backup server	
			Jaringan		(1) Listrik mati (2) Kerusakan provider		2	3	6	Rumah Sakit dan Provider	24 jam		Backup server dan jaringan	
	Structure	SDM Masyarakat	Tidak dapat memanfaatkan aplikasi		Literasi digital rendah	Budaya kolektivisme memudahkan cepatnya informasi menyebar	2	2	4	Perangkat Desa	24 Jam			
			Tidak memiliki smartphone		Tingkat ekonomi rendah									
			Berada di wilayah yang *blank spot*		Kondisi geografis									
		SDM Aparatur	Kompetensi yang kurang		Literasi digital rendah	Inisiatif belajar ASN tinggi	2	2	4	Rumah Sakit	6 bulan			

4.5 Manajemen Risiko *Quickwins Smart Society*

No	IDENTIFIKASI RISIKO (*RISK IDENTIFICATION*)						ANALISA RISIKO (*RISK ANALYSIS*)			PENANGANAN RISIKO (*RISK TREATMENT*)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Subkategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemung-kinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non-Struktural
	Structure	SDM Masyarakat	SDM penyandang disabilitas rata-rata masih rendah	Belum bisa diterima dunia kerja	Sulitnya mencari penyandang disabilitas yang memiliki potensi sesuai dengan kriteria / kualifikasi	Terbukanya lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas	3	2	6	Disdik, Disnaker, Dinas Sosial	10 tahun/ per tahun	SDM dan dana peningkatan kompetensi		Penyuluhan
		SDM Birokrasi	Belum ada petugas pendamping inklusi. Belum ada fungsional pengantar kerja	Kesulitaan komunikasi, kesulitan dalam penempatan tenaga kerja	Sulitnya perusahaan dalam menempatkan tenaga kerja disabilitas		2	2	4	Disnaker, Dinas Sosial	2 tahun	SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan		Penyuluhan
		Keuangan Daerah	Dana untuk sektor tenaga kerja masih kurang	Inovasi tidak bisa bergerak jika tidak disokong dana yang dibutuhkan	Terbatasnya Anggaran		1	1	1	Disnaker	Per tahun		Penambahan Anggaran	
	Infra-structure	Infrastruktur digital	Belum terintegrasinya aplikasi SIAP KERJA Kemenaker dengan aplikasi sejenis di daerah, belum berbasis lokasi	Aplikasi kurang dimanfaatkan, kondisi tenaga kerja tidak bisa dipantau secara real time	Sulitnya dalam penggunaan aplikasi untuk disabilitas		1	1	1	Disnaker, Dinas Sosial	5 tahun		Pengembangan Aplikasi	
	Supra-structure	Kelembagaan	Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sudah terbentuk tapi ruang gerak masih terbatas	Layanan belum maksimal			1	1	1	Disnaker	1 tahun			Sosialisasi Terkait pelayanan Disibilitas

4.6 Manajemen Risiko *Quickwins Smart Environment*

No	IDENTIFIKASI RISIKO (*RISK IDENTIFICATION*)						ANALISA RISIKO (*RISK ANALYSIS*)			PENANGANAN RISIKO (*RISK TREATMENT*)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Subkategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	*Opportunity* (Risiko Positif)	Nilai Kemung-kinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non-Struktural
	Structure	Keuangan Daerah	Terbatasnya dana anggaran daerah sehingga menyebabkan terbatasnya bank sampah unit desa	Kurangnya sarana prasaran yang mendukung sesuai standar	Terbatasnya Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang ada di perumahan	Dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Dapat membantu keuangan keluarga dengan menabung sampah ke bank sampah	2	1	4	Dispera KPLH	5 tahun		Penambahan anggaran	
		SDM Masyarakat	Kurangnya peran serta masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan sampah sehingga volume sampah yang masuk TPA masih tinggi	Kurangnya minat masyarakat		2	2	4	Dispera KPLH	5 tahun			Penyuluhan
		SDM Birokrasi	Kurangnya tim penyuluh persampahan	Layanan belum maksimal	Jumlah SDM yang terbatas sesuai kompetensinya		2	2	4	Dispera KPLH	5 tahun			Penambahan petugas penyuluh persampahan
	Infra-Stucture	Infrastruktur digital	Terganggunya server	Tidak dapat diakses aplikasi	Listrik mati Gangguan jaringan Kerusakan aplikasi		2	3	4	Dispera KPLH dan Keminfo	3 jam		Backup server	
			Kerusakan pada perangkat keras				1	3	4		3 jam		Backup server	
			Jaringan				2	3	4		3 jam		Backup server	

BAB V
PENUTUP

Buku IV *Quickwins Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak sekadar merupakan kumpulan program unggulan implementasi *smart city*, melainkan sebuah panduan komprehensif yang menyatukan visi dan misi RPJMD, serta visi, misi, dan sasaran khusus *smart city* daerah. Pembeberan profil *quickwins smart city* menjadi suatu gambaran mendalam mengenai program-program unggulan yang diusung, memberikan penjelasan tentang keunikan dan manfaat yang dapat dihasilkan.

Salah satu elemen dalam buku ini adalah manajemen risiko quickwins yang diimplementasikan secara menyeluruh. Analisis risiko yang terintegrasi pada setiap inovasi atau program unggulan memberikan dimensi proaktif dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Penggunaan manajemen risiko sebagai upaya mitigasi menjadi landasan kuat untuk mengurangi atau minimalisasi potensi risiko yang terkait dengan setiap langkah inovatif yang diambil.

Buku ini bukan hanya sekadar dokumen panduan, tetapi juga menjadi acuan yang sangat berharga. Dengan menyediakan visi yang jelas, profil program unggulan yang terperinci, dan strategi manajemen risiko yang terukur, buku ini menuntun para pengampu kepentingan yang akan melaksanakan program *smart city* untuk dapat mengimplementasikan langkah-langkah inovatif dengan keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, Buku IV *Quickwins Smart City* Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya memberikan panduan praktis tetapi juga menciptakan landasan untuk kesuksesan dalam mencapai sasaran-sasaran *smart city* yang telah ditetapkan. Buku ini tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga menjadi katalisator untuk transformasi yang berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

ENDRI